



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 15 TAHUN 2010

TENTANG

**CETAK BIRU TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA
TAHUN 2010 – 2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a. bahwa transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan mempunyai peranan penting serta strategis untuk memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945:
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan transportasi antarmoda/multimoda yang handal sebagai salah satu perwujudan dari Sistem Transportasi Nasional agar tercapai arus barang dan mobilitas orang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/ Multimoda Tahun 2010–2030;
- c. bahwa Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda merupakan hasil dari semua pihak terkait yaitu jajaran Kementerian Perhubungan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, PT. (Persero) Pelindo I s.d IV, PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II, Perum Damri, PT.ASDP, Organda, Gapasdap, Maska, MTI, Gafeksi/INFA, MAPPEL, Depalindo, APBMI, INSA, INACA dan Asosiasi Logistik Indonesia (ALI)
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005 – 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG CETAK BIRU TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA TAHUN 2010 - 2030

Pasal 1

Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010–2030 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan ini berupa arah pengembangan dan pembangunan transportasi antarmoda/multimoda dalam rangka kelancaran arus barang dan arus penumpang serta mendukung sistem logistik nasional yang efektif dan efisien.

Pasal 2

Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan program dan rencana aksi pengembangan transportasi antarmoda/multimoda dalam kurun waktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dijadikan sebagai acuan, pedoman dan landasan dalam perencanaan, dan pembangunan dan penyelenggaraan transportasi multimoda pada simpul-simpul 25 pelabuhan, 7 terminal khusus, 14 bandar udara, 9 kota metropolitan serta 183 kabupaten daerah tertinggal.

Pasal 3

Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda dilakukan secara berkesinambungan, konsisten dan terpadu baik intra maupun antar moda serta dengan sektor pembangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010–2030 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan ini.

Pasal 5

Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010 – 2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dan acuan baik bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, instansi pemerintah maupun Mitra Kerja yang terkait dengan pengembangan dan pembangunan transportasi antarmoda/multimoda.

Pasal 6

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J A K A R T A
Pada tanggal : 17 Pebruari 2010

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
9. Menteri BUMN;
10. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
11. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
14. Para Kepala Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia;
15. Para Direksi BUMN Sektor Perhubungan.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : KM.15 Tahun 2010

Tanggal : 17 Februari 2010

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Permasalahan Pokok.....	2
D. Pengertian	3
E. Sistematika Penyusunan.....	3
BAB II PENDEKATAN	
A. Sistem Logistik Nasional.....	5
1. Kinerja Logistik Nasional.....	5
2. Strategi Pengembangan Logistik Indonesia.....	5
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan Transportasi Multimoda.....	7
1. Nasional.....	7
2. Internasional.....	7
C. Transportasi Antarmoda/Multimoda.....	9
1. Badan Usaha Transportasi Antarmoda/Multimoda	9
2. Jaringan Pelayanan.....	9
3. Jaringan Prasarana.....	9
D. Permasalahan Transportasi Antarmoda/Multimoda di Indonesia.....	10
E. Alur Pikir.....	10
G. Metode Penetapan Program Pengembangan Transportasi Antarmoda/ Multimoda.....	10 11
H. Kriteria Daerah Tertinggal.....	13
I. Kedudukan Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda.....	13
BAB III VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MULTIMODA	
A. Visi dan Misi.....	16
B. Kebijakan.....	16
C. Strategi Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda	17
D. Program Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda.....	20
BAB IV PENUTUP	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Pikir penyusunan Cetak Biru TRansportasi Antarmoda/ Multimoda.....	12
Gambar 2.2	Kedudukan Cetak Biru Transportasi Anatrmoda/Multimoda.....	15
Gambar 3.1	Cakupan Cetak Biru Transportasi Anatrmoda/Multimoda	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi mempunyai peranan yang sangat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan wilayah, terlebih bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beribu pulau. Oleh karena itu, penyelenggaraan sistem transportasi nasional harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar, cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi, beban publik rendah dan utilitas tinggi. Penyelenggaraan transportasi ditata dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan mobillitas orang.

Salah satu perwujudan sasaran Sistranas yang sangat perlu mendapatkan perhatian, berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi yang mengintegrasikan berbagai moda dalam suatu sistem pelayanan untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan mobilitas orang, yang lazim disebut dengan kegiatan transportasi antarmoda/multimoda. Penyelenggaraan transportasi antarmoda/multimoda dilakukan melalui suatu perencanaan pemaduan jaringan prasarana dan pelayanan berbagai moda, jadwal pelayanan, penyediaan fasilitas untuk kegiatan alih muat dan standardisasi sarana dan prasarana serta dokumen, sehingga dapat menekan waktu dengan biaya lebih efisien dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai tambah terhadap barang dan perjalanan orang.

Berbagai kalangan praktisi di bidang logistik memandang, transportasi antarmoda/multimoda merupakan bagian integral yang tidak terpisah dengan sistem logistik. Transportasi antarmoda/multimoda dalam sistem logistik berfungsi merencanakan, melaksanakan dan mengontrol proses penerimaan, pengemasan, penyimpanan barang, pelayanan informasi, mulai dari titik awal (*point of origin*) sampai di titik akhir tujuan barang untuk diterima oleh orang yang berhak (*consignee*).

Dewasa ini, dalam Sistem Logistik Nasional ditemukan berbagai permasalahan strategis, berkaitan dengan transportasi antarmoda/ multimoda, yakni belum optimalnya manajemen penyelenggaraan transportasi antarmoda/multimoda di berbagai simpul transportasi dan kota metropolitan. Keadaan tersebut menyebabkan para pelaku industri tidak dapat mengelola distribusi barangnya

secara efektif dan efisien. Disamping itu, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau, dimana sebagian diantaranya belum memiliki aksesibilitas transportasi yang memadai terutama pada 183 kabupaten tertinggal.

Melihat peran strategis transportasi antarmoda/multimoda dalam sistem logistik, maka dalam Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, telah ditetapkan berbagai sasaran dan rencana aksi pengembangan transportasi untuk mendukung setiap sasaran sistem logistik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, antara lain penyusunan *roadmap* setiap moda transportasi, pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi, regulasi transportasi antarmoda/multimoda dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan.

Berkaitan dengan sasaran dan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, diperlukan penjabaran lebih rinci dan terarah dengan batasan rentang waktu yang jelas tentang pelaksanaan, penataan, pengembangan dan pembangunan. Penjabaran tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan kegiatan berbagai moda transportasi dalam suatu sistem pelayanan transportasi antarmoda/multimoda yang disusun dalam Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda dan merupakan salah satu Program 100 Hari Kerja Kementerian Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan “Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda” dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang menyebabkan terjadinya ketidaklancaran arus barang dan mobilitas orang pada simpul transportasi yang strategis dan kota metropolitan serta daerah tertinggal.

Sedangkan tujuan dari cetak biru ini adalah menyusun rencana pengembangan transportasi antarmoda/multimoda untuk mewujudkan kelancaran arus barang dan mobilitas orang yang efektif dan efisien dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

C. Permasalahan Pokok

Permasalahan pokok di bidang transportasi antarmoda/multimoda adalah terjadinya ketidaklancaran arus barang dan mobilitas orang pada beberapa simpul transportasi dan kota metropolitan serta terbatasnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal. Hal ini disebabkan oleh:

1. Kurangnya kapasitas jaringan pelayanan dan prasarana transportasi terutama pada simpul-simpul transportasi yang strategis, kota metropolitan dan daerah tertinggal.
2. Lemahnya manajemen penyediaan dan pemaduan jaringan pelayanan dan prasarana antarmoda/multimoda pada simpul transportasi dan kota-kota metropolitan.

D. Pengertian

1. Transportasi antarmoda diartikan sebagai transportasi penumpang dan/atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan. Transportasi antarmoda lebih menekankan pada upaya pemaduan jaringan pelayanan dan prasarana.
2. Transportasi multimoda adalah transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak yang menggunakan dokumen transportasi multimoda dari suatu tempat barang diterima oleh operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk barang tersebut. Transportasi multimoda lebih menekankan aspek pelayanan pengangkutan barang dan penumpang. Namun dari sisi penggunaan alat angkut untuk kelancaran arus barang dan mobilitas orang, transportasi antarmoda dan multimoda membutuhkan keterpaduan lebih dari dua moda, baik dalam wujud jaringan pelayanan maupun jaringan prasarana.
3. Badan Usaha Angkutan Multimoda adalah Badan Usaha Indonesia yang mempunyai izin dari pemerintah untuk bertindak atas namanya sendiri atau melalui badan hukum lain yang mewakilinya, menutup dan menyelesaikan kontrak angkutan multimoda dan menerbitkan dokumen angkutan barang.

E. Sistematika Penyusunan

Dokumen cetak biru ini terdiri dari visi, misi, kebijakan dan strategi pengembangan transportasi antarmoda/multimoda yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program pengembangan transportasi multimoda, meliputi program pengembangan transportasi antarmoda/multimoda untuk kelancaran arus barang dan mobilitas orang pada simpul pelabuhan, bandar udara, kota metropolitan dan kabupaten daerah tertinggal. Sistematika penulisan cetak biru ini sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan cetak biru, maksud dan tujuan, permasalahan pokok, pengertian serta sistematika penulisan dari cetak biru.

Bab 2. Pendekatan berisi gambaran sistem logistik nasional, dasar hukum, transportasi antarmoda/multimoda, permasalahan, alur pikir, metode penetapan program transportasi antarmoda/multimoda, kriteria daerah tertinggal, kedudukan cetak biru transportasi antarmoda/multimoda.

Bab 3. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda Nasional.

Bab 4. Penutup.

BAB II

P E N D E K A T A N

A. Sistem Logistik Nasional

1. Kinerja Logistik Nasional

Kinerja logistik Indonesia saat ini masih belum optimal karena masih tingginya biaya logistik dan perlunya peningkatan kualitas pelayanan. Berdasarkan survei Indeks Kinerja Logistik (*Logistics Performance Index/LPI*) Bank Dunia pada tahun 2007, sektor logistik Indonesia berada pada peringkat 43 dari 150 negara di bawah Singapura (urutan ke - 1), Malaysia (urutan ke-27) dan Thailand (urutan ke-31). Demikian pula jika dilihat dari biaya logistik domestik, Indonesia menempati urutan ke-93 yang menunjukkan biaya logistik domestik di Indonesia masih tinggi. Kondisi logistik Indonesia tersebut hingga tahun 2009 masih tetap berada di bawah kinerja beberapa negara ASEAN lainnya walaupun turun menjadi peringkat ke - 75.

Belum optimalnya bidang logistik nasional tersebut ditenggarai oleh berbagai permasalahan terkait dengan dukungan sektor transportasi sebagaimana yang diuraikan dalam Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (*Sislognas*), antara lain:

- a. Dukungan infrastruktur yang kurang memadai meliputi pelabuhan, prasarana jalan, angkutan kereta api, jalur sungai dan penyeberangan serta transportasi intermoda dan antarmoda/multimoda.
- b. Rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga pendidikan bidang logistik.
- c. Lemahnya penyediaan jasa logistik.
- d. Belum harmonisnya peraturan terkait dengan logistik.

2. Strategi Pengembangan Logistik Indonesia

Mengacu pada permasalahan sektor logistik Indonesia dan menghadapi tantangan global maka Visi Logistik Indonesia 2025 dalam Cetak Biru Sistem Logistik Nasional adalah "Terintegrasi Secara Lokal, Terhubung Secara Global untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat" atau "*Locally Integrated, Globally Connected for National Competitiveness and Social Welfare*". Pada tahun 2025 sektor logistik Indonesia, yang secara domestik terintegrasi antar pulau dan secara internasional terkoneksi dengan ekonomi utama dunia secara efektif dan efisien sehingga akan meningkatkan daya saing nasional untuk sukses dalam era persaingan rantai suplai dunia.

Untuk mencapai visi tersebut disusun strategi logistik Indonesia yang bertumpu pada 6 (enam) faktor penentu atau fokus utama yaitu: komoditas penentu (*key commodities*), peraturan perundangan (*laws and regulation*), prasarana dan sarana (*infrastructure*), sdm dan manajemen (*human resources and management*), teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology*) dan penyedia jasa logistik (*logistic service provider*).

Fokus utama “**penyedia jasa logistik**” dalam hal ini Badan Usaha Angkutan Multimoda diarahkan pada: (a) penguatan pelaku dan perusahaan penyedia jasa angkutan multimoda, (b) penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku dan penyedia jasa angkutan multimoda, dan (c) mendorong partisipasi swasta dalam investasi di bidang infrastruktur transportasi multimoda.

Fokus utama **pengembangan infrastruktur** diarahkan pada tersedianya prasarana dan sarana secara memadai dan beroperasi secara efisien untuk meningkatkan kelancaran arus barang dengan strategi antara lain sebagai berikut:

a. Transportasi Laut.

- 1) Memberlakukan asas *cabotage* untuk angkutan laut dalam negeri secara penuh sesuai jadwal *roadmap*.
- 2) Meningkatkan aksesibilitas angkutan penumpang dan barang di daerah tertinggal dan daerah padat/macet.
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara terpadu serta melalui penataan jaringan trayek.
- 4) Menyiapkan pelabuhan sebagai *hub* internasional di kawasan Indonesia Barat dan Timur untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada *hub* internasional di negara lain.
- 5) Peningkatan efisiensi operasional, optimasi kapasitas pelabuhan dan pengembangan interkoneksi dengan *hinterland* dan *hub* internasional.

b. Transportasi Jalan

Mengurangi beban jalan dengan mengembangkan jaringan transportasi antarmoda/multimoda dan *logistic center* sebagai upaya meningkatkan kelancaran arus barang dari pusat produksi menuju *outlet-inlet*, ekspor-impor dan antar pulau.

- c. **Transportasi Kereta Api**
Mengembangkan jaringan kereta api untuk angkutan barang jarak jauh di Sumatera, Jawa dan Kalimantan.
- d. **Transportasi Udara**
Mengoptimalkan peran bandar udara yang ada untuk dapat berfungsi sebagai bandar udara kargo.

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan Transportasi Antarmoda/Multimoda

1. Nasional

Penyelenggaraan angkutan antarmoda/multimoda diamanatkan dalam undang-undang di bidang transportasi yaitu undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Perkeretaapian dan Penerbangan.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ keterpaduan antarmoda/multimoda diatur pada berbagai pasal yaitu:

- a. Pasal 2 butir h, menyatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan asas terpadu;
- b. Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan antarmoda/multimoda ditempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal;
- c. Pasal 93 ayat 2 butir e menyatakan bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan pemaduan berbagai moda angkutan;
- d. Pasal 165 ayat 1 dan 2 antara lain menyatakan bahwa angkutan umum di jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda, dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menyebutkan keterpaduan antarmoda/multimoda dalam berbagai pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 2 butir e menyatakan bahwa perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan;
- b. Pasal 6 ayat 3 menyatakan tatanan perkeretaapian umum harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya;
- c. Pasal 147 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 menyatakan antara lain bahwa angkutan kereta api dapat merupakan bagian dari angkutan multimoda yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan multimoda, dan

dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara penyelenggara sarana perkeretaapian dengan badan hukum angkutan multimoda dan/atau penyelenggara moda lainnya.

Pada undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur keterpaduan antarmoda/multimoda antar lain diatur pada:

- a. Pasal 2, butir g, menyatakan bahwa pelayaran diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan;
- b. Pasal 9 ayat 4 butir d, menyatakan bahwa jaringan trayek dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
- c. Pasal 18 ayat 4 menyatakan bahwa kegiatan angkutan sungai dan danau disusun dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan Sistem Transportasi Nasional;
- d. Pasal 22 ayat 2 butir f, menyatakan bahwa penetapan lintas angkutan penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan jaringan trayek angkutan laut sehingga mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intramoda;
- e. Pasal 50-55 menyatakan bahwa angkutan perairan dapat merupakan bagian dari angkutan multimoda, dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dilaksanakan antara penyedia jasa angkutan perairan dan badan usaha angkutan multimoda dan penyedia jasa moda lainnya;
- f. Pasal 68 butir c.) menyatakan bahwa pelabuhan memiliki peran sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi;
- g. Pasal 96 ayat 2, menyatakan bahwa pembangunan pelabuhan laut harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan dan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.

Sedangkan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan diatur keterpaduan antarmoda/multimoda:

- a. Pasal 123 ayat 2, yang menyatakan bahwa jaringan dan rute penerbangan luar negeri antara lain memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda/multimoda;
- b. Pasal 182, tanggung jawab pada angkutan intermoda;
- c. Pasal 187-191 menyatakan bahwa angkutan udara dapat merupakan bagian angkutan multimoda, dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan usaha angkutan udara dan badan usaha angkutan multimoda dan/atau badan usaha moda lainnya;
- d. Pasal 194, bandar udara memiliki peran sebagai tempat kegiatan alih moda transportasi;

- e. Pasal 214, pembangunan bandar udara antara lain memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan serta keterpaduan antarmoda/multimoda.

2. Internasional

Secara internasional Indonesia turut serta menandatangani *ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport* sehingga kesepakatan multilateral tersebut, dapat menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan transportasi antarmoda/multimoda di Indonesia.

C. Transportasi Antarmoda/Multimoda

Elemen transportasi antarmoda/multimoda dalam proses distribusi barang dan perjalanan orang terdiri dari:

1. Badan Usaha Angkutan Multimoda (*Service Provider*)

Penyelenggara transportasi antarmoda/multimoda disebut sebagai badan usaha angkutan multimoda. Badan usaha ini dapat bertindak sebagai prinsipal dan bukan prinsipal atau mewakili kepentingan pemilik barang. Sebagai prinsipal menjalankan fungsi penyedia jasa angkutan multimoda, dan dapat mengontrakkan sebagian dari kegiatan angkutan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pengangkut pelaksana (*performing carrier*).

Sedangkan dalam hal mewakili kepentingan pemilik barang (bukan prinsipal) berfungsi sebagai:

- a. pengangkut sub kontrak sebagai pelaksana angkutan unimoda yang merupakan bagian dari keseluruhan pelaksanaan angkutan multimoda yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan multimoda lain;
- b. penyedia jasa pengurusan transportasi (*freight forwarder*);
- c. penyedia jasa pergudangan;
- d. penyedia jasa konsolidasi muatan;
- e. agen muatan;
- f. penyedia jasa logistik lainnya terkait dengan angkutan barang.

2. Jaringan pelayanan

Jaringan pelayanan adalah susunan rute-rute pelayanan dari berbagai moda transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan.

3. Jaringan prasarana

Jaringan prasarana terdiri dari simpul dan ruang lalu lintas. Simpul berfungsi sebagai ruang yang dipergunakan untuk keperluan menaikkan dan

menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, serta perpindahan intra dan antar moda. Ruang lalu lintas berfungsi sebagai ruang gerak untuk sarana transportasi, namun khusus untuk ruang lalu lintas transportasi jalan, disamping untuk lalu-lintas sarana transportasi juga memiliki fungsi lain yaitu untuk lalu lintas orang dan hewan.

D. Permasalahan Transportasi Antarmoda/Multimoda di Indonesia

Permasalahan transportasi antarmoda/multimoda di Indonesia dalam mendukung kelancaran arus barang dan mobilitas orang antara lain:

1. Kualitas badan usaha angkutan multimoda nasional masih belum sebaik di negara lain, hal ini disebabkan pembinaan dan mutu SDM yang belum baik.
2. Kurang lancarnya arus barang yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi khususnya pada simpul transportasi seperti di pelabuhan dan bandar udara tertentu.
3. Mobilitas orang khususnya pada simpul perkotaan metropolitan masih rendah disebabkan antara lain masih kurangnya manajemen antar dan intra moda.
4. Masih rendahnya arus barang dan mobilitas orang di sebagian wilayah Indonesia, khususnya pada daerah tertinggal yang disebabkan kurangnya jaringan transportasi antar moda.

E. Alur Pikir

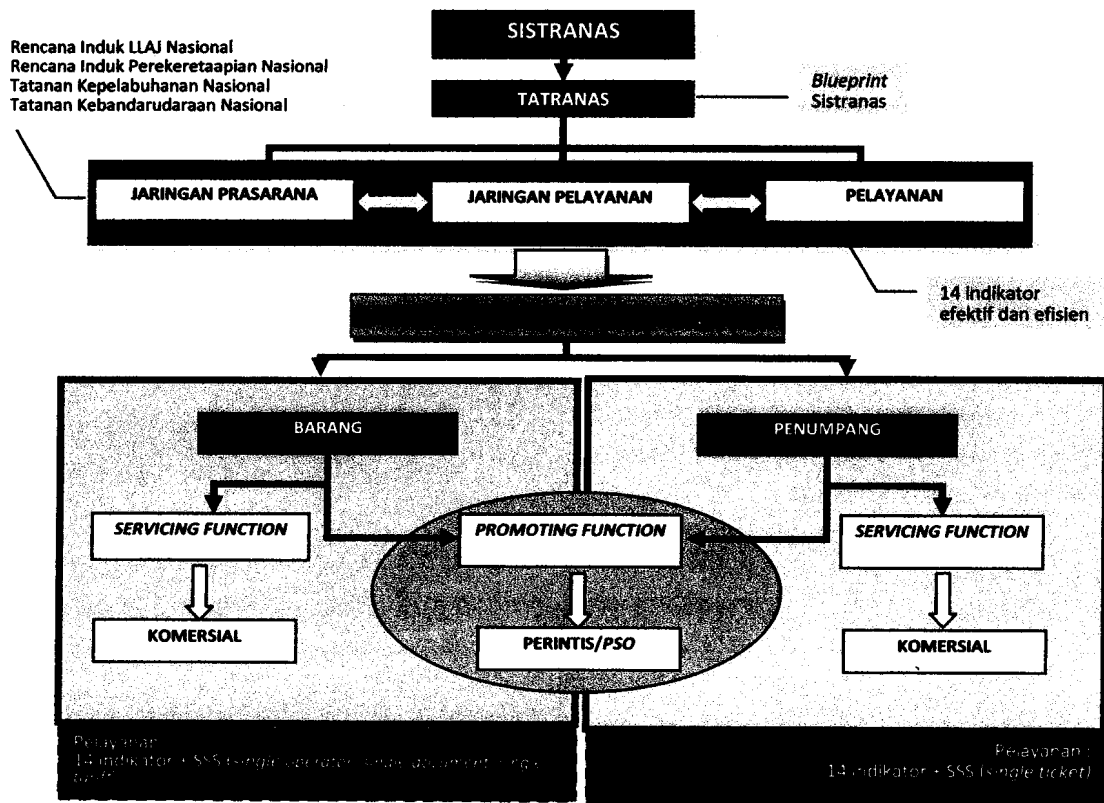
Pengembangan transportasi antarmoda/multimoda yang dimuat dalam Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda diarahkan pada perwujudan keterpaduan pelayanan, jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi sebagai satu kesatuan secara kesisteman. Perwujudan Sistranas pada tataran nasional (Tataran Transportasi Nasional/Tatranas), yang selanjutnya disebut sebagai Cetak Biru Pembangunan Sistranas pada Tatranas, memuat arah pengembangan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi secara terpadu dan seimbang dari semua moda transportasi (jalan, sungai, danau, penyeberangan, kereta api, laut dan udara) yang menghubungkan simpul-simpul kegiatan strategis nasional.

Keterpaduan jaringan prasarana transportasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang transportasi, digambarkan dalam rencana induk atau tatanan masing-masing moda transportasi. Pada tataran nasional, pengembangan prasarana transportasi mengacu pada berbagai rencana induk yaitu Rencana Induk LLAJ Nasional, Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Tatanan Kepelabuhanan Nasional dan Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

Transportasi antarmoda/multimoda merupakan salah satu wujud keterpaduan pelayanan, jaringan pelayanan dan jaringan prasarana dalam rangka kelancaran arus barang dan mobilitas orang. Transportasi pada dasarnya dapat berfungsi sebagai unsur penunjang (*servicing function*) dan sebagai unsur pendorong (*promoting function*). Fungsi penunjang untuk kegiatan sektor lain pada wilayah yang telah berkembang dan bersifat komersial serta sebagai unsur pendorong bagi daerah yang belum berkembang atau tertinggal dan bersifat keperintisan.

Pelayanan transportasi antarmoda/multimoda baik untuk jaringan pelayanan pada daerah yang telah berkembang maupun wilayah perintis, dikembangkan guna mewujudkan pelayanan *one stop service* yang didukung oleh sistem informasi yang handal. Untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien didasarkan pada 14 indikator Sistranas yaitu selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar, cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi, beban publik rendah dan utilitas tinggi serta indikator *Single Seamless Services (SSS)* yaitu *single operator*, *single document* dan *single tariff* untuk angkutan barang serta *single ticket* untuk angkutan penumpang.

Secara lengkap alur pikir pengembangan transportasi antarmoda/multimoda yang telah diuraikan di atas diilustrasikan sebagaimana dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Alur Pikir Penyusunan Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda

F. Metode Penetapan Program Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda

Pengembangan transportasi antarmoda/multimoda diharapkan dapat mendukung kelancaran arus barang dan mobilitas orang pada simpul transportasi, kota metropolitan dan meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal.

Pengembangan transportasi antarmoda/multimoda pada simpul transportasi seperti pelabuhan dan bandar udara serta kota metropolitan yang mengalami kejenuhan (*bottleneck*) dititikberatkan pada optimasi serta pengembangan dan pembangunan jaringan prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi.

Sedangkan untuk daerah tertinggal yang kurang memiliki aksesibilitas dilakukan melalui pendekatan pengembangan dan pembangunan jaringan prasarana serta penambahan sarana transportasi.

G. Kriteria Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk yang relatif tertinggal.

Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan 6 (enam) kriteria dasar sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik. Ke-6 (enam) kriteria ini diolah dengan menggunakan data Potensi Desa (PODES) tahun 2003 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2002 serta data Keuangan Kabupaten tahun 2004 dari Kementerian Keuangan (*Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal, KPDT, 2009*).

Penetapan daerah tertinggal dilihat dari aspek aksesibilitas transportasi, dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kabupaten dengan aksesibilitas sangat parah
2. Kabupaten dengan aksesibilitas sangat rendah
3. Kabupaten dengan aksesibilitas rendah
4. Kabupaten dengan aksesibilitas agak rendah

H. Kedudukan Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda

Perencanaan pengembangan transportasi di Indonesia diharapkan mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan nasional antara lain dokumen Sistranas, undang-undang di bidang transportasi, undang-undang penataan ruang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

Sistranas didefinisikan sebagai tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

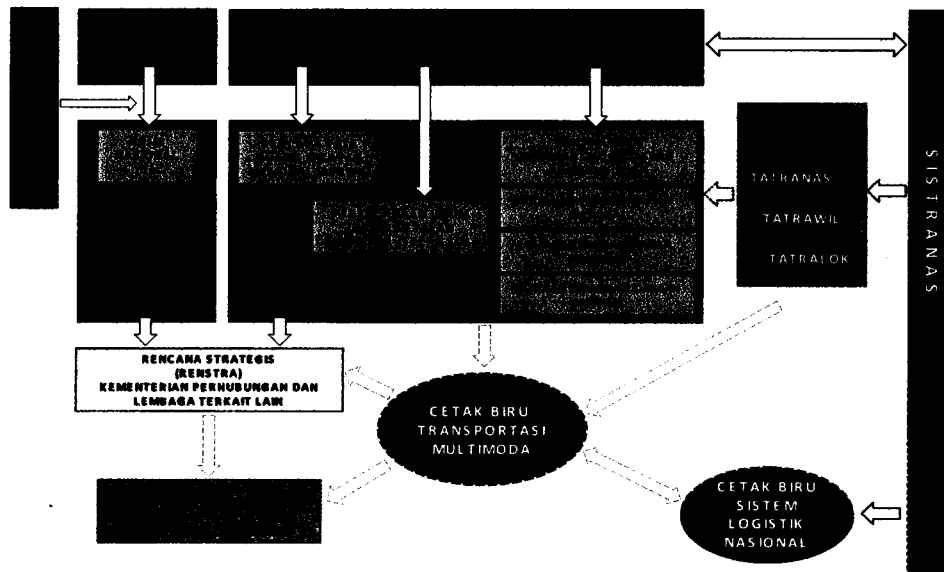
Sistranas diwujudkan dalam tiga tataran yaitu Tataran Transportasi Nasional (Tatranas) dalam skala nasional, Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) pada skala kewilayahan atau propinsi dan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) pada skala kabupaten/kota. Pada setiap tataran diwujudkan dalam jaringan prasarana, jaringan pelayanan dan pelayanan. Tatranas yang dalam lingkungannya adalah arah rencana pengembangan secara nasional maka terwujud konsep integrasi dan keterhubungan dari setiap moda antar pulau dan dalam pulau dengan horizon waktu jangka panjang.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan transportasi diamanahkan untuk menyusun tatanan dan rencana induk masing-masing moda, yaitu rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, tatanan perkeretaapian nasional, tatanan kepelabuhanan nasional dan tatanan kebandarudaraan nasional serta tersusunnya perencanaan umum jaringan jalan nasional dan jalan tol. Salah satu faktor yang diamanahkan dalam penyusunan tatanan dan rencana induk transportasi adalah keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing kementerian terkait dengan pengembangan infrastruktur transportasi.

Cetak Biru Sislognas yang dijadikan acuan kebijakan pemerintah di sektor logistik dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan peningkatan dunia usaha nasional di pasar global dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Antara Sislognas dan Sistranas terdapat unsur yang terkait yang menjadi tanggung jawab dalam penyelenggaraan transportasi dalam mendukung kelancaran arus logistik nasional terutama pada sarana dan prasarannya.

Posisi dari cetak biru transportasi antarmoda/multimoda dalam perencanaan transportasi, merupakan dokumen penjabaran dari Sistranas (Tatranas, Tatrawil dan Tatralok), Sislognas, Tatanan/Rencana Induk Pembangunan moda transportasi jalan, kereta api, sungai, danau, penyeberangan, laut dan udara yang akan diwujudkan melalui Renstra Kementerian Perhubungan dan lembaga terkait lainnya, yang memuat program optimasi, pengembangan dan pembangunan transportasi pada setiap simpul dan kota-kota metropolitan serta daerah tertinggal untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan mobilitas orang. Secara skematis, kedudukan cetak biru transportasi antarmoda/multimoda terhadap Sistranas dan Sislognas dapat dilihat dalam Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2. Kedudukan Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda

BAB III

VISI, MISI, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi transportasi antarmoda/multimoda menggambarkan suatu kondisi yang diharapkan dapat dicapai dalam penyelenggaraan transportasi antarmoda/multimoda pada masa yang akan datang. Pada tahun 2030 transportasi antarmoda/multimoda 2030 diharapkan mampu mendukung kelancaran arus barang dan mobilitas orang sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dirumuskan visi transportasi antarmoda/multimoda tahun 2030 adalah **"Arus Barang dan Mobilitas Orang Efektif dan Efisien"**.

2. Misi

Misi transportasi antarmoda/multimoda merupakan upaya yang dilaksanakan agar tercapai visi transportasi antarmoda/multimoda yaitu arus barang dan mobilitas orang yang efektif dan efisien. Adapun misi tersebut adalah:

- a. Mewujudkan kelancaran arus barang.
- b. Mewujudkan kelancaran mobilitas orang.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari terwujudnya visi dan misi transportasi antarmoda/multimoda adalah:

- a. Menekan lamanya waktu pelayanan pada simpul moda transportasi.
- b. Menurunkan biaya pelayanan transportasi pada simpul moda transportasi.
- c. Meningkatkan kelancaran arus barang dan mobilitas orang pada kota metropolitan.
- d. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari dan ke daerah tertinggal.

B. Kebijakan

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa misi transportasi antarmoda/multimoda adalah mewujudkan kelancaran arus barang dan mobilitas orang, guna mewujudkan tercapainya misi transportasi antarmoda/multimoda tersebut maka lebih lanjut ditetapkan berbagai kebijakan pada setiap misi, yaitu:

1. Misi mewujudkan kelancaran arus barang, melalui kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kualitas badan usaha angkutan multimoda.
 - b. Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul transportasi laut.
 - c. Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul transportasi udara.
 - d. Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal.
2. Misi mewujudkan kelancaran mobilitas orang, melalui kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kelancaran mobilitas orang di perkotaan.
 - b. Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal.

C. Strategi Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda

Strategi pengembangan transportasi antarmoda/multimoda, merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan yang ditetapkan dalam mendukung terwujudnya kelancaran arus barang dan mobilitas orang.

Adapun strategi dari kebijakan mewujudkan kelancaran arus barang adalah sebagai berikut:

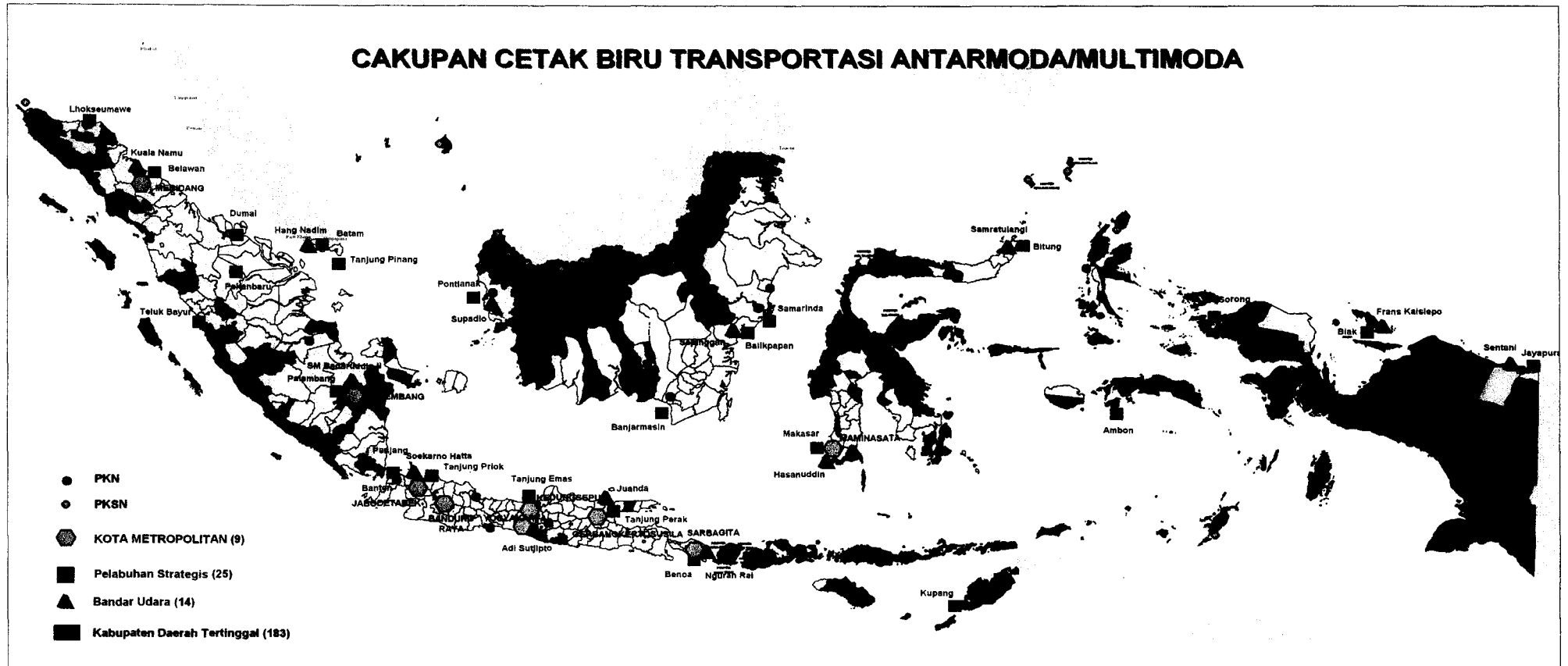
1. Meningkatnya kualitas badan usaha angkutan multimoda, diwujudkan melalui strategi:
 - a. Menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Multimoda.
 - b. Meningkatkan kualitas SDM angkutan multimoda.
2. Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul transportasi laut, diwujudkan melalui strategi:
 - a. Meningkatkan kinerja pelayanan pada 25 pelabuhan strategis yang menangani sebagian besar arus barang.
 - b. Meningkatkan kinerja pelayanan pada 7 terminal khusus CPO dan batubara yang melayani sebagian besar CPO dan batubara.
3. Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada simpul transportasi udara, diwujudkan melalui strategi meningkatkan kinerja pelayanan kargo pada 14 bandar udara yang menangani sebagian besar (96%) arus kargo.
4. Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal, diwujudkan melalui strategi membangun jaringan pelayanan dan jaringan prasarana pada 183 kabupaten daerah tertinggal sesuai dengan hasil analisis indeks

ketertinggalan daerah kabupaten pada tahun 2009 sebagaimana yang dikembangkan oleh Kementerian PDT.

Sedangkan strategi dalam rangka mewujudkan kebijakan untuk kelancaran mobilitas orang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kelancaran mobilitas orang di perkotaan, diwujudkan melalui strategi meningkatkan keterpaduan jaringan pelayanan pada 9 kota metropolitan yang merupakan aglomerasi permukiman dan pusat kegiatan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RTRWN.
2. Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal, diwujudkan melalui strategi membangun jaringan pelayanan dan jaringan prasarana pada 183 daerah tertinggal sebagaimana juga pada angkutan barang.

Secara lengkap cakupan dari strategi pengembangan transportasi antarmoda/multimoda yang dituangkan dalam Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda digambarkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Cakupan Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda

D. Program Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda

Program pengembangan transportasi antarmoda/multimoda disusun guna mewujudkan setiap strategi yang telah ditetapkan dalam mendukung kebijakan, misi dan visi pengembangan transportasi antarmoda/multimoda. Rangkuman program pengembangan transportasi antarmoda/multimoda untuk setiap strategi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Program pengembangan dari masing-masing strategi dalam kurun waktu 2010-2030 sebagai berikut:

1. Strategi Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Multimoda untuk mewujudkan kelancaran arus barang, diwujudkan dengan program antara lain:
 - a. Penyusunan konsep peraturan perundangan berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) berdasarkan naskah akademis yang ditelaah dikaji sebelumnya.
 - b. Pembahasan internal sektor perhubungan dengan melibatkan instansi terkait pada Kementerian Perhubungan.
 - c. Rapat antar instansi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari seluruh pihak terkait antara lain instansi pemerintah, BUMN, swasta dan *stakeholder*.
 - d. Penetapan legalitas Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

2. Strategi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) transportasi antarmoda/multimoda, diwujudkan melalui program antara lain:
 - a. Pengembangan diklat SDM
 - 1) Menyusun *Training Needs Analysis* (TNA) diklat di bidang transportasi antarmoda/multimoda dan logistik untuk aparatur maupun operator yang akan dilaksanakan pada tahun 2010.
 - 2) Mengembangkan program diklat sebagai implementasi undang-undang transportasi untuk kompetensi SDM di bidang logistik melalui pendidikan nonformal antara lain program Diklat Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*); pergudangan; terminal dan operator transportasi antarmoda/multimoda, dan lain-lain. Program ini akan dilaksanakan pada tahun 2010-2014.
 - 3) Meningkatkan kompetensi aparatur dan operator melalui pelaksanaan diklat bidang logistik termasuk transportasi antarmoda/multimoda yang dilaksanakan 2010-2014.
 - 4) Pada periode tahun 2010-2014 akan dilaksanakan pengembangan dan peningkatan kerjasama antara lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah dan swasta.

Tabel 3.1. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program

Visi	Misi	Kebijakan	Strategi	Program
Arus Barang dan Mobilitas Orang Efektif dan Efisien	Mewujudkan kelancaran arus barang	Meningkatnya kualitas badan usaha angkutan multimoda	1. Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Multimoda	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan konsep • Rapat internal Kementerian Perhubungan • Rapat antar instansi terkait • Penetapan PP
			2. Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) transportasi multimoda	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan diklat SDM • Pengembangan institusi pendidikan dan pelatihan
		Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana transportasi laut	3. Meningkatkan kinerja pelayanan pada 25 pelabuhan strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Optimasi • Pengembangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan • Peningkatan aksesibilitas ke pelabuhan • Penerapan NSW/<i>Portnet</i> secara bertahap di pelabuhan
			4. Meningkatkan kinerja pelayanan pada 7 terminal khusus CPO dan batubara	<ul style="list-style-type: none"> • Optimasi • Peningkatan aksesibilitas
		Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana transportasi udara	5. Meningkatkan kinerja pelayanan pada 14 bandara kargo	<ul style="list-style-type: none"> • Optimasi • Pengembangan dan pembangunan fasilitas terminal untuk kargo • Peningkatan aksesibilitas ke bandara kargo
		Meningkatnya aksesibilitas pada daerah tertinggal	6. Membangun jaringan pelayanan dan jaringan prasarana pada 183 daerah tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan pelayanan • Pengembangan dan pembangunan jaringan prasarana dan sarana
	Mewujudkan kelancaran mobilitas orang	Meningkatnya kelancaran mobilitas orang di perkotaan	7. Meningkatkan keterpaduan jaringan pelayanan pada 9 kota metropolitan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Transport Demand Management</i> (Optimasi) • <i>Transport Supply Management</i> (Optimasi, Pengembangan dan Pembangunan)
		Meningkatnya aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal	8. Membangun jaringan pelayanan dan jaringan prasarana pada 183 daerah tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan pelayanan • Pengembangan dan pembangunan jaringan prasarana

- b. Pengembangan institusi pendidikan dan pelatihan SDM profesional bidang logistik termasuk transportasi antarmoda/multimoda.
- 1) Meningkatkan dukungan pemerintah dalam pengembangan institusi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan tahun 2010-2011.

- 2) Mengembangkan program diklat untuk kompetensi SDM di bidang logistik termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan antarmoda/multimoda melalui pendidikan formal yaitu Program Studi D IV “Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan” menjadi “Manajemen Logistik dan Sistem Transportasi” dan membuka program studi S1 “Manajemen Logistik dan Sistem Transportasi” yang akan dilaksanakan tahun 2011.
3. Strategi meningkatkan kinerja pelayanan barang pada 25 pelabuhan strategis, diwujudkan melalui program antara lain:
- a. Optimasi
 - 1) Sinkronisasi *master plan* dengan cetak biru logistik nasional untuk mewujudkan perencanaan pembangunan pelabuhan strategis yang terintegrasi sehingga terwujud pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan.
 - 2) Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu untuk memperpendek *Turn Round Time* (TRT) kapal sehingga meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal.
 - 3) *Fully automatic gate system* untuk mengurangi *contact person* sehingga meningkatkan kelancaran arus barang dan efisiensi biaya pemakai jasa.
 - 4) Pelaksanaan *joint operation* terminal peti kemas untuk mempermudah pengawasan sehingga terjadi peningkatan kelancaran arus barang.
 - 5) Penerapan *Service Level Agreement* (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang.
 - 6) Pengembangan sistem registrasi *truck trailer* dan kendaraan pengangkut lainnya.
 - b. Pengembangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan
 - 1) Perkuatan fasilitas dan pengadaan alat bongkar muat.
 - 2) Peningkatan dan perkuatan lapangan penumpukan terminal peti kemas.
 - 3) Pengadaan kapal pandu dan tunda.
 - 4) Pembangunan dermaga dan terminal baru.
 - 5) Pembangunan lahan parkir truk.
 - 6) Pengerukan alur pelayaran.
 - 7) Perluasan area pelabuhan.

- c. Peningkatan aksesibilitas ke pelabuhan
 - 1) Pembangunan dan pemantapan jalan akses menuju pelabuhan.
 - 2) Perpanjangan jalur rel kereta api menuju dermaga.
 - 3) Pembangunan *double track* untuk meningkatkan akses kereta api dari pusat-pusat produksi ke pelabuhan.
 - 4) Pembangunan jalan tol akses menuju pelabuhan.
- d. Penerapan *National Single Windows (NSW)/port net* secara bertahap di pelabuhan
 - 1) Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal.
 - 2) Integrasi *port net* dan *trade net* dalam rangka NSW.

Program lebih detail tentang optimasi, peningkatan aksesibilitas, pengembangan dan pembangunan fasilitas serta penerapan NSW/*portnet* untuk meningkatkan kelancaran arus barang di 25 pelabuhan strategis sebagaimana pada Lampiran 1. Adapun 25 pelabuhan strategis dimaksud adalah pelabuhan Lhokseumawe, Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Batam, Teluk Bayur, Panjang, Palembang, Banten, Tanjung Priok, Pontianak, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Banjarmasin, Kupang, Benoa, Samarinda, Makassar, Balikpapan, Bitung, Biak, Jayapura, Ambon dan Sorong.

- 4. Strategi meningkatkan kinerja pelayanan pada 7 terminal khusus CPO dan batubara, diwujudkan melalui program antara lain:
 - a. Optimasi
 - 1) Sinkronisasi *master plan* dengan cetak biru logistik nasional.
 - 2) Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu.
 - b. Peningkatan aksesibilitas
 - Pembangunan jalan rel kereta api dari pusat produksi CPO dan batubara menuju dermaga.

Program lebih detail tentang optimasi dan peningkatan aksesibilitas untuk meningkatkan kelancaran arus barang di 4 terminal khusus batubara dan 3 terminal khusus CPO dapat dilihat pada Lampiran 2. Adapun 7 terminal khusus dimaksud terdiri dari 4 terminal khusus batubara yaitu Balikpapan, Kota Baru, Samarinda, Banjarmasin dan 3 terminal khusus CPO yaitu Belawan, Dumai dan Pekanbaru.

5. Strategi meningkatkan kinerja pelayanan angkutan barang pada 14 bandara, diwujudkan melalui program antara lain:
 - a. Optimasi dengan kegiatan berupa peningkatan manajemen pergudangan.
 - b. Pengembangan dan pembangunan fasilitas terminal untuk kargo
 - 1) Pengembangan *city check in* dan *port of origin* bagi kargo ekspor dan *port destination* bagi kargo impor.
 - 2) Perencanaan, perancangan dan pembangunan terminal kargo baru.
 - 3) Perencanaan, perancangan dan pembangunan *cargo consolidation* dan *cargo distribution*.
 - 4) Pengadaan alat bongkar muat *containerized cargo*.
 - 5) Instalasi peralatan *cargo weighting* terintegrasi dengan *x-ray* kargo, *history image* dan *record weighting*.
 - 6) Instalasi *system handling cargo* bandara dengan *Unit Load Devices* (ULD).
 - 7) Pengadaan dan pengoperasian *trucking system*.
 - 8) Perencanaan, perancangan dan pembangunan *dry port* sebagai fasilitas *inland customs and quarantine clearance* dan penyelesaian administrasi ekspor/impor *one stop*.
 - 9) Instalasi/pengadaan sistem *roller* dan *freighter*.
 - 10) Pengembangan dan instalasi sistem *Electronic Data Interchange* (EDI).
 - 11) Pengadaan dan instalasi *cold storage*.
 - c. Peningkatan aksesibilitas ke bandara kargo
 - 1) Perencanaan, perancangan dan pembangunan jalur kereta api menuju bandara.
 - 2) Penataan/peningkatan aksesibilitas dari dan ke *cargo area*.
 - 3) Perencanaan, perancangan dan pembangunan jalan tol dari dan ke bandar udara.
 - 4) Perencanaan, perancangan dan pembangunan jalan layang akses ke bandar udara.

Program lebih detail tentang optimasi, pengembangan dan pembangunan fasilitas terminal kargo serta peningkatan aksesibilitas di 14 bandara sebagaimana pada Lampiran 3. Adapun 14 bandara dimaksud adalah Bandara Soetta-Jakarta, Kualanamu-Medan, Juanda-Surabaya, Ngurah Rai-Denpasar, Hang Nadim-Batam, Adi Sucipto-Yogyakarta, Sultan Hasanuddin-Makassar, Sam Ratulangi-Manado, Supadio-Pontianak, Sepinggan-Balikpapan, SM.Badarudin II-Palembang, F.Kaisiepo-Biak, Wamena-Papua dan Sentani-Jayapura

6. Meningkatkan aksesibilitas pada daerah tertinggal untuk mewujudkan kelancaran arus barang, diwujudkan melalui program antara lain:
 - a. Pengembangan jaringan pelayanan
 - 1) Penambahan trayek dan frekwensi angkutan penyeberangan.
 - 2) Penambahan trayek dan frekwensi angkutan laut.
 - 3) Penambahan trayek dan frekwensi angkutan udara.
 - b. Pengembangan dan pembangunan jaringan prasarana dan sarana.
 - 1) Peningkatan jalan desa.
 - 2) Pembangunan terminal angkutan jalan.
 - 3) Penambahan sarana angkutan jalan.
 - 4) Pembangunan dermaga pelabuhan angkutan sungai.
 - 5) Pengadaan kapal angkutan penyeberangan.
 - 6) Penambahan kapal penyeberangan perintis.
 - 7) Pembangunan dermaga pelabuhan rakyat.
 - 8) Pembangunan bandar udara perintis.

Program lebih detail tentang optimalisasi pengembangan jaringan pelayanan, pengembangan dan pembangunan jaringan untuk meningkatkan mobilitas penumpang di 183 kabupaten tertinggal dapat dilihat pada Lampiran 5.

7. Strategi meningkatkan keterpaduan jaringan pelayanan pada 9 kota metropolitan, diwujudkan melalui program *Transport Demand Management* (TDM) dan *Transport Supply Management* (TSM) yang masing-masing disusun melalui pendekatan optimasi dan pengembangan serta pembangunan jaringan prasarana dan sarana antara lain sebagai berikut:
 - a. Optimasi
 - 1) Pengembangan ATCS dan teknologi informasi lalu lintas perkotaan.
 - 2) Pengembangan database transportasi perkotaan.
 - 3) Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional perkotaan.
 - 4) Sosialisasi/kampanye ketertiban lalu lintas.
 - 5) Pengaturan jam kerja untuk mengurangi konsentrasi kegiatan.
 - 6) Peningkatan pajak dan parkir kendaraan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
 - 7) Penyusunan dan penetapan standar pelayanan dan tata cara operasi angkutan umum untuk meningkatkan kualitas layanan.
 - 8) Penyusunan konsep integrasi pelayanan dan operasi angkutan umum.

- 9) Peningkatan pelayanan terpadu antara transportasi perairan dengan transportasi jalan dengan mensinkronkan trayek dan jadwal antara keduanya.
 - 10) Penerapan *city check in* untuk meningkatkan pelayanan angkutan udara.
- b. Pengembangan dan pembangunan jaringan prasarana dan sarana
- 1) Penyusunan rencana induk jaringan transportasi di wilayah aglomerasi untuk meningkatkan perencanaan dan penanganan transportasi perkotaan.
 - 2) Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum pengumpan.
 - 3) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas perpindahan transportasi multimoda di terminal, bandar udara, stasiun kereta api dan/atau halte.
 - 4) Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung serta pengoperasian *Bus Rapid Transit* (BRT).
 - 5) Pembangunan jalan lingkar.
 - 6) Pembangunan jalan layang dan *underpass* pada perlintasan sebidang dan persimpangan jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi.
 - 7) Pembangunan dan pengembangan jalan tol perkotaan.
 - 8) Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang perkotaan.
 - 9) Pembangunan fasilitas perpindahan moda penumpang antar angkutan jalan.
 - 10) Pembangunan dan pengembangan kereta api perkotaan.
 - 11) Pembangunan *double track* dan *double double track* termasuk elektrifikasi.
 - 12) Pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT).
 - 13) Pengembangan angkutan pepadu moda dari dan ke bandar udara.

Program lebih rinci tentang optimasi, pengembangan dan pembangunan jaringan untuk meningkatkan kelancaran mobilitas orang di 9 kota metropolitan dapat dilihat pada Lampiran 4. Adapun 9 kota metropolitan dimaksud adalah Mebidangro (Medan, Binjai, Deli, Serdang, Karo), Palembang, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung Raya, Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi), Yogyakarta, Gerbangkertosusilo (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan), Sarbagita (Denpasar, Bangli, Gianyar, Tabanan) dan Maminasata (Makasar, Sungguminasa, Takalar, Maros).

8. Strategi meningkatkan aksesibilitas pada daerah tertinggal untuk kelancaran mobilitas orang, diwujudkan melalui program dan sesuai dengan butir 6 untuk kelancaran arus barang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab-bab sebelumnya telah diuraikan bahwa Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda ini berisikan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi dan program serta kegiatan transportasi antarmoda/multimoda untuk mewujudkan kelancaran arus barang dan mobilitas orang yang efektif dan efisien. Untuk itu dalam pelaksanaan Cetak Biru Antarmoda/Multimoda membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak terkait yaitu:

1. **Pemerintah (*Regulator*)**
Cetak Biru ini agar dilaksanakan secara konsisten dalam pembangunan dan pengembangan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana serta pemaduan berbagai pelayanan moda transportasi.
2. **Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM)**
Cetak biru ini perlu dukungan sepenuhnya dari BUAM (*service provider*) dengan meningkatkan profesionalisme.
3. **Penyedia jaringan pelayanan dan prasarana**
Penyediaan jaringan pelayanan dan prasarana sebagaimana ditetapkan dalam Cetak Biru membutuhkan komitmen dari semua penyedia jaringan pelayanan dan prasarana baik pemerintah, BUMN maupun swasta untuk melaksanakannya, agar peningkatan kelancaran arus barang dan mobilitas orang dapat terwujud.
4. **Masyarakat Pemakai Jasa**
Dalam implementasi Cetak Biru ini, diharapkan kepada masyarakat membantu mengawasi pelaksanaan berbagai kegiatan penyediaan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana sehingga dapat terwujud peningkatan kelancaraan arus barang dan mobilitas orang.

Selain komitmen dari berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan transportasi, diperlukan perubahan paradigma dalam menatap masa depan yang disertai dengan tindakan konkrit merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda ini. Dengan demikian semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, *service provider*, penyedia jaringan pelayanan dan prasarana, dan masyarakat serta pihak-pihak terkait perlu selalu mengacu pada Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda ini.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

**MATRIKS PROGRAM PENGEMBANGAN ANTARMODA/MULTIMODA
UNTUK PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN STRATEGIS**

LAMPIRAN 1.
MATRIKS PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA
UNTUK PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN STRATEGIS

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN								PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015	2020			
					2010	2011	2012	2013	2014	s.d. 2019	s.d. 2030			
1.	PELABUHAN LHKSEUMAWE – NANGGROE ACEH DARUSSALAM													
Optimasi														
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Nanggroe Aceh Darussalam	■	■							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Pemprov NAD, Pemkot Lhokseumawe
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional	Nanggroe Aceh Darussalam				■	■	■			Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Nanggroe Aceh Darussalam		■	■	■					Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Nanggroe Aceh Darussalam	■	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standar kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Nanggroe Aceh Darussalam	■	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Nanggroe Aceh Darussalam		■	■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Pemkot Lhokseumawe, Ditjen Phb. Darat.
Aksesibilitas														
	• Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Nanggroe Aceh Darussalam	■	■	■	■					Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Lhokseumawe

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d 2019			2020 s.d 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan rel Banda Aceh -Lhokseumawe - Besitang 	Tersedianya jalan rel sepanjang 484 Km	Meningkatnya aksesibilitas	Nanggroe Aceh Darussalam								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Lhokseumawe, Pemprov NAD, Pemprov Sumut, PT. KAI
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan akses kereta barang menuju pelabuhan Lhokseumawe 	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatkan aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Nanggroe Aceh Darussalam								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Lhokseumawe, PT. KAI
2.	PELABUHAN BELAWAN - SUMATERA UTARA												
	Optimasi												
	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional 	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Sumatera Utara								Ditjen Phb. Laut,	PT.Pelindo I, Pemkot Medan, Pemprov Sumut
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu 	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional	Sumatera Utara								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal 	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Sumatera Utara								Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina
	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW 	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Sumatera Utara								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang 	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Sumatera Utara								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya 	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Sumatera Utara								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Pemkot Medan, Ditjen Phb. Darat.

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN								PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030			
					2010	2011	2012	2013	2014					
Pengembangan dan Pembangunan														
	• Revitalisasi terminal petikemas menjadi <i>total Logistics Service Provider (LSP)</i>	Tersedianya pelayanan terpadu di <i>dry port</i>	Menurunnya waktu dan biaya operasional pelayanan barang bagi pengguna jasa	Sumatera Utara		■	■	■	■	■		PT.Pelindo I	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Medan, PT. KAI	
	• Relokasi Alur pelayaran Pelabuhan Belawan	Tersedianya alur pelayaran: Lebar: 140m Kedalaman : -14m Panjang :11,8 km	Meningkatnya kapasitas, kelancaran dan keselamatan pelayaran	Sumatera Utara	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I	
	• Pemindahan terminal penumpang dari Ujung Baru ke Belawan Lama	Peningkatan kapasitas dermaga Ujung Baru	Meningkatnya pelayanan dan pengintegrasian multimoda	Sumatera Utara			■	■				PT.Pelindo I	Ditjen Phb. Laut	
	• Perpanjangan dermaga kontainer BICT	Tersedianya panjang dermaga 350 m	Meningkatnya kapasitas dan pelayanan	Sumatera Utara				■	■			PT.Pelindo I	Ditjen Phb. Laut	
Aksesibilitas														
	• Reaktivasi jalan rel antara Medan-Belawan	Tersedianya jalan rel sepanjang 22 km	Meningkatnya kelancaran arus barang dari kawasan industri ke pelabuhan	Sumatera Utara	■							Ditjen Perkeretaapian	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Medan, Pemprov Sumut, Pemkot Binjai, PT. KAI, PT.Pelindo I	
	• Pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Sumatera Utara	■	■	■	■	■			Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut	
	• Pembangunan akses kereta barang menuju pelabuhan Belawan	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan meningkatnya aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Sumatera Utara		■	■					Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut	
3.	PELABUHAN DUMAI - RIAU													
Optimasi														
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Riau	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Pemkot Dumai, Pemprov Riau	
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time (TRT)</i> kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional	Riau			■	■	■			Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina.	

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Riau								Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Integrasi port net dengan trade net dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Riau								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Penerapan/Service Level Agreement (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Riau								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan sistem registrasi truck trailer dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi truck trailer dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Riau								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Pemkot Dumai, Ditjen Phb. Darat.
Pengembangan dan Pembangunan													
	• Pengembangan terminal petikemas di Pelabuhan Dumai	Tersedianya terminal peti kemas untuk peningkatan pelayanan bongkar muat peti kemas	Menurunnya biaya operasional pelayanan peti kemas	Riau								PT.Pelindo I,	Ditjen Phb. Laut
	• Perluasan area pelabuhan	Tersedianya area pelabuhan seluas 3000 Ha	Outlet utama masuk barang ke Riau	Riau								PT.Pelindo I,	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Dumai
Aksesibilitas													
	• Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Riau								Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Dumai
	• Pembangunan dan revitalisasi jalan rel Rantau Prapat-Kota Pinang-Duri-Dumai	Tersedianya jalan rel sepanjang 246 Km	Meningkatnya kelancaran arus barang dari kawasan industri ke pelabuhan	Sumatera Utara, Riau								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Dumai, Pemprov Riau, Pemprov Sumut
	• Pembangunan akses kereta barang menuju pelabuhan Dumai	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatnya aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Sumatera Utara, Riau								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Dumai

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN								PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030			
					2010	2011	2012	2013	2014					
4.	PELABUHAN TANJUNG PINANG – KEPULAUAN RIAU													
	Optimasi													
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Tanjung Pinang	■	■							Ditjen Phb. Laut,	PT.Pelindo I, Pemkot Tanjung Pinang, Pemprov Kepri
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional	Tanjung Pinang				■	■	■			Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standar kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Tanjung Pinang	■	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina,
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Tanjung Pinang		■	■	■					Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina,
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan kapal dan barang	Menurunnya waktu dan biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Tanjung Pinang	■	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, , Kementrian Perdagangan, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Tanjung Pinang		■	■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Pemkot Tanjung Pinang, Ditjen Phb. Darat.
	Pengembangan dan Pembangunan													
	• perkuatan fasilitas dan pengadaan alat B/M (<i>LLC</i> dan <i>RMGC</i>)	Tersedianya fasilitas dan peralatan B/M (<i>LLC</i> dan <i>RMGC</i>)	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan	Tanjung Pinang	■	■	■						PT.Pelindo I	Ditjen Phb. Laut, PBM
	• Pelaksanaan pengerukan alur	Peningkatan kelancaran kapal masuk dan keluar	Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Tanjung Pinang		■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I
	• Pengadaan kapal pandu dan tunda	Tersedianya kapal pandu dan tunda	Meningkatnya kelancaran kapal masuk dan keluar	Tanjung Pinang		■	■						PT.Pelindo I	Ditjen Phb. Laut

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN								PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030			
					2010	2011	2012	2013	2014					
	Aksesibilitas													
	• Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Tanjung Pinang								Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Tanjung Pinang	
5.	PELABUHAN PEKAN BARU - RIAU													
	Optimasi													
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Riau, Sumbar								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Pemkot Pekanbaru, Pemprov Riau	
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Riau, Sumbar								Ditjen Phb. Laut,	PT.Pelindo I Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Riau, Sumbar								Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Riau, Sumbar								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Riau, Sumbar								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	• Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Riau, Sumbar								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Pemkot Riau, Ditjen Phb. Darat.	
	Pengembangan dan Pembangunan													
	• Revitalisasi terminal petikemas menjadi <i>total logistics service provider</i> (LSP)	Tersedianya pelayanan terpadu di <i>dry port</i>	Menurunnya waktu dan biaya operasional pelayanan barang bagi pengguna jasa	Riau								PT.Pelindo I	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Pekanbaru, PT. KAI	
	• Relokasi pelayanan kepelabuhanan Pekanbaru dari pasar bawah ke Perawang	Peningkatan kecepatan pelayanan kapal dan barang	Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Riau								PT.Pelindo I	Ditjen Phb. Laut	

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
Aksesibilitas													
	• Pembangunan akses kereta barang menuju pelabuhan Pekanbaru	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatkan aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Riau								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Pekanbaru, PT. KAI
	• Pembangunan jaringan jalur kereta api Durian-Pekanbaru-Muaro	Tersedianya jalur kereta api sepanjang 397 Km	Meningkatnya kelancaran arus barang dari kawasan industri ke pelabuhan	Riau, Sumbar								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Pekanbaru, Pemprov Riau, Pemprov Sumbar, PT. KAI
	• Pembangunan jalan rel antara Pekanbaru-Rengat	Tersedianya jalan rel sepanjang 161 Km	Meningkatnya kelancaran arus barang dari kawasan industri ke pelabuhan	Riau								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Pekanbaru, PT. KAI
	• Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Riau, Sumbar								Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Pekanbaru
6.	PELABUHAN BATAM - KEPULAUAN RIAU												
Optimasi													
	• Sinkronisasi masterplan dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Batam dan sekitarnya								Ditjen Phb. Laut	Pelabuhan Otorita Batam, Pemkot Batam, Pemprov Batam
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan Turn Round Time (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional	Batam dan sekitarnya								Ditjen Phb. Laut	Pelabuhan Otorita Batam, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Batam dan sekitarnya								Ditjen Bea Cukai	Pelabuhan Otorita Batam, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina,
	• Integrasi port net dengan trade net dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Batam dan sekitarnya								Ditjen Phb. Laut	Pelabuhan Otorita Batam, Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Batam dan sekitarnya							Ditjen Phb. Laut	Pelabuhan Otorita Batam, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	• Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Batam dan sekitarnya							Ditjen Phb. Laut	Pelabuhan Otorita Batam, Pemkot Batam, Ditjen Phb. Darat.	
Pengembangan dan Pembangunan													
	• Revitalisasi terminal petikemas menjadi <i>total logistics service provider</i> (LSP)	Tersedianya pelayanan terpadu di <i>dry port</i>	Menurunnya waktu dan biaya operasional pelayanan barang bagi pengguna jasa	Batam dan sekitarnya							Pelabuhan Otorita Batam	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Batam, PT. KAI	
	• Pembangunan dermaga peti kemas sesuai kebutuhan	Tersedianya dermaga peti kemas yang memadai	Meningkatnya kecepatan pelayanan	Batam dan sekitarnya							Pelabuhan Otorita Batam	Ditjen Phb. Laut	
Aksesibilitas													
	• Pembangunan akses kereta barang menuju pelabuhan Batam	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatkan aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Batam dan sekitarnya							Ditjen Perkeretaapian	Pelabuhan Otorita Batam, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Batam, PT. KAI	
	• Pembangunan jalan rel di Pulau Batam yang menghubungkan kawasan komersial, kawasan pelabuhan dan kawasan pemukiman padat	Tersedianya jalan rel	Meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan kapal dan barang	Batam dan sekitarnya							Ditjen Perkeretaapian	Pelabuhan Otorita Batam, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Batam, PT. KAI	
	• Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan	Tersediaya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Batam dan sekitarnya							Ditjen Bina Marga	Pelabuhan Otorita Batam, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Batam	
7.	PELABUHAN TELUK BAYUR - SUMATERA BARAT												
Optimasi													
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Sumatera Barat							Ditjen Phb. Laut	PT. Pelindo II, Pemkot Padang, Pemprov Sumbar	

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
					2010 s.d 2014							2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Sumatera Barat							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Sumatera Barat							Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina,	
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Sumatera Barat							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Ditjen Bea Cukai, Kemenda Ditjen Imigrasi, Karantina	
	• Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Sumatera Barat							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Pemko Padang, Ditjen Phb. Darat.	
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standar kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Sumatera Barat							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	
Pengembangan dan Pembangunan													
	• Perkuatan fasilitas dan pengadaan alat B/M (<i>Level Luffing Crane</i> dan <i>Rubber-Tyred Gantry Crane</i>)	Tersedianya fasilitas dan peralatan B/M (<i>Level Luffing Crane</i> dan <i>Rubber-Tyred Gantry Crane</i>)	Meningkatnya kapasitas pelayanan	Sumatera Barat							PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut	
	• Pelaksanaan pengerukan alur	Peningkatan kelancaran kapal masuk dan keluar	Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Sumatera Barat							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II	
	• Pengadaan kapal pandu dan tunda	Tersedianya kapal pandu dan tunda	Meningkatnya kelancaran kapal masuk dan keluar	Sumatera Barat							PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut	
	• Revitalisasi terminal petikemas menjadi <i>total logistics service provider</i> (LSP)	Tersedianya pelayanan terpadu di <i>dry port</i>	Menurunnya waktu dan biaya operasional pelayanan barang bagi pengguna jasa	Sumatera Barat							PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Padang, PT. KAI	
	• Perpanjangan dermaga dan penambahan <i>crane</i>	Tersedianya dermaga 1716 m dan <i>crane</i>	Meningkatnya kapasitas pelayanan	Sumatera Barat							PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut,	
Aksesibilitas													
	• Meningkatnya jalan rel lintas Sawahlunto-Telukbayur	Tersedianya jalan rel sepanjang 156 Km	Meningkatnya kecepatan dan beban gandar	Sumatera Barat							Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Padang, PT. KAI, Pemprov Sumbar	

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN								PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030			
					2010	2011	2012	2013	2014					
	• Revitalisasi terminal petikemas menjadi <i>total logistics service provider</i> (LSP)	Tersedianya pelayanan terpadu di <i>dry port</i>	Menurunnya waktu dan biaya operasional pelayanan barang bagi pengguna jasa	Lampung		■	■	■	■			PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Bandar Lampung, PT. KAI	
	• Pengadaan kapal pandu dan tunda	Tersedianya kapal pandu dan tunda	Meningkatnya kelancaran kapal masuk dan keluar	Lampung		■	■					PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut	
	• Perpanjangan dermaga	Tersedianya dermaga memadai	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang	Lampung	■				■	■		PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut	
Aksesibilitas														
	• Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Lampung	■	■	■	■	■			Ditjen Bina Marga	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Bandar Lampung, PT.Pelindo II	
	• Lanjutan pembangunan jalur ganda Tulungbuyut - Blambanganumpu	Tersedianya jalur ganda KA sepanjang 16 Km	Meningkatnya kelancaran arus barang khususnya angkutan batubara	Lampung, Sumatera Selatan	■	■	■	■	■			Ditjen Perkeretaapian	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Bandar Lampung, PT.Pelindo II	
	• Pembangunan akses kereta barang menuju pelabuhan Panjang	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatnya aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Lampung, Sumatera Selatan					■	■		Ditjen Perkeretaapian	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Bandar Lampung, PT.Pelindo II, PT. KAI	
9.	PALEMBANG – SUMATERA SELATAN													
Optimasi														
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Sumatera Selatan	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Pemkot Palembang, Pemprov Sumsel	
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Sumatera Selatan	■	■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Sumatera Selatan	■	■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan akses kereta barang menuju pelabuhan Telukbayur	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatnya aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Sumatera Barat								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Padang, PT. KAI
	• Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Sumatera Barat								Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Padang
8.	PELABUHAN PANJANG - LAMPUNG												
	Optimasi												
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Lampung								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Pemkot Bandar Lampung, Pemprov Lampung
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Lampung								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina,
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Lampung								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Lampung								Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina,
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Lampung								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Lampung								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Pemkot Bandar Lampung, Ditjen Phb. Darat.
	Pengembangan dan Pembangunan												
	• Perkuatan fasilitas dan pengadaan alat B/M (<i>Level Luffing Crane dan Rubber-Tyred Gantry Crane</i>)	Tersedianya fasilitas dan peralatan B/M (<i>Level Luffing Crane dan Rubber-Tyred Gantry Crane</i>)	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan	Lampung								PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Sumatera Selatan								Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina,
	• Integrasi port net dengan trade net dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Sumatera Selatan								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan sistem registrasi truck trailer dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi truck trailer dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Sumatera Selatan								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Pemkot Palembang, Ditjen Phb. Darat.
	• Pengembangan angkutan batubara melalui S. Musi	Peningkatan kecepatan pelayanan batubara	Menurunnya biaya transportasi batubara	Sumatera Selatan								PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut, Pemprov Sumsel
Pengembangan dan Pembangunan													
	• Revitalisasi terminal petikemas menjadi total logistics service provider (LSP)	Tersedianya pelayanan terpadu di dry port	Menurunnya waktu dan biaya operasional pelayanan barang bagi pengguna jasa	Sumatera Selatan								PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Palembang, PT. KAI
	• Perkuatan fasilitas dan pengadaan alat B/M (Level Luffing Crane dan Rail-Mounted Gantry Crane)	Tersedianya fasilitas dan peralatan B/M (Level Luffing Crane dan Rail-Mounted Gantry Crane)	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan	Sumatera Selatan								PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut
	• Pelaksanaan pengerukan alur	Peningkatan kelancaran kapal masuk dan keluar	Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Sumatera Selatan								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II
	• Pengadaan kapal pandu dan tunda	Tersedianya kapal pandu dan tunda	Meningkatnya kelancaran kapal masuk dan keluar	Sumatera Selatan								PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut
Aksesibilitas													
	• Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Sumatera Selatan								Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Palembang
	• Pembangunan jalur ganda Martapura-Tigagajah	Tersedianya jalur KA sepanjang 35 Km	Meningkatnya kapasitas lintas	Sumatera Selatan								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Palembang, PT. KAI Pemprov Lampung, Pemprov Sumsel

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan <i>shortcut</i> KA Batubara Tj. Enim-Baturaja	Tersedianya jalur KA sepanjang 78 Km	Meningkatnya kelancaran arus barang khususnya angkutan batubara	Sumatera Selatan, Lampung								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Palembang, PT. KAI Pemprov Sumsel
	• Pembangunan jalur ganda antara Sukacinta-Kertapati	Tersedianya jalur ganda KA sepanjang 190 Km	Meningkatnya kelancaran arus barang khususnya angkutan batubara	Sumatera Selatan, Lampung								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Palembang, PT. KAI, Pemprov Sumsel
	• Pembangunan jalur KA Batubara antara Tanjung Enim-Srengsem	Tersedianya jalur KA sepanjang 300 Km	Meningkatnya kelancaran arus barang khususnya angkutan batubara	Sumatera Selatan, Lampung								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Palembang, PT. KAI, Pemprov Sumsel
	• Pembangunan akses kereta barang menuju Pelabuhan Palembang	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatkan aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Sumatera Selatan, Lampung								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Palembang, PT. KAI
10.	PELABUHAN BANTEN – BANTEN												
	Optimasi												
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Banten dan Jawa Barat								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Pemprov Banten
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Banten dan Jawa Barat								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina,
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Banten dan Jawa Barat								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Banten dan Jawa Barat								Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina,
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Banten dan Jawa Barat								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Ditjen Imigrasi, Karantina

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya 	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Banten dan Jawa Barat							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Pemprov Banten, Ditjen Phb. Darat.	
Pengembangan dan Pembangunan													
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan <i>Liquid Hub Port</i> Bojonegoro 	Tersedianya <i>Hub Port</i>	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang	Banten dan Jawa Barat							PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan kapal pandu dan tunda 	Tersedianya kapal pandu dan tunda	Meningkatnya kelancaran kapal masuk dan keluar	Banten dan Jawa Barat							PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut	
Aksesibilitas													
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan akses kereta barang menuju pelabuhan Bojonegara (Tonjong - Pelabuhan Bojonegara) 	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatkan aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Banten dan Jawa Barat							Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Pemprov Banten, PT. KAI	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan tol Cilegon-Bojonegara 	Tersedianya Jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Banten dan Jawa Barat							Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Pemprov Banten	
11.	PELABUHAN TANJUNG PRIOK - DKI JAKARTA												
Optimasi													
	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional 	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Jabodetabek dan Jawa Barat							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Pemprov DKI	
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu 	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Jabodetabek dan Jawa Barat							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Fully automatic gate system</i> JICT 	Tersedianya <i>Fully automatic gate system</i>	Meningkatnya kelancaran arus barang dan efisiensi biaya pemakai jasa	Jabodetabek dan Jawa Barat							Direksi JICT	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan <i>Joint Operation</i> TPK Koja dan JICT 	Terwujudnya percepatan proses pelayanan, mempermudah operasional pelayanan petikemas	Meningkatnya kelancaran arus barang	Jabodetabek dan Jawa Barat							PT.Pelindo II JICT	Ditjen Phb. Laut	

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014								
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pengembangan Jakarta Hub Port	Peningkatan kapasitas pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang	Jabodetabek dan Jawa Barat								PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut
	• Pengembangan oil & gas terminal	Tersedianya oil & gas terminal	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Jabodetabek dan Jawa Barat								PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut
	• Joint in/out gate TPK Koja dan JICT	Terwujudnya kerja sama dan pengawasan	Meningkatnya kelancaran arus barang	Jabodetabek dan Jawa Barat								PT.Pelindo II JICT	Ditjen Phb. Laut
	• Penerapan Service Level Agreement (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Jabodetabek dan Jawa Barat								Ditjen Phb. Laut,	PT.Pelindo II , Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Jabodetabek dan Jawa Barat								Ditjen Bea Cukai	Ditjen Phb. Laut, PT.Pelindo II, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Integrasi port net dengan trade net dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Jabodetabek dan Jawa Barat								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Ditjen Bea Cukai, , Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan sistem registrasi truck trailer dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi truck trailer dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Jabodetabek dan Jawa Barat								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Pemprov DKI, Ditjen Phb. Darat.
Pengembangan dan Pambangunan													
	• Perkuatan fasilitas dan pengadaan alat B/M (Level Luffing Crane & Container Crane)	Tersedianya fasilitas dan peralatan B/M (Level Luffing Crane dan Container Crane)	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan	Jabodetabek dan Jawa Barat								PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut
	• Pelaksanaan pengerukan dan turning basin	Peningkatan kelancaran kapal masuk dan keluar	Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Jabodetabek dan Jawa Barat								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Pemprov DKI
	• Meningkatnya & perkuatan lapangan 301, 302 & 303 untuk terminal peti kemas	Peningkatan kapasitas CY	Meningkatnya Yard Through Put (YTP)	Jabodetabek dan Jawa Barat								PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pengadaan kapal pandu dan tunda	Tersedianya 4 unit pembersih sampah, dan 1 unit kapal pandu	Meningkatnya kelancaran kapal masuk dan keluar	Jabodetabek dan Jawa Barat								PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut
	• Pembangunan lahan parkir truk	Tersedianya lahan parkir truk seluas 3,5 Ha	Meningkatnya kelancaran arus barang	Jakarta dan sekitarnya								Pemprov DKI Jakarta	Ditjen Phb. Laut, PT.Pelindo II
Aksesibilitas													
	• Pembangunan jalan rel akses Cikarang (<i>dry port</i> Jababeka) menuju Pelabuhan Tanjung Priok	Tersedianya akses jalan rel sepanjang 15 km	Meningkatnya kelancaran arus barang	Cikarang, Karawang dan sekitarnya								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo II, PT. KAI, Ditjen Phb.Laut, Pemprov DKI, Pemkot Tangerang.
	• Perpanjangan jalur rel KA dari Pasoso ke ICT/Koja	Tersedianya jalur rel KA sepanjang 3,2 km	Meningkatnya kelancaran arus barang khususnya angkutan peti kemas dan perkembangan kawasan industri	Jabodetabek dan Jawa Barat								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo II, PT. KAI, Ditjen Phb Laut, Pemkot DKI
	• Pembangunan rel jalur ganda di lintas utara Pulau Jawa yaitu Stasiun Jakarta-Kalimas Surabaya	Tersedianya rel jalur ganda sepanjang 459 km	Meningkatnya kapasitas menjadi 1000 peti kemas per hari	Pulau Jawa								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo II, PT. KAI, Ditjen Phb Laut, Pemprov DKI, Pemprov Jatim, Pemprov Jateng
	• Pembangunan <i>shortcut</i> Parungpanjang - Citayam	Tersedianya jalur KA sepanjang 28,3 Km	Meningkatnya kelancaran arus barang dengan pengalihan arus barang tidak melalui Jakarta	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo II, PT. KAI, PT.Pelindo II Cabang Tanjung Priok, Pemprov Jabar
	• Pembangunan jalur KA Nambo-Bekasi/Cikarang	Peningkatan kapasitas jalur KA	Meningkatnya kelancaran arus barang dengan pengalihan arus barang tidak melalui Jakarta	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat								Ditjen Perkeretaapian	PT. KAI, Pemprov DKI, Pemprov Jabar
	• Pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya kecepatan kelancaran arus barang	Jakarta								Ditjen Bina Marga	Pemprov DKI, Ditjen Phb Darat, Pemprov Jabar
	• Pembangunan jalan layang Tarum Barat	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya kecepatan kelancaran arus barang	Cikarang dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	Pemprov DKI, Ditjen Phb Darat, Pemprov Jabar
	• <i>Overpass</i> Tol Jakarta - Cikampek dan Jalan Akses (<i>akses dryport</i> Cikarang)	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Cikarang, Karawang dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	Pemprov DKI, Ditjen Phb Darat, Pemprov Jabar

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN								PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030				
					2010	2011	2012	2013	2014						
12.	PELABUHAN PONTIANAK – KALIMANTAN BARAT														
	Optimasi														
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Kalimantan Barat	■	■							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Pemkot Pontianak, Pemprov Kalbar	
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Kalimantan Barat	■	■							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Kalimantan Barat	■	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	• Pelaksanaan pengerukan	Peningkatan kelancaran kapal masuk dan keluar	Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Kalimantan Barat	■	■							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II	
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Kalimantan Barat		■	■						Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Kalimantan Barat	■	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	• Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Kalimantan Barat		■	■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo II, Pemkot Pontianak, Ditjen Phb. Darat.	
	Pengembangan dan Pembangunan														
	• Revitalisasi terminal petikemas menjadi <i>total logistics service provider</i> (LSP)	Tersedianya pelayanan terpadu di <i>dry port</i>	Menurunnya waktu dan biaya operasional pelayanan barang bagi pengguna jasa	Kalimantan Barat		■	■	■					PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Pontianak, PT. KAI	
	• Pengadaan kapal pandu dan tunda	Tersedianya kapal pandu dan tunda	Meningkatnya kelancaran kapal masuk dan keluar	Kalimantan Barat		■							PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut	

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	<ul style="list-style-type: none"> Perkuatan fasilitas dan pengadaan alat B/M (<i>Level Luffing Crane dan Container Crane</i>) 	Tersedianya fasilitas dan peralatan B/M (<i>Level Luffing Crane dan Container Crane</i>)	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan	Kalimantan Barat								PT.Pelindo II	Ditjen Phb. Laut
Aksesibilitas													
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalur KA antara Pontianak-Mempawah-Singkawang-Sambas 	Tersedianya jalur kereta api sepanjang 176 km	Meningkatnya kelancaran dan menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Kalimantan Barat								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Pontianak, PT. KAI, Pemprov Kalbar
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan akses kereta barang menuju Pelabuhan Pontianak 	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatnya aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Kalimantan Barat								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Pontianak, PT. KAI
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan Temajo-Pontianak-Putussibau dan Temajo-Pontianak-Ketapang 	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus barang	Kalimantan Barat								Ditjen Bina Marga	Pemkot Pontianak, Pemprov kalbar
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan 	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Kalimantan Barat								Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo II, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Pontianak
13.	PELABUHAN TANJUNG EMAS – JAWA TENGAH												
Optimasi													
	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional 	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Jawa Tengah, Yogyakarta								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemkot Semarang, Pemprov Jateng
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu 	Penurunan <i>Turn Round Time (TRT)</i> kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Jawa Tengah, Yogyakarta								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina,
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal 	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Jawa Tengah, Yogyakarta								Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo III , Ditjen Phb. Laut, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW 	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Jawa Tengah, Yogyakarta							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III , Ditjen Bea Cukai , Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> pada segmen pelayanan kapal dan barang 	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Jawa Tengah, Yogyakarta							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya 	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Jawa Tengah, Yogyakarta							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemkot Semarang, Ditjen Phb. Darat.	
Pengembangan dan Pembangunan													
	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi terminal petikemas menjadi <i>total logistics service provider (LSP)</i> 	Tersedianya pelayanan terpadu di <i>dry port</i>	Menurunnya waktu dan biaya operasional pelayanan barang bagi pengguna jasa	Jawa Tengah, Yogyakarta							PT.Pelindo III	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Semarang, PT. KAI	
	<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan dermaga 	Tersedianya dermaga memadai	Meningkatnya kapasitas pelayanan	Jawa Tengah, Yogyakarta							PT.Pelindo III	Ditjen Phb. Laut	
Aksesibilitas													
	<ul style="list-style-type: none"> Reaktivasi jalan rel menuju Pelabuhan Tanjung Emas 	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatkan aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Jawa Tengah, Yogyakarta							Ditjen Perkeretaapian	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Semarang, PT. KAI, PT.Pelindo III	
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan 	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Jawa Tengah, Yogyakarta							Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo III, Ditjen Phb. Laut	
14.	PELABUHAN TANJUNG PERAK - JAWA TIMUR												
	Optimasi												
	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional 	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Jawa Timur								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Jawa Timur	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Jawa Timur		■	■					Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo III, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina,
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Jawa Timur	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Jawa Timur	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina.
	• Kerjasama bisnis logistik dan angkutan barang dari dan ke pelabuhan dengan menggunakan sarana kereta api	Peningkatan kapasitas jalur KA	Meningkatnya kelancaran arus barang dengan pengalihan arus barang tidak melalui Jakarta	Jawa Timur	■							Direksi PT.KA	PT.Pelindo III, Ditjen Perkertaapian, Ditjen Phb. Laut
	• Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Jawa Timur	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, Ditjen Phb. Darat.
Pengembangan dan Pembangunan													
	• Pembangunan dan pengoperasian terminal <i>multipurpose</i> Teluk Lamong	Tersedianya fasilitas terminal <i>multipurpose</i>	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa kepelabuhanan akibat terbatasnya areal pengembangan di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak	Jawa Timur	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemkot Surabaya
	• Mengembalikan posisi pipa gas KODECO ke posisi yang aman bagi keselamatan pelayaran dan pengembangan Pelabuhan Tj.Perak	Peningkatan kecepatan pelayanan kapal dan barang	Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Jawa Timur	■							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemkot Surabaya, Kementrian ESDM
	• Pembangunan terminal curah cair di Nilam Utara	Tersedianya terminal curah cair	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Jawa Timur		■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemkot Surabaya, PT. KAI dan Ditjen Bina Marga

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan Pengelolaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) 	Tersedianya alur pelayaran	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Jawa Timur								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III
	<ul style="list-style-type: none"> Konversi terminal konvensional menjadi terminal <i>multipurpose</i> di Nilam Timur 	Tersedianya terminal <i>multipurpose</i>	Mampu menangani arus petikemas dengan kapasitas 245 ribu TEU's/thn Menurunnya kongesti dan kelancaran pelayanan bongkar muat	Jawa Timur								PT.Pelindo III	Ditjen Phb. Laut
Aksesibilitas													
	<ul style="list-style-type: none"> Reaktivasi jalan rel menuju Pelabuhan Tanjung Perak 	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatkan aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Jawa Timur								Ditjen Perkeretaapian	Ditjen Phb. Laut, PT. KAI, PT.Pelindo III, Pemkot Surabaya
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan jalan tol Bandara Juanda-Tanjung Perak 	Tersedianya Jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Jawa Timur								Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo III, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Phb. Darat
15.	PELABUHAN BANJARMASIN - KALIMANTAN SELATAN												
	Optimasi												
	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional 	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemkot Banjarmasin, Pemprov Kalsel
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu 	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah								Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo III, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina,
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal 	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW 	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemkot Banjarmasin
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal 	Tersedianya standar kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina.
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya 	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemkot Banjarmasin, Ditjen Phb. Darat.
Pengembangan dan Pembangunan													
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan <i>full container</i> 	Tersedianya <i>full container</i>	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah								PT.Pelindo III	Ditjen Phb. Laut
	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi terminal petikemas menjadi total <i>logistics service provider</i> (LSP) 	Tersedianya pelayanan terpadu di <i>dry port</i>	Menurunnya waktu dan biaya operasional pelayanan barang bagi pengguna jasa	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah								PT.Pelindo III	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Banjarmasin, PT. KAI
Aksesibilitas													
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalur KA antara Banjarmasin-Palangkaraya 	Tersedianya jalur KA sepanjang 138 Km	Meningkatnya kelancaran arus barang dari kawasan industri ke pelabuhan	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo III, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Banjarmasin, PT. KAI
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalur KA menuju pelabuhan Banjarmasin 	Tersedianya jalur KA	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo III, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Banjarmasin, Pemkot Palangkaraya, Pemprov Kalsel, Pemprov Kalteng, PT. KAI
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan 	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah								Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo III, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Banjarmasin

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
16.	PELABUHAN TENAU KUPANG - NUSA TENGGARA TIMUR												
Optimasi													
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Nusa Tenggara Timur	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemkot Kupang, Pemprov NTT
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Nusa Tenggara Timur		■	■	■	■			Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina,
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Nusa Tenggara Timur		■	■					Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo III, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Nusa Tenggara Timur	■	■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, , Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standar kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Nusa Tenggara Timur	■	■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Nusa Tenggara Timur		■	■	■				Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemkot Kupang, Ditjen Phb. Darat.
Pengembangan dan Pembangunan													
	• Pembangunan dedicated terminal baik untuk curah kering, curah cair dan perluasan <i>car terminal</i>	Tersedianya kapasitas <i>dedicated terminal</i>	Meningkatnya kelancaran arus barang	Nusa Tenggara Timur				■	■	■		PT.Pelindo III	Ditjen Phb. Laut
Aksesibilitas													
	• Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Nusa Tenggara Timur	■	■	■	■	■			Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo III, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Kupang

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
17.	PELABUHAN BENOA - BALI												
	Optimasi												
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Bali, Nusa Tenggara Barat	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemprov Bali
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time (TRT)</i> kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Bali, Nusa Tenggara Barat		■	■	■				Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina,
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Bali, Nusa Tenggara Barat		■	■					Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo III, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina,
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Bali, Nusa Tenggara Barat	■	■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, , Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Penerapan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Bali, Nusa Tenggara Barat	■	■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Bali, Nusa Tenggara Barat	■	■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemprov Bali, Ditjen Phb. Darat.
	Aksesibilitas												
	• Pembangunan jalan rel di Pulau Bali	Tersedianya jalan rel	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang	Bali						■	■	Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo III, Ditjen Phb. Laut, Pemprov Bali, PT. KAI
	• Pembangunan akses kereta barang menuju pelabuhan Benoa	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatkan aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Bali							■	Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo III, Ditjen Phb. Laut, Pemprov Bali, PT. KAI
	• Pembangunan konstruksi jembatan Serangan-Tanjung Benoa	Tersedianya jembatan sepanjang 7,5 Km	Meningkatnya jaringan pelayanan	Bali, Nusa Tenggara Barat	■	■	■	■	■			Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo III, Ditjen Phb. Laut, Pemprov Bali

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d 2019			2020 s.d 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pengembangan dan pematapan akses jaringan jalan ke pelabuhan	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Bali, Nusa Tenggara Barat							Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo III, Ditjen Phb. Laut, Pemprov Bali	
18.	PELABUHAN SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR												
	Optimasi												
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Kalimantan Timur								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Kalimantan Timur								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Kalimantan Timur								Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Kalimantan Timur								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Kalimantan Timur								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Kalimantan Timur								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemkot Samarinda, Ditjen Phb. Darat.
	Pengembangan dan Pembangunan												
	• Pembangunan dermaga dan terminal penumpang di Terminal Palaran	Tersedianya kapasitas dermaga dan terminal	Meningkatnya pelayanan	Kalimantan Timur								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Samarinda
	• Pengoperasian Terminal Palaran	Tersedianya kapasitas terminal	Meningkatnya pelayanan	Kalimantan Timur								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV
	• Pengembangan dermaga dan lapangan penumpukan petikemas, <i>multipurpose</i> , curah cair dan curah kering di Terminal Palaran	Tersedianya dermaga dan lapangan penumpukan	Meningkatnya pelayanan	Kalimantan Timur								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penataan lahan Pelabuhan Samarinda Lama sebagai kawasan komersial dan publik	Tersedianya lahan pelabuhan	Meningkatnya kapasitas pelayanan	Kalimantan Timur								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut
	• Revitalisasi terminal petikemas menjadi <i>total logistics service provider</i> (LSP)	Tersedianya pelayanan terpadu di <i>dry port</i>	Menurunnya waktu dan biaya operasional pelayanan barang bagi pengguna jasa	Kalimantan Timur								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Samarinda, PT. KAI
	• Penyiapan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda dengan kedalaman Min.-6,00 MLWS dengan lebar 100M	Tersedianya alur pelayaran kedalaman minimal - 6 m LWS	Meningkatnya pelayanan pelabuhan terbuka untuk 24 jam dan jaminan keselamatan pelayaran	Kalimantan Timur								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemprov Kaltim
	• Pemasangan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi sepanjang alur pelayaran Pelabuhan Samarinda	Ketersediaan SBN pada alur pelayaran	Meningkatnya jaminan keselamatan pelayaran	Kalimantan Timur								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemprov Kaltim
	• Deklarasi dan pengoperasian Terminal Petikemas Palaran (dalam waktu 6 bulan)	Tersedianya pengoperasian Terminal Petikemas Palaran	Meningkatkan kelancaran dan produktivitas pelayanan B/M petikemas	Kalimantan Timur								Ditjen Phb. Laut	PT. PT.Pelindo IV
Aksesibilitas													
	• Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Kalimantan Timur								Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Samarinda
	• Pembangunan jalur KA antara Bontang-Samarinda	Tersedianya jalur KA sepanjang 69 Km	Meningkatnya kelancaran arus barang khususnya komoditi batu bara	Kalimantan Timur								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim, Pemkot Bontang, PT. KAI
	• Pembangunan jalur KA antara Samarinda-Balikpapan	Tersedianya jalur KA sepanjang 104 Km	Meningkatnya kelancaran arus barang khususnya komoditi batu bara	Kalimantan Timur								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Samarinda, Pemkot Balikpapan, Pemprov Kaltim, PT. KAI
	• Pembangunan jalur KA antara Samarinda-Tenggarong-Kotabangun	Tersedianya jalur KA 78 km	Meningkatnya kelancaran arus barang khususnya komoditi batu bara	Kalimantan Timur								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim, PT. KAI
	• Pembangunan akses kereta barang menuju pelabuhan Samarinda	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatkan aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Kalimantan Timur								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Samarinda, PT. KAI

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
19.	PELABUHAN MAKASSAR – SULAWESI SELATAN												
	Optimasi												
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Sulawesi Selatan.	■							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemkot Makassar, Pemprov Sulsel
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Sulawesi Selatan.	■							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina,
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Sulawesi Selatan.	■							Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo IV , Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Sulawesi Selatan.	■	■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, , Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang.	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Sulawesi Selatan	■	■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Sulawesi Selatan	■	■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemkot Makassar, Ditjen Phb. Darat.
	Pengembangan dan Pembangunan												
	• Revitalisasi terminal petikemas menjadi <i>total logistics service provider</i> (LSP)	Tersedianya pelayanan terpadu di <i>dry port</i>	Menurunnya biaya operasional pelayanan barang bagi pengguna jasa	Sulawesi Selatan	■	■						PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Makassar, PT. KAI
	• Optimalisasi Terminal Petikemas Makassar melalui penambahan alat bongkar muat petikemas di terminal peti kemas <i>eksisting</i>	Peningkatan kecepatan pelayanan peti kemas	Meningkatnya kapasitas terminal peti kemas	Sulawesi Selatan		■	■	■	■			PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut
	• Pembangunan pelabuhan baru (Makassar <i>New Port</i>) untuk terminal petikemas, penumpang, curah dan <i>general cargo</i> (<i>Dedicated Terminal</i>)	Kapasitas pelabuhan	Meningkatnya kapasitas pelayanan	Sulawesi Selatan		■	■	■	■	■		Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemkot Makassar

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan <i>In-land Container Depo</i> di Pelabuhan Makassar	Tersedianya <i>In-land Container</i>	Meningkatnya kapasitas pelayanan	Sulawesi Selatan								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut
Aksesibilitas													
	• Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Sulawesi Selatan								Ditjen Bina Marga	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Makassar, PT.Pelindo IV, PT. KAI
	• Pembangunan jalur KA antara Makassar-Pare-pare	Tersedianya jalur KA sepanjang 128 Km	Meningkatnya aksesibilitas	Sulawesi Selatan								Ditjen Perkeretaapian	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Makassar, Pemprov Sulsel, PT. KAI, PT.Pelindo IV
	• Pembangunan akses kereta barang menuju pelabuhan Makassar	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatnya aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Sulawesi Selatan								Ditjen Perkeretaapian	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Makassar, PT.Pelindo IV, PT. KAI
20.	PELABUHAN BALIKPAPAN – KALIMANTAN TIMUR												
Optimasi													
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Kalimantan Timur								Ditjen Phb. Laut,	PT.Pelindo IV, Pemkot Balikpapan, Pemprov Kaltim
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Sulawesi Selatan								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Kalimantan Timur								Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka <i>NSW</i>	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Kalimantan Timur								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, , Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Kalimantan Timur								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemkot Balikpapan, Ditjen Phb. Darat.

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN								PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030			
					2010	2011	2012	2013	2014					
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal 	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Kalimantan Timur								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	
Pengembangan dan Pembangunan														
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan Terminal Semayang untuk pelayanan penumpang, <i>Ro-Ro</i> 	Tersedianya <i>Dedicated Terminal</i> penumpang, Roro dan kawasan komersial	Meningkatnya kapasitas pelayanan	Kalimantan Timur								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Balikpapan	
	<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan dermaga di Kawasan Kampung Baru untuk pelayanan perintis dan pelayaran rakyat 	Tersedianya dermaga di pelabuhan	Meningkatnya kapasitas pelayanan	Kalimantan Timur								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Balikpapan	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Terminal Kariangau untuk pelayanan petikemas, curah kering, curah cair dan <i>general cargo</i> (<i>multipurposed</i>) 	Tersedianya terminal untuk pelayanan petikemas, curah kering, curah cair dan <i>general cargo</i> (<i>multipurposed</i>)	Meningkatnya kapasitas pelayanan	Kalimantan Timur								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Balikpapan	
Aksesibilitas														
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan 	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Kalimantan Timur								Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Balikpapan	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalur KA batubara antara Muara Wahau-Lubuk Tutung Kaltim 	Tersedianya jalur KA sepanjang 150 Km	Meningkatnya kelancaran arus barang khususnya komoditi batubara	Kalimantan Timur								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Balikpapan, Pemprov Kaltim, PT. KAI	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalur KA batubara antara Puruk Cahu-Balikpapan 	Tersedianya jalur KA sepanjang 350 Km	Meningkatnya kelancaran arus barang khususnya komoditi batubara	Kalimantan Timur								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Balikpapan, Pemprov Kaltim, PT. KAI	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan akses kereta barang menuju Pelabuhan Balikpapan 	Tersedianya akses kereta barang sepanjang 350 Km	Meningkatnya kelancaran arus barang khususnya batubara	Kalimantan Timur								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Balikpapan, PT. KAI	
21.	PELABUHAN BITUNG - SULAWESI UTARA													
Optimasi														
	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional 	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Sulawesi Utara								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemkot Bitung, Pemprov Sulut	

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d 2019			2020 s.d 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Sulawesi Utara	■							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Sulawesi Utara		■	■	■				Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Sulawesi Utara	■	■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standar kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Sulawesi Utara	■	■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Sulawesi Utara	■	■	■					Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Darat
Pengembangan dan Pembangunan													
	• Pembangunan <i>In-Land Container Depo</i>	Tersedianya <i>In-Land Container Depo</i>	Meningkatnya kapasitas pelayanan	Sulawesi Utara	■	■	■					PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Bitung
	• Penataan dan Perkuatan Terminal Konvensional Bitung untuk pelayanan <i>multipurpose</i> , curah cair, curah kering dan penumpang	Tersedianya terminal konvensional	Meningkatnya keselamatan operasional pelabuhan	Sulawesi Utara	■	■	■	■				PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut
	• Revitalisasi terminal petikemas menjadi <i>total logistics service provider</i> (LSP)	Tersedianya pelayanan terpadu di <i>dry port</i>	Menurunnya waktu dan biaya operasional pelayanan barang bagi pengguna jasa	Sulawesi Utara	■	■						PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Bitung, PT. KAI
	• Perpanjangan dan pembangunan dermaga dan lapangan petikemas Terminal Petikemas Bitung	Tersedianya Dermaga sepanjang 600 m' dan Lapangan Penumpukan seluas 5 Ha	Meningkatnya pelayanan	Sulawesi Utara	■	■	■	■	■			PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut
Aksesibilitas													
	• Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Sulawesi Utara	■	■	■	■				Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Bitung, Pemprov Sulut

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015			2020
					2010	2011	2012	2013	2014	s.d. 2019			s.d. 2030
	• Pembangunan jalan tol antara Manado-Bitung	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Sulawesi Utara								Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Bitung, Pemprov Sulut
	• Pembangunan jalur rel antara Manado-Bitung	Tersedianya jalur rel sepanjang 48 km	Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Sulawesi Utara								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Bitung, Pemprov Sulut, PT. KAI
	• Pembangunan akses kereta barang menuju Pelabuhan Bitung	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatkan aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Sulawesi Utara								Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut. PT. KAI
22.	PELABUHAN AMBON - MALUKU												
	Optimasi												
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Maluku								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemkot Ambon, Pemprov Maluku
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Maluku								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Maluku								Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Maluku								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Maluku								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	• Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Maluku								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemkot Ambon, Ditjen Phb. Darat.

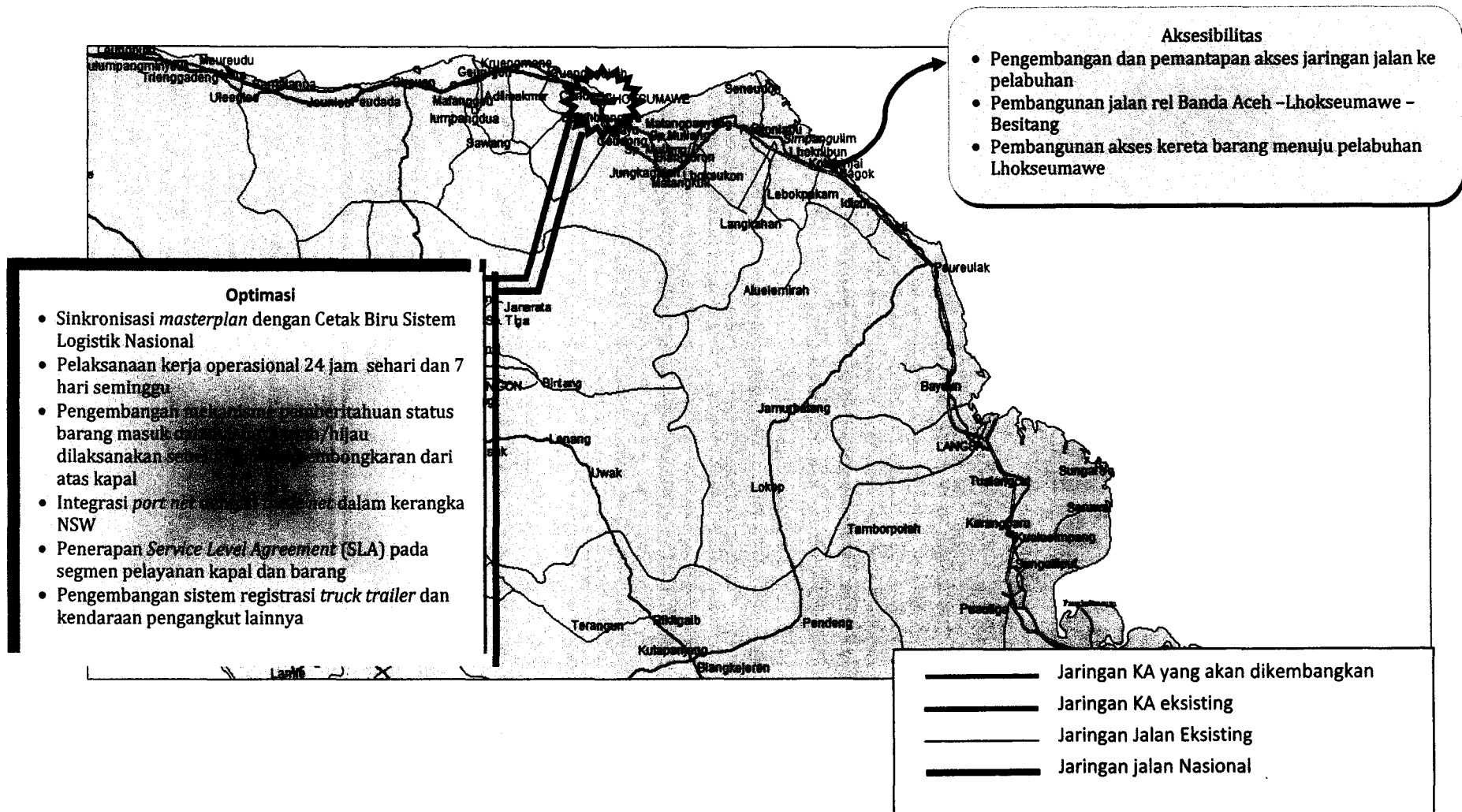
NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN								PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015 s.d 2019	2020 s.d 2030			
					2010	2011	2012	2013	2014					
Pengembangan dan Pembangunan														
	• Perpanjangan dan perkuatan dermaga untuk terminal petikemas dan <i>multipurpose</i>	Tersedianya dermaga sepanjang 1.500 m	Meningkatnya pelayanan	Maluku								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut	
	• Perluasan dan pembangunan lapangan petikemas, curah cair, curah kering, <i>general cargo</i> , dan pembangunan ICD	Tersedianya lapangan peti kemas, curah cair, curah kering <i>general cargo</i> , dan pembangunan ICD seluas 5 Ha	Meningkatnya pelayanan	Maluku								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut	
Aksesibilitas														
	• Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Maluku								Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Ambon	
23.	PELABUHAN BIAK - PAPUA													
Optimasi														
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Biak								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemkot Biak, Pemprov Papua	
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Biak								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	• Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Biak								Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	• Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Biak								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	• Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Biak								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya 	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Biak							Ditjen Phb. Laut	Pelindo VI, Pemkot Biak, Ditjen Phb. Darat.	
Pengembangan dan Pembangunan													
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pembangunan lapangan petikemas 	Tersedianya lapangan peti kemas	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang	Biak							PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Replacement</i> dan perpanjangan dermaga untuk pelayanan penumpang, petikemas dan <i>multipurpose</i> 	Tersedianya dermaga	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang	Biak							PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut	
Aksesibilitas													
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan 	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Biak							Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Biak	
24.	PELABUHAN JAYAPURA - PAPUA												
Optimasi													
	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional 	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Papua							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemkot Jayapura, Pemprov Papua	
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu 	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Papua							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal 	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Papua							Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya 	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Papua							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemkot Jayapura, Ditjen Phb. Darat.	
	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW 	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Papua							Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina	

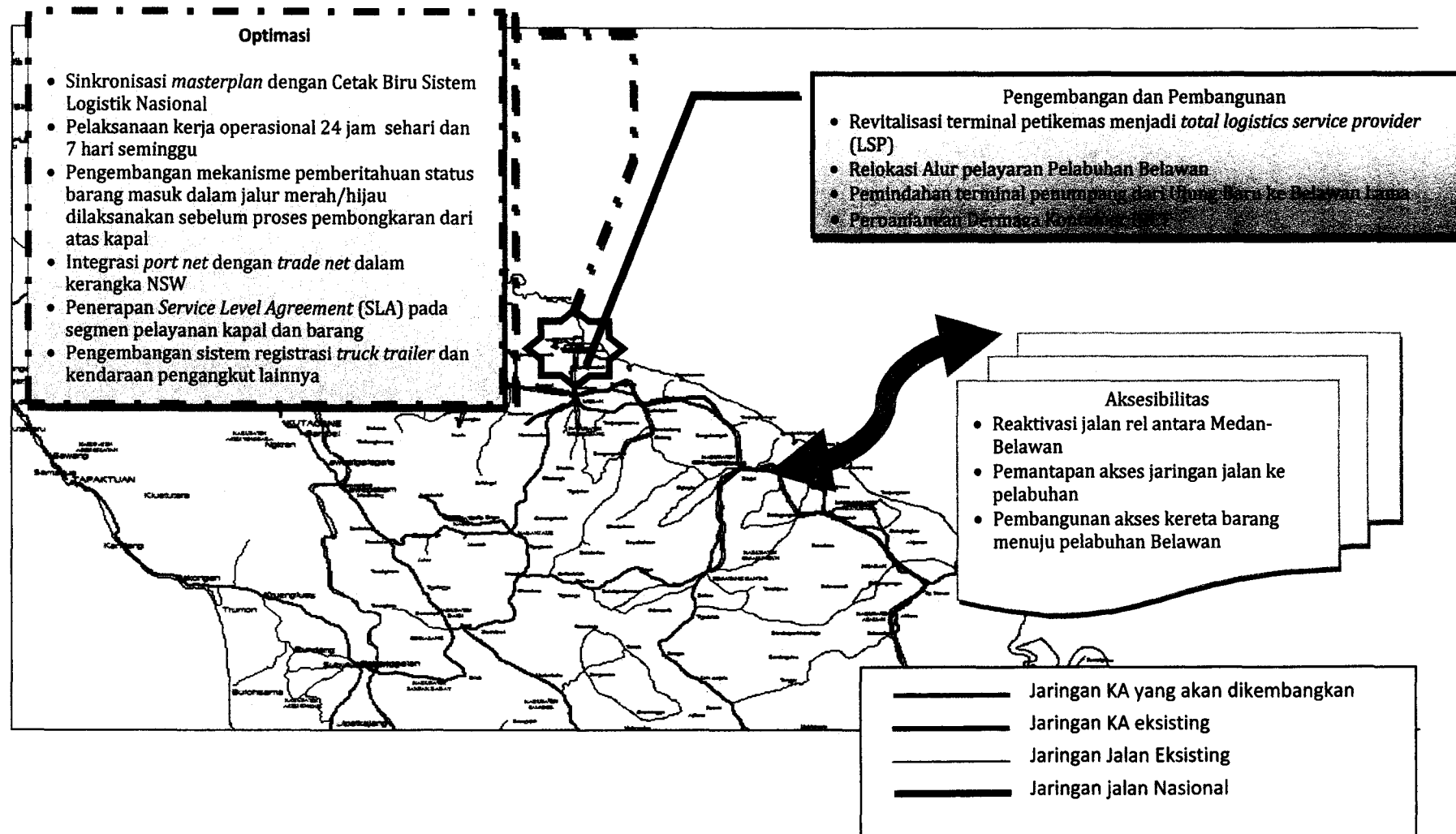
NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang 	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Papua								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
Pengembangan dan Pembangunan													
	<ul style="list-style-type: none"> Perkuatan, replacement dan perpanjangan dermaga serta pemasangan alat B/M peti kemas untuk pelayanan peti kemas 	Tersedianya dermaga dan alat B/M peti kemas	Meningkatnya kapasitas dan kecepatan pelayanan bongkar muat dan Menurunnya biaya operasional pengguna jasa	Papua								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut
	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan <i>Luffing Crane</i> (<i>Ship to Shore Crane</i>) untuk kegiatan Bongkar Muat Petikemas di pelabuhan <i>eksisting</i> 	Tersedianya fasilitas dan peralatan B/M (<i>Level Luffing Crane</i>)	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan	Papua								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut, PBM
	<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan dermaga untuk pelayanan petikemas dan <i>multipurpose</i> 	Tersedianya dermaga petikemas dan <i>multipurpose</i>	Meningkatnya kapasitas dan kecepatan pelayanan bongkar muat dan Menurunnya biaya operasional pengguna jasa	Papua								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut,
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pembangunan lapangan petikemas 	Tersedianya lapangan peti kemas	Meningkatnya pelayanan	Papua								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Papua
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pelabuhan jangka panjang di Depapre 	Tersedianya pelabuhan jangka panjang	Meningkatnya pelayanan	Papua								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut, Pemkot Papua
Aksesibilitas													
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pematapan akses jaringan jalan ke pelabuhan 	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Papua								Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Papua
25.	PELABUHAN SORONG - PAPUA BARAT												
Optimasi													
	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional 	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Papua Barat								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemkot Sorong, Pemprov Papua Barat
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu 	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Papua Barat								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina,

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal 	Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi	Menurunnya waktu pelayanan kapal dan barang	Papua Barat								Ditjen Bea Cukai	PT.Pelindo IV , Ditjen Phb. Laut, Ditjen Imigrasi, Karantina
	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi <i>port net</i> dengan <i>trade net</i> dalam kerangka NSW 	Peningkatan kecepatan pelayanan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Menurunnya waktu dan biaya pengurusan dokumen kapal dan barang ekspor/impor	Papua Barat								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV , Ditjen Bea Cukai, Kemendag, Ditjen Imigrasi, Karantina
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut lainnya 	Tersedianya registrasi <i>truck trailer</i> dan kendaraan pengangkut.	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran operasional kendaraan di pelabuhan	Papua Barat								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemkot Sorong, Ditjen Phb. Darat.
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang 	Tersedianya standard kinerja pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan pelabuhan	Papua Barat								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
Pengembangan dan Pembangunan													
	<ul style="list-style-type: none"> Perkuatan,perpanjangan dermaga dan pemasangan alat B/M peti kemas untuk pelayanan peti kemas 	Tersedianya dermaga dan alat B/M peti kemas	Meningkatnya kapasitas dan kecepatan pelayanan bongkar muat dan Menurunnya biaya operasional pengguna jasa	Papua Barat								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan lapangan penumpukan petikemas dan pembangunan ICD 	Tersedianya lapangan penumpukan peti kemas seluas 5 Ha	Meningkatnya kapasitas pelayanan	Papua Barat								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut
	<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan <i>Luffing Crane (Ship to Shore Crane)</i> untuk kegiatan bongkar muat petikemas 	Tersedianya 1 unit <i>Luffing Crane (Ship to Shore Crane)</i>	Meningkatnya kapasitas pelayanan	Papua Barat								PT.Pelindo IV	Ditjen Phb. Laut
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Pelabuhan Jangka Panjang di Arar, Kabupaten Sorong 	Tersedianya pelabuhan untuk jangka panjang	Meningkatnya kapasitas dan kecepatan pelayanan bongkar muat	Papua Barat								Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV
Aksesibilitas													
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan 	Tersedianya akses jaringan jalan	Meningkatnya kelancaran arus angkutan barang	Papua Barat								Ditjen Bina Marga	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Sorong

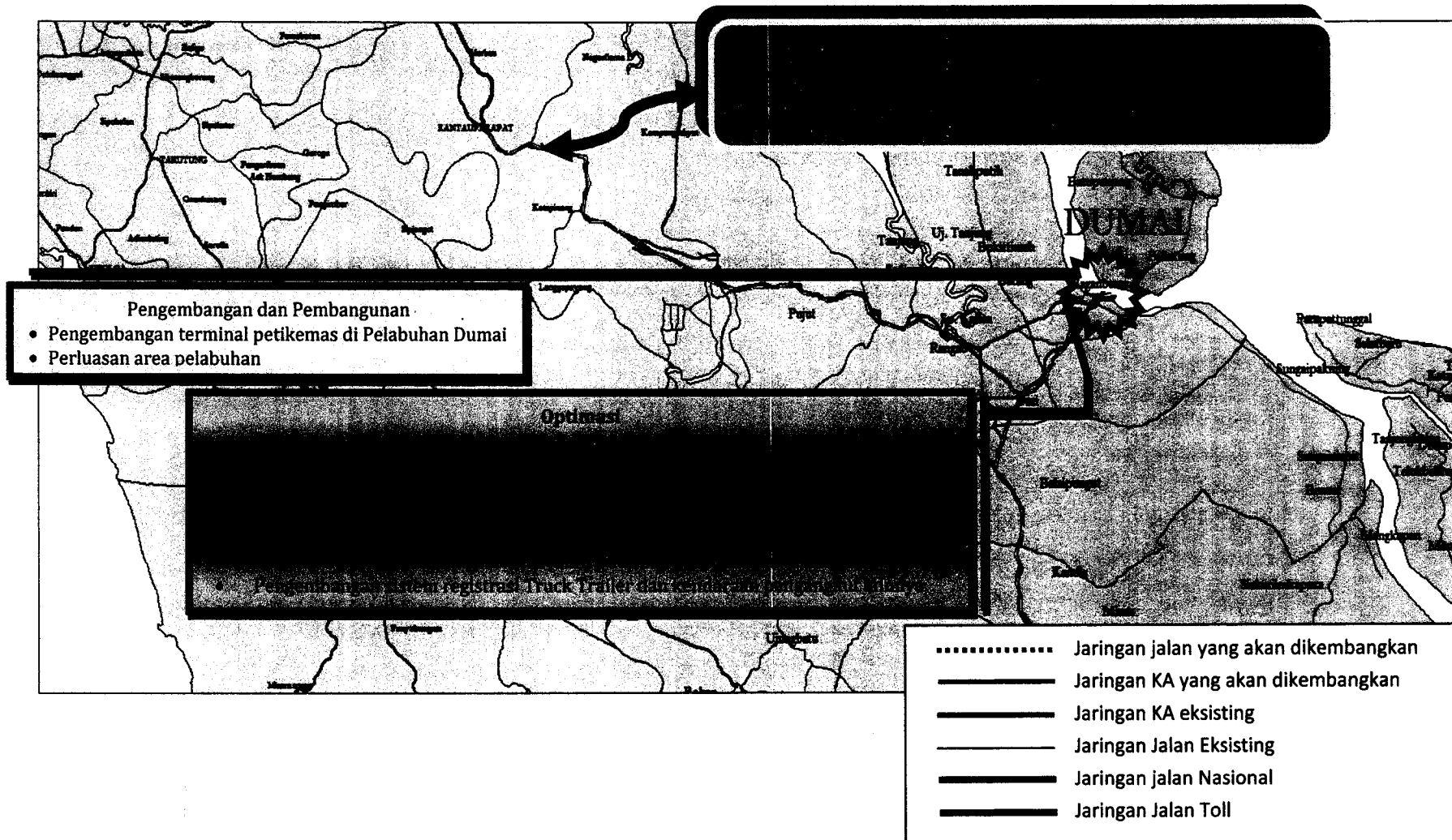
GAMBAR L1-1 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN LHOKSEUMAWE – NANGGROE ACEH DARUSSALAM



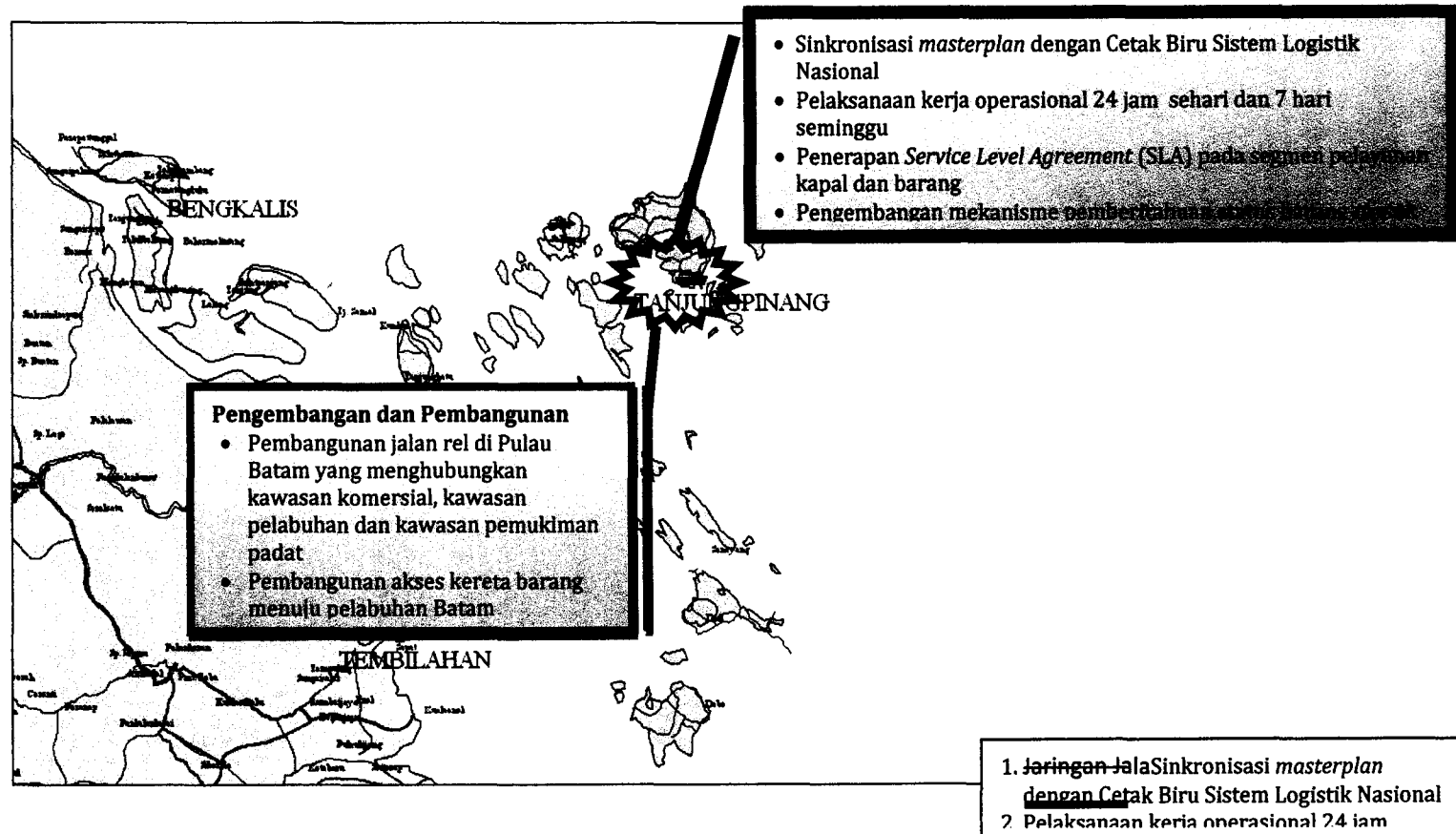
GAMBAR L1-2 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN BELAWAN – SUMATERA UTARA



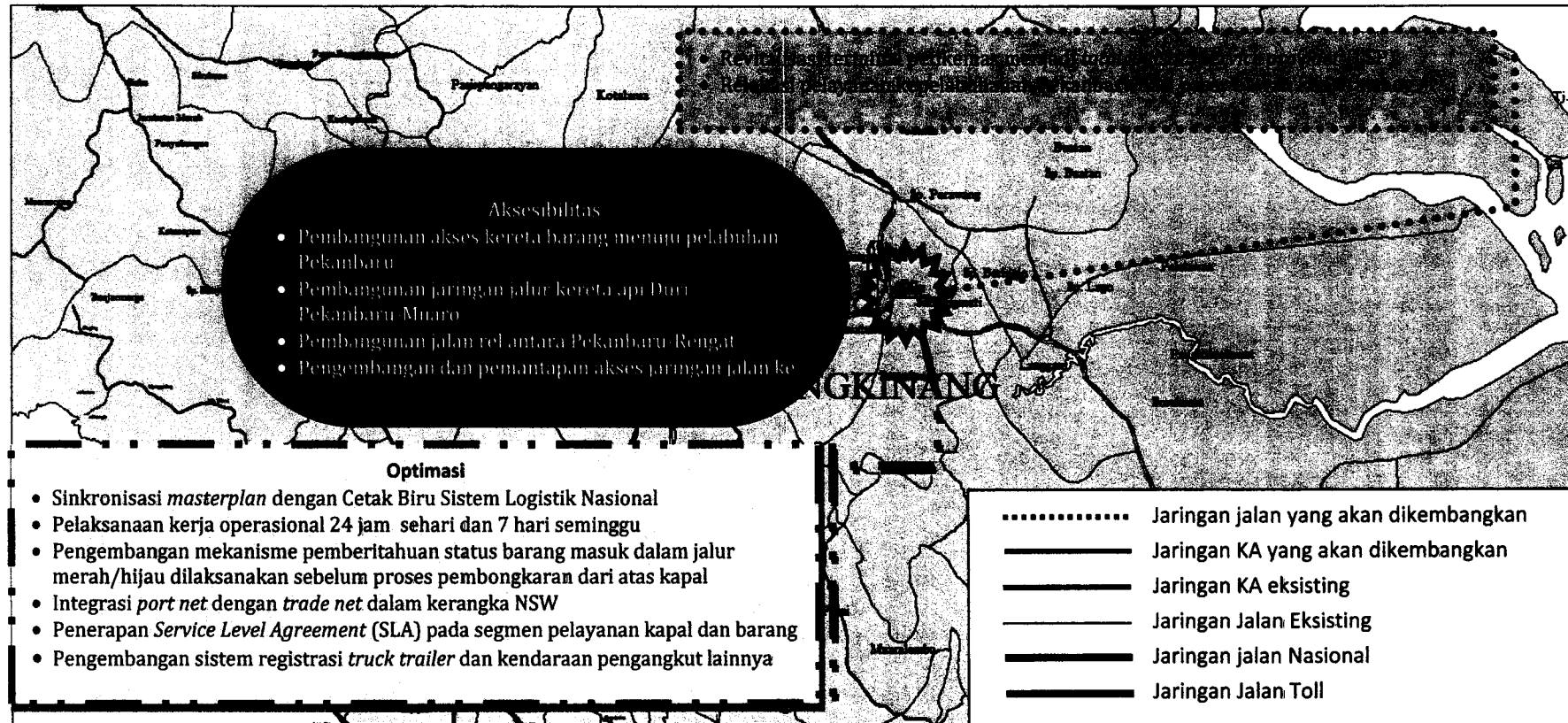
GAMBAR L1-3 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN DUMAI - RIAU



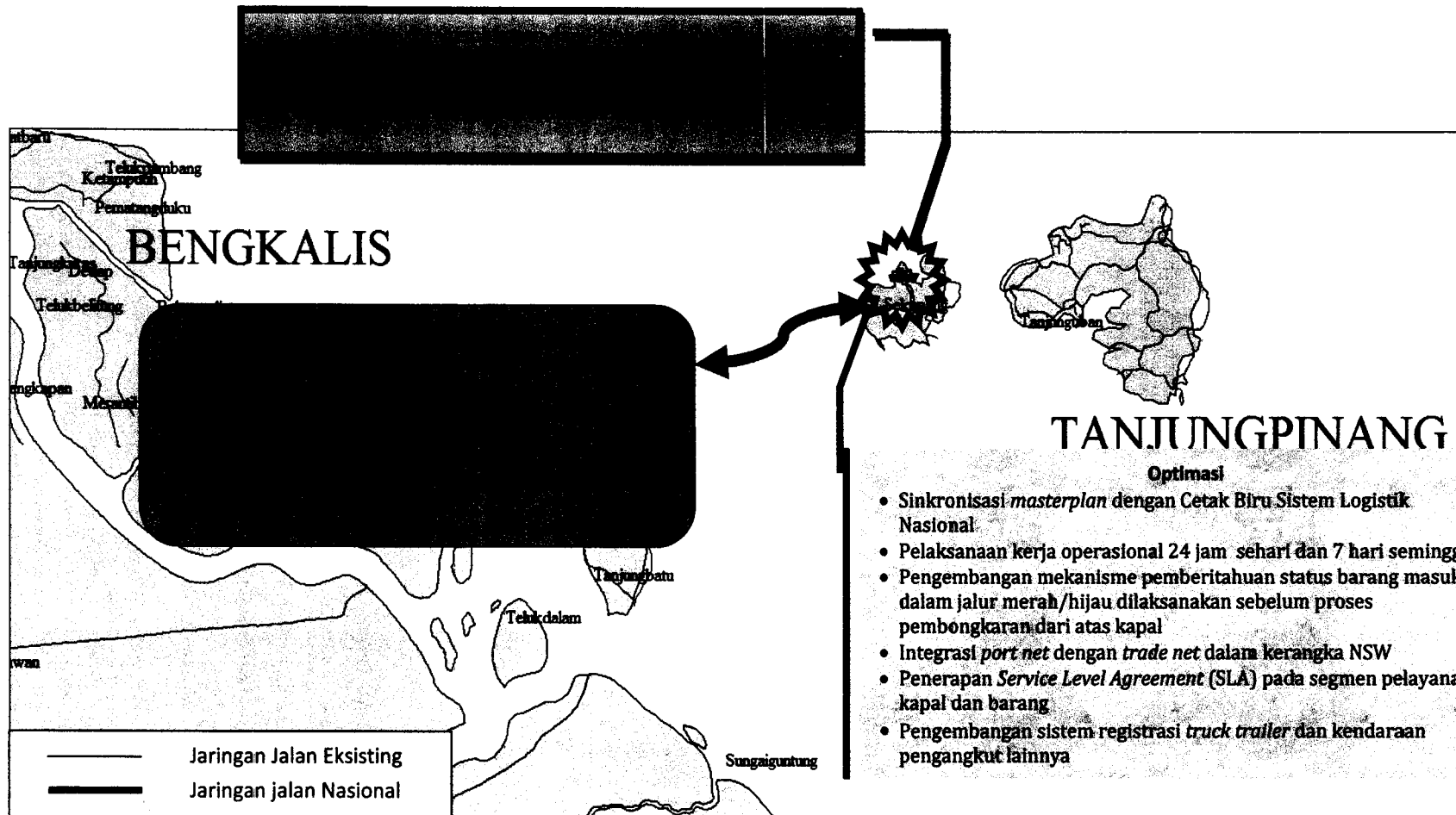
GAMBAR L1-4 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN TANJUNG PINANG – KEPULAUAN RIAU



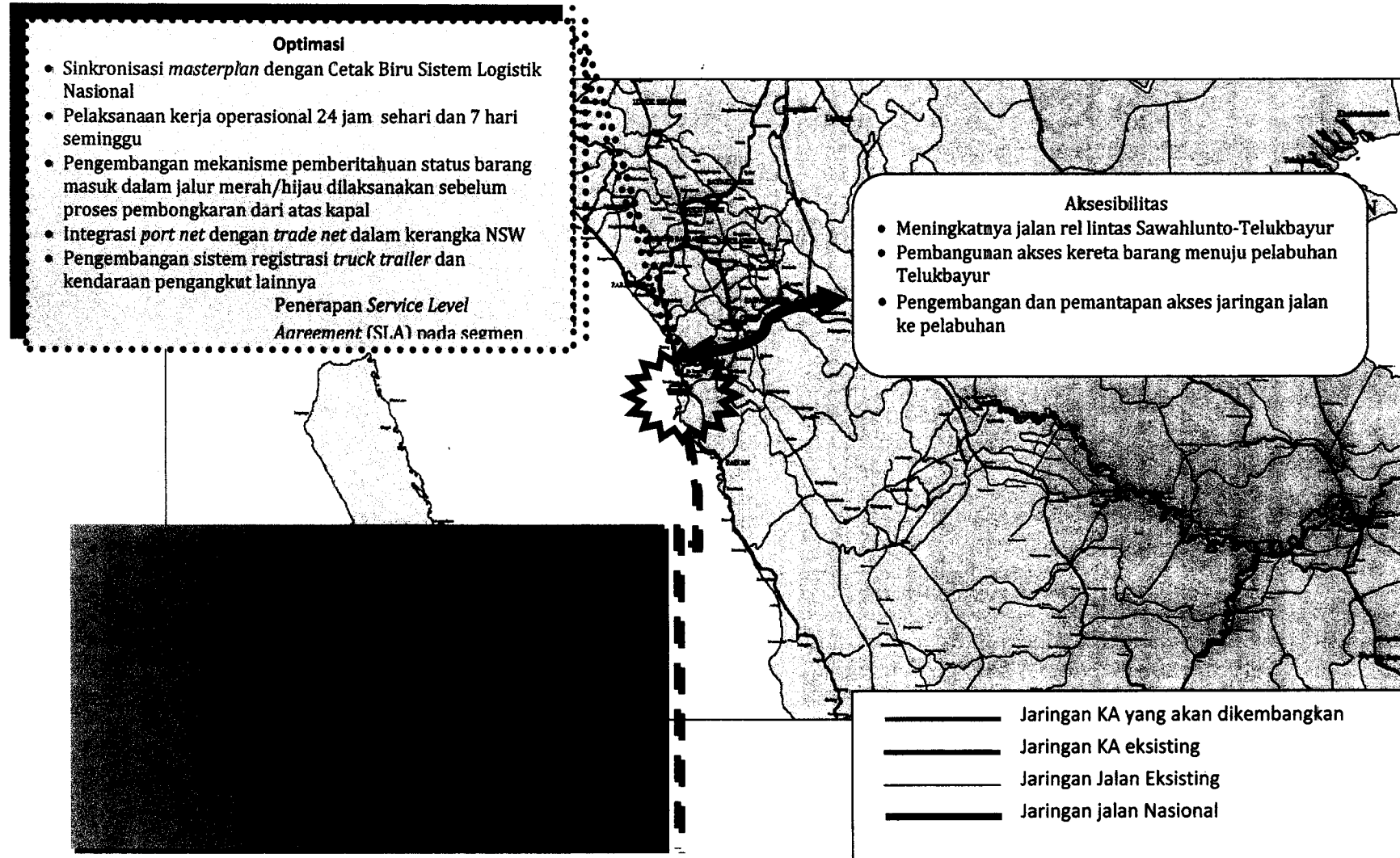
GAMBAR L1-5 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN PEKAN BARU - RIAU



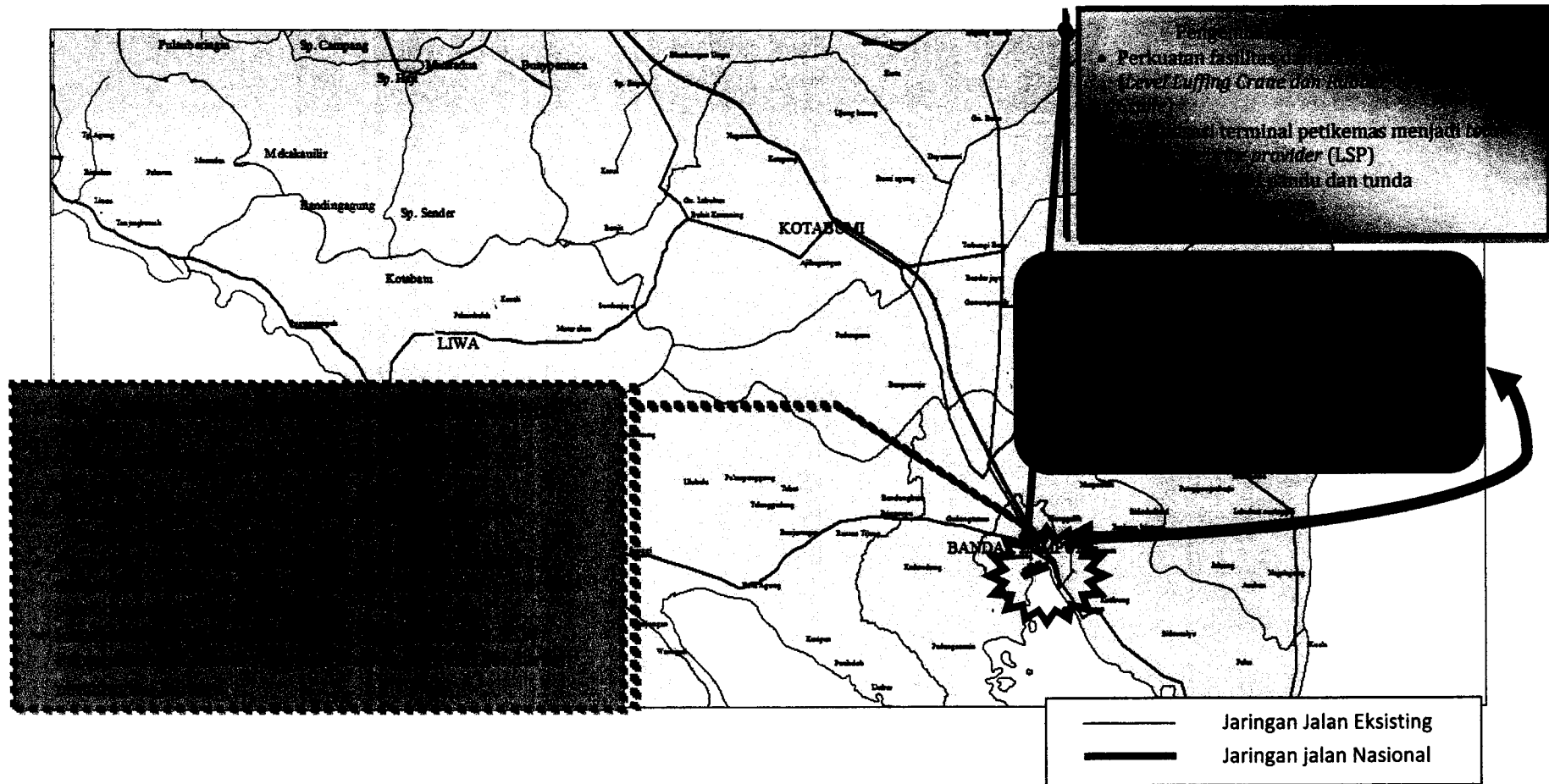
GAMBAR L1-6 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN BATAM - KEPULAUAN RIAU



GAMBAR L1-7 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN TELUK BAYUR – SUMATERA BARAT

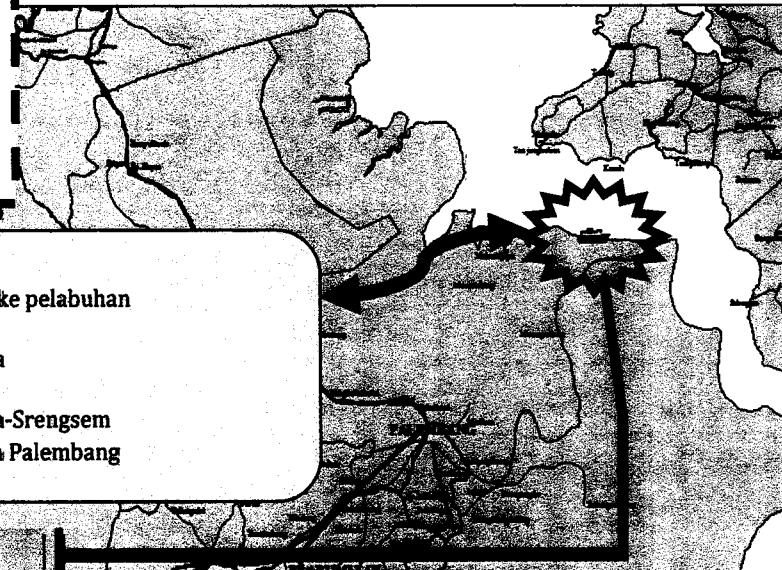


GAMBAR L1-8 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN PANJANG - LAMPUNG



**GAMBAR L1-9 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG
DI PALEMBANG - SUMATERA SELATAN**

- Sinkronisasi *masterplan* dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional
- Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu
- Penerapan *Service Level Agreement* (SLA) pada segmen pelayanan kapal dan barang
- Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses pembongkaran dari atas kapal
- Integrasi *port net* dengan *trade net* dalam kerangka NSW
- Pengembangan sistem registrasi *truck trailer* dan kendaraan pengangkut lainnya
- Pengembangan angkutan batubara melalui S. Musi



Aksesibilitas

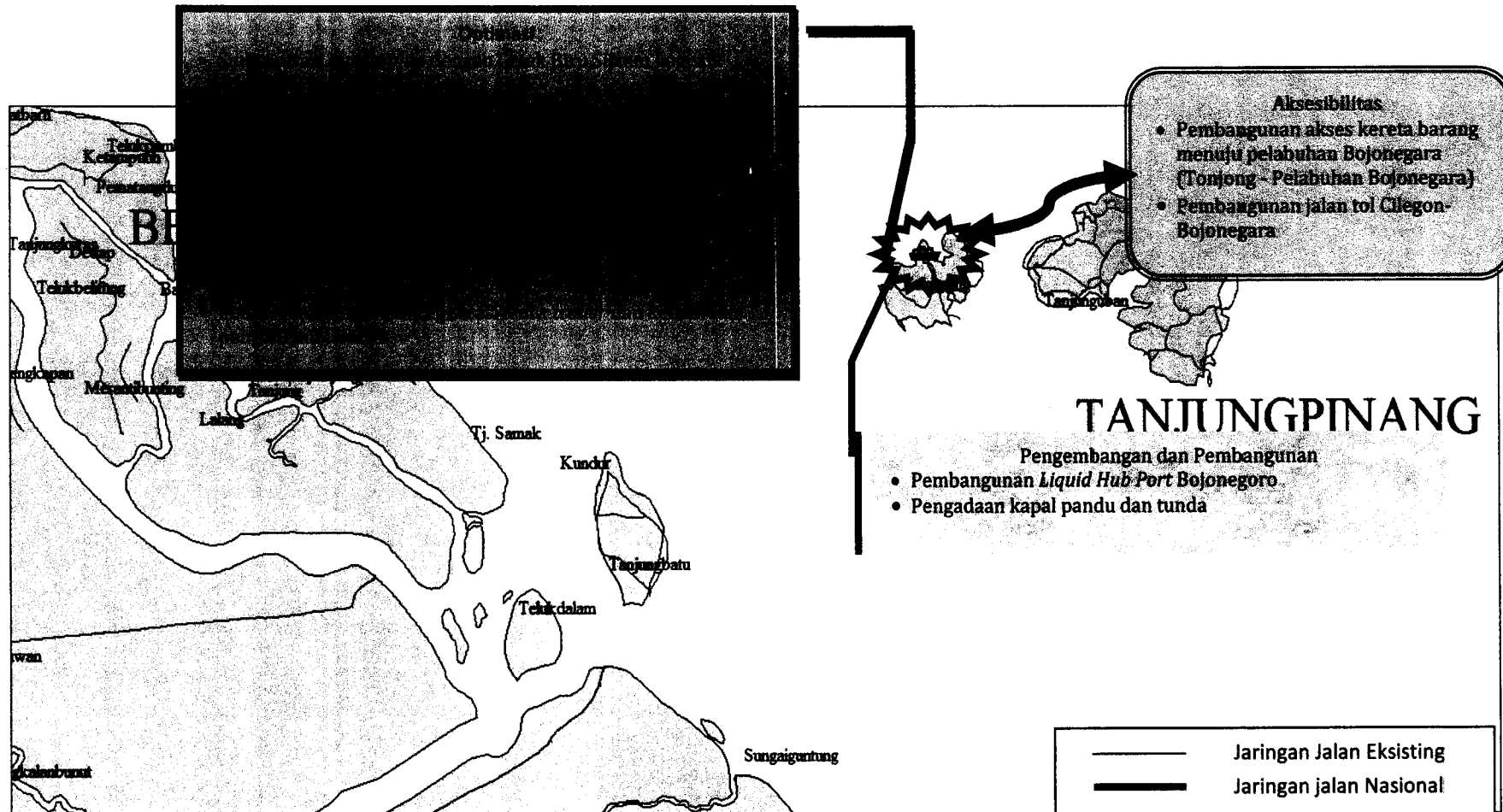
- Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan
- Pembangunan jalur ganda Martapura-Tigagajah
- Pembangunan *shortcut* KA Batubara Tj. Enim-Baturaja
- Pembangunan jalur ganda antara Sukacinta-Kertapati
- Pembangunan jalur KA Batubara antara Tanjung Enim-Srengsem
- Pembangunan akses kereta barang menuju Pelabuhan Palembang

Pengembangan dan Pembangunan

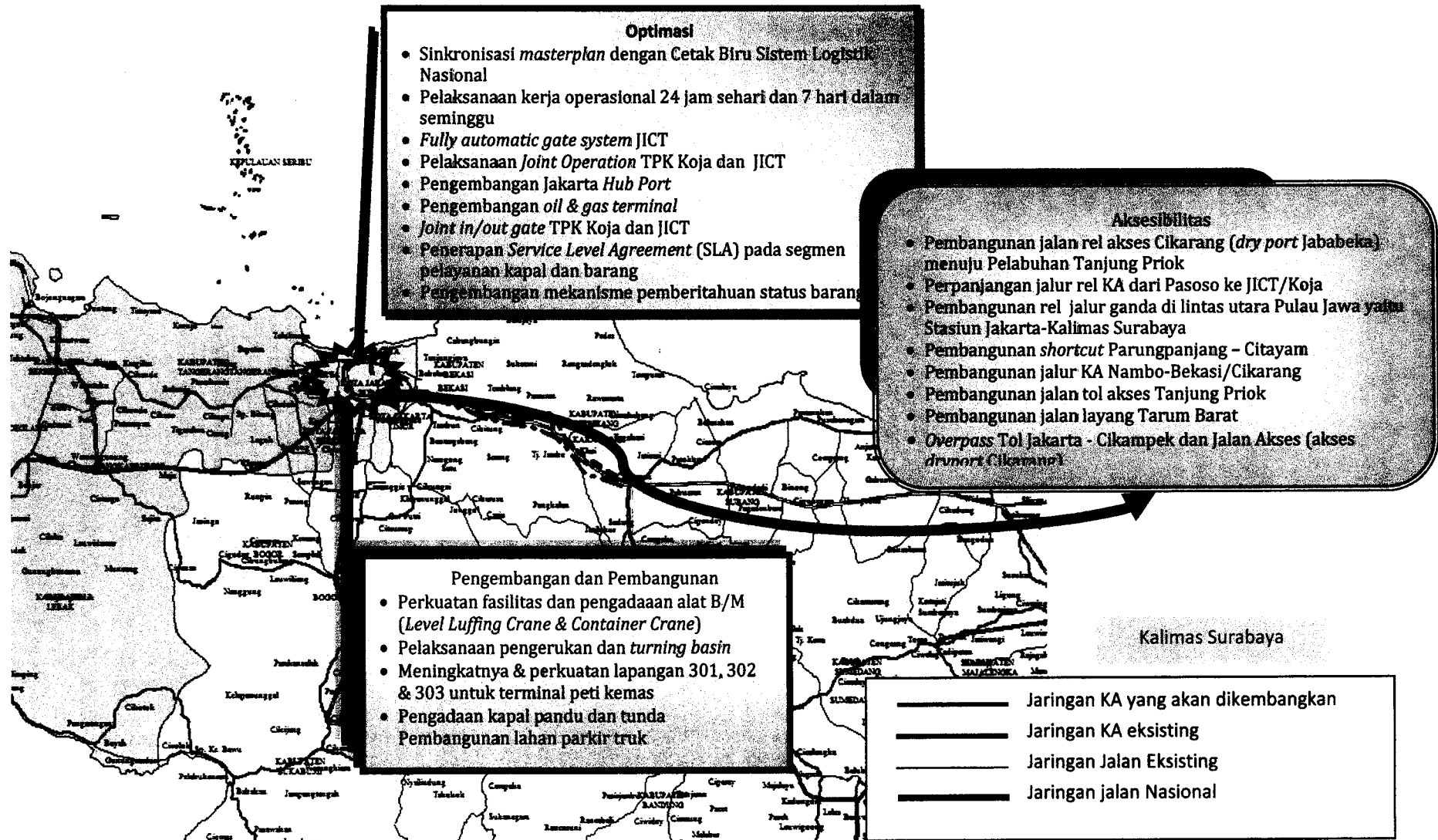
- Revitalisasi terminal petikemas menjadi *total logistics service provider* (LSP)
- Perkuatan fasilitas dan pengadaan alat B/M (*Level Luffing Crane* dan *Rail-Mounted Gantry Crane*)
- Pelaksanaan pengerukan alur
- Pengadaan kapal pandu dan tunda

- Jaringan jalan yang akan dikembangkan
- Jaringan KA yang akan dikembangkan
- Jaringan KA eksisting
- Jaringan Jalan Eksisting
- Jaringan jalan Nasional
- Jaringan Jalan Toll

GAMBAR L1-10 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN BANTEN - BANTEN

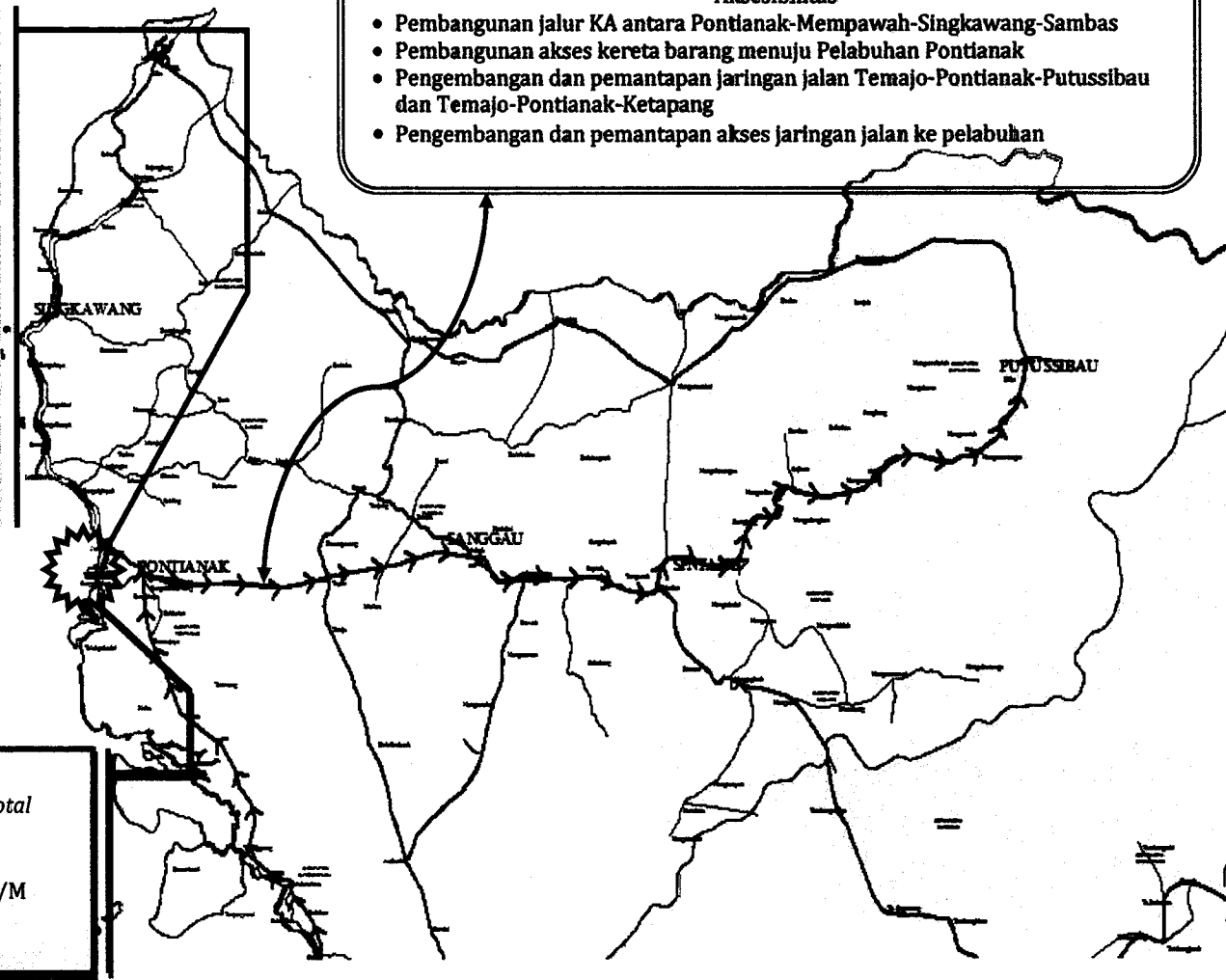


**GAMBAR L1-11 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG
DIPELABUHAN TANJUNG PRIOK**



**GAMBAR L1-12 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG
DIPELABUHAN PONTIANAK - KALIMANTAN BARAT**

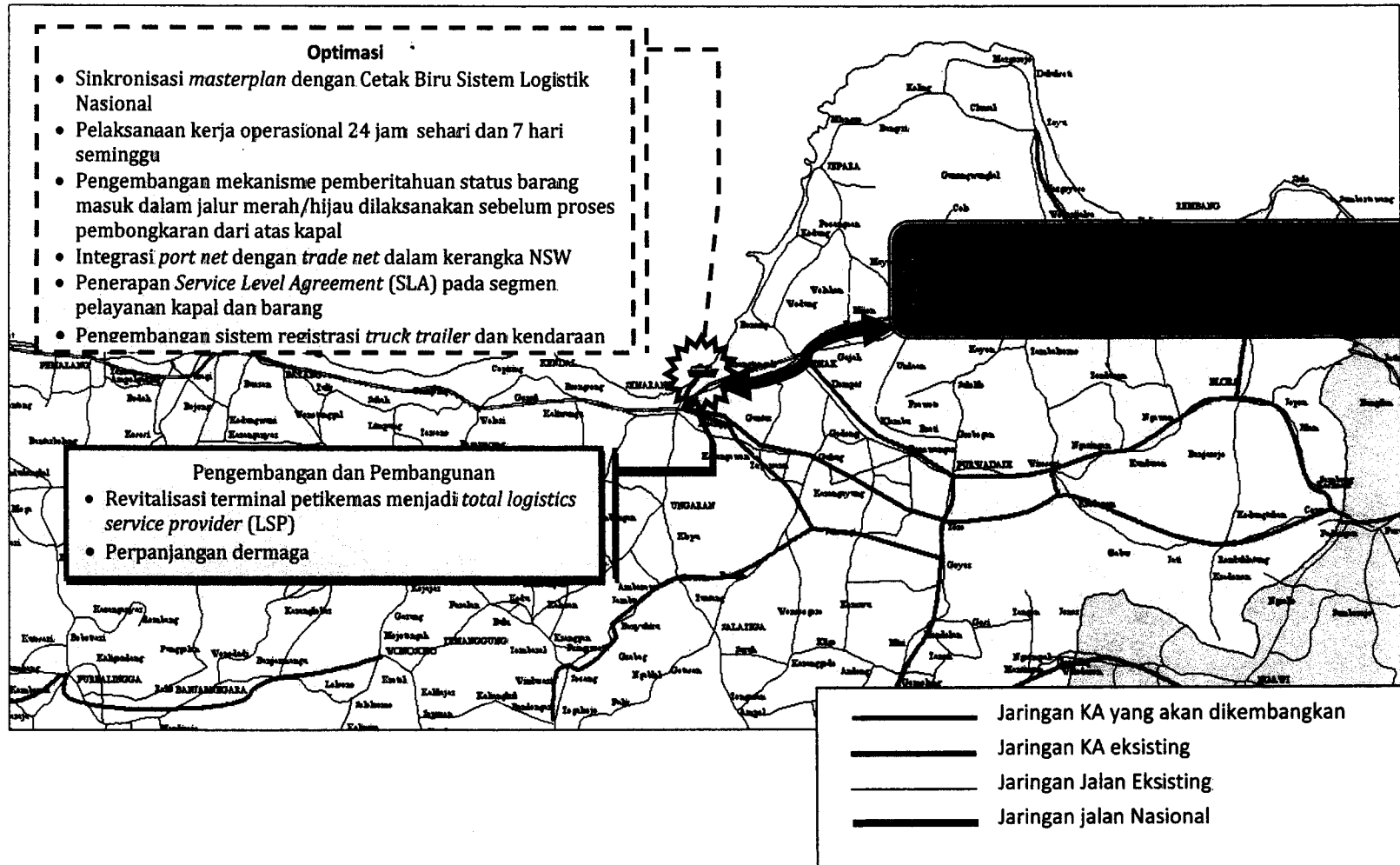
- Optimasi**
- Sinkronisasi *masterplan* dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional
 - Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu
 - Penerapan *Service Level Agreement (SLA)* pada segmen pelayanan kapal dan barang
 - Pelaksanaan pengerukan
 - Pengembangan mekanisme pemberitahuan status barang masuk dalam jalur merah/hijau dilaksanakan sebelum proses perabongkaran dari atas kapal
 - Integrasi *port net* dengan *trade net* dalam kerangka NSW
- Pengembangan sistem registrasi truck trailer dan



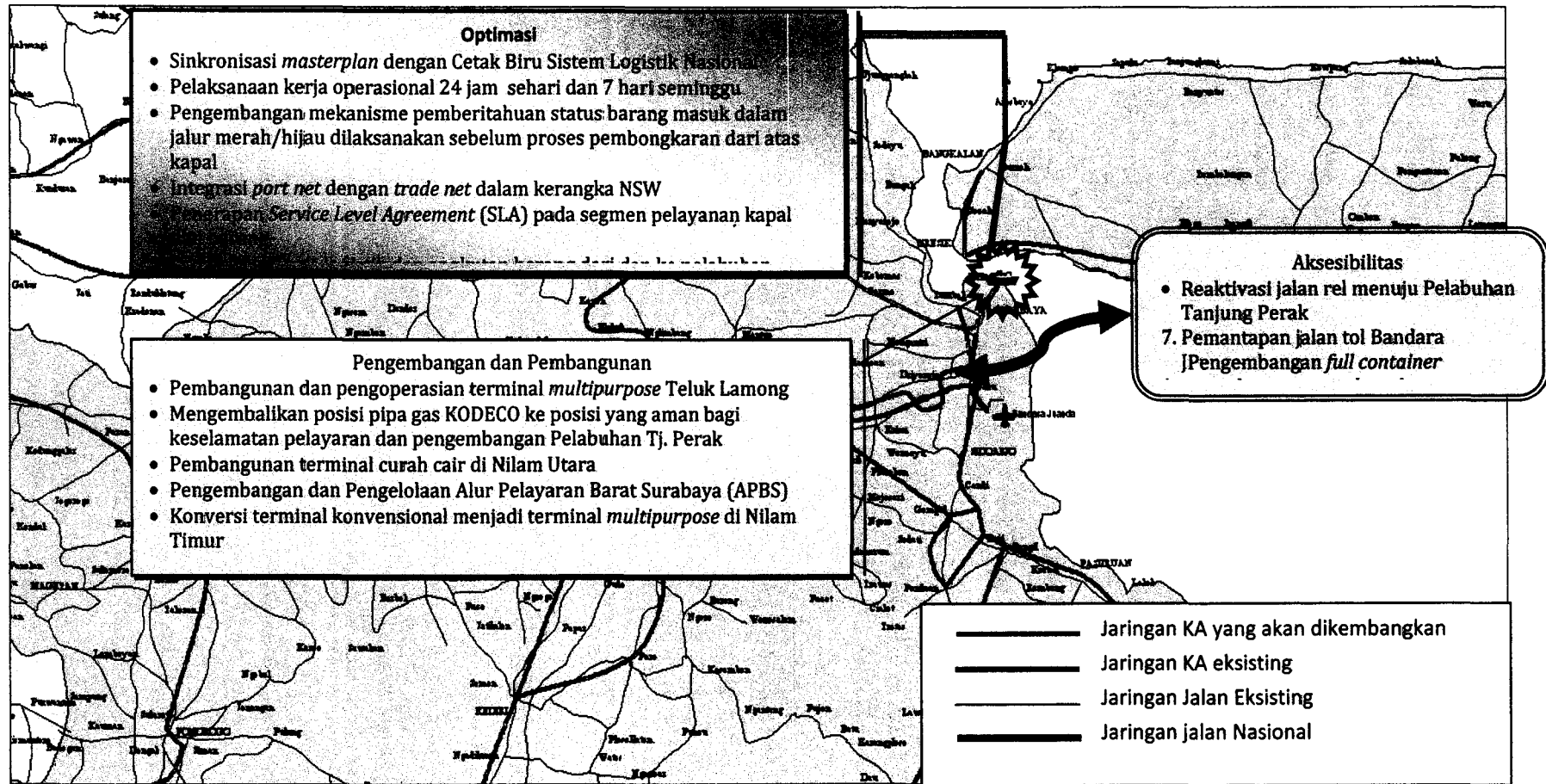
- Aksesibilitas**
- Pembangunan jalur KA antara Pontianak-Mempawah-Singkawang-Sambas
 - Pembangunan akses kereta barang menuju Pelabuhan Pontianak
 - Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan Temajo-Pontianak-Putussibau dan Temajo-Pontianak-Ketapang
 - Pengembangan dan pemantapan akses jaringan jalan ke pelabuhan

- Pengembangan dan Pembangunan**
- Revitalisasi terminal petikemas menjadi *total logistics service provider (LSP)*
 - Pengadaan kapal pandu dan tunda
 - Perkuatan fasilitas dan pengadaan alat B/M (*Level Luffing Crane dan Container Crane*)

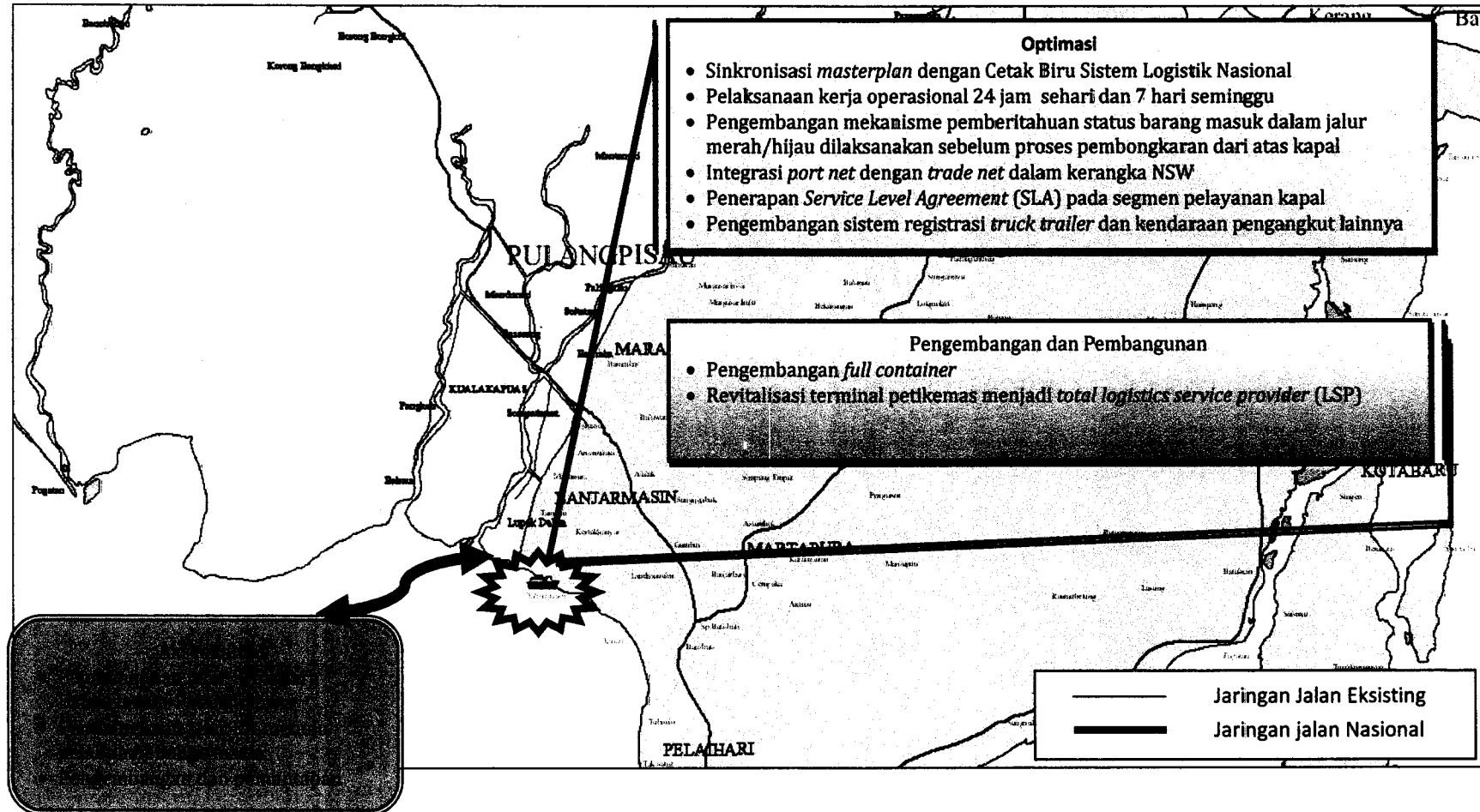
GAMBAR L1-13 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN TANJUNG EMAS - JAWA TENGAH



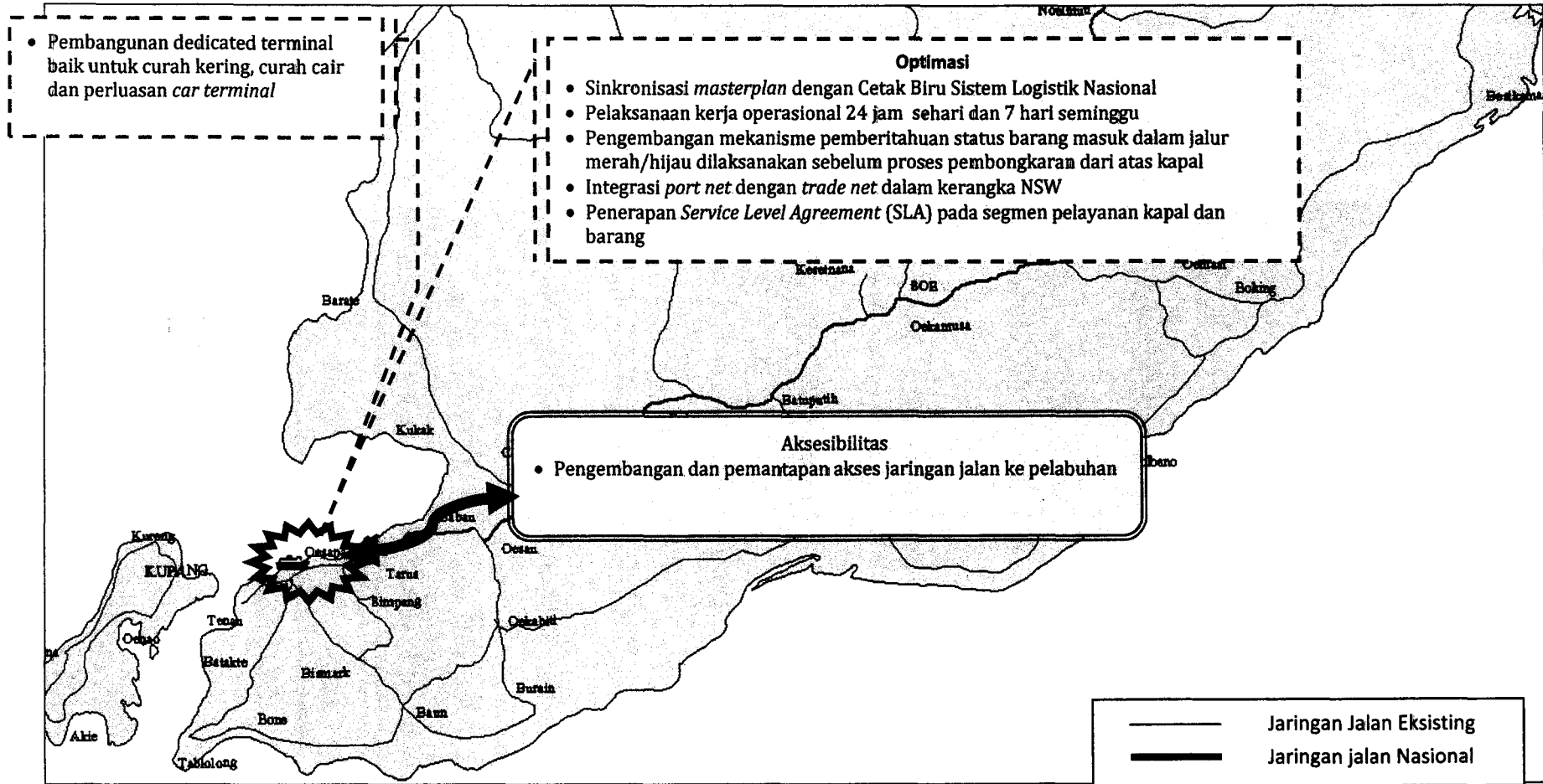
GAMBAR L1-14 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN TANJUNG PERAK - JAWA TIMUR



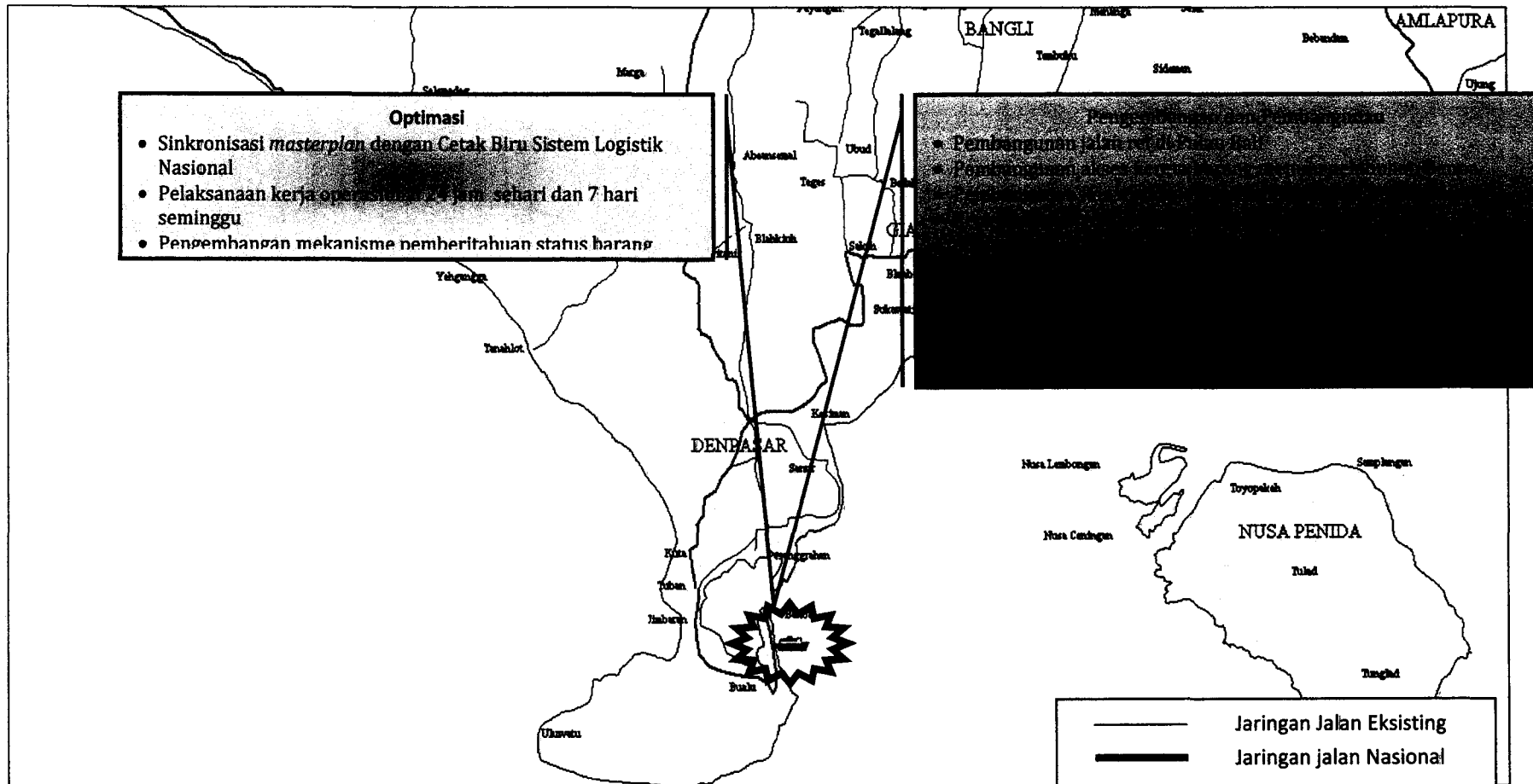
GAMBAR L1-15 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DIPELABUHAN BANJARMASIN – KALIMANTAN SELATAN



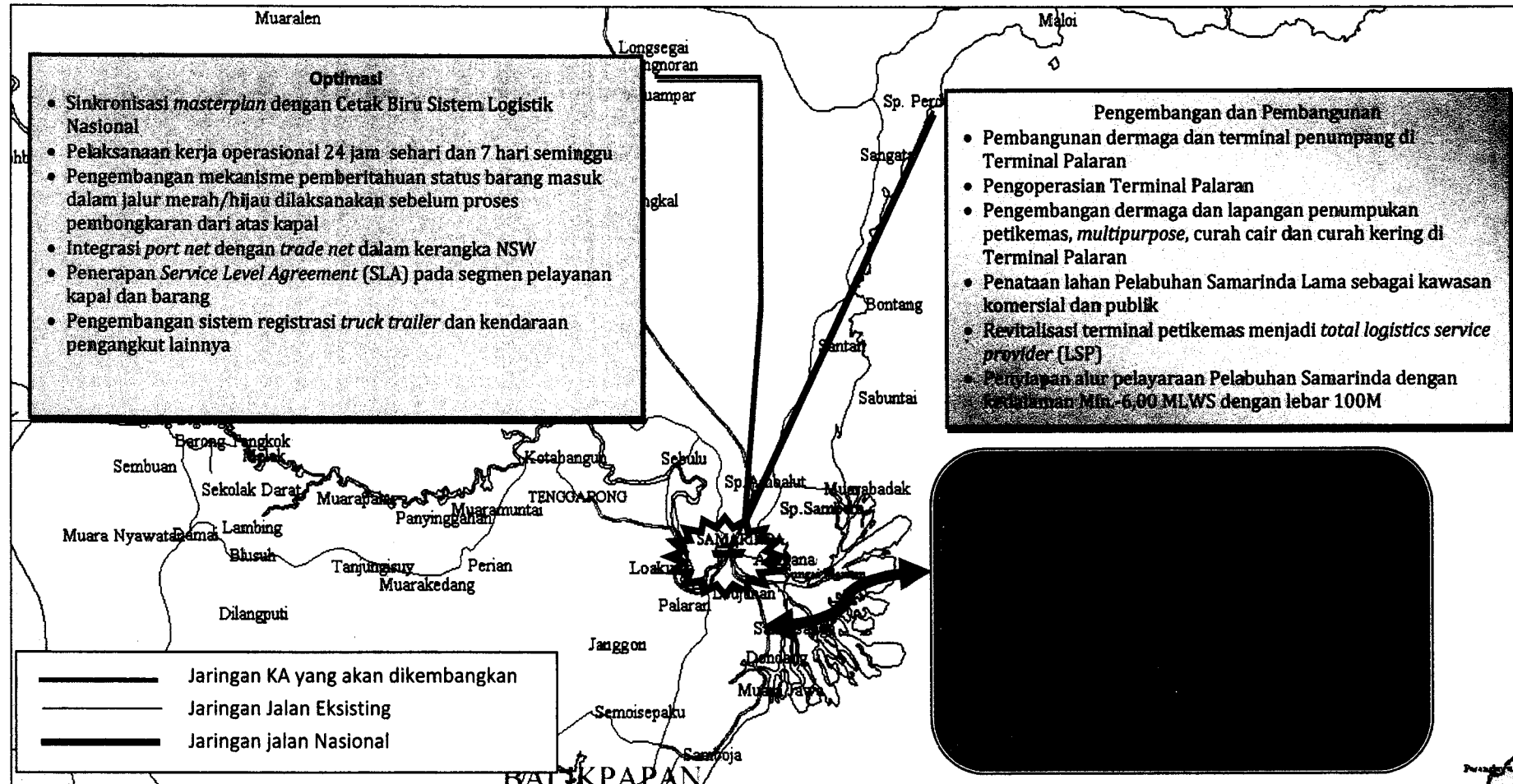
**GAMBAR L1-16 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG
DIPELABUHAN TENAU KUPANG - NUSA TENGGARA TIMUR**



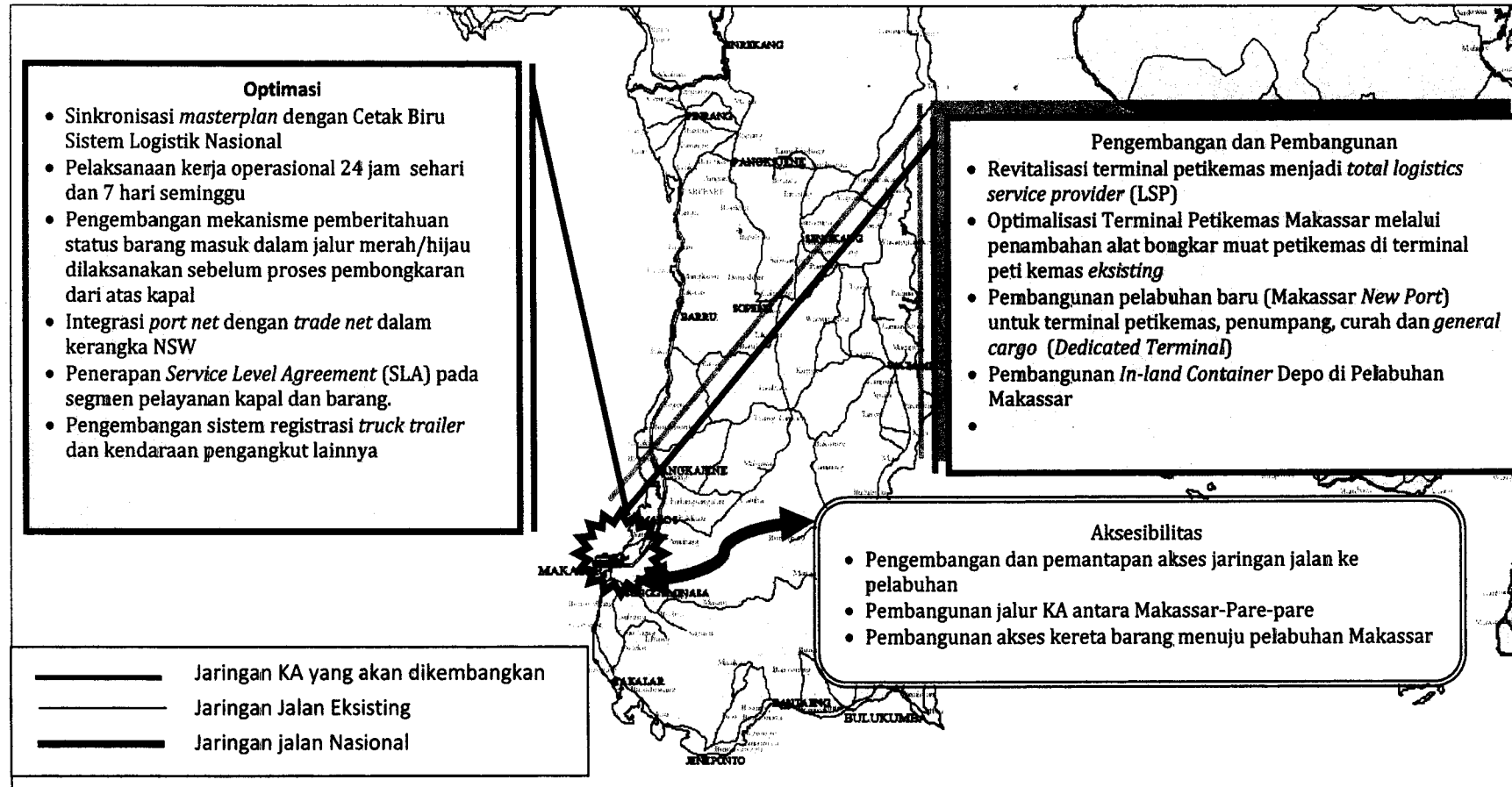
GAMBAR L1-17 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN BENOA - BALI



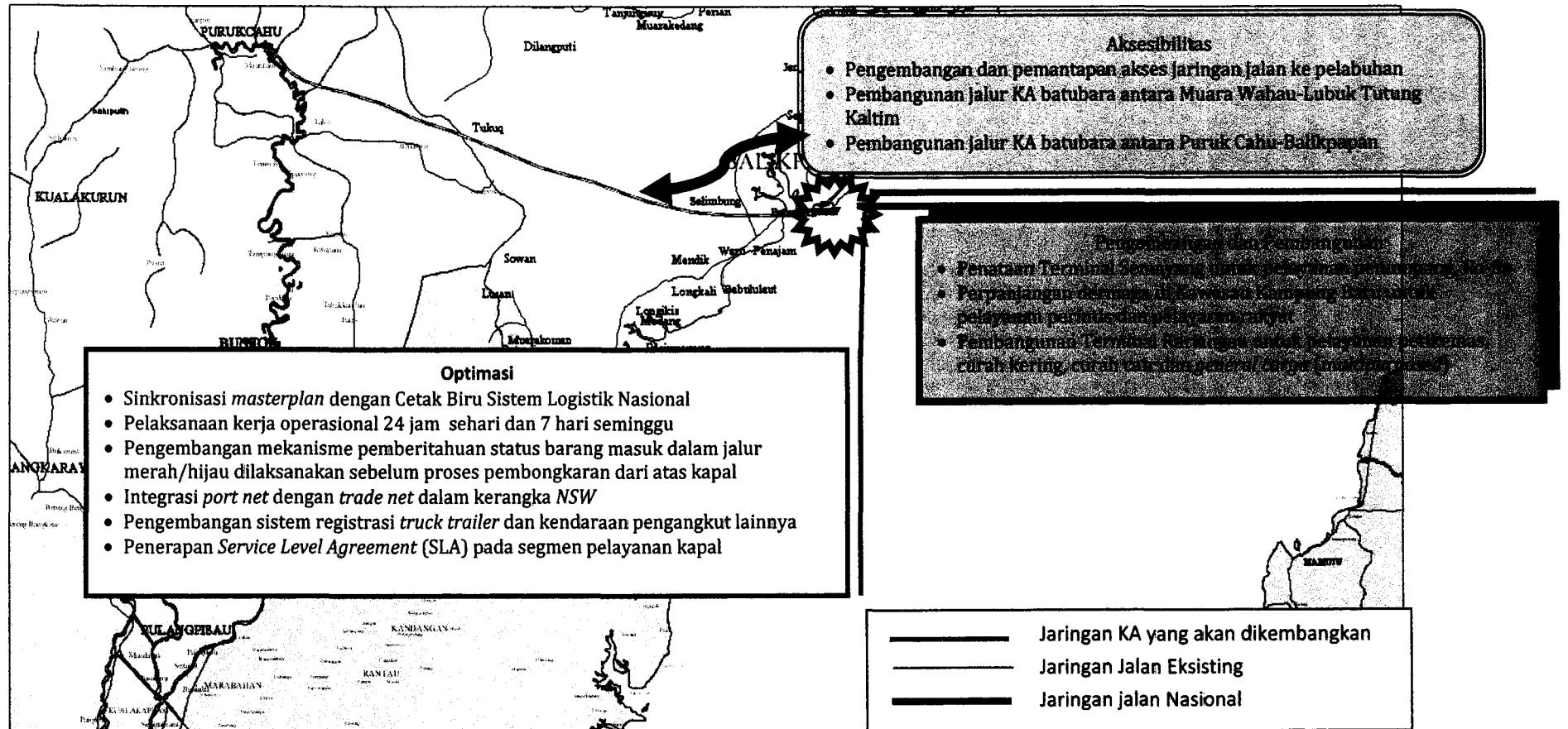
GAMBAR L1-18 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR



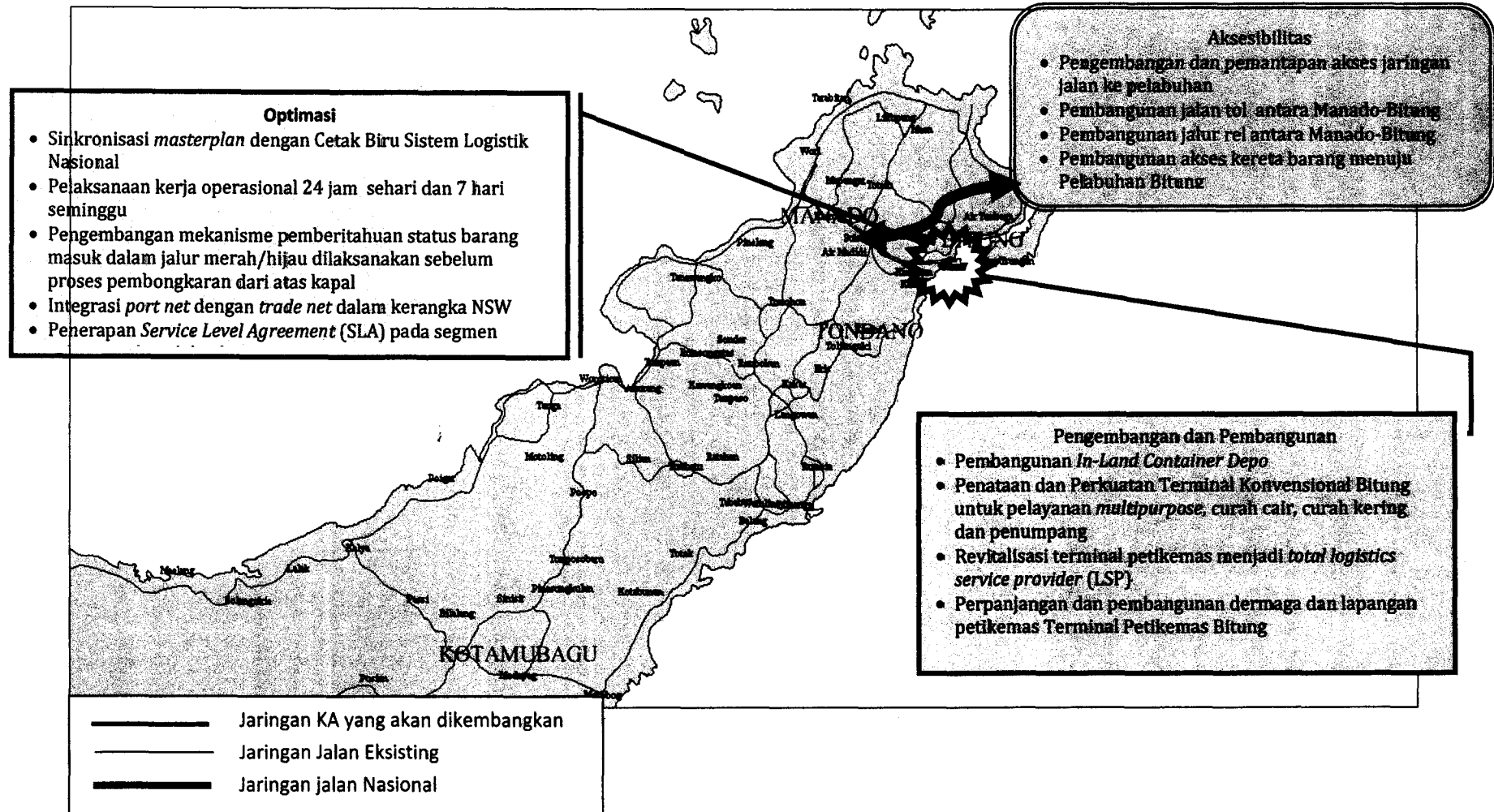
GAMBAR L1-19 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DIPELABUHAN MAKASSAR – SULAWESI SELATAN



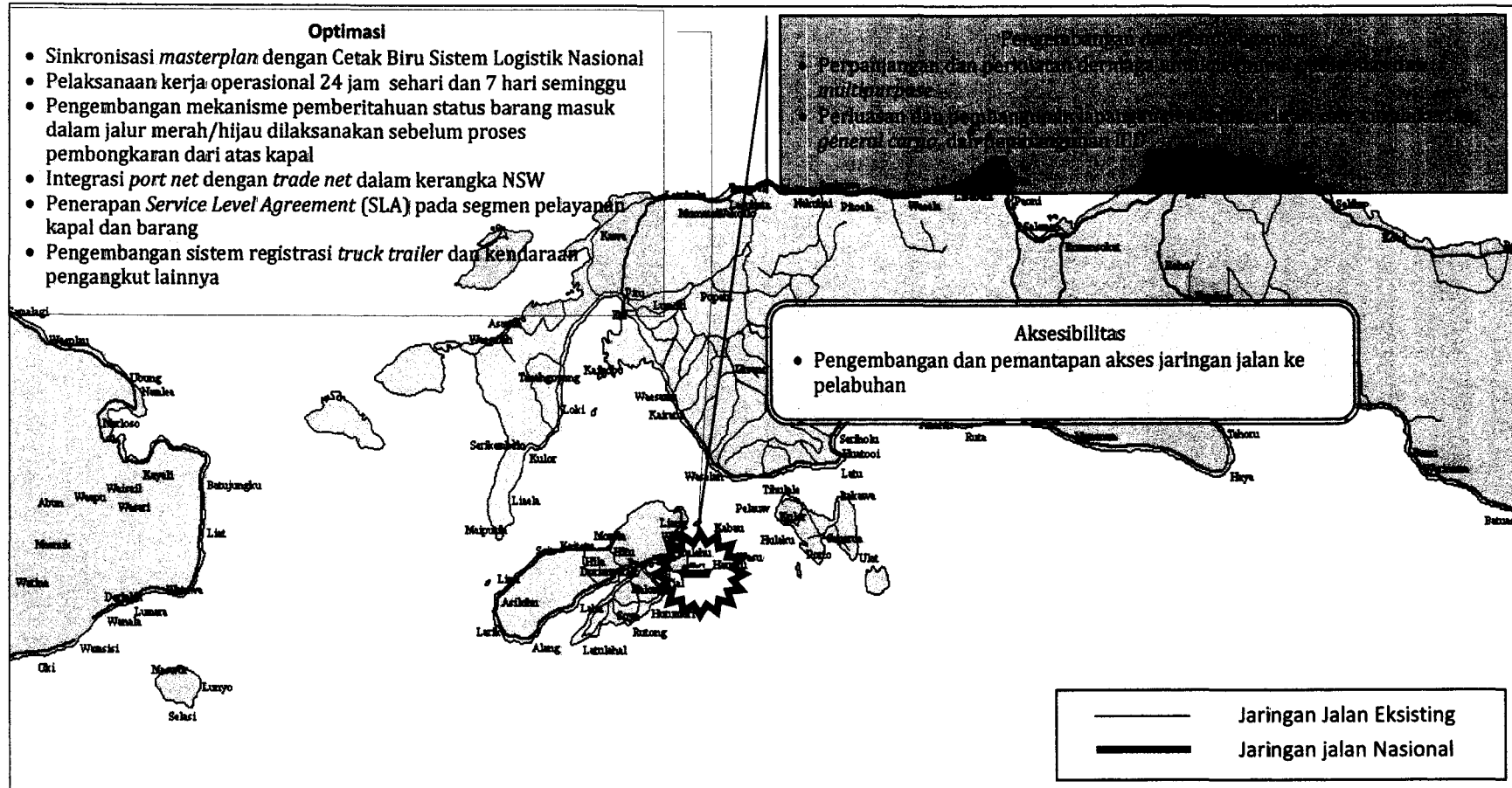
GAMBAR L1-20 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DIPELABUHAN BALIKPAPAN – KALIMANTAN TIMUR



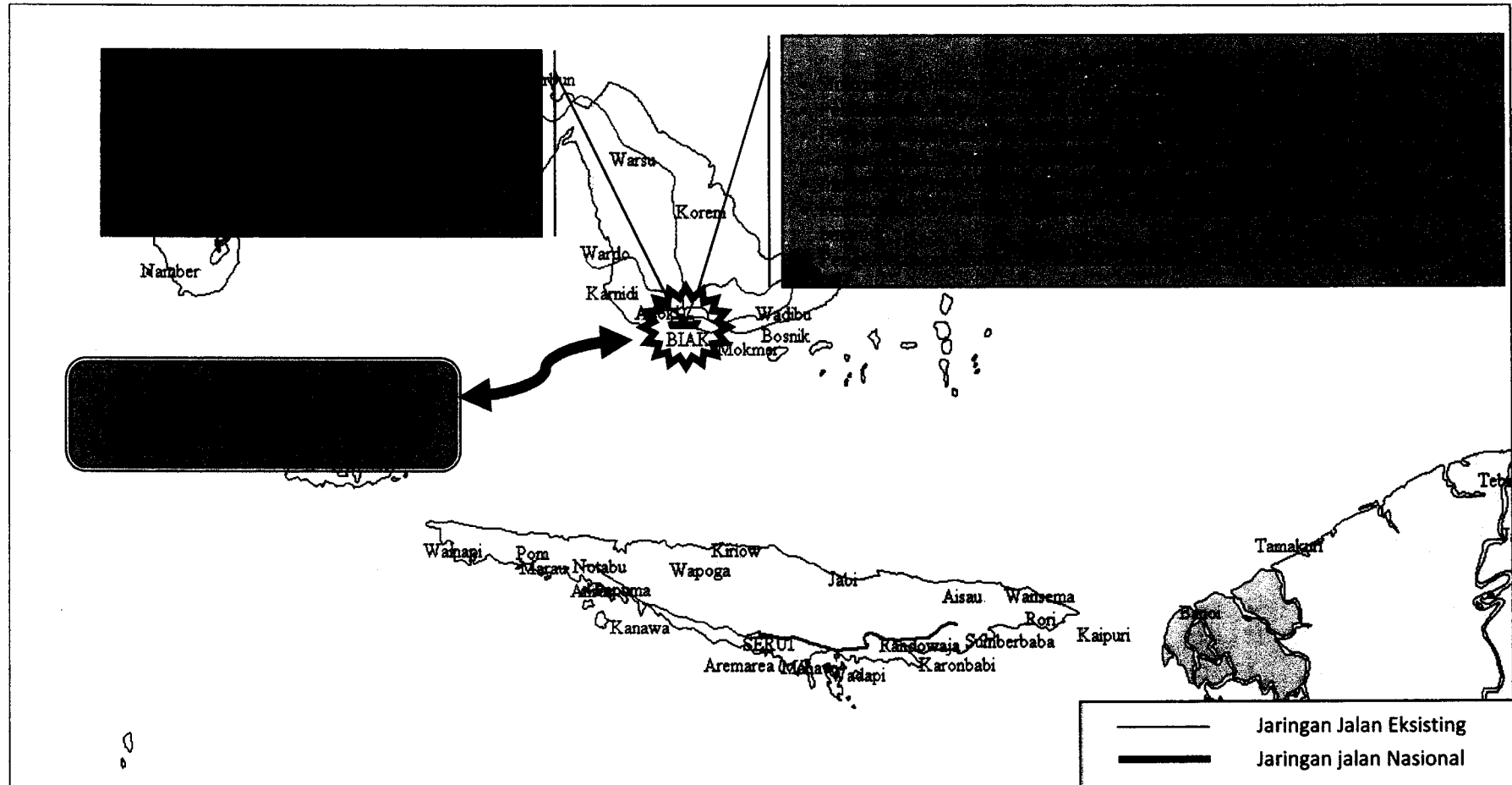
GAMBAR L1-21 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN BITUNG – SULAWESI UTARA



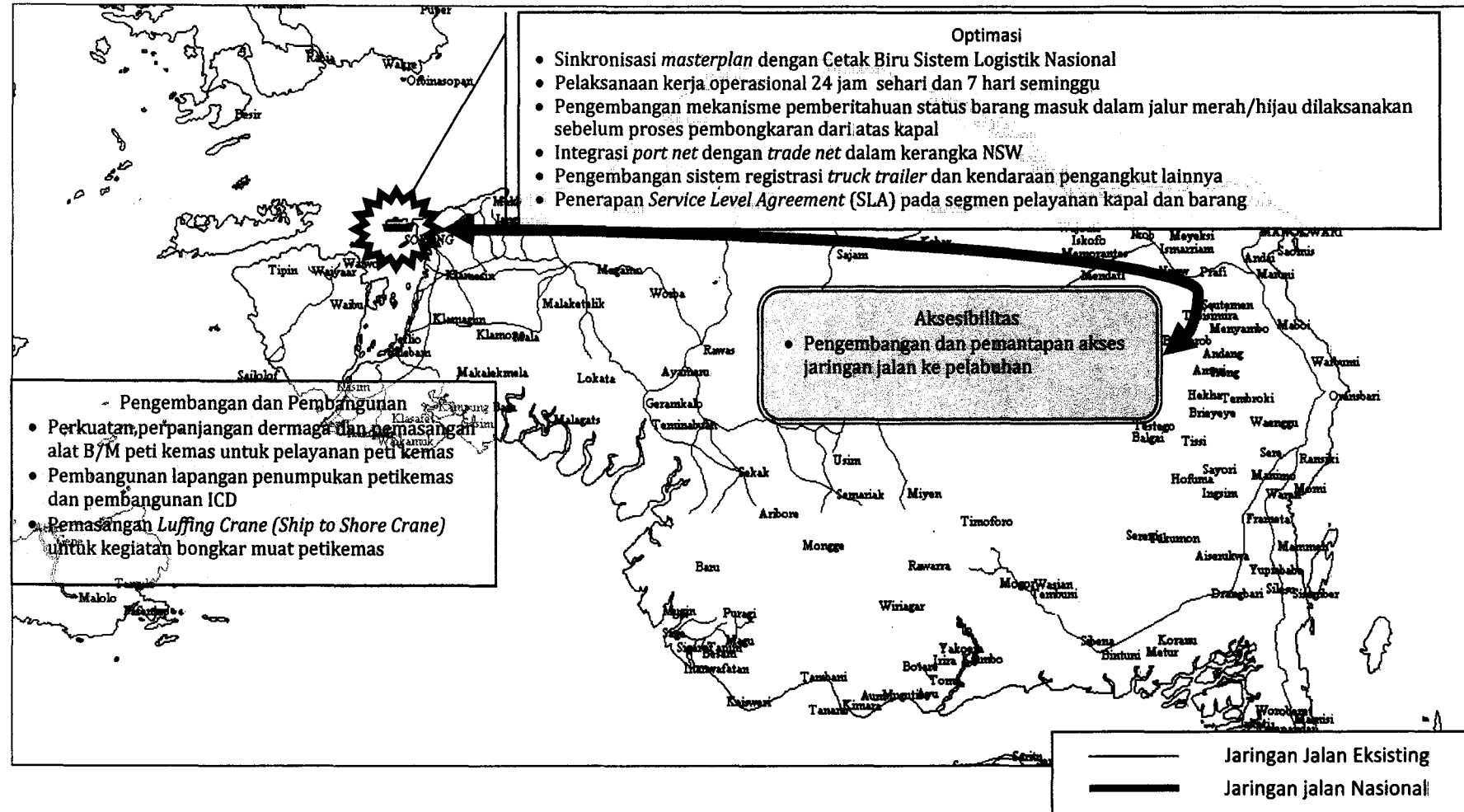
GAMBAR L1-22 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN AMBON - MALUKU



**GAMBAR L1-23 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG
DIPELABUHAN BIAK - PAPUA**



GAMBAR L1-25 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI PELABUHAN SORONG - PAPUA BARAT



LAMPIRAN 2.

**MATRIKS PROGRAM PENGEMBANGAN ANTARMODA/MULTIMODA
UNTUK PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG DI TERMINAL KHUSUS**

LAMPIRAN 2.
MATRIKS PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA
UNTUK PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG DI TERMINAL KHUSUS

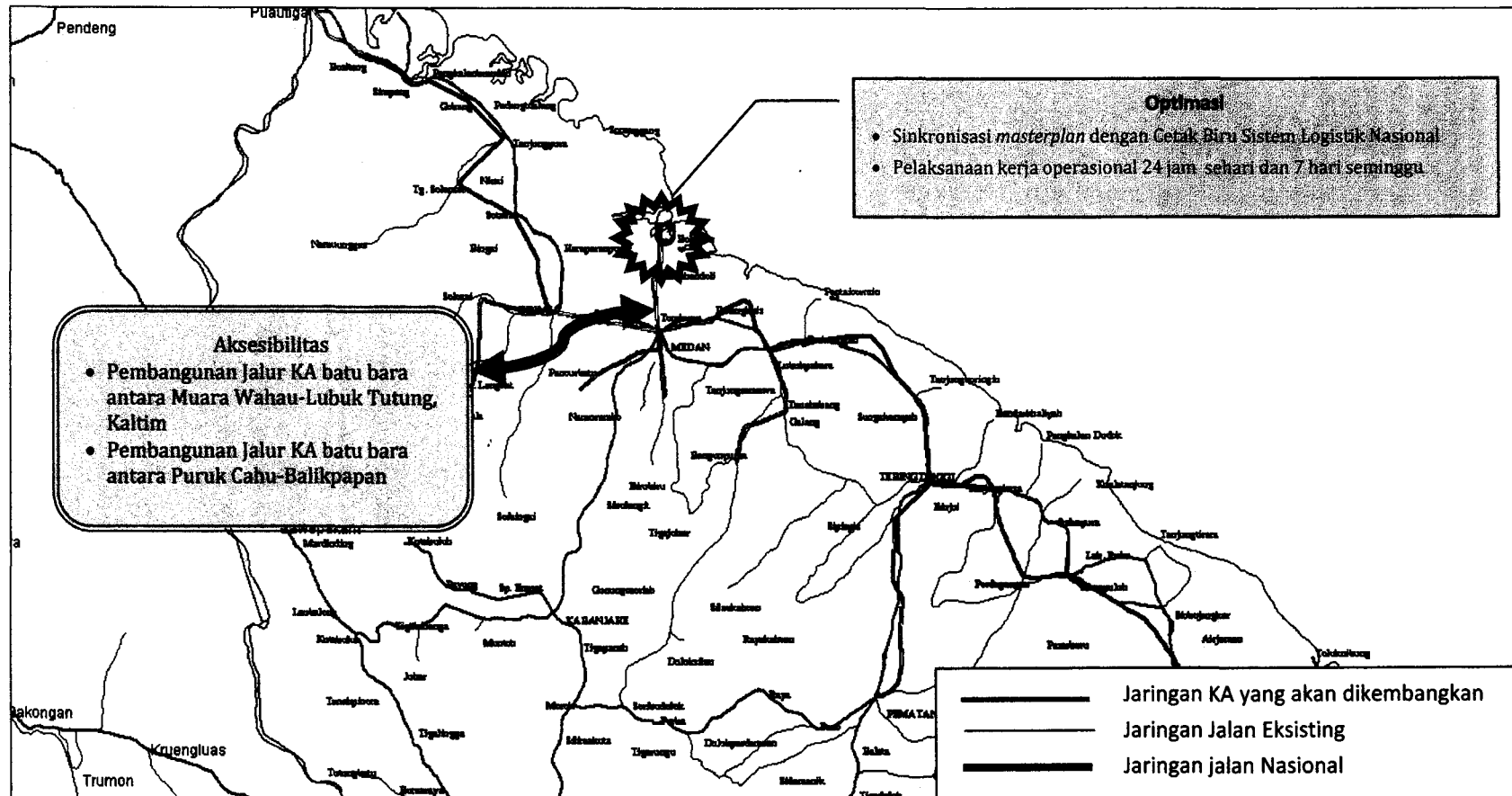
NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015	2020		
					2010	2011	2012	2013	2014	s.d. 2019	s.d. 2030		
I.	TERMINAL KHUSUS BATUBARA												
1.	BALIKPAPAN - KALIMANTAN TIMUR												
	Optimasi												
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Kalimantan Timur		■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Pemkot Balikpapan, Pemprov Kaltim
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional kapal	Kalimantan Timur		■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo IV, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	Aksesibilitas												
	• Pembangunan Jalur KA batu bara antara Muara Wahau-Lubuk Tutung, Kaltim	Tersedianya jalur KA	Peningkatan kecepatan pelayanan kapal dan barang dan kelancaran arus barang dan Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Kalimantan Timur			■	■	■	■		Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Balikpapan, Pemprov Kaltim, PT. KAI
	• Pembangunan Jalur KA batu bara antara Puruk Cahu-Balikpapan	Tersedianya jalur KA	Peningkatan kecepatan pelayanan kapal dan barang dan kelancaran arus barang dan Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Kalimantan Timur			■	■	■			Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo IV, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Balikpapan, Pemprov Kaltim, PT. KAI

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
2.	KOTABARU – KALIMANTAN SELATAN												
	Optimasi												
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Kalimantan Selatan		■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemkot Kota Baru, Pemprov Kalsel
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional	Kalimantan Selatan		■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	Aksesibilitas												
• Pembangunan sistem jaringan lintas berpotensi Batubara pada ruas Buntok – Tj Selatan	Tersedianya sistem jaringan lintas berpotensi Batubara pada ruas Buntok – Tj Selatan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan kelancaran arus barang	Kalimantan Selatan			■	■	■			Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo III, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Balikpapan, Pemprov Kalsel, PT. KAI	
3.	SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR												
	Optimasi												
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Kalimantan Selatan		■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim
	• Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional	Kalimantan Selatan		■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina,
4.	BANJARMASIN – KALIMANTAN SELATAN												
	Optimasi												
	• Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Logistik Nasional	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Banjarmasin		■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Pemkot Banjarmasin, Pemprov Kalsel

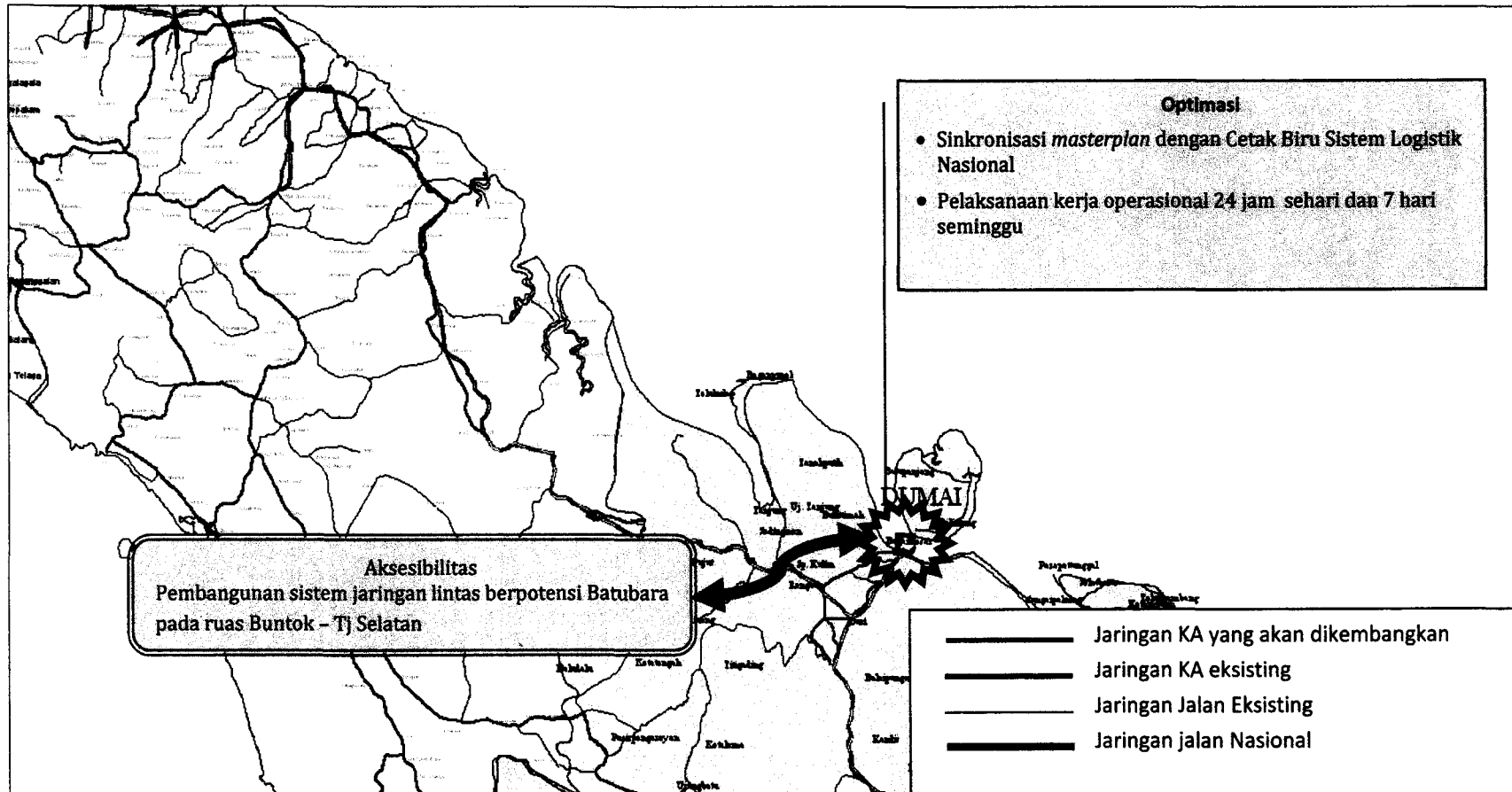
NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu 	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional	Banjarmasin		■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo III, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	<ul style="list-style-type: none"> Peresmian pengoperasian TPK Banjarmasin 	Tersedianya terminal peti kemas	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan kelancaran arus barang	Banjarmasin	■							PT.Pelindo III	Ditjen Phb. Laut
II.	TERMINAL KHUSUS CPO												
1.	BELAWAN - SUMATERA UTARA												
	Optimasi												
	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional 	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Binjai, Belawan, Hampan Perak dan Kuala Namu		■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Pemkot Medan
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu 	Penurunan <i>turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional	Binjai, Belawan, Hampan Perak dan Kuala Namu		■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	Aksesibilitas												
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jaringan jalan rel Medan-Belawan 	Tersedianya akses jalan rel ke pelabuhan	Meningkatnya kecepatan pelayanan kapal dan barang dan Meningkatkan aksesibilitas dan perkembangan kawasan industri	Binjai, Belawan, Hampan Perak dan Kuala Namu	■							Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Pekanbaru, PT. KAI, Pemprov Sumut
2.	DUMAI - RIAU												
	Optimasi												
	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional 	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Riau		■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Pemkot Medan

NO.	PELABUHAN - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015			2020
					2010	2011	2012	2013	2014	s.d. 2019			s.d. 2030
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu 	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional	Riau		■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	Aksesibilitas												
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jaringan jalan rel lintas Rantau Prapat-Duri-Dumai 	Tersedianya jaringan jalan rel	Peningkatan kecepatan pelayanan kapal dan barang dan kelancaran arus barang dan Menurunnya biaya operasional pelayanan kapal dan barang bagi pengguna jasa	Riau	■	■	■	■	■			Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Pekanbaru, PT. KAI
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan area pelabuhan 	Tersedianya area pelabuhan seluas 3000 Ha	Meningkatnya kapasitas pelayanan	Riau			■	■	■			PT.Pelindo I	Ditjen Phb. Laut
3.	PEKANBARU - RIAU												
	Optimasi												
	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi <i>masterplan</i> dengan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional 	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan	Riau		■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Pemkot Medan
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja operasional 24 jam sehari dan 7 hari seminggu 	Penurunan <i>Turn Round Time</i> (TRT) kapal	Meningkatnya produktivitas dan menurunkan biaya operasional	Riau		■						Ditjen Phb. Laut	PT.Pelindo I, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Imigrasi, Karantina
	Aksesibilitas												
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jaringan jalan rel Pekanbaru-Rengat 	Tersedianya jaringan jalan rel sepanjang 161 Km	Meningkatnya Kelancaran arus barang	Riau			■	■	■			Ditjen Perkeretaapian	PT.Pelindo I, Ditjen Phb. Laut, Pemkot Pekanbaru, Pemprov Riau, PT. KAI

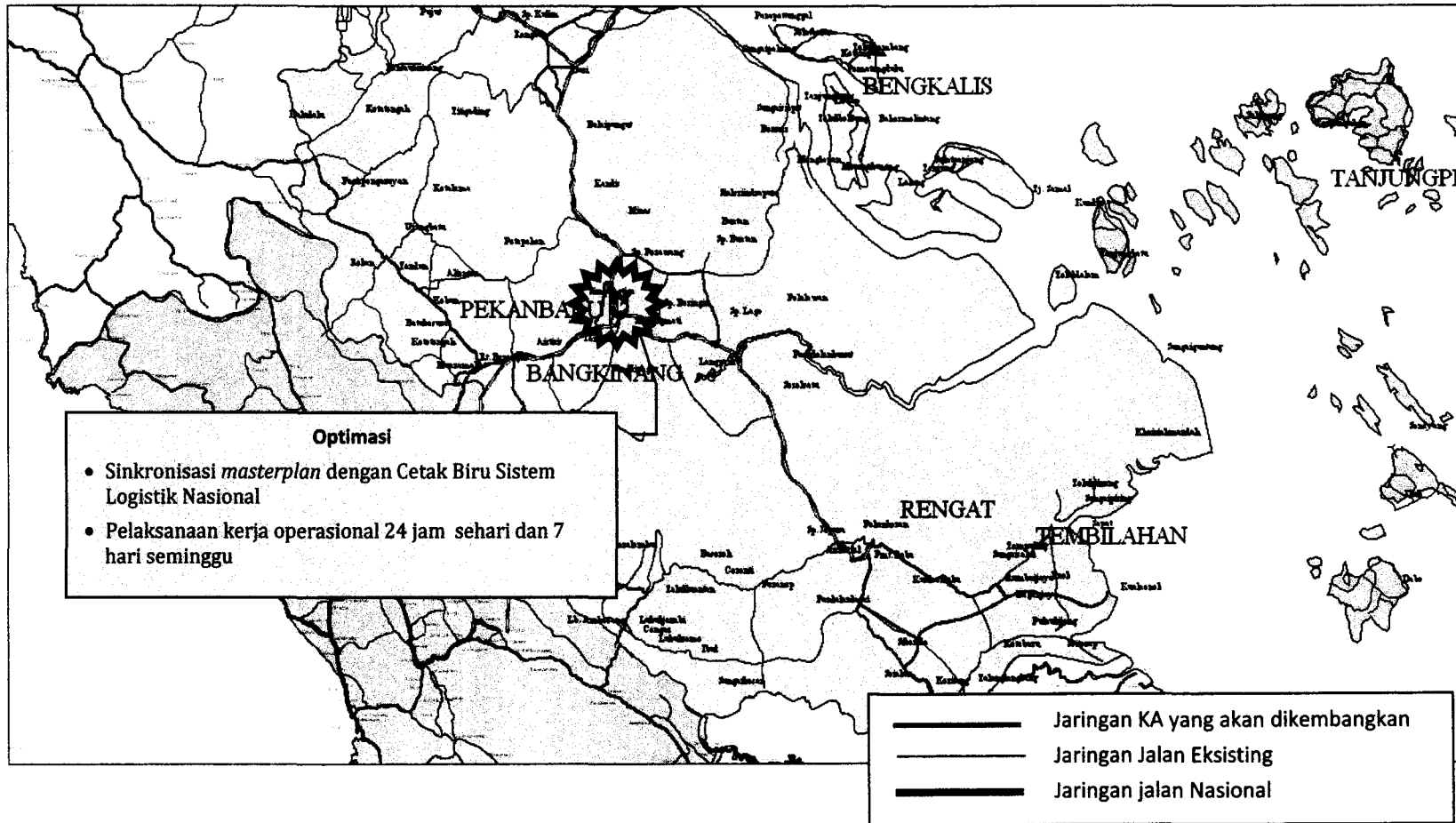
GAMBAR L2-1 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI TERMINAL KHUSUS CPO BELAWAN - SUMATERA UTARA



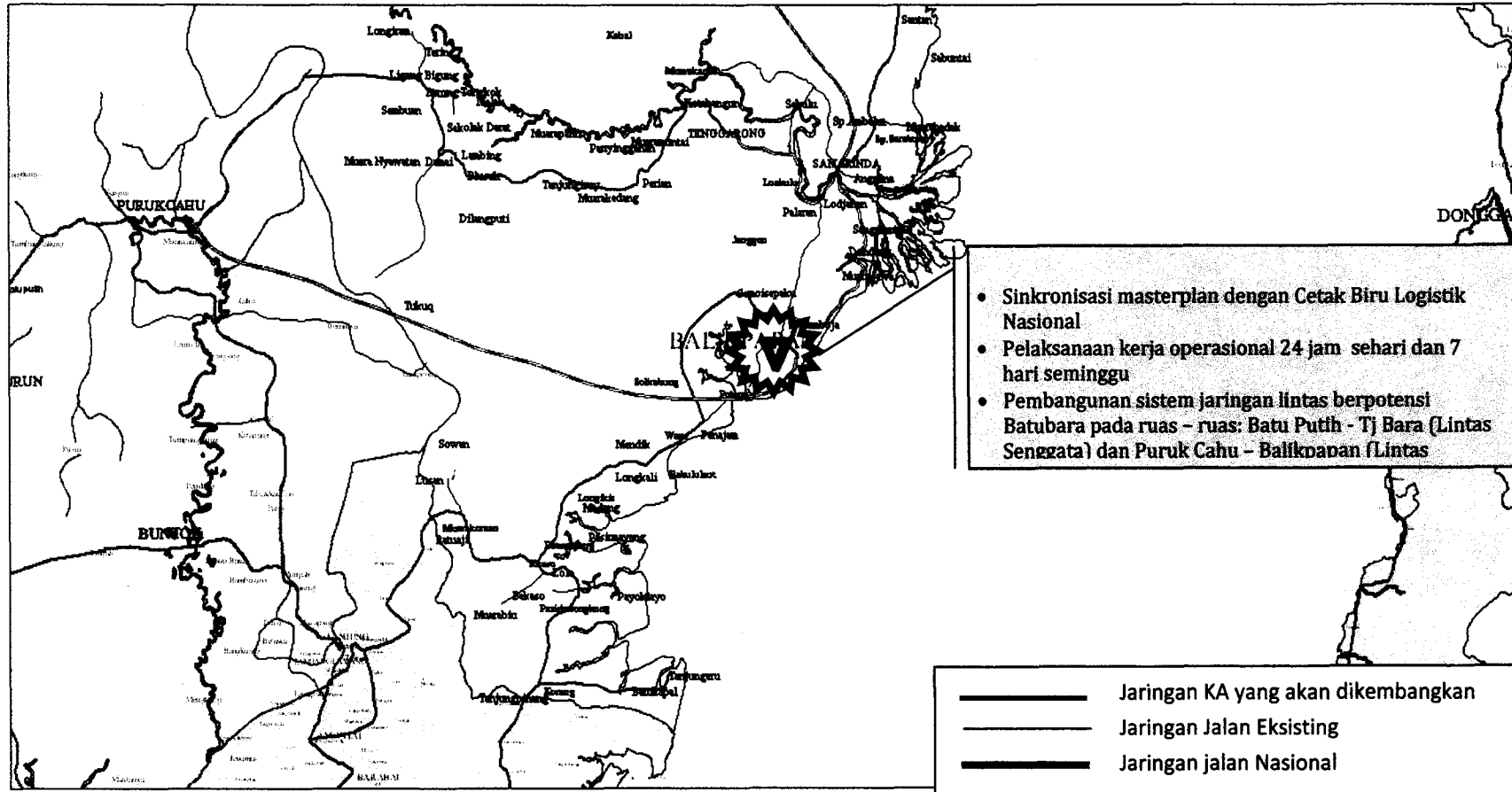
**GAMBAR L2-2 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG
DI TERMINAL KHUSUS CPO DUMAI - RIAU**



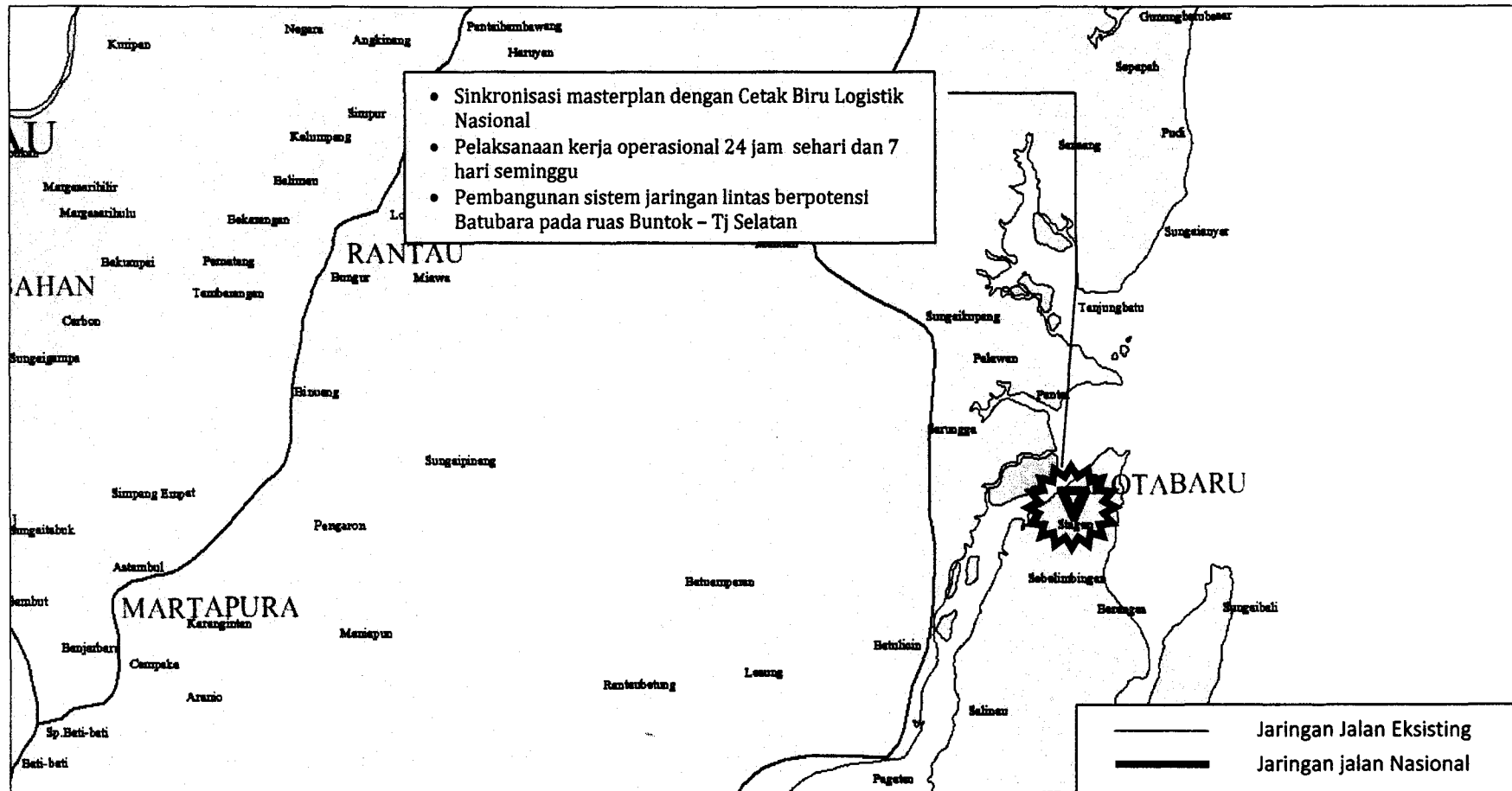
GAMBAR L2-3 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI TERMINAL KHUSUS CPO PEKANBARU - RIAU



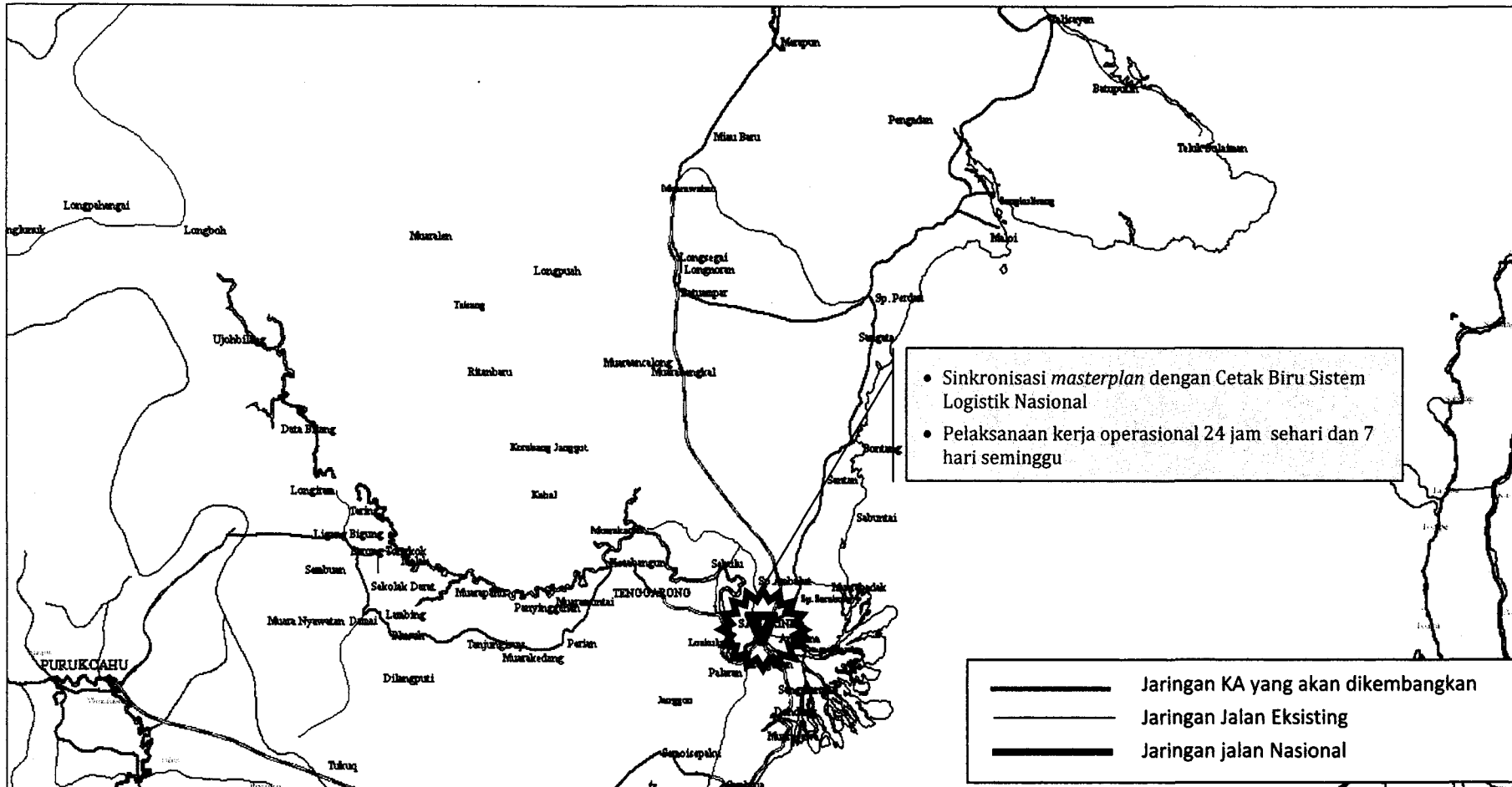
GAMBAR L2-4 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI TERMINAL KHUSUS BATUBARA BALIKPAPAN - KALIMANTAN TIMUR



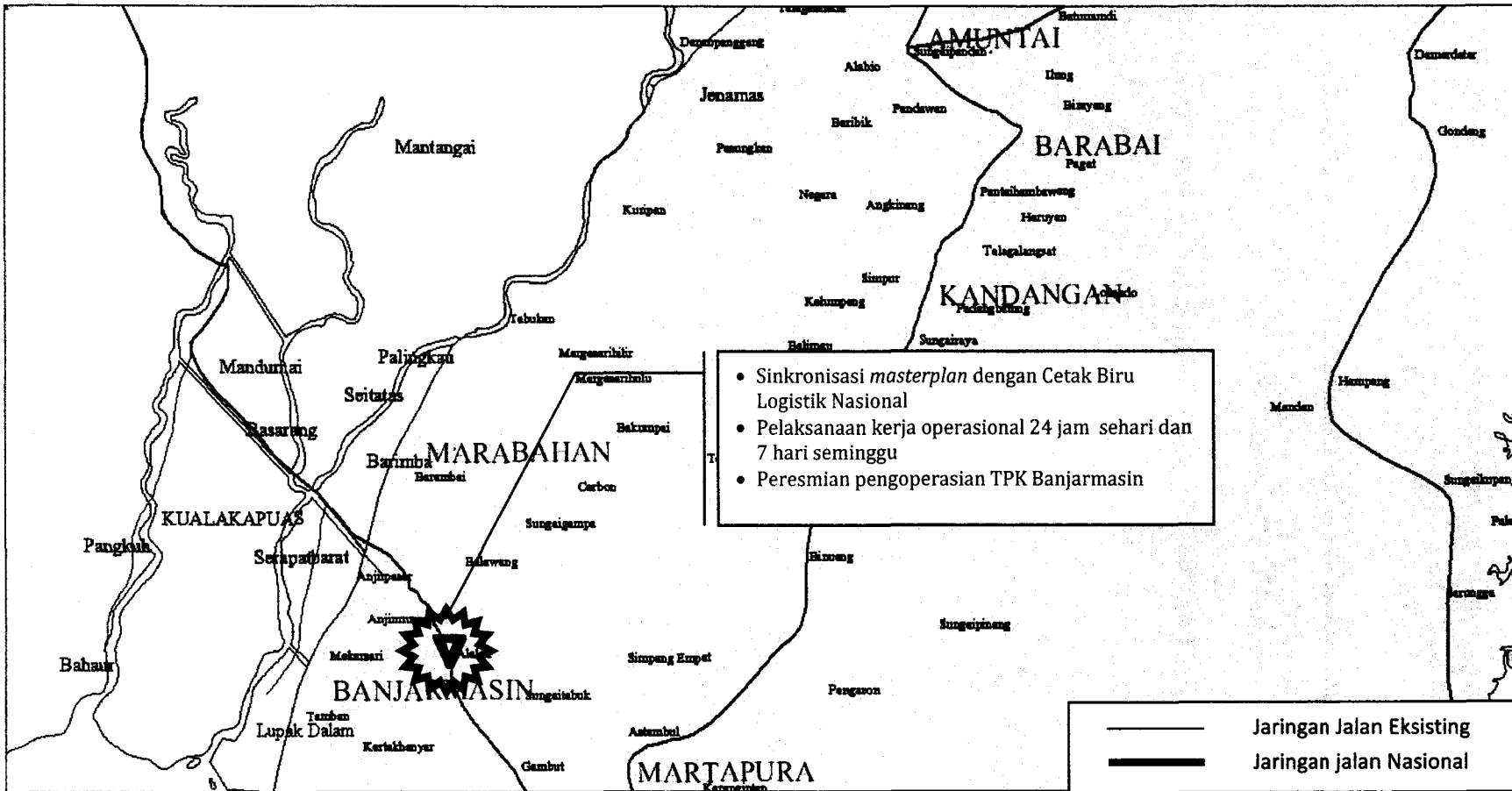
GAMBAR L2-5 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI TERMINAL KHUSUS BATUBARA KOTABARU – KALIMANTAN SELATAN



GAMBAR L2-6 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI TERMINAL KHUSUS BATUBARA SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR



GAMBAR L2-7 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI TERMINAL KHUSUS BATUBARA BANJARMASIN – KALIMANTAN SELATAN



LAMPIRAN 3.

**MATRIKS PROGRAM PENGEMBANGAN ANTARMODA/MULTIMODA
UNTUK PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG DI BANDAR UDARA**

LAMPIRAN 3.
MATRIKS PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA
UNTUK PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG DI BANDAR UDARA

NO.	BANDAR UDARA - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015			2020
					2010	2011	2012	2013	2014	s.d. 2019			s.d. 2030
1.	BANDARA SOEKARNO-HATTA - BANTEN												
	Optimasi												
	• <i>City check in</i> dan <i>port of origin</i> bagi kargo ekspor dan <i>port of destination</i> bagi kargo impor	Tersedianya fasilitas <i>city check in</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jabodetabek & Jawa Barat							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara, CIQ, Kemendag	
	• Instalasi peralatan <i>cargo weighting</i> terintegrasi dengan <i>x-ray cargo, history image & record weighting</i>	Tersedianya peralatan <i>cargo weighting</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jakarta, Jawa Barat, Banten							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara	
	• Instalasi sistem <i>handling</i> kargo udara dengan <i>Unit Load Devices (ULD)</i>	Tersedianya sistem kargo udara dengan <i>Unit Load Devices</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jakarta, Jawa Barat, Banten							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara	
	Pengembangan dan Pembangunan												
	• Instalasi/pengadaan <i>system roller</i> dan <i>freighter</i>	Tersedianya instalasi <i>roller</i> dan <i>freighter</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jakarta, Jawa Barat, Banten							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara	
	• Pengembangan/instalasi <i>System Electronic Data Interchange (EDI)</i>	Tersedianya <i>System EDI</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jakarta, Jawa Barat, Banten							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara	
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan terminal kargo baru	Tersedianya terminal kargo baru	Meningkatnya kapasitas pelayanan kargo	Jakarta, Jawa Barat, Banten							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara	
	• Pembangunan Gudang	Tersedianya gudang kargo eksisting	Meningkatnya pelayanan bandara sebagai <i>gateway</i> Indonesia dan Kargo Hub	Jabodetabek dan Jawa Barat							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara	
	• Pembangunan gudang <i>perishable</i> dan <i>cold storage</i>	Tersedianya gudang kargo eksisting	Meningkatnya pelayanan kinerja bandara sebagai <i>gateway</i> Indonesia dan Kargo Hub	Jabodetabek dan Jawa Barat							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara	
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Tersedianya fasilitas <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jabodetabek & Jawa Barat							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara	

NO.	BANDAR UDARA - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
					2010 s.d 2014							2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pengembangan angkutan pepadu moda dari dan ke bandara	Tersedianya angkutan pepadu moda	Meningkatnya pelayanan perpindahan moda	Jabodetabek dan sekitarnya		■	■	■	■			Ditjen Phb. Darat, Pemprov. DKI, Banten, Jabar	PT. Angkasa Pura II, Pemprov/kot, Jabodetabek
	• Pengadaan alat bongkar/muat <i>containerized cargo</i>	Tersedianya peralatan bongkar muat	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jabodetabek & Jawa Barat			■	■				PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara
	• Pengadaan alat bongkar/muat kargo intermoda	Tersedianya peralatan bongkar muat intermoda	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo intermoda	Jabodetabek & Jawa Barat			■	■				PT. Angkasa Pura II	Kemenhub, KemenPU
Aksesibilitas													
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan jalur KA antara Manggarai-Soekarno Hatta	Tersedianya jaringan KA sepanjang 33 KM	Meningkatnya kelancaran aksesibilitas dan keterpaduan antarmoda	Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat		■	■	■				Ditjen Perkeretaapian	PT. KAI, PT. Angkasa Pura II, Ditjen Phb. Udara, Pemprov. DKI Jakarta dan Banten
	• Membangun trayek KA khusus M1 (Tangerang-Kota)	Tersedianya jaringan KA	Meningkatnya kelancaran aksesibilitas dan keterpaduan antarmoda						■			Ditjen Perkeretaapian	PT. KAI, PT. Angkasa Pura II, Ditjen Phb. Udara, Pemprov. DKI Jakarta dan Banten
	• Pengadaan dan pengoperasian <i>trucking system</i>	Tersedianya peralatan <i>trucking system</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jakarta, Jawa Barat, Banten			■	■				PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara
	• Penataan/meningkatnya aksesibilitas dari dan ke kargo area	Meningkatnya aksesibilitas kargo	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jakarta, Jawa Barat, Banten		■	■					PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara
2.	BANDARA KUALANAMU – SUMATERA UTARA												
Optimasi													
	• Meningkatkan manajemen pergudangan	Adanya manajemen pergudangan	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sumatera Utara		■	■	■				PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara
Pengembangan dan Pembangunan													
	• <i>City check in</i> dan <i>port of origin</i> bagi kargo ekspor dan <i>port of destination</i> bagi kargo impor	Tersedianya fasilitas <i>city check in</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sumatera Utara						■		PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara, CIQ, Kemendag
	• Pengaturan/penataan <i>flow</i> kargo ke/dari terminal kargo domestik ke/dari terminal kargo internasional	Teratur/tertata <i>flow</i> kargo	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sumatera Utara		■	■	■				PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara

NO.	BANDAR UDARA - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Instalasi dan pengoperasian <i>trucking system 6-tier</i>	Tersedianya <i>trucking system 6-tier</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sumatera Utara							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara	
	• Perencanaan, perancangan, dan pembangunan <i>dry port</i> sebagai fasilitas <i>inland customs and quarantine clearance</i> ; penyelesaian administrasi ekspor/impor <i>one stop</i>	Tersedianya fasilitas <i>dry port</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sumatera Utara							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara	
	• Pembangunan <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Tersedianya fasilitas <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sumatera Utara							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara	
	• Pembangunan terminal kargo	Tersedianya bangunan kargo	Meningkatnya kapasitas pelayanan kargo	Sumatera Utara							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara	
	• Pengadaan alat bongkar/muat <i>containerized cargo</i>	Tersedianya peralatan bongkar muat	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sumatera Utara							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara	
	• Pengadaan alat bongkar/muat kargo intermoda	Tersedianya peralatan bongkar muat intermoda	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo intermoda	Sumatera Utara							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara	
	• Pengadaan kereta barang ke terminal kargo	Tersedianya kereta barang	Meningkatnya kapasitas dan kelancaran pelayanan angkutan kargo	Sumatera Utara							PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara	
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan jalur KA ke terminal kargo dan penumpang	Penambahan jaringan KA	Meningkatnya kelancaran, aksesibilitas dan keterpaduan antarmoda	Sumatera Utara							Ditjen Perkeretaapian	PT. Angkasa Pura II, Ditjen Phb Udara, Pemprov. Sumut	
	• Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya aksesibilitas	Sumatera Utara							Ditjen Bina Marga	PT. Angkasa Pura II, Pemprov. Sumut	
	• Jalan akses Kualanamu (<i>non tol</i>)	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya aksesibilitas	Sumatera Utara							Ditjen Bina Marga	PT. Angkasa Pura II, Pemprov. Sumut	
	• Pembangunan <i>Fly Over</i> akses Kualanamu I	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya aksesibilitas	Sumatera Utara							Ditjen Bina Marga	PT. Angkasa Pura II, Pemprov. Sumut	
	• Pembangunan <i>Fly Over</i> akses Kualanamu II dan jalan sepanjang 13,5 Km	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya aksesibilitas	Sumatera Utara							Ditjen Bina Marga	PT. Angkasa Pura II, Pemprov. Sumut	

NO.	BANDAR UDARA - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
					2010 s.d 2014							2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
3.	BANDARA JUANDA - JAWA TIMUR												
Optimasi													
	• Meningkatnya manajemen pergudangan	Adanya manajemen pergudangan	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jawa Timur		■	■	■			PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
	• Pengaturan/penataan flow kargo ke/dari terminal kargo domestik ke/dari terminal kargo internasional	Teraturinya/ tertatanya flow kargo	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jawa Timur		■	■	■			PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
	• Instalasi dan pengoperasian trucking system 6-tier	Tersedianya trucking system 6-tier	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jawa Timur			■	■			PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
Pengembangan dan Pembangunan													
	• City check in dan port of origin bagi kargo ekspor dan port of destination bagi kargo impor	Tersedianya fasilitas city check in	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jawa Timur						■	PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara, CIQ, Kemendag	
	• Perencanaan, perancangan, dan pembangunan dry port sebagai fasilitas inland customs and quarantine clearance; penyelesaian administrasi ekspor/impor one stop	Tersedianya fasilitas dry port	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jawa Timur						■	PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
	• Pembangunan cargo consolidation dan cargo distribution	Tersedianya fasilitas cargo consolidation dan cargo distribution	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jawa Timur			■	■			PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
	• Pengadaan alat bongkar/muat containerized cargo	Tersedianya peralatan bongkar muat	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jawa Timur				■	■		PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
	• Pengadaan alat bongkar/muat kargo intermoda	Tersedianya peralatan bongkar muat intermoda	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo intermoda	Jawa Timur				■	■		PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
	• Pengadaan kereta barang ke terminal kargo	Tersedianya kereta barang	Meningkatnya kapasitas dan kelancaran pelayanan angkutan kargo	Jawa Timur				■	■		PT. Angkasa Pura I	Ditjen Perkeretaapian	
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan jalur KA (double track) antara Waru-Bandara Juanda	Tersedianya jalur KA sepanjang 6 km	Meningkatnya aksesibilitas dan keterpaduan antarmoda	Jawa Timur				■	■		Ditjen Perkeretaapian	PT. Angkasa Pura II, Ditjen Phb. Udara, Pemprov. Jatim	

NO.	BANDAR UDARA - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pengembangan terminal kargo	Pengembangan tahap I terminal kargo domestik 10.700 m2 & internasional 14.700m2 Pengembangan tahap II terminal kargo domestik 13.400 m2 & internasional 18.700 m2	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Jawa Timur							PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
4. BANDARA NGURAH RAI - BALI													
Optimasi													
	• Meningkatnya manajemen pergudangan	Adanya manajemen pergudangan	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Pulau Bali							PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
Pengembangan dan Pembangunan													
	• <i>City check in</i> dan <i>port of origin</i> bagi kargo ekspor dan <i>port of destination</i> bagi kargo impor	Tersedianya fasilitas <i>city check in</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Pulau Bali							PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara, CIQ, Kemendag	
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan terminal kargo baru	Tersedianya terminal kargo baru	Meningkatnya kapasitas kelancaran pelayanan kargo	Pulau Bali							PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Tersedianya fasilitas <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Pulau Bali							PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
	• Pengadaan alat bongkar/muat <i>containerized cargo</i>	Tersedianya peralatan bongkar muat	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Pulau Bali							PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
	• Pengadaan alat bongkar/muat kargo intermoda	Tersedianya peralatan bongkar muat intermoda	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo intermoda	Pulau Bali							PT. Angkasa Pura I	Kemenhub, KemenPU	
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan pergudangan kargo	Tersedianya pergudangan kargo	Meningkatnya kapasitas pepelayanan	Pulau Bali							PT. Angkasa Pura I	Ditjend Phb Udara	
	• Instalasi peralatan <i>cargo weighting</i> terintegrasi dengan <i>x-ray cargo, history image & record weighting</i>	Tersedianya peralatan <i>cargo weighting</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Pulau Bali							PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	

NO.	BANDAR UDARA - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	<ul style="list-style-type: none"> Instalasi sistem handling kargo udara dengan <i>Unit Load Devices (ULD)</i> Pengadaan dan pengoperasian <i>trucking system</i> Instalasi/pengadaan <i>System Roller</i> dan <i>Freighter</i> Pengembangan/instalasi <i>System Electronic Data Interchange (EDI)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sistem kargo udara dengan <i>Unit Load Devices</i> Tersedianya peralatan <i>trucking system</i> Tersedianya instalasi <i>roller</i> dan <i>freighter</i> Peningkatan ketersediaan <i>System EDI</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo 	Pulau Bali								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan/Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke <i>cargo area</i> Pengembangan terminal kargo 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas kargo Pengembangan tahap I terminal kargo internasional seluas 4.639 m2 Pengembangan tahap II terminal kargo domestik 4.400 m2 Pengembangan tahap III terminal kargo domestik 6.800 m2 & internasional 5.767 m2 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo 	Pulau Bali								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
5.	BANDARA HANG NADIM - KEPULAUAN RIAU												
	Optimasi												
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya manajemen pergudangan 	Adanya manajemen pergudangan	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Kep. Riau								Ditjen Phb. Udara	PT. Angkasa Pura II
	Pembangunan dan Pengembangan												
	<ul style="list-style-type: none"> <i>City check in</i> dan <i>port of origin</i> bagi kargo ekspor dan <i>port of destination</i> bagi kargo impor Perencanaan, perancangan dan pembangunan <i>dry port</i> sebagai fasilitas <i>inland customs and quarantine clearance</i>; penyelesaian administrasi ekspor/impor <i>one stop</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya fasilitas <i>city check in</i> Tersedianya fasilitas <i>dry port</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo 	Kep. Riau								Otorita Batam	Ditjen Phb. Udara, CIQ, Kemendag
				Kep. Riau								Otoritas Batam	Ditjen Phb. Udara

NO.	BANDAR UDARA - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Tersedianya fasilitas <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Kep. Riau			■	■			Otoritas Batam	Ditjen Phb. Udara	
	• Pengadaan alat bongkar/muat <i>containerized cargo</i>	Tersedianya peralatan bongkar muat	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Kep. Riau			■	■			Otoritas Batam	Ditjen Phb. Udara	
	• Pengadaan alat bongkar/muat kargo intermoda	Tersedianya peralatan bongkar muat intermoda	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo intermoda	Kep. Riau			■	■			Otoritas Batam	Ditjen Phb. Udara	
	• Pengadaan kereta barang ke terminal kargo	Tersedianya kereta barang	Meningkatnya kapasitas dan kelancaran pelayanan angkutan kargo	Kep. Riau						■	Ditjen Perkeretaapian	Otorita Batam	
	• Pembangunan jalur KA menuju Bandara Hang Nadim	Pelayanan transportasi KA bandara	Meningkatnya aksesibilitas dan keterpaduan moda	Kep. Riau						■	Ditjen Perkeretaapian	PT.Angkasa Pura II, Ditjen Phb Udara, Otorita Batam	
6.	BANDARA ADI SUCIPTO – DI YOGYAKARTA												
	Optimasi												
	• Meningkatkan manajemen pergudangan	Adanya manajemen pergudangan	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	DIY & Jateng		■	■	■			Ditjen Phb. Udara	PT. Angkasa Pura I	
	Pengembangan dan Pembangunan												
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan terminal kargo	Tersedianya terminal kargo baru	Meningkatnya kapasitas pelayanan kargo	DIY & Jateng		■	■	■	■		PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara Pemprov. DIY	
	• Pengadaan dan instalasi <i>cold storage</i>	Tersedianya fasilitas <i>cold storage</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	DIY & Jateng			■	■			PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara Pemprov. DIY	
	• Pengadaan dan instalasi fasilitas terminal kargo	Tersedianya fasilitas terminal kargo	Meningkatnya kelancaran pelayanan	DIY & Jateng			■	■			PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara Pemprov. DIY	
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan pergudangan kargo	Tersedianya fasilitas gudang kargo	Meningkatnya kapasitas dan pelayanan penyimpanan kargo	DIY & Jateng		■	■	■			PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara Pemprov. DIY	
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Tersedianya fasilitas <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	DIY & Jateng			■	■			PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara Pemprov. DIY	
	• Pengadaan alat bongkar/muat <i>containerized cargo</i>	Tersedianya peralatan bongkar muat	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	DIY & Jateng			■	■			PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara Pemprov. DIY	

NO.	BANDAR UDARA - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d 2019			2020 s.d 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pengadaan alat bongkar/muat kargo intermoda	Tersedianya peralatan bongkar muat intermoda	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo intermoda	DIY & Jateng							PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara Pemprov. DIY	
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan jalur KA menuju terminal kargo	Tersedianya fasilitas KA kargo menuju bandara	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo intermoda	DIY & Jateng							PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara Pemprov. DIY	
	• <i>Underpass</i> di bawah rel KA (dapat menghubungkan moda KA dengan udara)	Tersedianya <i>underpass</i> sepanjang ± 44 m	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	DIY & sekitarnya							PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
7.	BANDARA SULTAN HASANUDIN - SULAWESI SELATAN												
	Optimasi												
	• Meningkatkan manajemen pergudangan	Adanya manajemen pergudangan	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sulawesi Selatan							Ditjen Phb. Udara	PT. Angkasa Pura I	
	Pengembangan dan Pembangunan												
	• <i>City check in</i> dan <i>port of origin</i> bagi kargo ekspor dan <i>port of destination</i> bagi kargo impor	Tersedianya fasilitas <i>city check in</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sulawesi Selatan							PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara, CIQ, Kemendag	
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan <i>dry port</i> sebagai fasilitas <i>inland customs and quarantine clearance</i> ; penyelesaian administrasi ekspor/impor <i>one stop</i>	Tersedianya fasilitas <i>dry port</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sulawesi Selatan							PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Tersedianya fasilitas <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sulawesi Selatan							PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
	• Pengadaan alat bongkar/muat <i>containerized cargo</i>	Tersedianya peralatan bongkar muat	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sulawesi Selatan							PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
	• Pengadaan alat bongkar/muat kargo intermoda	Penambahan peralatan	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sulawesi Selatan							PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara	
	• Jalur KA menuju Bandara Sultan Hasanudin	Tersedianya pelayanan transportasi KA bandara	Meningkatnya aksesibilitas dan keterpaduan moda	Sulawesi Selatan							Ditjen Perkeretaapian	Angkasa Pura I, Pemprov. Sulsel	
	• Pengadaan kereta barang ke terminal kargo	Tersedianya kereta barang ke bandara	Meningkatnya aksesibilitas dan keterpaduan moda	Sulawesi Selatan							Ditjen Perkeretaapian	Pemprov. Sulsel	

NO.	BANDAR UDARA - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan peralatan pendukung <i>warehouse</i> 	Tersedianya peralatan <i>warehouse</i> yang lengkap	Meningkatnya kelancaran pelayanan	Sulawesi Selatan								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan terminal kargo 	Pengembangan terminal kargo tahap I ±16.100 m2 & tahap II ±35.100 m2	Meningkatnya kelancaran pelayanan	Sulawesi Selatan								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
8.	BANDARA SAM RATULANGI – SULAWESI UTARA												
	Optimasi												
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya manajemen pergudangan 	Adanya manajemen pergudangan	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sulawesi Utara								Ditjen Phb. Udara	PT. Angkasa Pura I
	Pengembangan dan Pembangunan												
	<ul style="list-style-type: none"> <i>City check in</i> dan <i>port of origin</i> bagi kargo ekspor dan <i>port of destination</i> bagi kargo impor 	Tersedianya fasilitas <i>city check in</i>	Meningkatnya kelancaran peelayanan kargo	Sulawesi Utara								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara, CIQ, Kemendag
	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, perancangan dan pembangunan <i>dry port</i> sebagai fasilitas <i>inland customs and quarantine clearance</i>; penyelesaian administrasi ekspor/impor <i>one stop</i> 	Tersedianya fasilitas <i>dry port</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sulawesi Utara								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, perancangan dan pembangunan <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i> 	Tersedianya fasilitas <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sulawesi Utara								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan alat bongkar/muat <i>containerized cargo</i> 	Tersedianya peralatan bongkar muat	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sulawesi Utara								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan alat bongkar/muat kargo intermoda 	Tersedianya peralatan bongkar muat intermoda	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo intermoda	Sulawesi Utara								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan kereta barang ke terminal kargo 	Tersedianya kereta barang	Meningkatnya kapasitas dan kelancaran pelayanan angkutan kargo	Sulawesi Utara								Ditjen Perkeretaapian	Pemprov. Sulut
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalur kereta api menuju Bandara Sam Ratulangi 	Pepelayanan transportasi KA bandara	Meningkatnya aksesibilitas dan keterpaduan moda	Sulawesi Utara								Ditjen Perkeretaapian	PT. Angkasa Pura I, Ditjen Phb. Udara, Pemprov Sumut

NO.	BANDAR UDARA - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pengembangan terminal kargo	Pengembangan terminal kargo tahap I 5.500 m2 & tahap II 13.500 m2	Meningkatnya pelayanan	Sulawesi Utara								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
9.	BANDARA SUPADIO – KALIMANTAN BARAT												
	Optimasi												
	• Meningkatkan manajemen pergudangan	Adanya manajemen pergudangan	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Kalimantan Barat								Ditjen Phb. Udara	PT. Angkasa Pura I
	Pengembangan dan Pembangunan												
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan terminal kargo	Tersedianya terminal kargo baru	Meningkatnya kapasitas pelayanan kargo	Kalimantan Barat								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	• Pengadaan dan instalasi cold storage	Tersedianya fasilitas cold storage	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Kalimantan Barat								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	• Pengadaan dan instalasi fasilitas terminal kargo	Tersedianya fasilitas terminal kargo	Meningkatnya kelancaran pelayanan	Kalimantan Barat								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	• City check in dan port of origin bagi kargo ekspor dan port of destination bagi kargo impor	Tersedianya fasilitas city check in	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Kalimantan Barat								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara, CIQ, Kemendag
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan dry port sebagai fasilitas inland customs and quarantine clearance; penyelesaian administrasi ekspor/impor one stop	Tersedianya fasilitas dry port	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Kalimantan Barat								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan cargo consolidation dan cargo distribution	Tersedianya fasilitas cargo consolidation dan cargo distribution	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Kalimantan Barat								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	• Pengadaan alat bongkar/muat containerized cargo	Tersedianya peralatan bongkar muat	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Kalimantan Barat								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	• Pengadaan alat bongkar/muat kargo intermoda	Tersedianya peralatan bongkar muat intermoda	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo intermoda	Kalimantan Barat								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	• Pengadaan kereta barang ke terminal kargo	Tersedianya kereta barang	Meningkatnya kapasitas dan kelancaran pelayanan angkutan kargo	Kalimantan Barat								Ditjen Perkeretaapian	Pemprov. Kalbar

NO.	BANDAR UDARA - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan jalur KA ke/dari Bandara Supadio	Tersedianya jalur KA ke bandara	Meningkatnya aksesibilitas dan keterpaduan moda	Kalimantan Barat								Ditjen Perkeretaapian	Pemprov. Kalbar
10.	BANDARA SEPINGGAN - KALIMANTAN TIMUR												
	Optimasi												
	• Meningkatkan manajemen pergudangan	Adanya manajemen pergudangan	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Kalimantan Timur								Ditjen Phb. Udara	PT. Angkasa Pura I
	Pengembangan dan Pembangunan												
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan terminal kargo	Tersedianya terminal kargo baru	Meningkatnya kapasitas pelayanan kargo	Kalimantan Timur								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	• Pengadaan dan instalasi cold storage	Tersedianya fasilitas cold storage	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Kalimantan Timur								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	• Pengadaan dan instalasi fasilitas terminal kargo	Tersedianya fasilitas terminal kargo	Meningkatnya kelancaran pelayanan	Kalimantan Timur								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	• City check in dan port of origin bagi kargo ekspor dan port of destination bagi kargo impor	Tersedianya fasilitas city check in	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Kalimantan Timur								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara, CIQ, Kemendag
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan dry port sebagai fasilitas inland customs and quarantine clearance; penyelesaian administrasi ekspor/impor one stop	Tersedianya fasilitas dry port	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Kalimantan Timur								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan cargo consolidation dan cargo distribution	Tersedianya fasilitas cargo consolidation dan cargo distribution	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Kalimantan Timur								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	• Pengadaan alat bongkar/muat containerized cargo	Tersedianya peralatan bongkar muat	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Kalimantan Timur								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	• Pengadaan alat bongkar/muat kargo intermoda	Tersedianya peralatan bongkar muat intermoda	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo intermoda	Kalimantan Timur								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	• Pengadaan peralatan pendukung warehouse	Tersedianya peralatan warehouse yang lengkap	Meningkatnya kelancaran pelayanan	Kalimantan Timur								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara

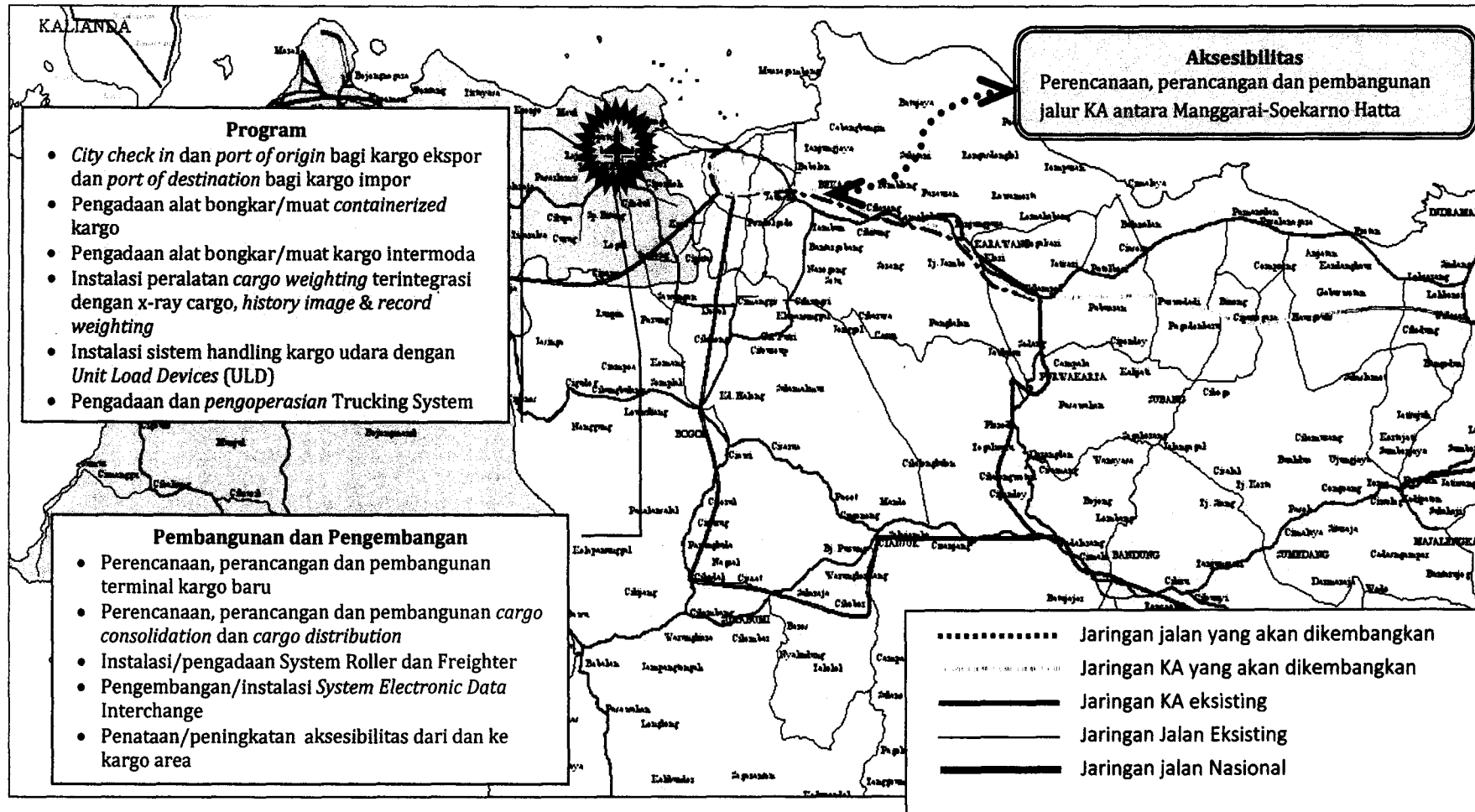
NO.	BANDAR UDARA - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pengembangan terminal kargo	Pengembangan terminal kargo tahap I ±10.000 m2 & tahap II ±18.000 m2	Meningkatnya kelancaran pelayanan	Kalimantan Timur								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
11.	BANDARA SM.BADARUDIN II - SUMATERA SELATAN												
	Optimasi												
	• Meningkatnya manajemen pergudangan	Adanya manajemen pergudangan	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sumatera Selatan								Ditjen Phb. Udara	PT. Angkasa Pura II
	Pengembangan dan Pembangunan												
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan terminal kargo	Tersedianya terminal kargo baru	Meningkatnya kapasitas pelayanan kargo	Sumatera Selatan								PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara
	• Pengadaan dan instalasi cold storage	Tersedianya fasilitas cold storage	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sumatera Selatan								PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara
	• Pengadaan dan instalasi fasilitas terminal kargo	Tersedianya fasilitas terminal kargo	Meningkatnya kelancaran pelayanan	Sumatera Selatan								PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara
	• City check in dan port of origin bagi kargo ekspor dan port of destination bagi kargo impor	Tersedianya fasilitas city check in	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sumatera Selatan								PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara, CIQ, Kemendag
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan dry port sebagai fasilitas inland customs and quarantine clearance; penyelesaian administrasi ekspor/impor one stop	Tersedianya fasilitas dry port	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sumatera Selatan								PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan cargo consolidation dan cargo distribution	Tersedianya fasilitas cargo consolidation dan cargo distribution	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sumatera Selatan								PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara
	• Pengadaan alat bongkar/muat containerized cargo	Tersedianya peralatan bongkar muat	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Sumatera Selatan								PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara
	• Pengadaan alat bongkar/muat kargo intermoda	Tersedianya peralatan bongkar muat intermoda	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo intermoda	Sumatera Selatan								PT. Angkasa Pura II	Ditjen Phb. Udara

NO.	BANDAR UDARA - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan jalur KA menuju bandara SM. Badarudin II	Pepelayanan transportasi KA Bandara	Meningkatnya aksesibilitas & keterpaduan antarmoda	Sumatera Selatan								Ditjen Perkeretaapian	PT. Angkasa Pura, Ditjen Phb. Udara, Pemprov Sumsel
12.	BANDARA F. KAISIEPO - PAPUA												
	Optimasi												
	• Meningkatkan manajemen pergudangan	Peningkatan manajemen pergudangan	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Papua								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
	Pengembangan dan Pembangunan												
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan terminal kargo	Tersedianya terminal kargo baru	Meningkatnya kapasitas pelayanan kargo	Papua								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara Pemprov. Papua
	• Pengadaan dan instalasi cold storage	Tersedianya fasilitas cold storage	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Papua								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara Pemprov. Papua
	• Pengadaan dan instalasi fasilitas terminal kargo	Tersedianya fasilitas terminal kargo	Meningkatnya kelancaran pelayanan	Papua								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara Pemprov. Papua
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan pergudangan kargo	Tersedianya fasilitas gudang kargo	Meningkatnya kapasitas dan pepelayanan penyimpanan kargo	Papua								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara Pemprov. Papua
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan cargo consolidation dan cargo distribution	Tersedianya fasilitas cargo consolidation dan cargo distribution	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Papua								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara Pemprov. Papua
	• Pengadaan alat bongkar/muat containerized cargo	Tersedianya peralatan bongkar muat	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Papua								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara Pemprov. Papua
	• Pengadaan alat bongkar/muat kargo intermoda	Tersedianya peralatan bongkar muat intermoda	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo intermoda	Papua								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara Pemprov. Papua
	• Pengembangan terminal kargo	Pengembangan terminal kargo dalam 2 tahap	Meningkatnya kelancaran pelayanan	Papua								PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
13.	BANDARA WAMENA - PAPUA												
	Optimasi												
	• Meningkatkan manajemen pergudangan	Adanya manajemen pergudangan	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Papua								Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua

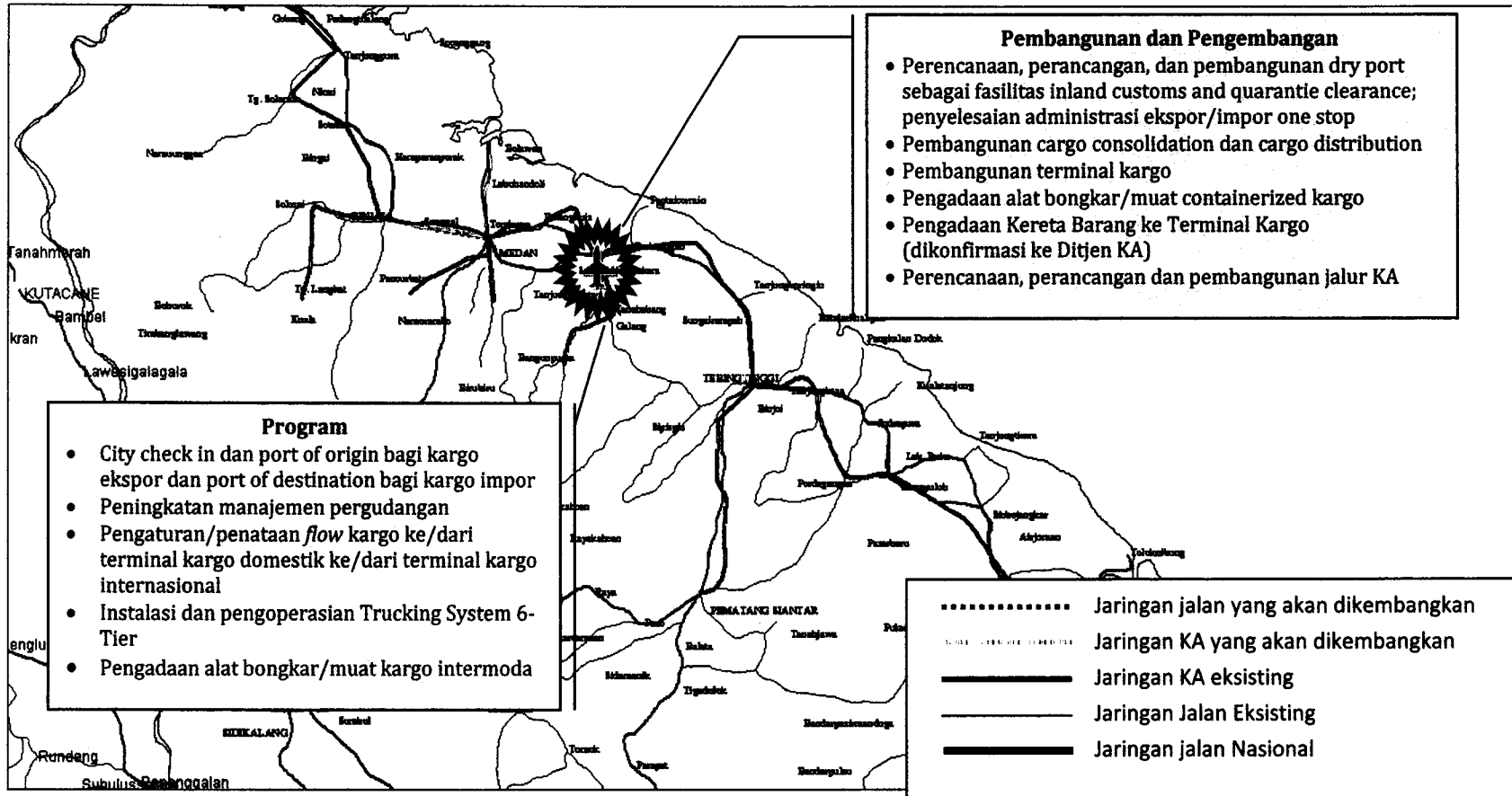
NO.	BANDAR UDARA - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
Pengembangan dan Pembangunan													
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan terminal kargo	Tersedianya terminal kargo baru	Meningkatnya kapasitas pelayanan kargo	Papua								Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua
	• Pengadaan dan instalasi <i>cold storage</i>	Tersedianya fasilitas <i>cold storage</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Papua								Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua
	• Pengadaan dan instalasi fasilitas terminal kargo	Tersedianya fasilitas terminal kargo	Meningkatnya kelancaran pelayanan	Papua								Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan pergudangan kargo	Tersedianya fasilitas gudang kargo	Meningkatnya kapasitas dan pelayanan penyimpanan kargo	Papua								Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Tersedianya fasilitas <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Papua								Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua
	• Pengadaan alat bongkar/muat <i>containerized cargo</i>	Tersedianya peralatan bongkar muat	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Papua								Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua
	• Pengadaan alat bongkar/muat kargo intermoda	Tersedianya peralatan bongkar muat intermoda	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo intermoda	Papua								Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua
14.	BANDARA SENTANI - PAPUA												
	Optimasi												
	• Meningkatkan manajemen pergudangan	Adanya manajemen pergudangan	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Papua								Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua
	Pengembangan dan Pembangunan												
	• Perencanaan, perancangan dan pembangunan terminal kargo	Tersedianya terminal kargo baru	Meningkatnya kapasitas pelayanan kargo	Papua								Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua
	• Pengadaan dan instalasi <i>cold storage</i>	Tersedianya fasilitas <i>cold storage</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Papua								Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua
	• Pengadaan dan instalasi fasilitas terminal kargo	Tersedianya fasilitas terminal kargo	Meningkatnya kelancaran pelayanan	Papua								Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua
	• <i>City check in</i> dan <i>port of origin</i> bagi kargo ekspor dan <i>port of destination</i> bagi kargo impor	Tersedianya fasilitas <i>city check in</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Papua								Ditjen Phb. Udara	CIQ, Kemendag

NO.	BANDAR UDARA - PROPINSI Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PRODUKSI YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, perancangan dan pembangunan <i>dry port</i> sebagai <i>fasilitas inland customs and quarantine clearance</i>; penyelesaian administrasi ekspor/impor <i>one stop</i> 	Tersedianya fasilitas <i>dry port</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Papua							Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua	
	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, perancangan dan pembangunan <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i> 	Tersedianya fasilitas <i>cargo consolidation</i> dan <i>cargo distribution</i>	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Papua							Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan alat bongkar/muat <i>containerized cargo</i> 	Tersedianya peralatan bongkar muat	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo	Papua							Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan alat bongkar/muat kargo intermoda 	Tersedianya peralatan bongkar muat intermoda	Meningkatnya kelancaran pelayanan kargo intermoda	Papua							Ditjen Phb. Udara	Pemprov. Papua	

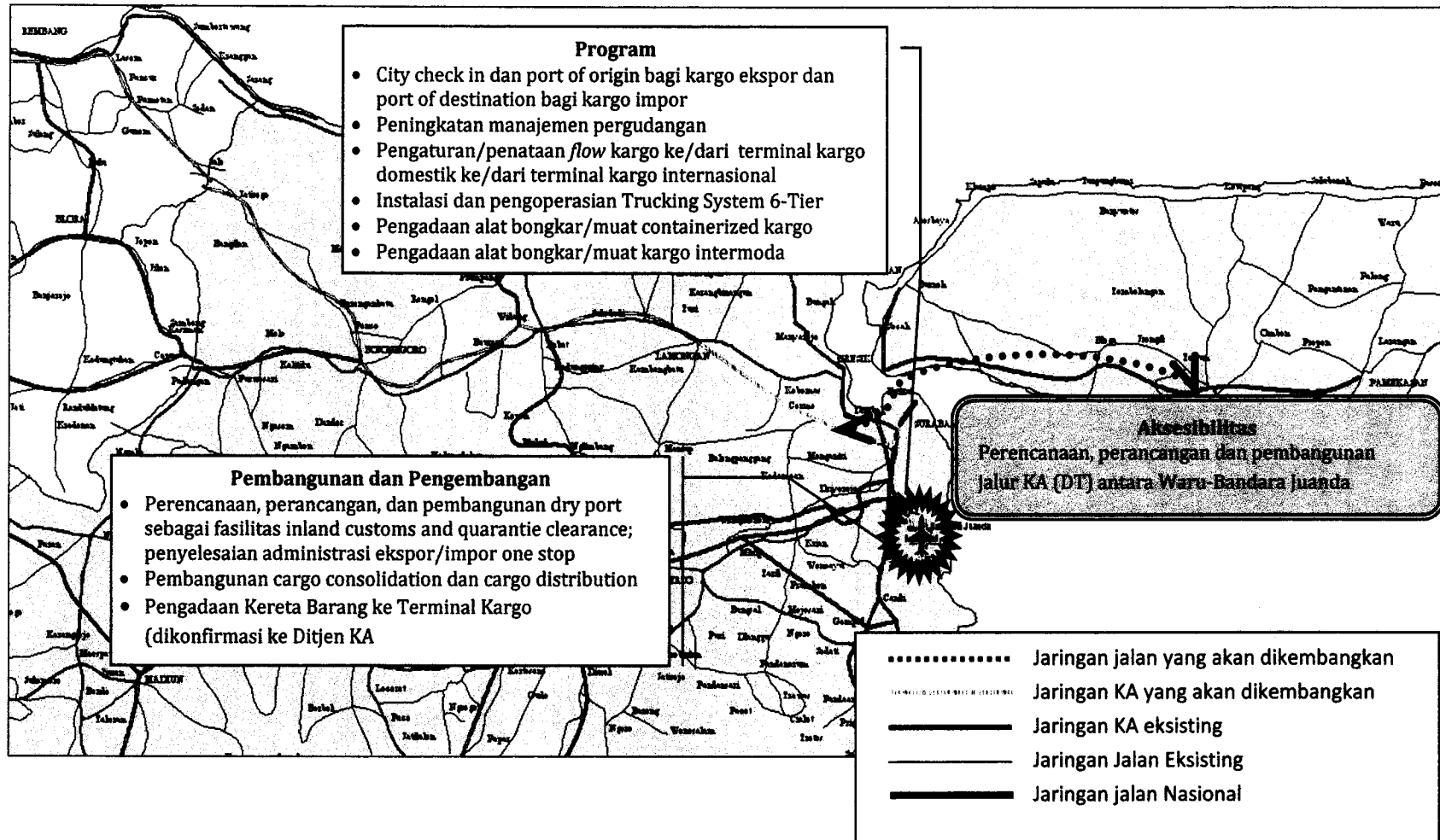
**GAMBAR L3-1 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG
DI BANDAR UDARA SOEKARNO HATTA - BANTEN**



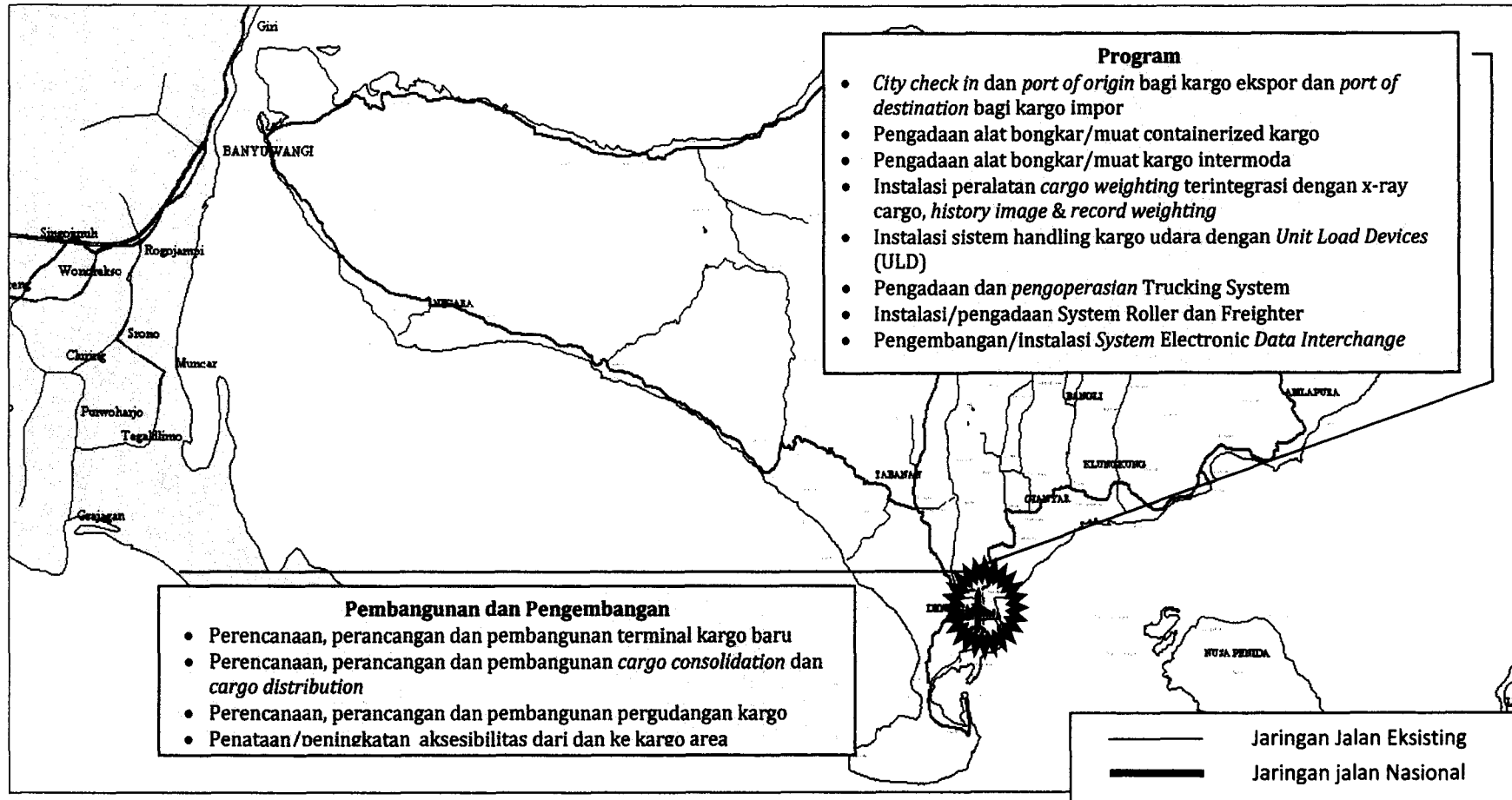
**GAMBAR L3-2 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG
DI BANDAR UDARA KUALANAMU - SUMATERA UTARA**



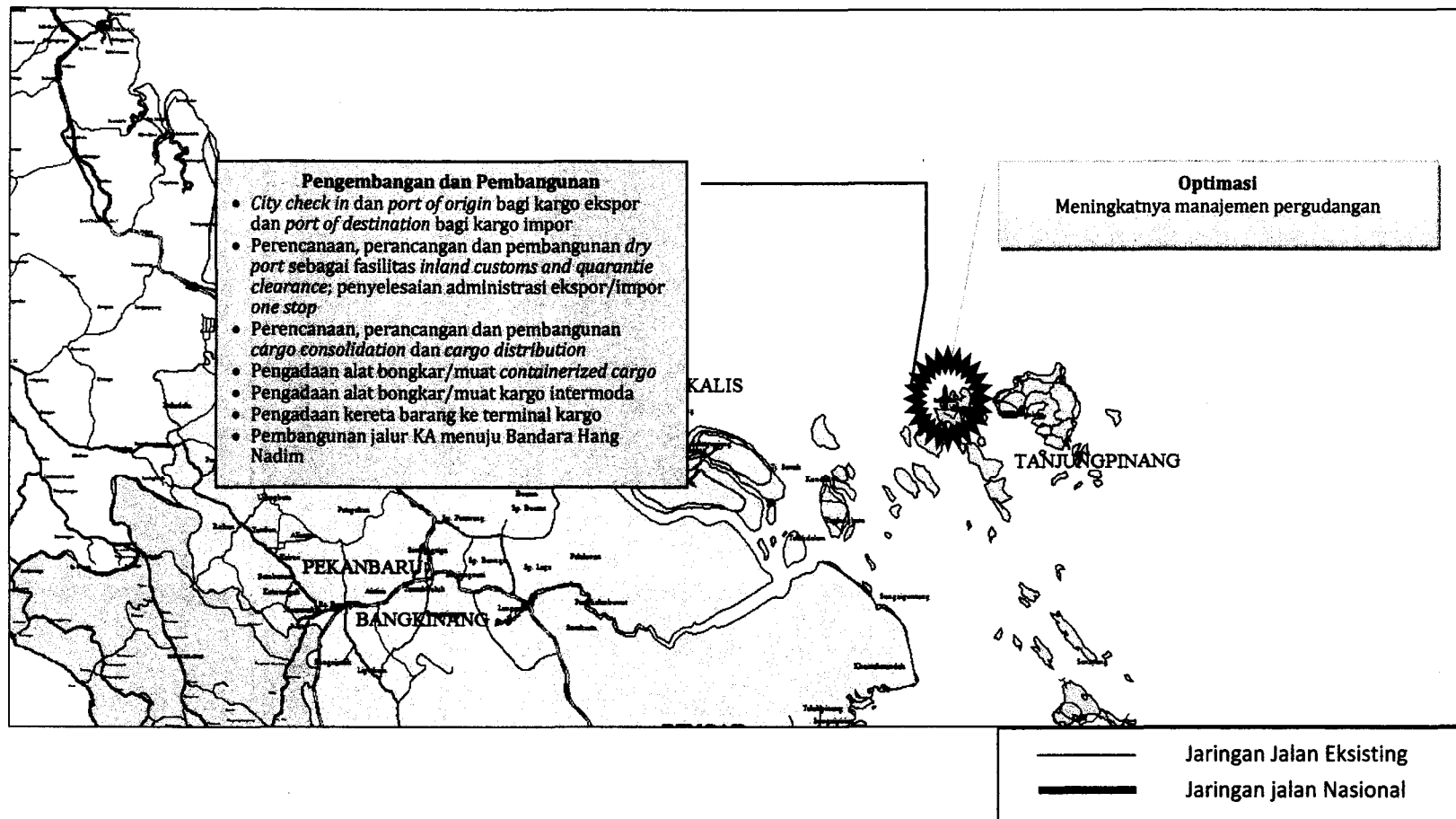
GAMBAR L3-3 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI BANDAR UDARA JUANDA - JAWA TIMUR



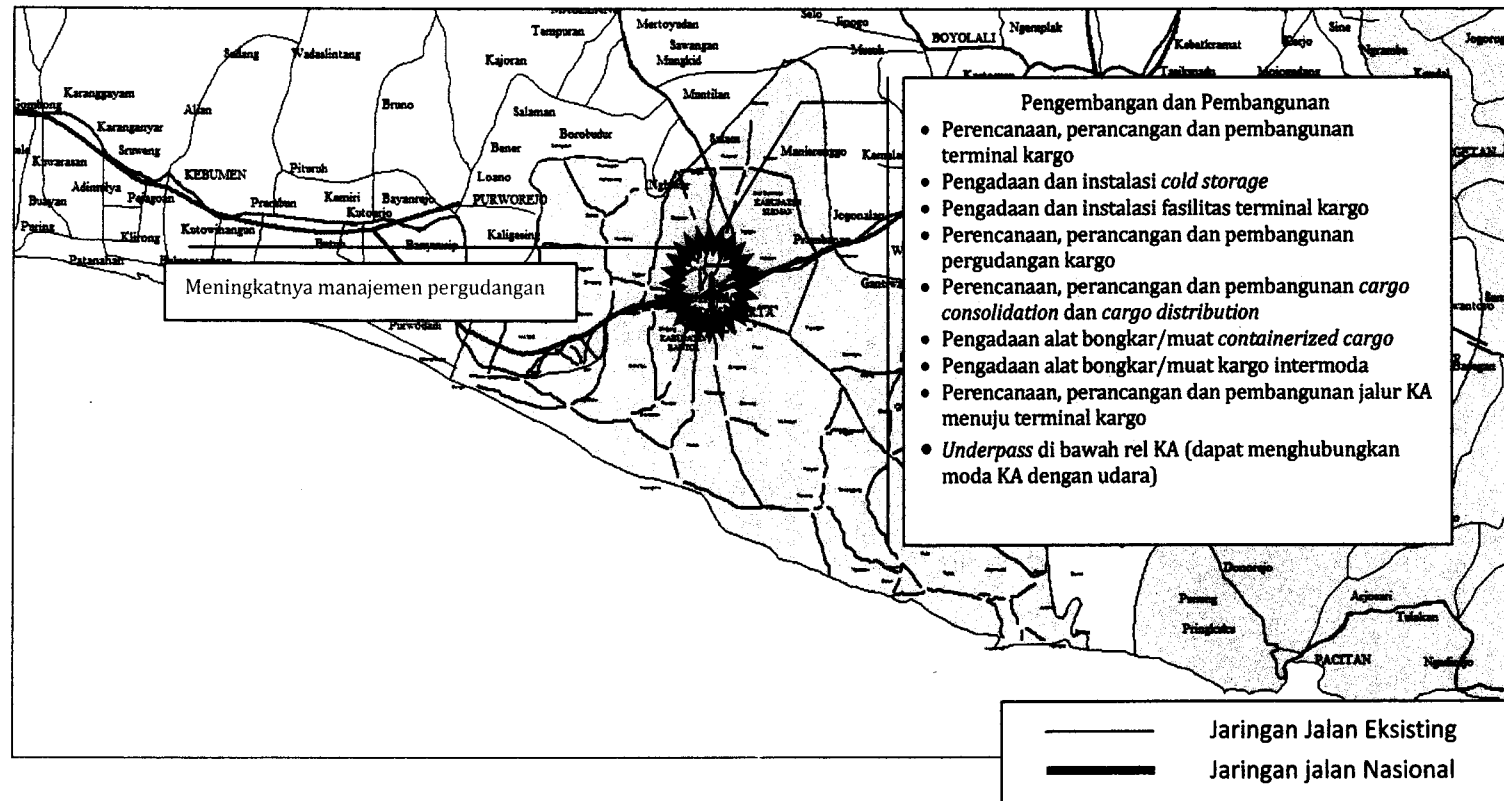
GAMBAR L3-4 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI BANDAR UDARA NGURAH RAI - BALI



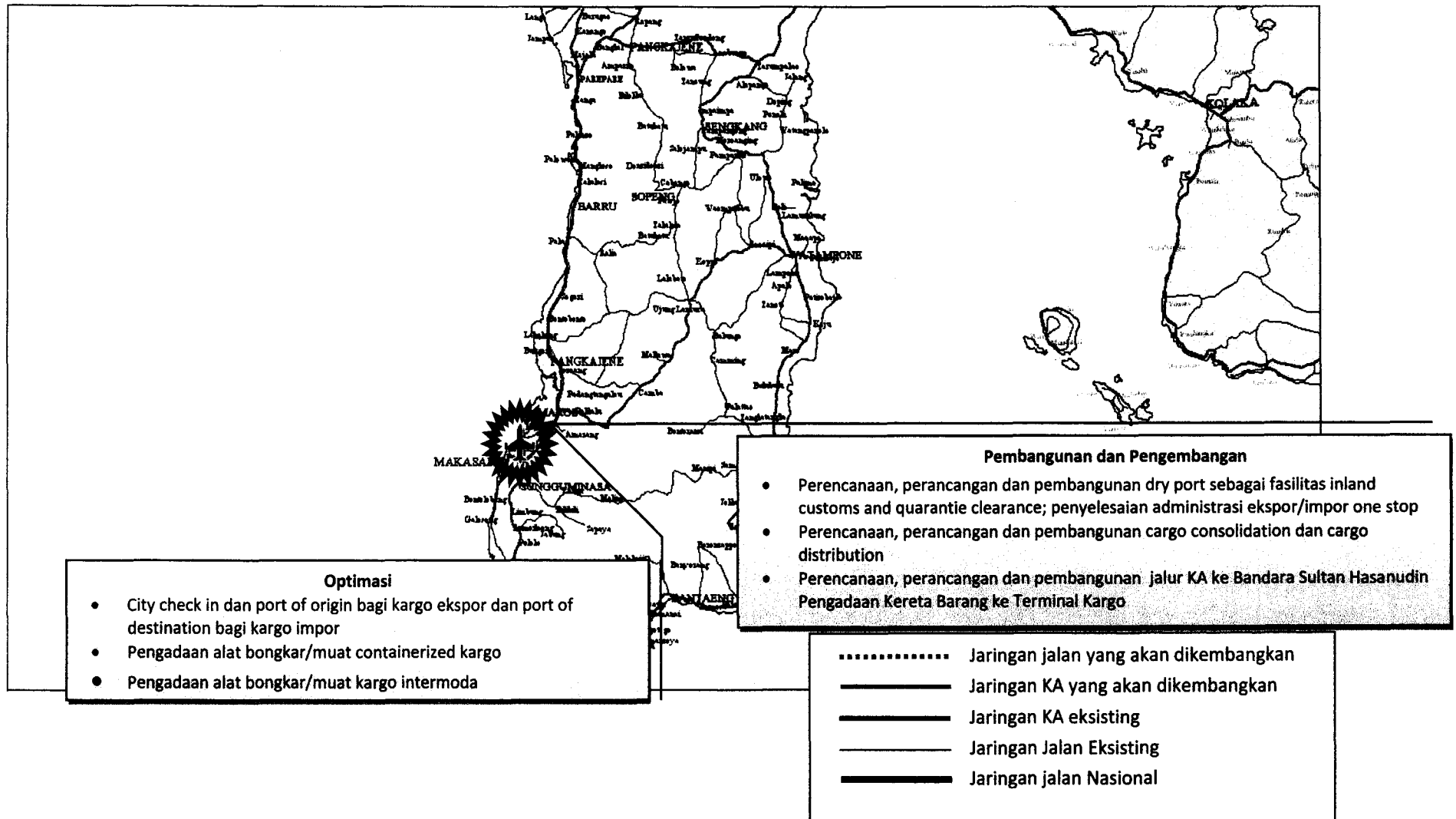
**GAMBAR L3-5 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG
DI BANDAR UDARA HANG NADIM - BATAM**



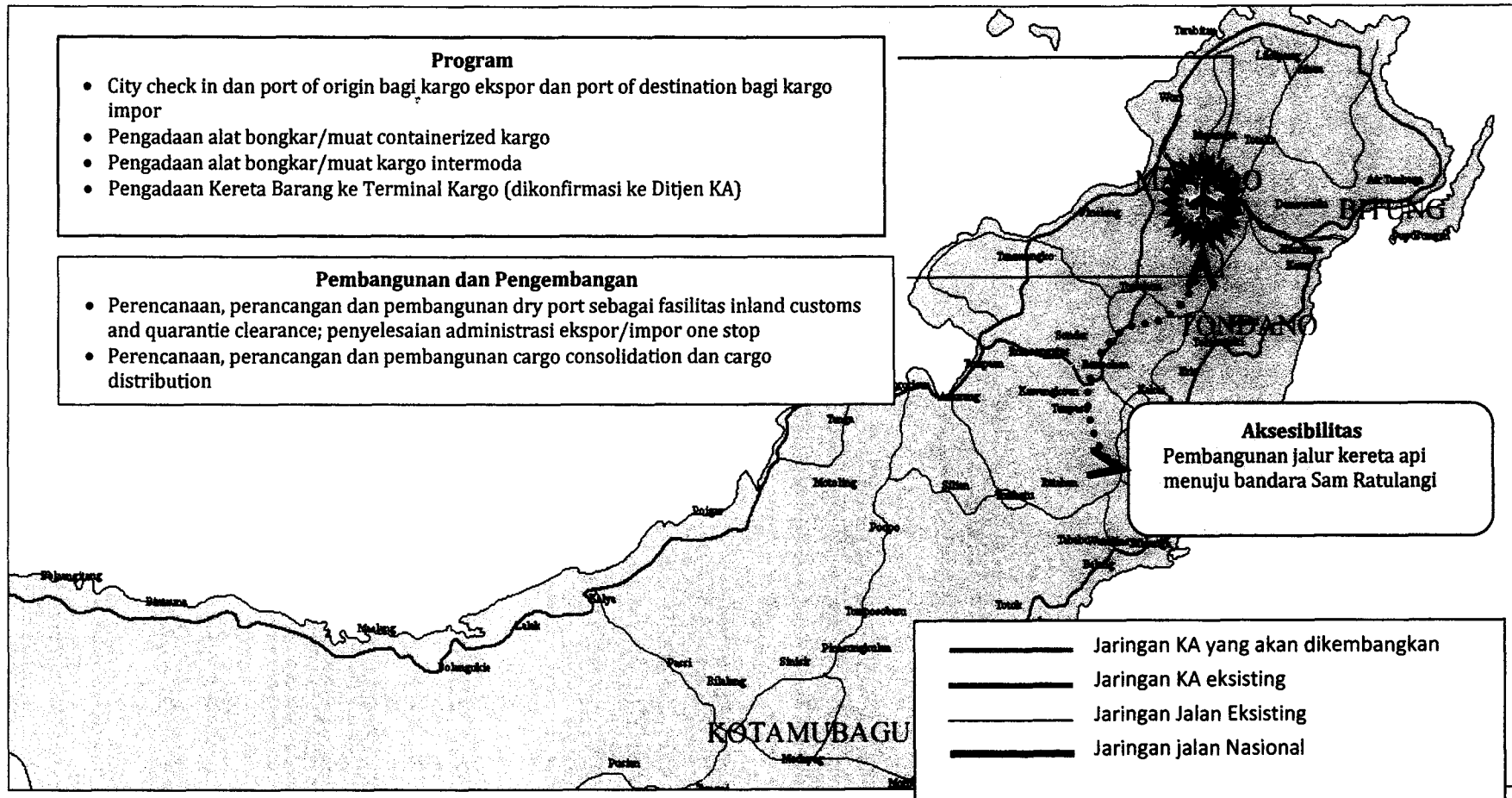
**GAMBAR L3-6 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG
DI BANDAR UDARA ADI SUCIPTO - DI YOGYAKARTA**



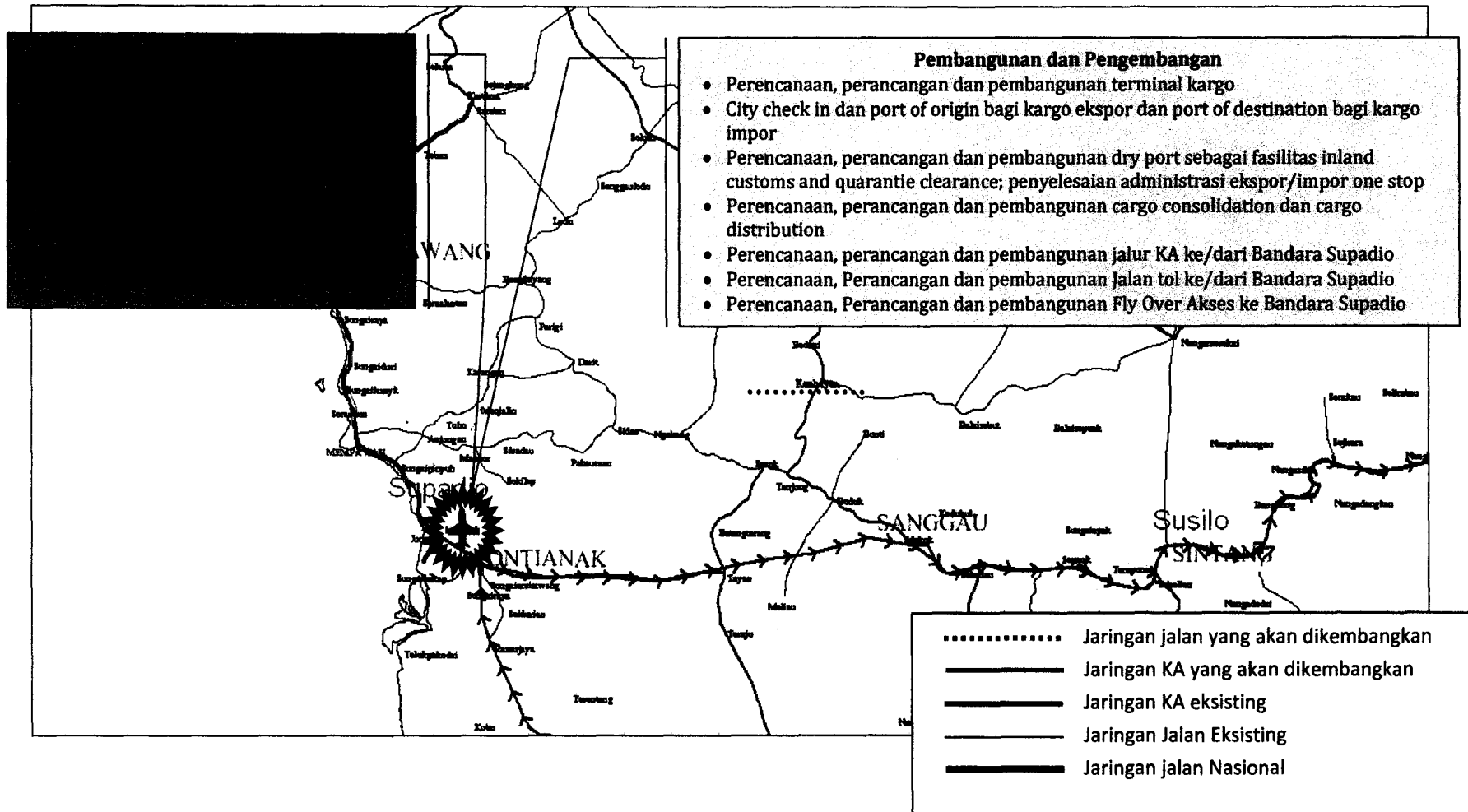
GAMBAR L3-7 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI BANDAR UDARA SULTAN HASANUDIN - SULAWESI SELATAN



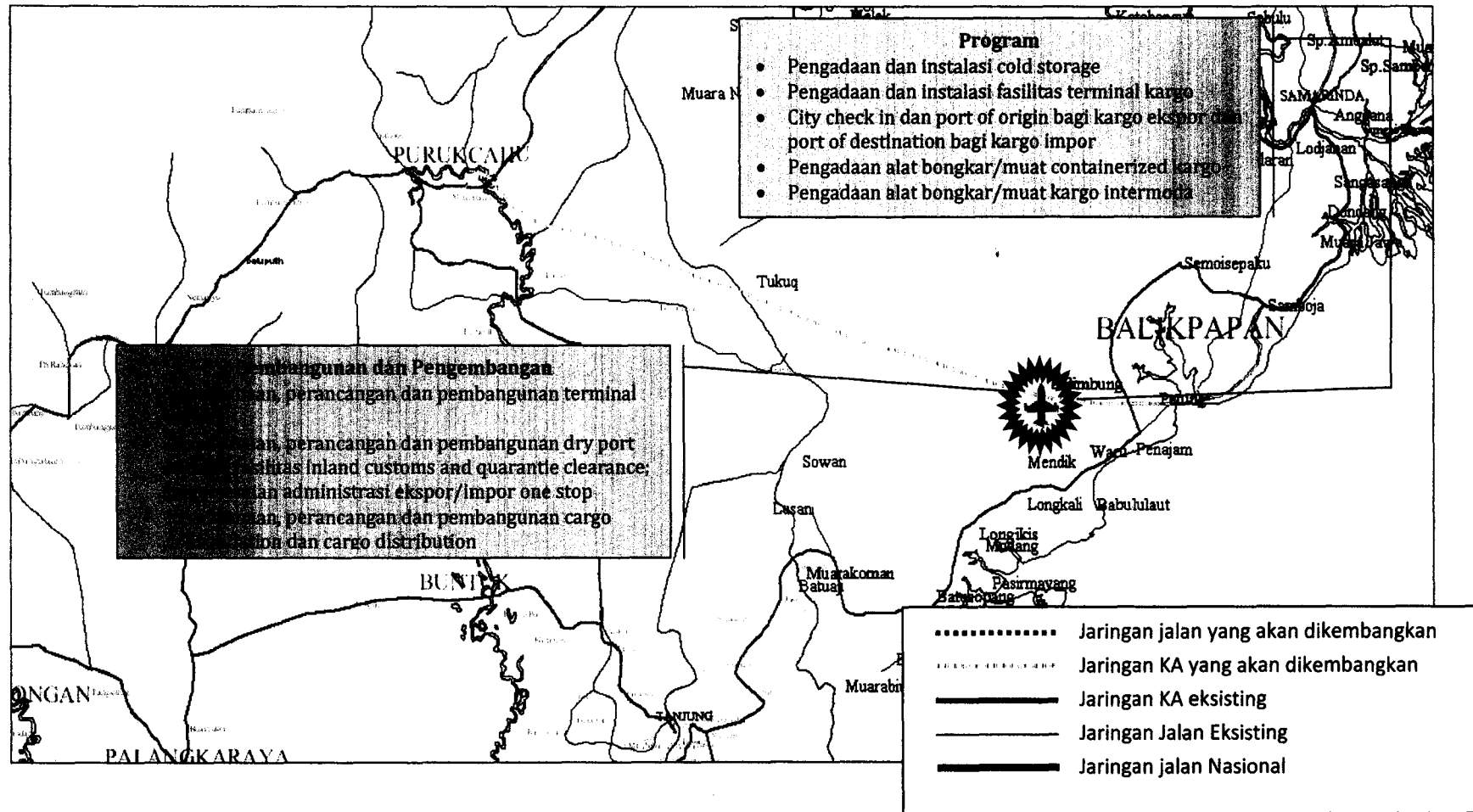
**GAMBAR L3-8 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG
DI BANDAR UDARA SAM RATULANGI - SULAWESI UTARA**



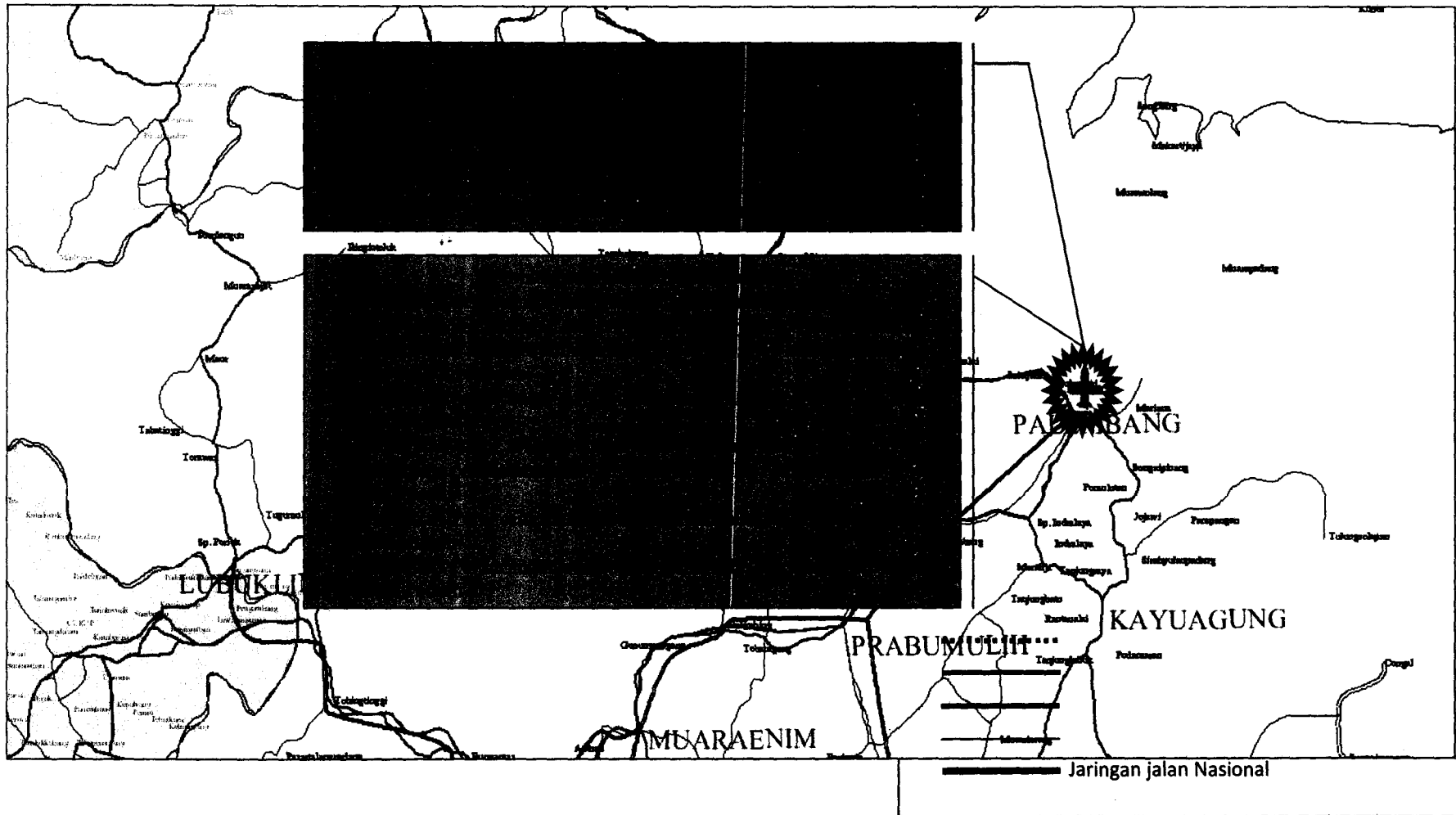
GAMBAR L3-9 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI BANDAR UDARA SUPADIO – KALIMANTAN BARAT



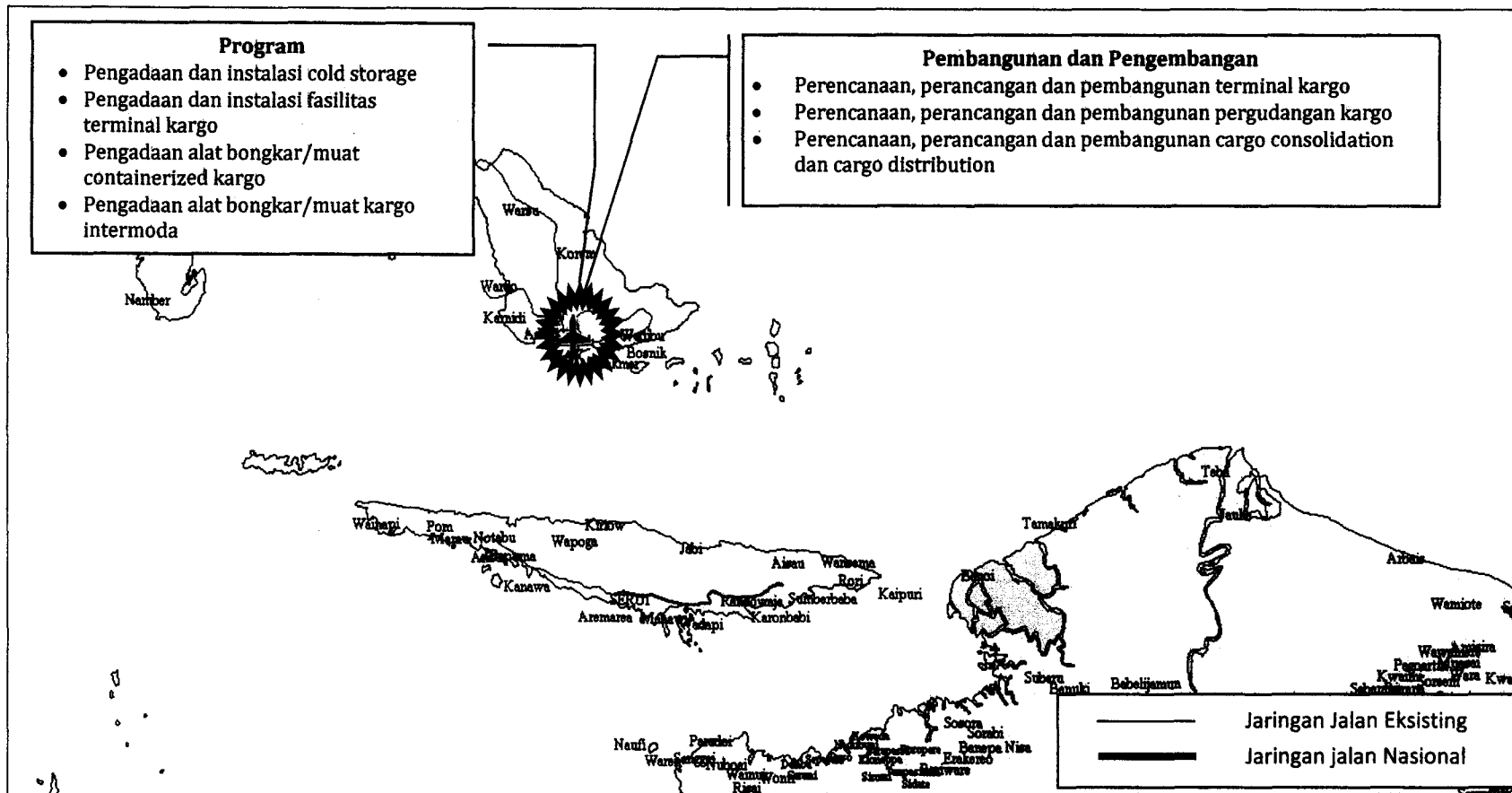
GAMBAR L3-10 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI BANDAR UDARA SEPINGGAN - KALIMANTAN TIMUR



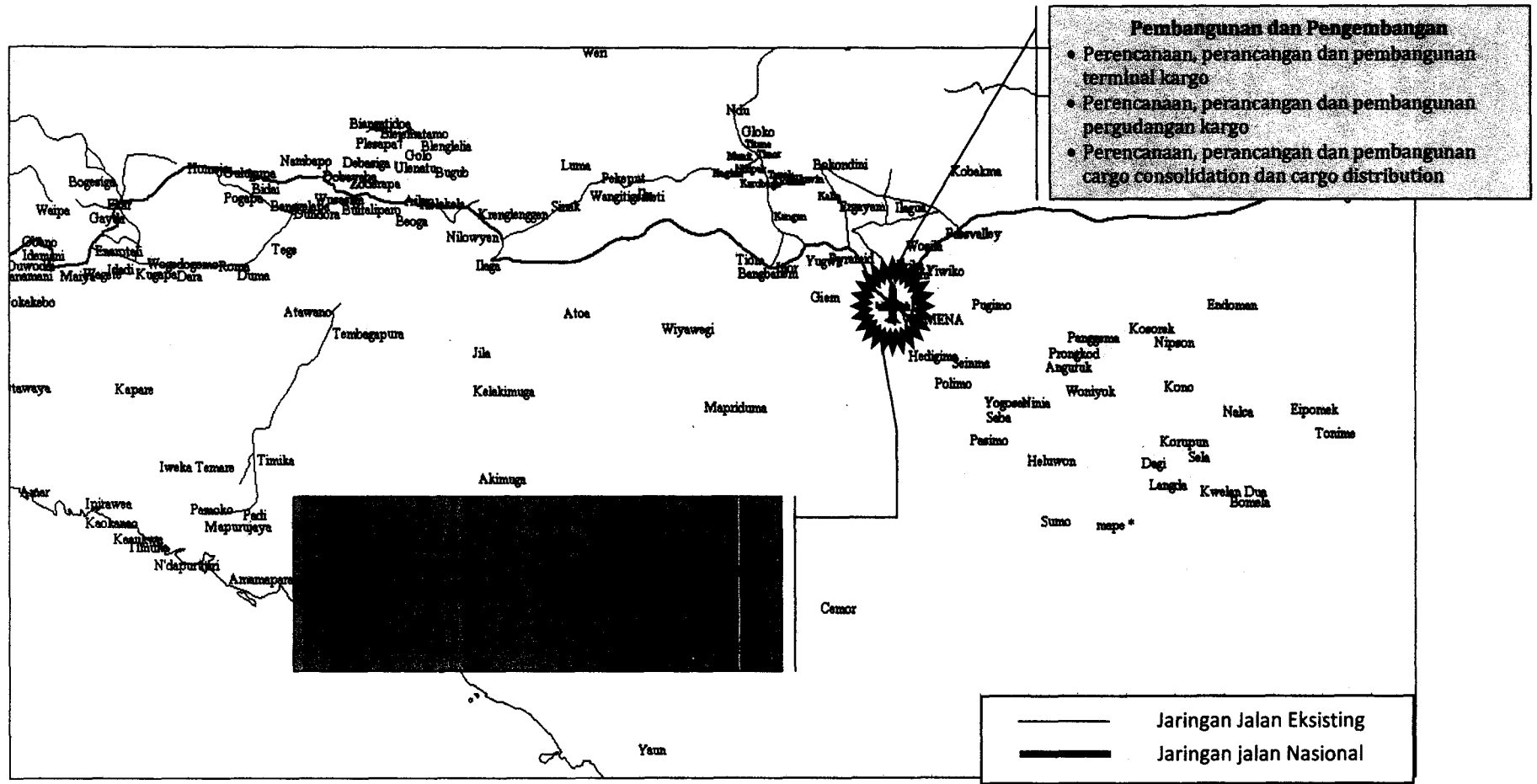
**GAMBAR L3-11 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG
DI BANDAR UDARA SM.BADARUDIN II – SUMATERA SELATAN**



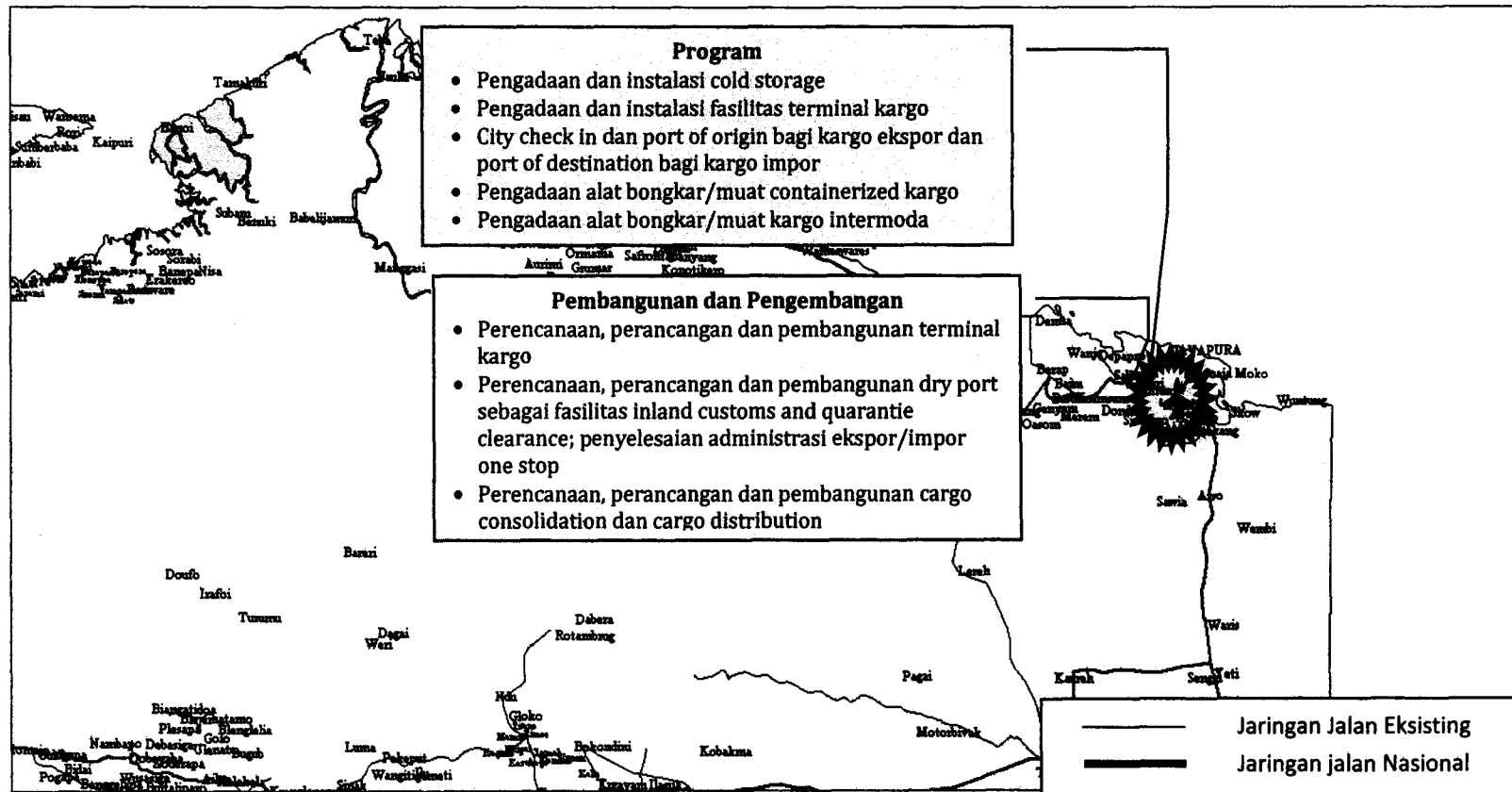
GAMBAR L3-12 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI BANDAR UDARA F. KAISIEPO - PAPUA



GAMBAR L3-13 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI BANDAR UDARA WAMENA - PAPUA



GAMBAR L3-14 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN ARUS BARANG DI BANDAR UDARA SENTANI - PAPUA



LAMPIRAN 4.

**MATRIKS PROGRAM PENGEMBANGAN ANTARMODA/MULTIMODA
UNTUK PENINGKATAN KELANCARAN MOBILITAS ORANG DI KOTA METROPOLITAN**

LAMPIRAN 4.
MATRIKS PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA
UNTUK PENINGKATAN KELANCARAN MOBILITAS ORANG DI KOTA METROPOLITAN

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
1.	MEBIDANGRO (MEDAN-BINJAI-DELI-SERDANG-KARO)												
	Optimasi												
	• Pengaturan hari kerja untuk mengurangi konsentrasi kegiatan (pengaturan jam sekolah)	Tersedianya regulasi pergerakan	Distribusi pergerakan merata	Mebidangro dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumut, Pemkot. Medan	Kemen. PAN Kemennaker
	• Sosialisasi/kampanye ketertiban lalu lintas dan angkutan perkotaan	Pemahaman tertib lalu lintas	Tertib lalu lintas	Mebidangro dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumut, Pemkot. Medan	Polri
	• Peningkatan pajak dan parkir untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi	Tersedianya regulasi kendaraan pribadi	Menurunnya penggunaan kendaraan pribadi	Mebidangro dan sekitarnya								Pemprov. Sumut, Pemkot. Medan	Kemenkeu, Polri
	• Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional perkotaan termasuk penyediaan fasilitas pejalan kaki	Manajemen lalu lintas yang lebih baik	Kelancaran arus lalu lintas	Mebidangro dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumut, Pemkot. Medan	Polri
	• Penerapan <i>city check-in</i> untuk pelayanan keberangkatan penumpang angkutan udara	Tersedianya <i>city check in</i>	Kelancaran pelayanan ke bandar udara	Mebidangro dan sekitarnya								Perusahaan Penerbangan	Ditjen Phb. Udara, Pemprov. Sumut, Pemkot. Medan
	• Pengembangan ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>) dan teknologi informasi lalu lintas perkotaan	Tersedianya dan diterapkannya perangkat pengendali lalu lintas	Terkendalinya lalu lintas yang efisien dan terintegrasi	Mebidangro dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumut, Pemkot. Medan	Polri
	• Pengembangan <i>database</i> transportasi perkotaan	Tersedianya data dan informasi lalu lintas yang akurat	Manajemen lalu lintas semakin tepat	Mebidangro dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumut, Pemkot. Medan	Polri
	• Penataan jalur pedestrian dalam kawasan <i>transit oriented destination</i>	Tersedianya manajemen pedestrian	Kenyamanan dan keamanan pejalan kaki	Mebidangro dan sekitarnya								Pemkot. Medan	Pemprov. Sumut
	Pengembangan dan Pembangunan												
	• Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung serta pengoperasian BRT di Medan	Tersedianya BRT di Medan	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Medan dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemkot. Medan	Pemprov. Sumut

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum pengumpan BRT di Medan	Terintegrasinya layanan angkutan umum dengan BRT	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Medan dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemkot Medan	Pemprov. Sumut	
	• Pengembangan angkutan pemadu moda dari dan ke bandar udara	Tersedianya pelayanan angkutan pemadu moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Mebidangro dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumut	Pemkot. Medan	
	• Pembangunan/pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas perpindahan transportasi multi-moda di terminal, bandar udara, stasiun kereta api dan/atau halte	Tersedianya fasilitas alih moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Mebidangro dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumut	Pemkot. Medan	
	• Pengembangan KA perkotaan Medan dan sekitarnya (Mebidangro)	Tersedianya pelayanan transportasi KA perkotaan	Meningkatnya pelayanan transportasi KA perkotaan	Mebidangro dan sekitarnya							Ditjen Perkeretaapian	Pemkot./kab. Mebidangro Pemprov. Sumut, PT. KAI	
	• Pembangunan Terminal Labuhan yang terintegrasi dengan stasiun KA	Terintegrasinya simpul transportasi	Meningkatnya pelayanan antarmoda	Mebidangro dan sekitarnya							Pemkot. Medan	Pemprov.. Sumut, PT. KAI	
	• Pembangunan lingkhar luar paling luar (<i>outer-outer ring road</i>)	Tersedianya <i>outer-outer ring road</i>	Kelancaran arus lalu lintas	Mebidangro dan sekitarnya							Ditjen Bina Marga	Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumut, Pemkot. Medan	
	• Pembangunan jalan layang Jamin Ginting-Medan	Tersedianya jalan layang Jamin Ginting-Medan	Kelancaran arus lalu lintas dan KA	Medan dan sekitarnya							Ditjen Bina Marga	Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumut, Pemkot. Medan	
	• Pembangunan fasilitas <i>transfer point</i> di Bandara Kualanamu untuk mendukung pelayanan angkutan pemadu moda	Tersedianya fasilitas <i>transfer point</i>	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan angkutan	Deli Serdang							Pemprov. Sumut	Ditjen Phb. Udara, PT. Angkasa Pura II	
	• Pembangunan jalan layang Jl. Gatot Subroto (Simpang Pinang Baris)	Tersedianya jalan layang Jl. Gatot Subroto	Kelancaran arus lalu lintas	Mebidangro dan sekitarnya							Pemkot. Medan, Ditjen Bina Marga	Pemkot. Medan, Pemprov. Sumut	
	• Pembangunan jalan tol ruas Medan-Lubuk Pakam-Kualanamu-Tebing Tinggi	Tersedianya jalan tol ruas Medan-Lubuk Pakam-Kualanamu-Tebing Tinggi	Kelancaran arus lalu lintas	Mebidangro dan sekitarnya							Pemkot. Medan, Ditjen Bina Marga	Pemprov. Sumut	
	• Pembangunan jalan tol ruas Medan-Binjai	Tersedianya jalan tol ruas Medan-Binjai	Kelancaran arus lalu lintas	Mebidangro dan sekitarnya							Pemkot. Medan, Ditjen Bina Marga	Pemprov. Sumut	
	• Pembangunan <i>underpass</i> Simpang Titi Kuning	Tersedianya <i>underpass</i> Simpang Titi Kuning	Kelancaran arus lalu lintas	Mebidangro dan sekitarnya							Pemkot. Medan, Ditjen Bina Marga	Pemprov. Sumut	

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan jembatan layang (<i>fly over</i>) - Simpang Pondok Kelapa	Tersedianya jembatan layang (<i>fly over</i>)-Simpang Pondok Kelapa	Kelancaran arus lalu lintas	Mebidangro dan sekitarnya							Pemkot. Medan, Ditjen Bina Marga	Pemprov. Sumut	
	• Pembangunan terminal terpadu CBD Polonia (eks bandara)	Tersedianya terminal terpadu CBD Polonia	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan angkutan	Medan							Pemkot. Medan	Pemprov. Sumut	
	• Pembangunan jalan layang CBD Polonia ke Jalan Halad	Tersedianya jalan layang CBD Polonia ke Jalan Halad	Kelancaran arus lalu lintas	Mebidangro dan sekitarnya							Pemkot. Medan	Pemprov. Sumut	
	• Pembangunan jalan lingkar utara dan selatan ke arah sisi timur untuk <i>connecting</i> dengan bandara Kualanamu.	Tersedianya jalan lingkar utara dan selatan ke arah sisi timur	Kelancaran arus lalu lintas	Mebidangro dan sekitarnya							Pemkot. Medan, Ditjen Bina Marga	Pemprov. Sumut	
	• Pembangunan jalan layang tidak sebidang dengan KA di <i>ringroad</i> Binjai	Tersedianya jalan layang tidak sebidang dengan KA di <i>ringroad</i> Binjai	Kelancaran arus lalu lintas	Mebidangro dan sekitarnya							Pemkot. Medan, Ditjen Bina Marga	Pemprov. Sumut	
2.	PALEMBANG												
	Optimasi												
	• Pengaturan hari kerja untuk mengurangi konsentrasi kegiatan	Tersedianya regulasi pergerakan	Distribusi pergerakan merata	Palembang dan sekitarnya							Pemkot. Palembang	Kemen PAN Kemennaker	
	• Sosialisasi/kampanye ketertiban lalu lintas dan angkutan perkotaan	Pemahaman tertib lalu lintas	Tertib lalu lintas	Palembang dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumsel, Pemkot. Palembang	Polri	
	• Peningkatan pajak dan parkir di CBD (<i>Central Bussiness Development</i>) untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi	Tersedianya regulasi kendaraan pribadi	Menurunnya penggunaan kendaraan pribadi	Palembang dan sekitarnya							Pemkot. Palembang	Kemenkeu	
	• Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional perkotaan termasuk penyediaan fasilitas pejalan kaki	Manajemen lalu lintas yang lebih baik	Kelancaran arus lalu lintas	Palembang dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumsel, Pemkot. Palembang	Polri	
	• Pengembangan ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>) dan teknologi informasi lalu lintas perkotaan	Tersedianya dan diterapkannya perangkat pengendali lalu lintas	Terkendalinya lalu lintas yang efisien dan terintegrasi	Palembang dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumsel, Pemkot. Palembang	Polri	
	• Pengembangan <i>database</i> transportasi perkotaan	Tersedianya data dan informasi lalu lintas yang akurat	Manajemen lalu lintas semakin tepat	Palembang dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumsel, Pemkot. Palembang	Polri	

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan infrastruktur manajemen lalu lintas perkotaan	Manajemen lalu lintas yang lebih baik	Kelancaran arus lalu lintas	Palembang dan sekitarnya							Pemkot. Palembang	Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumsel	
	• Penanganan simpang-simpang kritis di Kota Palembang	Manajemen lalu lintas yang lebih baik	Meningkatnya aksesibilitas dan keterpaduan antar moda	Palembang dan sekitarnya							Pemkot. Palembang		
	• Penyusunan dan penetapan standar pelayanan dan tata cara operasi angkutan umum	Tersedianya standar pelayanan dan tata cara operasi angkutan umum	Meningkatnya kualitas layanan	Palembang dan sekitarnya							Pemkot. Palembang		
	• Pelayanan terpadu antara transportasi perairan dengan transportasi jalan dengan mensinkronkan trayek dan jadwal antara keduanya	Terintegrasinya jaringan antar moda	Meningkatnya keterpaduan antar moda	Palembang dan sekitarnya							Pemkot. Palembang	Pemprov. Sumsel	
	• Sistem informasi parkir pada fasilitas transfer antar moda (dermaga, pelabuhan dan bandara)	Tersedianya sistem informasi parkir	Meningkatnya pelayanan parkir	Palembang dan sekitarnya							Pemkot. Palembang		
Pengembangan dan Pembangunan													
	• Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung serta pengoperasian BRT di Palembang	Tersedianya BRT di Palembang	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Palembang dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemkot. Palembang	Pemprov. Sumsel	
	• Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum pengumpan BRT di Palembang	Terintegrasinya layanan angkutan umum dengan BRT	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Palembang dan sekitarnya							Pemkot. Palembang	Pemprov. Sumsel	
	• Pengembangan angkutan pepadu moda dari dan ke bandar udara	Tersedianya pelayanan angkutan pepadu moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Palembang dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumsel	Pemkot. Palembang	
	• Pembangunan/pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas perpindahan transportasi multi-moda di terminal, bandar udara, stasiun kereta api dan/atau halte	Tersedianya fasilitas alih moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Palembang dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumsel	Pemkot. Palembang	
	• Penyusunan rencana induk jaringan transportasi di wilayah aglomerasi Palembang dan sekitarnya	Tersedianya Rencana Induk Transportasi Perkotaan	Terintegrasinya perencanaan dan penanganan transportasi perkotaan	Palembang dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sumsel, Pemkot. Palembang		
	• Peningkatan pelayanan angkutan perairan (melayani wilayah sekitar sungai Musi, Ogan, Keramasan dan lain-lain)	Meluasnya pelayanan angkutan sungai	Meningkatnya pelayanan angkutan sungai	Palembang dan sekitarnya							Pemkot. Palembang	Pemprov. Sumsel	

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyusunan standar fasilitas transfer dan pindah moda melalui pembangunan terminal multimoda di Karya Jaya	Tersedianya terminal multimoda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Palembang dan sekitarnya							Pemprov. Sumsel, Pemkot. Palembang		
	• Penyusunan konsep integrasi pelayanan dan operasi angkutan umum	Tersusunnya konsep integrasi	Meningkatnya keterpaduan antarmoda	Palembang dan sekitarnya							Pemkot. Palembang		
	• Pembuatan fasilitas perpindahan moda penumpang antar angkutan darat	Tersedianya fasilitas alih moda	Meningkatnya pelayanan dan keterpaduan antarmoda	Palembang dan sekitarnya							Pemkot. Palembang		
	• Pembuatan fasilitas perpindahan moda penumpang antar angkutan darat-sungai/laut	Tersedianya fasilitas alih moda	Meningkatnya pelayanan dan keterpaduan antarmoda	Palembang dan sekitarnya							Pemkot. Palembang		
	• Pembangunan KA perkotaan Palembang dan sekitarnya	Tersedianya pelayanan transportasi KA perkotaan	Meningkatnya pelayanan transportasi KA perkotaan	Palembang dan sekitarnya							Ditjen Perkeretaapian	Pemprov. Sumsel Pemkot. Palembang	
	• Pemberdayaan sungai dan angkutan sungai di kota Palembang	Tersedianya jaringan angkutan sungai	Meningkatnya aksesibilitas dan keterpaduan antarmoda	Palembang dan sekitarnya							Pemkot. Palembang		
	• Pembangunan Jembatan Musi III dan jalan akses 25 km	Tersedianya Jembatan Musi III	Meningkatnya aksesibilitas	Palembang dan sekitarnya							Ditjen Bina Marga	Pemprov. Sumsel	
	• Pembangunan jalan lingkar barat dan lingkar timur Palembang	Tersedianya jalan lingkar barat dan lingkar timur	Meningkatnya aksesibilitas	Palembang dan sekitarnya							Ditjen Bina Marga	Pemprov. Sumsel	
	• Pembangunan Jembatan Kramasan (lanjutan)	Tersedianya Jembatan Kramasan	Meningkatnya aksesibilitas	Palembang dan sekitarnya							Ditjen Bina Marga	Pemprov. Sumsel	
	• Pembangunan duplikasi Jembatan Musi II	Tersedianya duplikasi Jembatan Musi II	Meningkatnya aksesibilitas	Palembang dan sekitarnya							Ditjen Bina Marga	Pemprov. Sumsel	
	• Pembangunan jalan tol Palembang-Betung	Tersedianya jalan tol Palembang-Betung	Meningkatnya aksesibilitas	Palembang dan sekitarnya							Ditjen Bina Marga	Pemprov. Sumsel	
3.	JABODETABEK (JAKARTA-BOGOR-DEPOK-TANGERANG-BEKASI)												
	Optimasi												
	• Pengaturan hari kerja untuk mengurangi konsentrasi kegiatan	Tersedianya regulasi pergerakan	Distribusi pergerakan merata	Jabodetabek							Pemprov.,kot se- Jabodetabek	Kemen PAN Kemennaker	
	• Sosialisasi/kampanye ketertiban lalu lintas dan angkutan perkotaan	Pemahaman tertib lalu lintas	Tertib lalu lintas	Jabodetabek dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. DKI Jakarta, Jabar, Banten, Pemkot. Jabodetabek	Polri	

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014								
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan pajak dan parkir untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi	Tersedianya regulasi kendaraan pribadi	Menurunnya penggunaan kendaraan pribadi	Jabodetabek								Pemprov. DKI Jakarta, Jabar, Banten, Pemkot. Jabodetabek	Kemenkeu
	• Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional perkotaan termasuk penyediaan fasilitas pejalan kaki	Manajemen lalu lintas yang lebih baik	Kelancaran arus lalu lintas	Jabodetabek dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. DKI Jakarta, Jabar, Banten, Pemkot. Jabodetabek	Polri
	• Penerapan <i>city check-in</i> untuk pelayanan keberangkatan penumpang angkutan udara	Tersedianya <i>city check in</i>	Kelancaran pelayanan ke bandar udara	Jabodetabek								Perusahaan Penerbangan	Ditjen Phb. Udara, Pemprov. DKI Jakarta, Jabar, Banten, Pemkot. Jabodetabek
	• Pengembangan ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>) dan teknologi informasi lalu lintas perkotaan	Tersedianya dan diterapkannya perangkat pengendali lalu lintas	Terkendalinya lalu lintas yang efisien dan terintegrasi	Jabodetabek dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. DKI Jakarta, Jabar, Banten, Pemkot. Jabodetabek	Polri
	• Pengembangan <i>database</i> transportasi perkotaan	Tersedianya data dan informasi lalu lintas yang akurat	Manajemen lalu lintas semakin tepat	Jabodetabek dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. DKI Jakarta, Jabar, Banten, Pemkot. Jabodetabek	Polri
Pengembangan dan Pembangunan													
	• Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung serta pengoperasian BRT di Jabodetabek	Tersedianya BRT di Jabodetabek	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Jabodetabek dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemkot. Jabodetabek	Pemprov. DKI Jakarta, Jabar, Banten
	• Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum pengumpan BRT di Jabodetabek	Terintegrasinya layanan angkutan umum dengan BRT	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Jabodetabek dan sekitarnya								Pemkot. Jabodetabek	Pemprov. DKI Jakarta, Jabar, Banten
	• Pengembangan angkutan pepadu moda dari dan ke bandar udara	Tersedianya pelayanan angkutan pepadu moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Jabodetabek dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. DKI Jakarta, Jabar, Banten	Pemkot. Jabodetabek
	• Pembangunan/pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas perpindahan transportasi multi-moda di terminal, bandar udara, stasiun kereta api dan/atau halte	Tersedianya fasilitas alih moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Jabodetabek dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. DKI Jakarta, Jabar, Banten	Pemkot. Jabodetabek
	• Pembangunan jalur ganda Serpong-Maja (termasuk elektrifikasi)	Tersedianya jalur ganda Serpong-Maja sepanjang 32 Km	Meningkatnya kecepatan dan kapasitas	Jabodetabek								Ditjen Perkeretaapian	Pemprov. DKI Jakarta dan Banten, Pemkot. Jabodetabek, PT. KAI

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
					2010 s.d 2014							2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan jalur ganda Duri-Tangerang (termasuk elektrifikasi)	Tersedianya jalur ganda Duri-Tangerang sepanjang 19 Km	Meningkatnya kecepatan dan kapasitas	Jabodetabek							Ditjen Perkeretaapian	Pemda, PT. KAI	
	• Pembangunan <i>double double track</i> (Manggarai- Cikarang)	Tersedianya <i>double-double track</i> Manggarai-Cikarang sepanjang 34 Km	Pemisahan operasi KA Perkotaan dengan KA antar kota	Jabodetabek							Ditjen Perkeretaapian	Pemda, PT. KAI	
	• Pengembangan koridor MRT(<i>Mass Rapid Transit</i>) untuk jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas	Tersedianya jaringan MRT Lebak Bulus-Dukuh Atas	Meningkatnya aksesibilitas dan keterpaduan antarmoda	Jabodetabek							Ditjen Perkeretaapian	Pemprov. DKI Jakarta	
	• Pembangunan/perpanjangan MRT (<i>Mass Rapid Transit</i>) antara Dukuh Atas-Kota	Tersedianya jaringan MRT Dukuh Atas-Kota	Meningkatnya aksesibilitas dan keterpaduan antarmoda	Jabodetabek							Ditjen Perkeretaapian	Pemprov. DKI Jakarta	
	• Pembangunan MRT (<i>Mass Rapid Transit</i>) barat-timur wilayah Jakarta	Tersedianya jaringan MRT barat-timur wilayah Jakarta	Meningkatnya aksesibilitas dan keterpaduan antarmoda	Jabodetabek							Ditjen Perkeretaapian	Pemprov. DKI Jakarta	
	• Pembangunan <i>Monorail</i> Jakarta	Tersedianya <i>monorail</i> di Jakarta	Meningkatnya aksesibilitas dan keterpaduan antarmoda	Jabodetabek							Ditjen Perkeretaapian	Pemprov. DKI Jakarta	
	• Pengembangan koridor berbasis rel pada koridor Pulogebang-Kp. Melayu-Casablanca-Tomang-Sentra Primer Barat	Tersedianya jaringan kereta api perkotaan	Meningkatnya aksesibilitas dan keterpaduan antarmoda	Jabodetabek							Pemprov. DKI Jakarta	Ditjen Perkeretaapian	
	• Pengoperasian Trans Pakuan dengan rute Baranangsiang-Jalan Baru-Terminal Bubulak	Beroperasinya Trans Pakuan Baranangsiang-Jalan baru-Terminal Bubulak	Meningkatnya aksesibilitas	Bogor dan sekitarnya							Pemkot. Bogor		
	• Relokasi Terminal Baranangsiang ke Ciluar Bogor Utara	Terelokasinya terminal Baranangsiang ke Ciluar	Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas	Bogor dan sekitarnya							Pemkot. Bogor	Pemprov. Jabar Ditjen Phb. Darat	
	• Pembangunan terminal tipe C di Ciawi	Tersedianya terminal tipe C di Ciawi	Meningkatnya aksesibilitas	Bogor dan sekitarnya							Pemkot. Bogor		
	• Pembangunan Jalan Tol Sentul City-Dramaga Bogor (<i>Bogor Ring Road</i>)	Tersedianya jaringan jalan tol Sentul City-Dramaga Bogor	Meningkatnya aksesibilitas Bogor-Jakarta	Jakarta, Bogor							Ditjen Bina Marga		
	• Pembangunan jalan Tajur-Muarasari-Ciomas-Dramaga(<i>Inner Ring Road</i>)	Tersedianya jaringan jalan Tajur-Muarasari-Ciomas-Dramaga(<i>Inner Ring Road</i>)	Meningkatnya aksesibilitas ke kegiatan perekonomian	Bogor							Ditjen Bina Marga		
	• Pembangunan lingkaran utara Bogor sepanjang Tanah Baru - Parung Banteng -Tajur (R3)	Tersedianya jaringan jalan lingkaran utara Bogor sepanjang Tanah Baru - Parung Banteng -Tajur (R3)	Meningkatnya aksesibilitas	Bogor							Ditjen Bina Marga		

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan jalan layang di perlintasan sebidang utama (Jl. Jampea, dll)	Tersedianya jaringan jalan layang di perlintasan sebidang utama	Meningkatnya aksesibilitas	Jakarta dan sekitarnya	■	■	■	■	■	■		Ditjen Bina Marga	Ditjen Perkeretaapian
	• Pembangunan jalan layang Rawa Buaya dan Suprpto	Tersedianya jaringan jalan layang Rawa Buaya dan Suprpto	Meningkatnya aksesibilitas	Jakarta dan sekitarnya	■	■	■					Ditjen Bina Marga	Ditjen Perkeretaapian
	• Pembangunan jalan layang Simpang Gapek-Ciputat	Tersedianya jaringan jalan layang Simpang Gapek-Ciputat	Meningkatnya aksesibilitas	Jakarta, Bogor, Tangerang		■	■					Ditjen Bina Marga	Ditjen Perkeretaapian
	• Pembangunan jalan layang Bulak Kapal-Bekasi	Tersedianya jaringan jalan layang Bulak Kapal-Bekasi	Meningkatnya aksesibilitas	Jakarta, Bekasi				■	■	■		Ditjen Bina Marga	Ditjen Perkeretaapian
	• Pembangunan Jakarta Outer Ring Road (JORR) I	Tersedianya Jakarta Outer Ring Road (JORR) I	Meningkatnya kapasitas jalan	Jabodetabek	■	■	■	■	■			Ditjen Bina Marga	
	• Pembangunan Jakarta Outer Ring Road (JORR) II	Tersedianya Jakarta Outer Ring Road (JORR) II	Meningkatnya kapasitas jalan	Jabodetabek	■	■	■	■	■			Ditjen Bina Marga	
4.	BANDUNG RAYA												
	Optimasi												
	• Pengaturan hari kerja untuk mengurangi konsentrasi kegiatan	Tersedianya regulasi pergerakan	Distribusi pergerakan merata	Bandung dan sekitarnya	■	■	■					Pemkot. Bandung Pemprov. Jabar	Kemen PAN Kemennaker
	• Peningkatan pajak dan parkir untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi	Tersedianya regulasi kendaraan pribadi	Menurunnya penggunaan kendaraan pribadi	Bandung dan sekitarnya		■	■	■				Pemkot. Bandung Pemprov. Jabar	Kemenkeu
	• Sosialisasi/kampanye ketertiban lalu lintas dan angkutan perkotaan	Pemahaman tertib lalu lintas	Tertib lalu lintas	Bandung dan sekitarnya	■	■	■					Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jabar, Pemkot. Bandung	Polri
	• Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional perkotaan termasuk penyediaan fasilitas pejalan kaki	Manajemen lalu lintas yang lebih baik	Kelancaran arus lalu lintas	Bandung dan sekitarnya	■	■	■	■	■			Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jabar, Pemkot. Bandung	Polri
	• Pengembangan ATCS (Area Traffic Control System) dan teknologi informasi lalu lintas perkotaan	Tersedianya dan diterapkannya perangkat pengendali lalu lintas	Terkendalnya lalu lintas yang efisien dan terintegrasi	Bandung dan sekitarnya		■	■	■	■			Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jabar, Pemkot. Bandung	Polri
	• Pengembangan database transportasi perkotaan	Tersedianya data dan informasi lalu lintas yang akurat	Manajemen lalu lintas semakin tepat	Bandung dan sekitarnya	■	■						Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jabar, Pemkot. Bandung	Polri

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN								PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030			
					2010	2011	2012	2013	2014					
Pengembangan dan Pembangunan														
	• Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung serta pengoperasian BRT di Bandung	Tersedianya BRT di Bandung	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Bandung dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemkot. Bandung	Pemprov. Jabar	
	• Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum pengumpan BRT di Bandung	Terintegrasinya layanan angkutan umum dengan BRT	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Bandung dan sekitarnya								Pemkot. Bandung	Pemprov. Jabar	
	• Pengembangan angkutan pepadu moda dari dan ke bandar udara	Tersedianya pelayanan angkutan pepadu moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Bandung dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jabar	Pemkot. Bandung	
	• Pembangunan/pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas perpindahan transportasi multi-moda di terminal, bandar udara, stasiun kereta api dan/atau halte	Tersedianya fasilitas alih moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Bandung dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jabar	Pemkot. Bandung	
	• Elektrifikasi Padalarang-Bandung-Cicalengka (termasuk pembangunan jalur ganda Kiaraconong-Cicalengka)	Tersedianya jaringan KA perkotaan sepanjang 42 Km	Meningkatnya kecepatan dan kapasitas	Bandung dan sekitarnya								Ditjen Perkeretaapian	Pemprov. Jabar Pemkot, kab Bandung PT. KAI	
	• Pembangunan perlintasan tidak sebidang	Tersedianya flyover/ underpass	Kelancaran arus lalu lintas dan KA	Bandung dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	Pemkot. Bandung Pemprov. Jabar Ditjen Phb. Darat	
	• Bandung Intra Urban Road	Tersedianya Intra Urban Road	Meningkatnya kapasitas	Bandung dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	Pemkot. Bandung	
	• Jalan tol Cisundawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan)	Tersedianya jalan tol Cisundawu	Meningkatnya kecepatan	Bandung dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	Ditjen Phb. Darat	
	• Jalan tol Soreang- Pasir Koja	Tersedianya jalan tol Soreang-Pasir Koja	Meningkatnya kecepatan	Bandung dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	Ditjen Phb. Darat	
	• Pembangunan jalan layang Nagreg Bandung	Tersedianya jalan layang Nagreg Bandung	Meningkatnya aksesibilitas	Bandung dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga		
	• Pembangunan jalan layang Kopo Bandung	Tersedianya jalan layang Kopo Bandung	Meningkatnya aksesibilitas	Bandung dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga		
	• Pembangunan jalan layang Buah Batu Bandung	Tersedianya jalan layang Buah Batu Bandung	Meningkatnya aksesibilitas	Bandung dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga		
	• Pembangunan jalan layang Pasir Koja Bandung	Tersedianya jalan layang Pasir Koja Bandung	Meningkatnya aksesibilitas	Bandung dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga		

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan jalan layang Kiara Condong Bandung	Tersedianya jalan layang Kiara Condong Bandung	Meningkatnya aksesibilitas	Bandung dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	
	• Pembangunan jalan lingkaran Bandung	Tersedianya jalan lingkaran Bandung	Meningkatnya aksesibilitas	Bandung dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	
5. KEDUNGSEPUR (KENDAL-DEMAK-UNGERAN-SEMARANG-PURWODADI)													
Optimasi													
	• Pengaturan hari kerja untuk mengurangi konsentrasi kegiatan	Tersedianya regulasi pergerakan	Distribusi pergerakan merata	Semarang dan sekitarnya								Pemprov. Jateng, Pemkot, kab Kedungsepur	Kemen PAN Kemennaker
	• Pengaturan pajak dan parkir untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi	Tersedianya regulasi kendaraan pribadi	Menurunnya penggunaan kendaraan pribadi	Semarang dan sekitarnya								Pemprov. Jateng, Pemkot, kab Kedungsepur	Kemenkeu
	• Sosialisasi/kampanye ketertiban lalu lintas dan angkutan perkotaan	Pemahaman tertib lalu lintas	Tertib lalu lintas	Semarang dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jateng, Pemkot. Semarang	Polri
	• Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional perkotaan termasuk penyediaan fasilitas pejalan kaki	Manajemen lalu lintas yang lebih baik	Kelancaran arus lalu lintas	Semarang dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jateng, Pemkot. Semarang	Polri
	• Pengembangan ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>) dan teknologi informasi lalu lintas perkotaan	Tersedianya dan diterapkannya perangkat pengendali lalu lintas	Terkendalnya lalu lintas yang efisien dan terintegrasi	Semarang dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jateng, Pemkot. Semarang	Polri
	• Pengembangan <i>database</i> transportasi perkotaan	Tersedianya data dan informasi lalu lintas yang akurat	Manajemen lalu lintas semakin tepat	Semarang dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jateng, Pemkot. Semarang	Polri
Pengembangan dan Pembangunan													
	• Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung serta pengoperasian BRT di Semarang	Tersedianya BRT di Semarang	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Semarang dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemkot. Semarang	Pemprov. Jateng
	• Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum pengumpan BRT di Semarang	Terintegrasinya layanan angkutan umum dengan BRT	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Semarang dan sekitarnya								Pemkot. Semarang	Pemprov. Jateng
	• Pengembangan angkutan pepadu moda dari dan ke bandar udara	Tersedianya pelayanan angkutan pepadu moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Semarang dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jateng	Pemkot. Semarang

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan/pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas perpindahan transportasi multi-moda di terminal, bandar udara, stasiun kereta api dan/atau halte	Tersedianya fasilitas alih moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Semarang dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jateng	Pemkot. Semarang
	• Pengembangan KA perkotaan Semarang dan sekitarnya (reaktifasi dan elektrifikasi)	Tersedianya pelayanan transportasi KA perkotaan	Meningkatnya kecepatan dan kapasitas	Semarang dan sekitarnya								Ditjen Perkeretaapian	Pemprov. Jateng, Pemkot./kab. Kedungsepur, PT. KAI
	• Pembangunan jalan layang Kalibanteng	Tersedianya jalan layang Kalibanteng	Meningkatnya aksesibilitas	Semarang dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	
	• Pengembangan interkoneksi ke/dari pelabuhan, bandar udara, stasiun dan terminal di Semarang	Terkoneksinya simpul-simpul transportasi di Semarang	Meningkatnya kelancaran arus angkutan penumpang	Semarang dan sekitarnya								Pemprov. Jateng, Pemkot. Semarang	
	• Pengembangan KA di Kedungsepur	Tersedianya jaringan KA di Kedungsepur	Meningkatnya kelancaran arus angkutan penumpang	Semarang dan sekitarnya								Dirjen Perkeretaapian, Pemprov. Jateng.	
	• Penanganan Rob di Pelabuhan Tanjung Emas	Tertanggulangnya Rob di Pelabuhan Tanjung Emas	Meningkatnya kelancaran transportasi laut	Semarang dan sekitarnya								Pemkot. Semarang, PT. Pelindo III	Ditjen Phb. Laut
	• Penanganan Rob di Stasiun Tawang	Tertanggulangnya Rob di Stasiun Tawang	Meningkatnya kelancaran arus penumpang KA	Semarang dan sekitarnya								Pemkot. Semarang, Ditjen Perkeretaapian	
	• Relokasi terminal penumpang Bandara A. Yani Semarang	Terelokasinya terminal penumpang	Meningkatnya pelayanan penumpang di Bandara	Semarang dan sekitarnya								Pemprov. Jateng, PT. Angkasa Pura I	Ditjen Phb. Udara
6.	YOGJAKARTA												
	Optimasi												
	• Pengaturan hari kerja untuk mengurangi konsentrasi kegiatan	Tersedianya regulasi pergerakan	Distribusi pergerakan merata	Yogyakarta dan sekitarnya								Pemprov. DIY, Pemkot. Yogyakarta	Kemen PAN Kemennaker
	• Peningkatan pajak dan parkir untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi	Tersedianya regulasi kendaraan pribadi	Menurunnya penggunaan kendaraan pribadi	Yogyakarta dan sekitarnya								Pemprov. DIY, Pemkot. Yogyakarta	Kemenkeu
	• Sosialisasi/kampanye ketertiban lalu lintas dan angkutan perkotaan	Pemahaman tertib lalu lintas	Tertib lalu lintas	Yogyakarta dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. DIY, Pemkot. Yogyakarta	Polri
	• Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional perkotaan termasuk penyediaan fasilitas pejalan kaki	Manajemen lalu lintas yang lebih baik	Kelancaran arus lalu lintas	Yogyakarta dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. DIY, Pemkot. Yogyakarta	Polri

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pengembangan ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>) dan teknologi informasi lalu lintas perkotaan	Tersedianya dan diterapkannya perangkat pengendali lalu lintas	Terkendalnya lalu lintas yang efisien dan terintegrasi	Yogyakarta dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. DIY, Pemkot. Yogyakarta	Polri
	• Pengembangan <i>database</i> transportasi perkotaan	Tersedianya data dan informasi lalu lintas yang akurat	Manajemen lalu lintas semakin tepat	Yogyakarta dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. DIY, Pemkot. Yogyakarta	Polri
Pengembangan dan Pembangunan													
	• Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung serta pengoperasian BRT di Yogyakarta	Tersedianya BRT di Yogyakarta	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Yogyakarta dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemkot. Yogyakarta	Pemprov. DIY
	• Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum pengumpan BRT di Yogyakarta	Terintegrasinya layanan angkutan umum dengan BRT	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Yogyakarta dan sekitarnya								Pemkot. Yogyakarta	Pemprov. DIY
	• Pengembangan angkutan pepadu moda dari dan ke bandar udara	Tersedianya pelayanan angkutan pepadu moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Yogyakarta dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. DIY	Pemkot. Yogyakarta
	• Pembangunan/pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas perpindahan transportasi multi-moda di terminal, bandar udara, stasiun kereta api dan/atau halte	Tersedianya fasilitas alih moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Yogyakarta dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. DIY	Pemkot. Yogyakarta
	• Pengembangan KA perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya (elektrifikasi Kutoarjo-Yogyakarta-Solo, reaktifasi Yogyakarta-Magelang dan Yogyakarta-Bantul)	Tersedianya jaringan KA perkotaan	Meningkatnya kecepatan dan kapasitas	Yogyakarta dan sekitarnya								Ditjen Perkeretaapian	Pemprov. DIY, Pemkot. Yogyakarta, PT. KAI
	• Pembangunan <i>park and ride</i>	Tersedianya <i>park and ride</i>	Meningkatnya kemudahan alihmoda	Yogyakarta dan sekitarnya								Pemprov. DIY	Pemkot. DIY
7.	GERBANG KERTOSUSILO (GRESIK-BANGKALAN-MOJOKERTO-SURABAYA-SIDOARJO-LAMONGAN)												
Optimasi													
	• Pengaturan hari kerja untuk mengurangi konsentrasi kegiatan	Tersedianya regulasi pergerakan	Distribusi pergerakan merata	Surabaya dan sekitarnya								Pemprov. Jatim, Pemkot. Surabaya	Kemen PAN Kemennaker
	• Peningkatan pajak dan parkir untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi	Tersedianya regulasi kendaraan pribadi	Menurunnya penggunaan kendaraan pribadi	Surabaya dan sekitarnya								Pemprov. Jatim, Pemkot. Surabaya	Kemenkeu

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Sosialisasi/kampanye ketertiban lalu lintas dan angkutan perkotaan	Pemahaman tertib lalu lintas	Tertib lalu lintas	Surabaya dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jatim, Pemkot. Surabaya	Polri	
	• Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional perkotaan termasuk penyediaan fasilitas pejalan kaki	Manajemen lalu lintas yang lebih baik	Kelancaran arus lalu lintas	Surabaya dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jatim, Pemkot. Surabaya	Polri	
	• Pengembangan ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>) dan teknologi informasi lalu lintas perkotaan	Tersedianya dan diterapkannya perangkat pengendali lalu lintas	Terkendalnya lalu lintas yang efisien dan terintegrasi	Surabaya dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jatim, Pemkot. Surabaya	Polri	
	• Pengembangan <i>database</i> transportasi perkotaan	Tersedianya data dan informasi lalu lintas yang akurat	Manajemen lalu lintas semakin tepat	Surabaya dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jatim, Pemkot. Surabaya	Polri	
Pengembangan dan Pembangunan													
	• Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung serta pengoperasian BRT di Surabaya	Tersedianya BRT di Surabaya	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Surabaya dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemkot. Surabaya	Pemprov. Jatim	
	• Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum pengumpan BRT di Surabaya	Terintegrasinya layanan angkutan umum dengan BRT	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Surabaya dan sekitarnya							Pemkot. Surabaya	Pemprov. Jatim	
	• Pengembangan angkutan pepadu moda dari dan ke bandar udara	Tersedianya pelayanan angkutan pepadu moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Surabaya dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jatim	Pemkot. Surabaya	
	• Pembangunan/pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas perpindahan transportasi multi-moda di terminal, bandar udara, stasiun kereta api dan/atau halte	Tersedianya fasilitas alih moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Surabaya dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Jatim	Pemkot. Surabaya	
	• Elektrifikasi dan pembangunan jalur ganda (Lamongan-Pasar Turi-Gubeng-Sidoarjo-Porong, Wonokromo-Tarik-Mojokerto, Gubeng-Sidotopo)	Tersedianya jaringan KA perkotaan sepanjang 124 Km	Meningkatnya kecepatan dan kapasitas	Surabaya dan sekitarnya							Ditjen Perkeretaapian	Pemprov. Jatim, Pemkot./kab. Gerbangkertosusilo, PT. KAI	
	• Pembangunan rel KA <i>double track elevated</i> pada seluruh jaringan di Wilayah kota Surabaya	Tersedianya jaringan rel KA <i>double track elevated</i>	Meningkatnya pelayanan dan pengurangan kemacetan	Surabaya dan sekitarnya							Pemprov. Jatim, Ditjen Perkeretaapian	Pemkot./kab Gerbangkertosusilo, PT. KAI	

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pengembangan Kereta Api (KA) untuk komuter di wilayah Gerbangkertosusila (GKS)	Tersedianya angkutan KA komuter di Gerbangkertosusilo	Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang murah, aman dan nyaman	Surabaya dan sekitarnya								Pemprov. Jatim , Ditjen Perkeretaapian	Pemkot./kab. Gerbangkertosusilo, PT. KAI
	• Pembangunan jalan lingkar (MERR & Lingkar Barat)	Tersedianya jalan lingkar	Meningkatnya kapasitas layanan	Surabaya dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	
	• Pembangunan jalan layang Pasar Kembang	Tersedianya jalan layang Pasar Kembang	Meningkatnya kapasitas layanan	Surabaya dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	
	• Pembangunan jalan layang Wonokromo/Mayangkara	Tersedianya jalan layang Wonokromo/ Mayangkara	Peningkatan kapasitas layanan	Surabaya dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	
	• Pembangunan jalan layang Margorejo ^{*)}	Tersedianya jalan layang Margorejo	Meningkatnya kapasitas layanan	Surabaya dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	
	• Pembangunan jalan layang akses Waru ^{*)}	Tersedianya jalan layang akses Waru	Meningkatnya kapasitas layanan	Surabaya dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	
	• Pembangunan jalan layang Jemursari ^{*)}	Tersedianya jalan layang Jemursari	Meningkatnya kapasitas layanan	Surabaya dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	
	• Pembangunan jalan tol lingkar timur luar dan peningkatan tol Surabaya Gempol (Ruas Waru-Perak)	Tersedianya jalan tol lingkar timur luar dan Surabaya Gempol	Meningkatnya kapasitas layanan	Surabaya dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	Pemprov. Jatim
	• Pembangunan jalan lingkar tengah	Tersedianya jalan lingkar tengah	Meningkatnya kapasitas layanan	Surabaya dan sekitarnya								Pemkot. Surabaya	Pemprov. Jatim, Kemen PU
	• Peningkatan jalan Kali Rungkut Tropodo, pembangunan <i>frontage road</i> Ahmad Yani, pembangunan jalan lingkar barat tengah, peningkatan jalan mastrip dan peningkatan jalan ITS-Kertajaya-Sulawesi-Pandegiling-Banyuurip-Tandes-Benowo	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya kapasitas layanan	Surabaya dan sekitarnya								Pemkot. Surabaya	Pemprov. Jatim, Kemen PU
	• Pembangunan jalan Darmahusada lingkar timur-tengah, pembangunan jalan stadion lingkar luar barat, pembangunan jalan RSUD Surabaya barat-lingkar luar barat.	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya kapasitas layanan	Surabaya dan sekitarnya								Pemkot. Surabaya	Pemprov. Jatim, Kemen PU
	• Pembangunan jalan lingkar barat luar	Tersedianya jalan lingkar barat luar	Meningkatnya kapasitas layanan	Surabaya dan sekitarnya								Pemprov. Jatim, Pemkot. Surabaya Ditjen Bina Marga	

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan jalan tol Waru-Surabaya-Mojokerto	Tersedianya jalan tol Waru- Surabaya-Mojokerto sepanjang 37 Km	Meningkatnya kapasitas layanan	Surabaya dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	Pemprov. Jatim
	• Pembangunan jalan Benowo-Studio-Romo-Kalisari dan peningkatan jalan Kenjeran-Sidorame-Iskandar Muda	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya kapasitas layanan	Surabaya dan sekitarnya								Pemprov. Jatim	Ditjen Bina Marga
8. SARBAGITA (DENPASAR-BADUNG-GIANYAR-TABANAN)													
Optimasi													
	• Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi	Tersedianya regulasi pergerakan	Meningkatnya kelancaran lalu lintas dan pemberian prioritas angkutan umum	Denpasar dan sekitarnya								Pemprov. Bali, Ditjen Phb. Darat, Pemkot./kab. Sarbagita	Polri
	• Peningkatan pajak dan parkir untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi	Tersedianya regulasi kendaraan pribadi	Menurunnya penggunaan kendaraan pribadi	Denpasar dan sekitarnya								Pemprov. Bali, Pemkot./kab. Sarbagita	Kemenkeu
	• Sosialisasi/kampanye ketertiban lalu lintas dan angkutan perkotaan	Pemahaman tertib lalu lintas	Tertib lalu lintas	Denpasar dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Bali, Pemkot. /kab. Sarbagita	Polri
	• Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional perkotaan termasuk penyediaan fasilitas pejalan kaki	Manajemen lalu lintas yang lebih baik	Kelancaran arus lalu lintas	Denpasar dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Bali, Pemkot. /kab. Sarbagita	Polri
	• Pengembangan ATCS (<i>Area Traffic Control System</i>) dan teknologi informasi lalu lintas perkotaan	Tersedianya dan diterapkannya perangkat pengendali lalu lintas	Terkendalnya lalu lintas yang efisien dan terintegrasi	Denpasar dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Bali, Pemkot./kab. Sarbagita	Polri
	• Penyediaan infrastruktur manajemen lalu lintas perkotaan	Manajemen lalu lintas yang lebih baik	Kelancaran arus lalu lintas	Denpasar dan sekitarnya								Pemprov. Bali, Pemkot./kab. Sarbagita	Ditjen Phb. Darat
	• Penanganan simpang-simpang kritis di Kota Denpasar dan sekitarnya	Manajemen lalu lintas yang lebih baik	Peningkatan aksesibilitas dan keterpaduan antar moda	Denpasar dan sekitarnya								Pemprov. Bali, Pemkot./kab. Sarbagita	Ditjen Phb. Darat
	• Pembentukan Badan Layanan Umum	Terbentuknya Badan Layanan Umum	Terintegrasinya pengelolaan LLAJ di Sarbagita	Denpasar dan sekitarnya								Pemprov. Bali, Pemkot./kab. Sarbagita	Ditjen Phb. Darat

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyusunan dan penetapan standar pelayanan dan tata cara operasi angkutan umum	Tersusunnya standar pelayanan dan tata cara operasi angkutan umum	Peningkatan kualitas layanan	Denpasar dan sekitarnya								Pemprov. Bali, Pemkot./kab. Sarbagita	Ditjen Phb. Darat
	• Pengembangan <i>database</i> transportasi perkotaan	Tersedianya data dan informasi lalu lintas yang akurat	Manajemen lalu lintas semakin tepat	Denpasar dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Bali, Pemkot./kab. Sarbagita	Polri
Pengembangan dan Pembangunan													
	• Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung serta pengoperasian angkutan BRT di Sarbagita	Tersedianya BRT di Sarbagita	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Sarbagita dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Bali Pemkot./kab. Sarbagita	Polri
	• Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum pengumpulan angkutan BRT di Sarbagita	Terintegrasinya layanan angkutan umum dengan BRT	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Sarbagita dan sekitarnya								Pemkot./kab. Sarbagita	Pemprov. Bali
	• Pengembangan angkutan pemadu moda dari dan ke bandar udara dan Pelabuhan laut dan terminal transportasi jalan	Tersedianya pelayanan angkutan pemadu moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Denpasar dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Bali	Pemkot. /kab. Sarbagita
	• Pembangunan/pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas perpindahan transportasi multi-moda di terminal, bandar udara, pelabuhan laut dan/atau halte	Tersedianya fasilitas alih moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Denpasar dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Bali	Pemkot. /kab. Sarbagita
	• Perencanaan dan pembangunan khusus lajur sepeda dan sepeda motor di jalan nasional	Tersedianya lajur khusus sepeda dan sepeda motor di jalan nasional	Meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kapasitas layanan	Denpasar dan sekitarnya								Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Bali	Pemkot. /kab. Sarbagita
	• Pembangunan jalan Serangan - Tanjung Benoa	Tersedianya jaringan jalan Serangan-Tanjung Benoa	Meningkatnya kapasitas layanan	Denpasar dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	Pemprov. Bali
	• Pembangunan <i>underpass</i> Dewa Ruci	Tersedianya <i>underpass</i> Dewa Ruci	Meningkatnya kapasitas layanan	Denpasar dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	Pemprov. Bali
	• Pembangunan <i>sunset road</i> (Kuta - Tanah Lot)	Tersedianya jaringan jalan Kuta-Tanah Lot sepanjang 20 km	Meningkatnya kapasitas layanan	Kuta - Tanah Lot								Ditjen Bina Marga	Pemprov. Bali
	• Pembangunan jalan lingkar luar Sarbagita	Tersedianya jalan lingkar luar Sarbagita sepanjang 25 km	Meningkatnya kapasitas layanan	Bringkit-Batua - Purnama								Ditjen Bina Marga	Pemprov. Bali , Pemkot./kab. Sarbagita

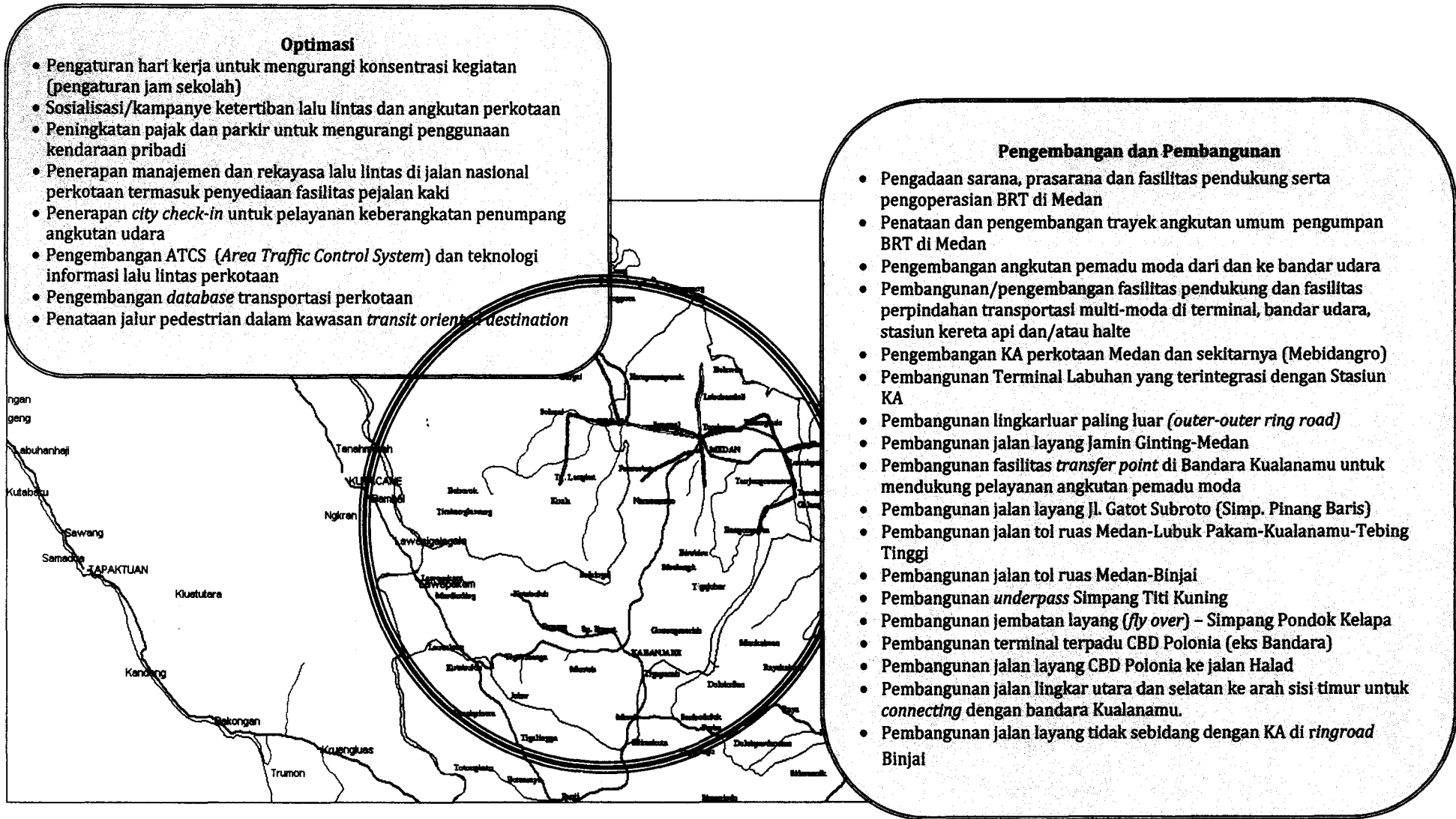
NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan Terminal Mengui	Terbangunnya terminal tipe A	Meningkatnya kapasitas layanan angkutan jalan	Provinsi Bali dan sekitarnya							Pemprov. Bali , Ditjen Phb. Darat		
9.	MAMINASATA (MAKASSAR-SUNGGUMINASA-TAKALAR-MAROS)												
	Optimasi												
	• Sosialisasi/kampanye ketertiban lalu lintas dan angkutan perkotaan	Pemahaman tertib lalu lintas	Tertib lalu lintas	Makasar dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sulsel, Pemkot. Makassar	Polri	
	• Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional perkotaan termasuk fasilitas pejalan kaki	Manajemen lalu lintas yang lebih baik	Kelancaran arus lalu lintas	Makasar dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sulsel, Pemkot. Makassar	Polri	
	• Pengembangan ATCS (Area Traffic Control System) dan teknologi informasi lalu lintas perkotaan	Tersedianya dan diterapkannya perangkat pengendali lalu lintas	Terkendalnya lalu lintas yang efisien dan terintegrasi	Makasar dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sulsel, Pemkot. Makassar	Polri	
	• Penerapan manajemen dan kelayakan angkutan massal Kota Makasar	Manajemen lalu lintas angkutan massal yang lebih baik	Meningkatnya pelayanan angkutan massal Kota Makassar	Makasar dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemkot. Makasar	Polri, Pemprov. Sulsel	
	• Pengembangan data base transportasi perkotaan	Tersedianya data dan informasi lalu lintas yang akurat	Manajemen lalu lintas semakin tepat	Makasar dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sulsel, Pemkot. Makassar	Polri	
	Pengembangan dan Pembangunan												
	• Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung serta pengoperasian BRT Makassar	Tersedianya BRT di Makassar	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Maminasata							Ditjen Phb. Darat, Pemkot. Maminasata	Pemprov. Sulsel	
	• Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum pengumpan BRT Makassar	Terintegrasinya layanan angkutan umum dengan BRT	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Makasar dan sekitarnya							Pemkot. Makassar	Pemprov. Sulsel	
	• Pengembangan angkutan pepadu moda dari dan ke bandar udara	Tersedianya pelayanan angkutan pepadu moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Maminasata							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sulsel	Pemkot. Maminasata	
	• Pembangunan/pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas perpindahan transportasi multi-moda di terminal, bandara udara, stasiun kereta api dan/atau halte	Tersedianya fasilitas alih moda	Kemudahan dan kenyamanan perpindahan moda angkutan	Makasar dan sekitarnya							Ditjen Phb. Darat, Pemprov. Sulsel	Pemkot. Makasar	

NO.	PERKOTAAN Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN PERMUKIMAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan jaringan KA perkotaan metropolitan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar)	Tersedianya jaringan KA perkotaan	Meningkatnya aksesibilitas dan keterpaduan antarmoda	Makassar dan sekitarnya								Ditjen Perkeretaapian	Pemprov. Sulsel Pemkot./kab. Maminasata, PT. KAI
	• Pembangunan jalan lingkar tengah Makassar (MRR)	Tersedianya jaringan jalan lingkar tengah Makassar	Meningkatnya kapasitas layanan	Makassar dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	Pemprov. Sulsel Pemkot./kab. Maminasata
	• Pembangunan jalan layang Perintis Kemerdekaan	Tersedianya jalan layang Perintis Kemerdekaan	Meningkatnya kapasitas layanan	Makassar dan sekitarnya								Ditjen Bina Marga	Pemprov. Sulsel Pemkot./kab. Maminasata

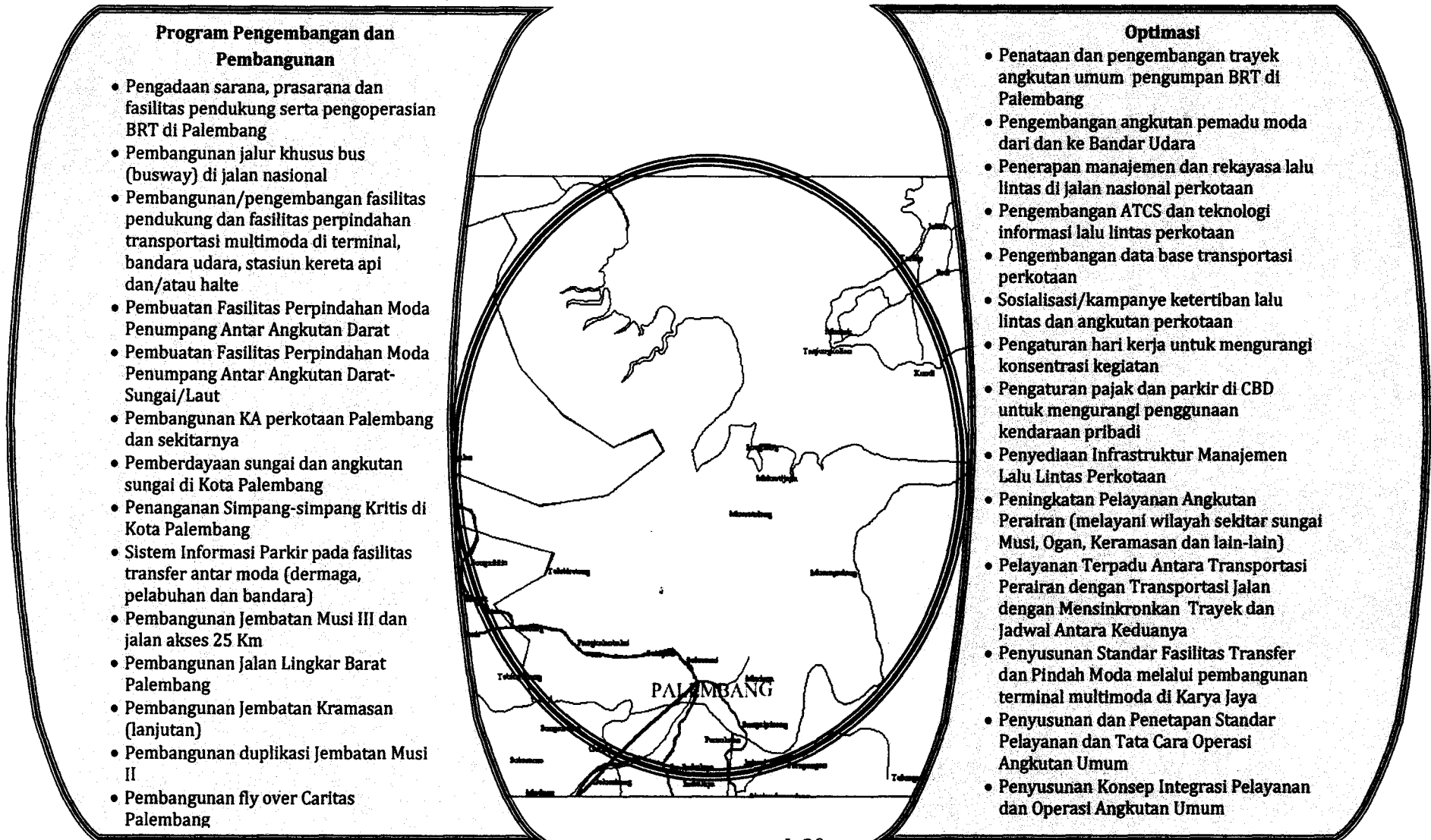
Keterangan:

*) Pembangunan jalan layang di atas jalan rel dalam kota menunggu kepastian pembangunan jalan rel *elevated track*

GAMBAR L4-1 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN MOBILITAS ORANG DI MEBIDANGRO (MEDAN-BINJAI-DELI-SERDANG-KARO)



GAMBAR L4-2 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN MOBILITAS ORANG DI KOTA PALEMBANG

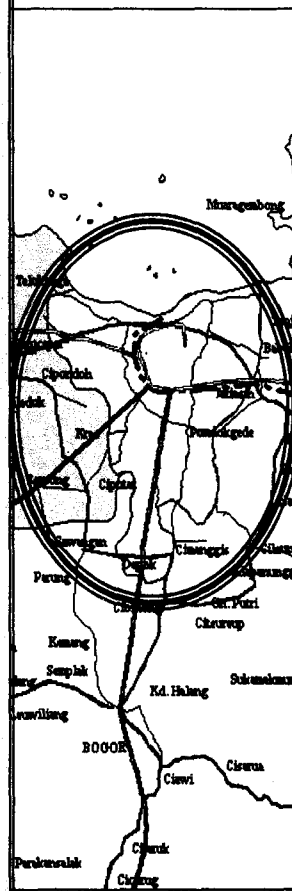


**GAMBAR L4-3 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN MOBILITAS ORANG
DI JABODETABEK (JAKARTA-BOGOR-DEPOK-TANGERANG-BEKASI)**

Pengembangan dan Pembangunan

Pembangunan jalur ganda Serpong-Maja (termasuk elektrifikasi)

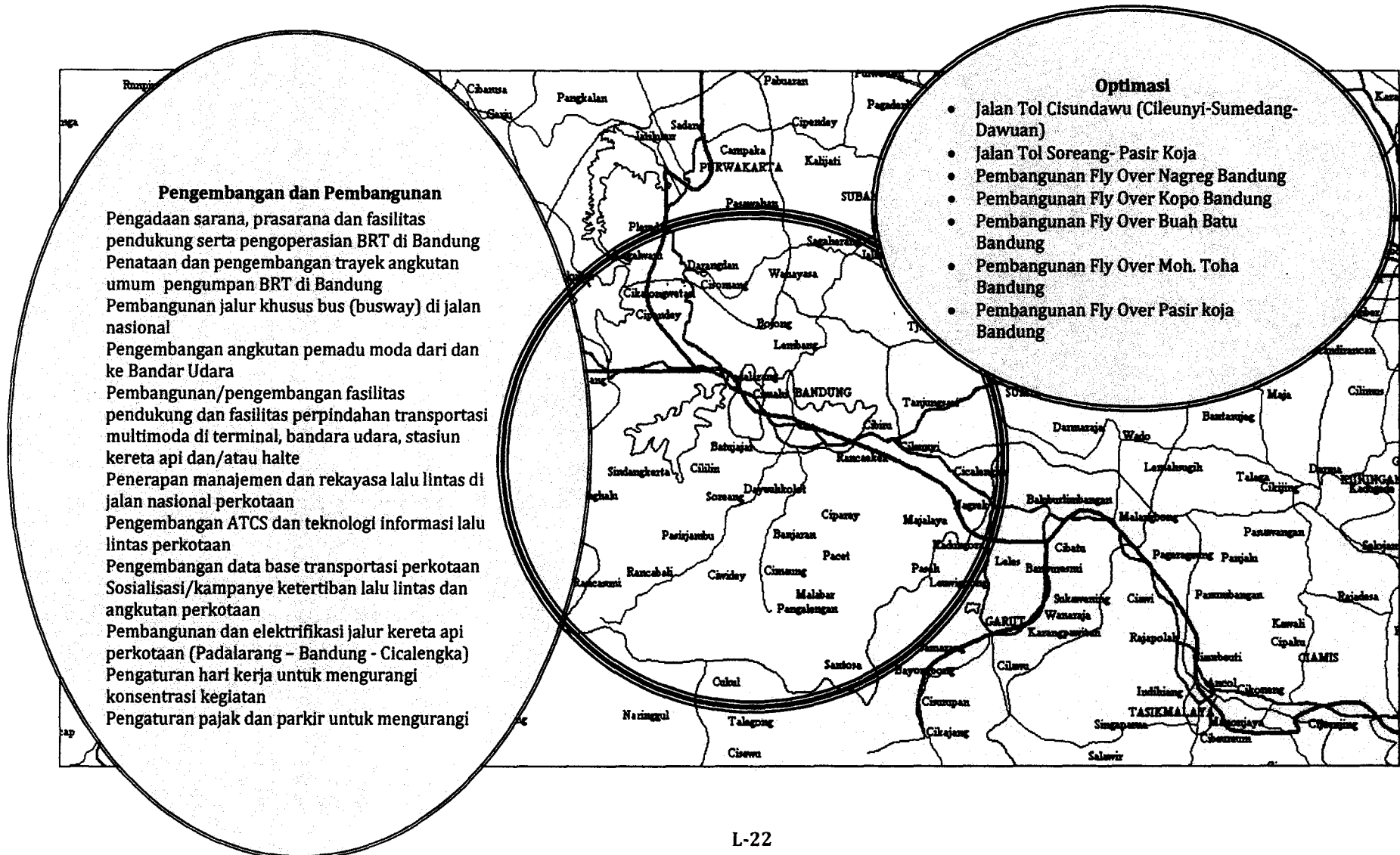
- Pembangunan jalur ganda Duri-Tangerang (termasuk elektrifikasi)
- Pembangunan double double track (Cikarang-Manggarai)
- Pengembangan koridor MRT untuk jalur Lebak Bulus-Dukuh atas
- Pembangunan/perpanjangan MRT antara Dukuh Atas-Kota
- Pembangunan MRT Barat-Timur Wilayah Jakarta
- Pembangunan Monorail Jakarta
- Pengembangan koridor berbasis rel pada koridor Pulogebang-Kp. Melayu-Casablanca-Tomang-Sentra Primer Barat
- Pembangunan jalan Tol Sentul City-Dramaga Bogor (Bogor Ring Road)
- Pembangunan lingkaran selatan Bogor: Tajur-Muarasari-Ciomas-Dramaga (Inner Ring Road)
- Pembangunan lingkaran utara bogor sepanjang Tanah Baru-Parung Banteng-Tajur (R3)
- Pengoperasian Trans Pakuan dengan rute Baranangsiang-jalan Baru-Terminal Bubulak
- Relokasi terminal baranangsiang ke Ciluar Bogor Utara
- Pembangunan terminal tipe C di Ciawi
- Pembangunan fasilitas perpindahan antarmoda
- Pembangunan Jalan Tol Sentul City-Dramaga Bogor (Bogor Ring Road)
- Pembangunan jalan Tajur-Muarasari-Ciomas-Dramaga (Inner Ring Road)
- Pembangunan lingkaran utara Bogor sepanjang Tanah Baru - Parung Banteng -Tajur (R3)
- Pembangunan Fly Over di perlintasan sebidang utama (Jl. Jampea, dll)
- Pembangunan Fly Over Rawa Buaya + Ramp Fly Over Suprpto
- Pembangunan Fly Over Simpang Gapek-Ciputat
- Pembangunan Fly Over Bulak Kapal-Bekasi
- Pembangunan Fly Over Ciawi-Bogor
- Pembangunan Fly Over Simpang Daan Mogot-Sudirman
- Pembangunan Fly Over Rel Kereta Jalan Sudirman Tangerang
- Pembangunan Underpass Cililitan Jakarta
- Pembangunan Fly Over Kuningan



Optimasi

- Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung serta pengoperasian BRT di Jabodetabek
- Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum pengumpan BRT di Jabodetabek
- Pembangunan jalur khusus bus (busway) di jalan nasional
- Pengembangan angkutan pemuat moda dari dan ke Bandar Udara
- Pembangunan/pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas perpindahan transportasi multimoda di terminal, bandara udara, stasiun kereta api dan/atau halte
- Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional perkotaan
- Pengembangan ATCS dan teknologi informasi lalu lintas perkotaan
- Pengembangan data base transportasi perkotaan
- Sosialisasi/kampanye ketertiban lalu lintas dan angkutan perkotaan
- Double track, jalan baru dan shortcut pada lintas Tanah Abang - Serpong - Maja, Manggarai - Jatinegara - Bekasi & Manggarai - Bandara Soekarno Hatta
- Pembangunan jalur kereta api bandar udara
- Pengaturan hari kerja untuk mengurangi konsentrasi kegiatan
- Pengaturan pajak dan parkir untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
- Penerapan city check-in untuk pelayanan keberangkatan penumpang angkutan udara
- Pembangunan perlintasan tidak sebidang

GAMBAR L4-4 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN MOBILITAS ORANG DI KOTA BANDUNG RAYA-CIREBON



GAMBAR L4-5 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN MOBILITAS ORANG DI KEDUNGSEPUR (KENDAL-DEMAK-UNGERAN-SEMARANG-PURWADADI)

Pengembangan dan Pembangunan

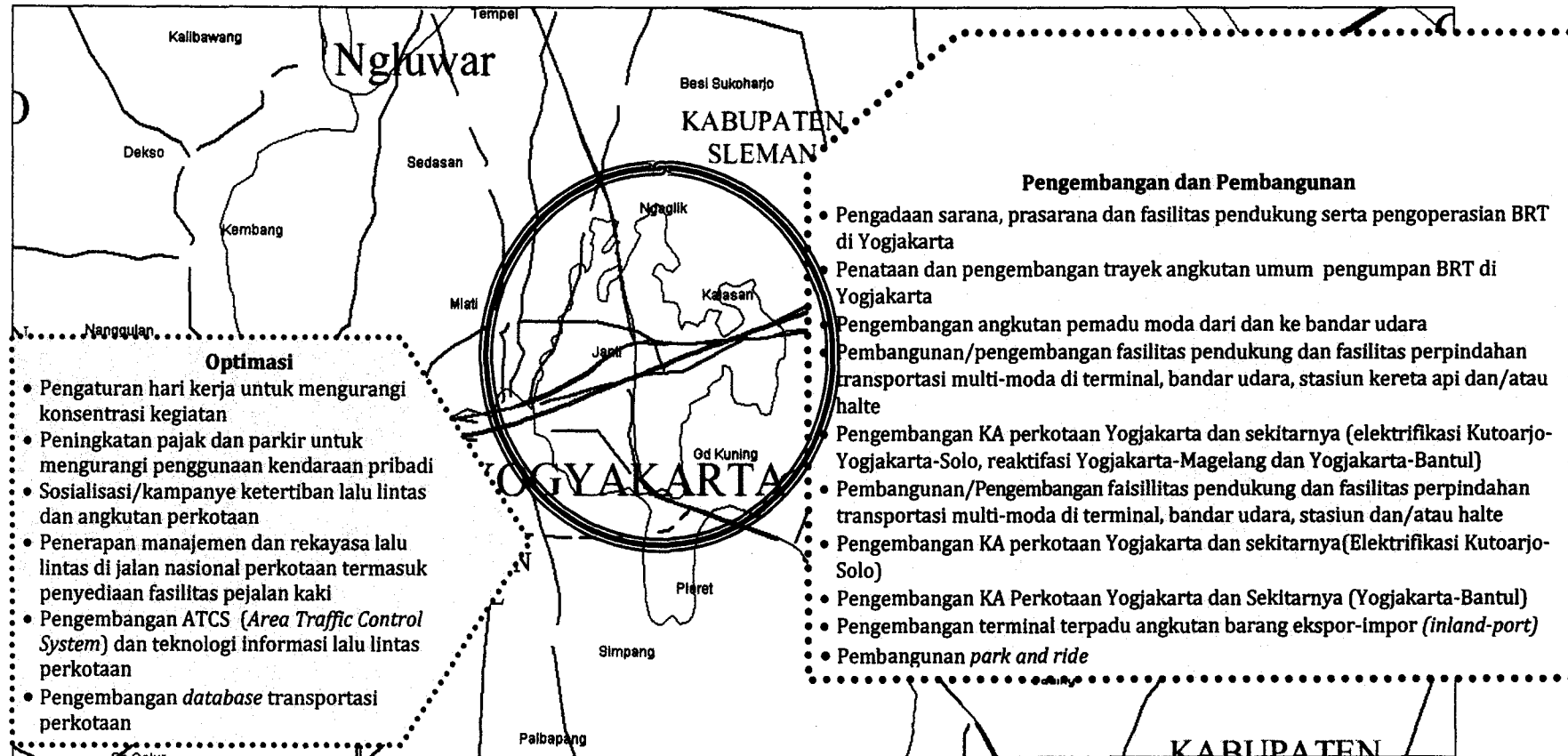
- Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung serta pengoperasian BRT di Semarang
- Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum pengumpan BRT di Semarang
- Pengembangan angkutan pepadu moda dari dan ke bandar udara
- Pembangunan/pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas perpindahan transportasi multi-moda di terminal, bandar udara, stasiun kereta api dan/atau halte
- Pengembangan KA perkotaan Semarang dan sekitarnya (reaktifasi dan elektrifikasi)
- Pembangunan jalan layang Kalibanteng
- Pengembangan interkoneksi angkutan jalan di antara wilayah Metropolitan : KEDUNGSEPUR, SUBOSUKOWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Klaten), BERGASMALANG (Brebes, Tegal, Slawi, Pemalang).
- Pengembangan interkoneksi dari dan ke Pelabuhan, Bandara, Stasiun dan Terminal di Semarang dan Bandara, Stasiun dan Terminal di Surakarta.
- Pengembangan KA di Kedungsepur, Surakarta, Pelabuhan Tanjung Emas, Tanjung Intan Cilacap dan Tegal.
- Pembangunan Jalan Tol ruas Semarang - Bawen - Solo
- Perencanaan, perancangan dan pembangunan Jalan Tol ruas Jogja-Bawen
- Perencanaan, perancangan dan pembangunan Jalan Tol ruas Pejagan - Batang
- Perancangan dan pembangunan Jalan Tol ruas Semarang - Batang
- Perencanaan, perancangan dan pembangunan Jalan Tol ruas Semarang-Demak-Kudus-Pati- Perbatasan Jatim
- Perencanaan, perancangan dan pembangunan Jalan Tol ruas Solo-Sragen-Perbatasan Jatim
- Perencanaan, perancangan dan pembangunan Jalan Tol ruas Jogja-Solo
- Perencanaan, perancangan dan pembangunan Jalan Tol ruas Ciamis-Cilacap-Jogja
- Pengembangan Kereta Komuter Slawi-Purwokerto-Kutoarjo (Prioritas Tinggi)
- Revitalisasi jalur KA Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang (Prioritas Tinggi)
- Pembangunan jalur ganda KA Tegal-Pekalongan-Semarang
- Pembangunan jalur ganda KA Cirebon-Kroya
- Revitalisasi jalur KA Wonosobo-Purwokerto
- Revitalisasi jalur KA Jogja-Magelang
- Pengoperasian Kapal Penyeberangan Kendal-Kumai
- Penataan kembali lokasi Jembatan Timbang di Brebes, Subah, Tugu, Klepu, Banyudono sebagai dampak pembangunan jalan Tol (Prioritas Tinggi)
- Penanganan Rob di pelabuhan Tj.Emas
- Penanganan Rob di Stasiun Tawang
- Relokasi terminal penumpang Bandara A. Yani Semarang
- Pengembangan Bandara Dewadaru Karimunjawa

Optimasi

- Pengaturan hari kerja untuk mengurangi konsentrasi kegiatan
- Pengaturan pajak dan parkir untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
- Sosialisasi/kampanye ketertiban lalu lintas dan angkutan perkotaan
- Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional perkotaan termasuk penyediaan fasilitas pejalan kaki
- Pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*) dan teknologi informasi lalu lintas perkotaan
- Pengembangan *database* transportasi perkotaan
- Optimalisasi angkutan barang melalui KA lintas Jakarta-Semarang-Surabaya
- Optimalisasi angkutan barang melalui *Coastal Ferry* Lampung-Banten-Jakarta-Jabar-Jateng



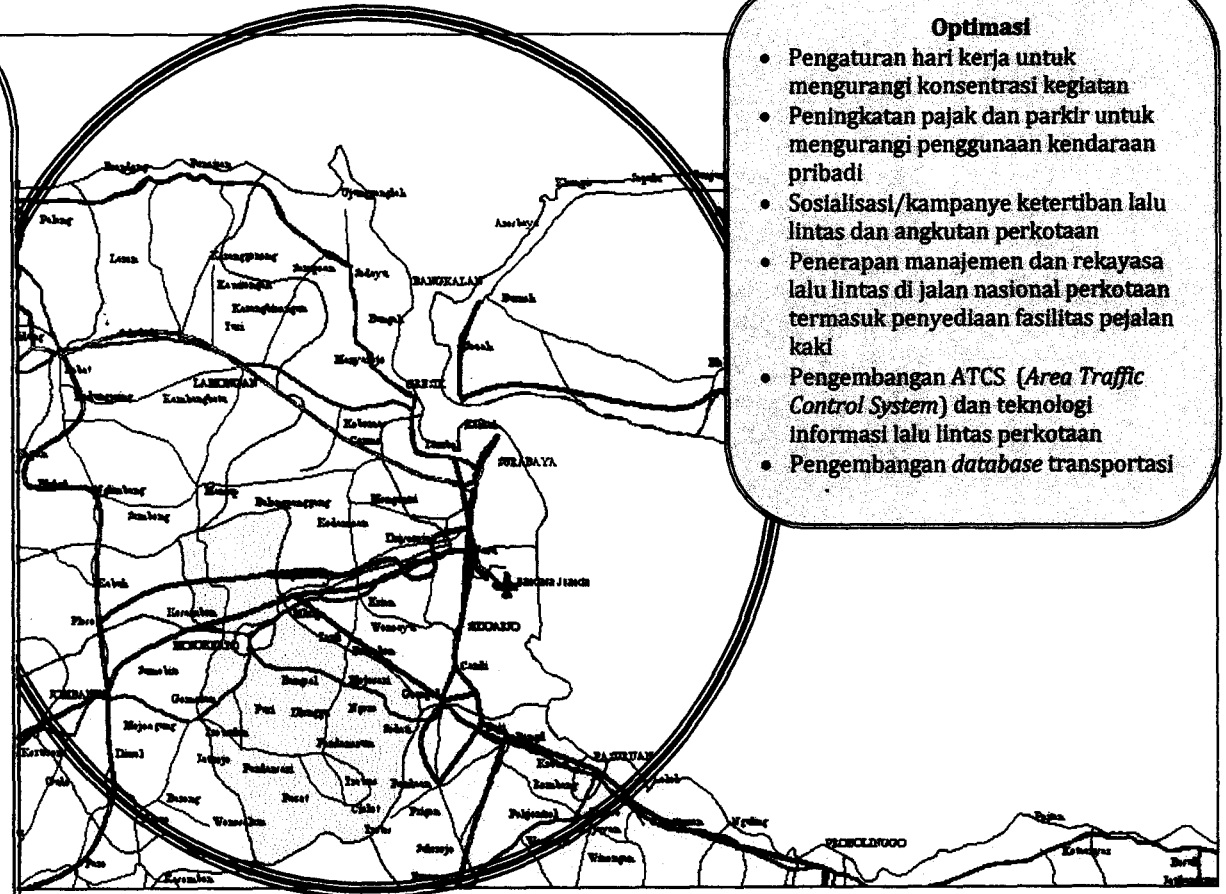
GAMBAR L4-6 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN MOBILITAS ORANG DI YOGYAKARTA



GAMBAR L4-7 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN MOBILITAS ORANG DI GERBANGKERTOSUSILA

Pengembangan dan Pembangunan

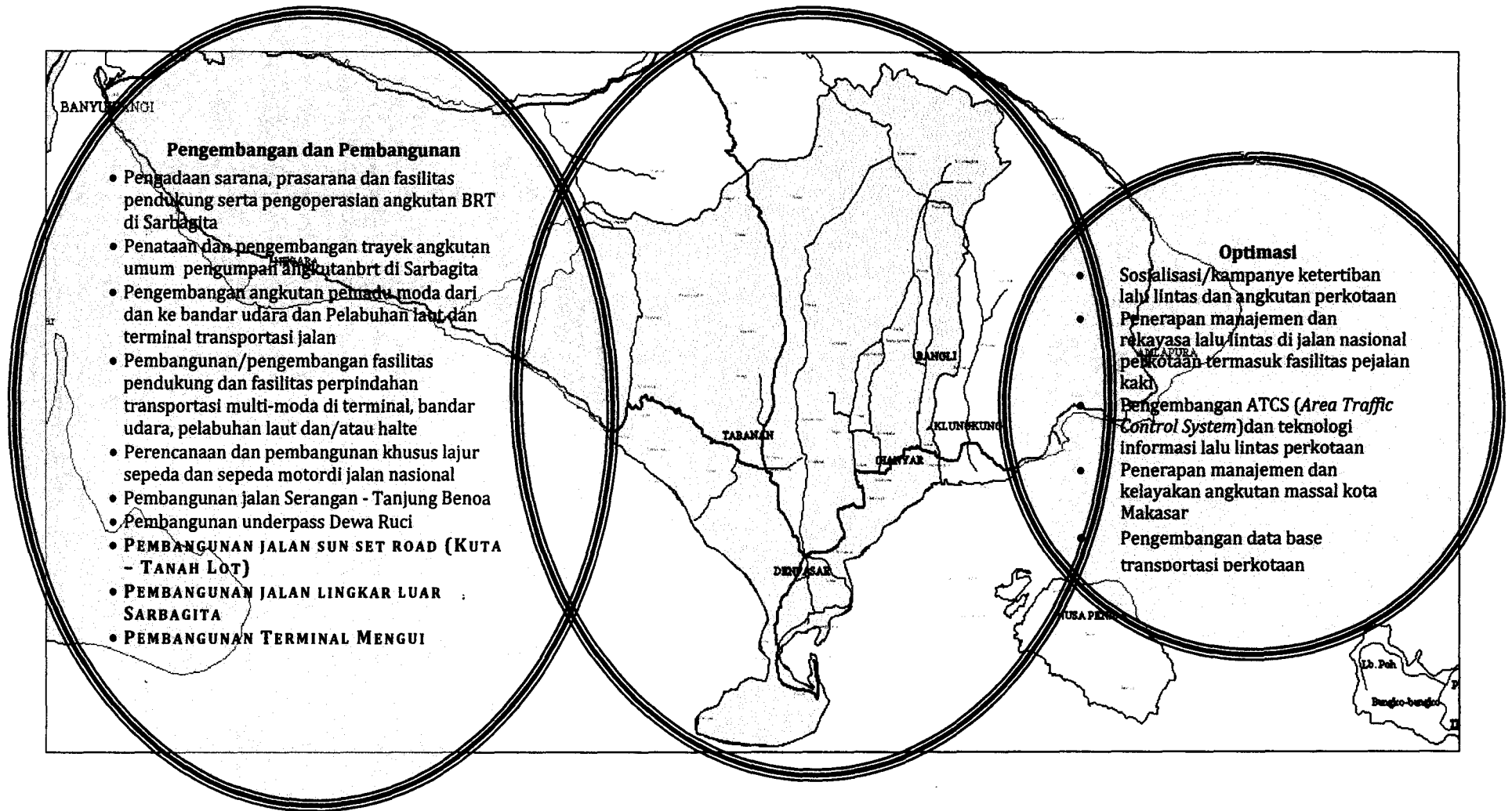
- Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung serta pengoperasian BRT di Surabaya
- Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum pengumpan BRT di Surabaya
- Pengembangan angkutan pemuat moda dari dan ke bandar udara
- Pembangunan/pengembangan fasilitas pendukung dan fasilitas perpindahan transportasi multi-moda di terminal, bandar udara, stasiun kereta api dan/atau halte
- Elektrifikasi dan pembangunan jalur ganda (Lamongan-Pasar Turi-Gubeng-Sidoarjo-Porong, Wonokromo-Tarik-Mojokerto, Gubeng-Sidotopo)
- Pembangunan Rel Kereta Api (KA) *double track elevated* pada seluruh jaringan di Wilayah kota Surabaya
- Pengembangan Kereta Api (KA) untuk komuter di wilayah Gerbangkertosusila (GKS) dan antar kota regional
- Pembangunan jalan lingkar (MERR & Lingkar Barat)
- Pembangunan jalan layang Pasar Kembang
- Pembangunan jalan layang Wonokromo/Mayangkara
- Pembangunan jalan layang Margorejo
- Pembangunan jalan layang Akses Waru
- Pembangunan jalan layang Jemursari
- Pembangunan jalan Tol Lingkar Timur Luar dan Peningkatan Tol Surabaya Gempol (Ruas Waru-Perak)
- Pembangunan Jalan Lingkar Tengah
- Peningkatan jalan Kali Rungkut Tropodo, pembangunan *frontage road* A. Yani, pembangunan jalan lingkar barat tengah, peningkatan jalan mastrip dan peningkatan jalan ITS-Kertajaya-Sulawesi-Pandegiling-Banyuurip-Tandes-Benowo.
- Pembangunan jalan darmahusada lingkar timur-tengah, pembangunan jalan stadion lingkar luar barat, pembangunan jalan RSUD Surabaya Barat-lingkar luar barat.
- Pembangunan Jalan Lingkar Barat Luar
- Peningkatan jalan Tol Dupak - Gresik
- Pembangunan jalan Tol Juanda-Waru-Tol Surabaya-Mojokerto



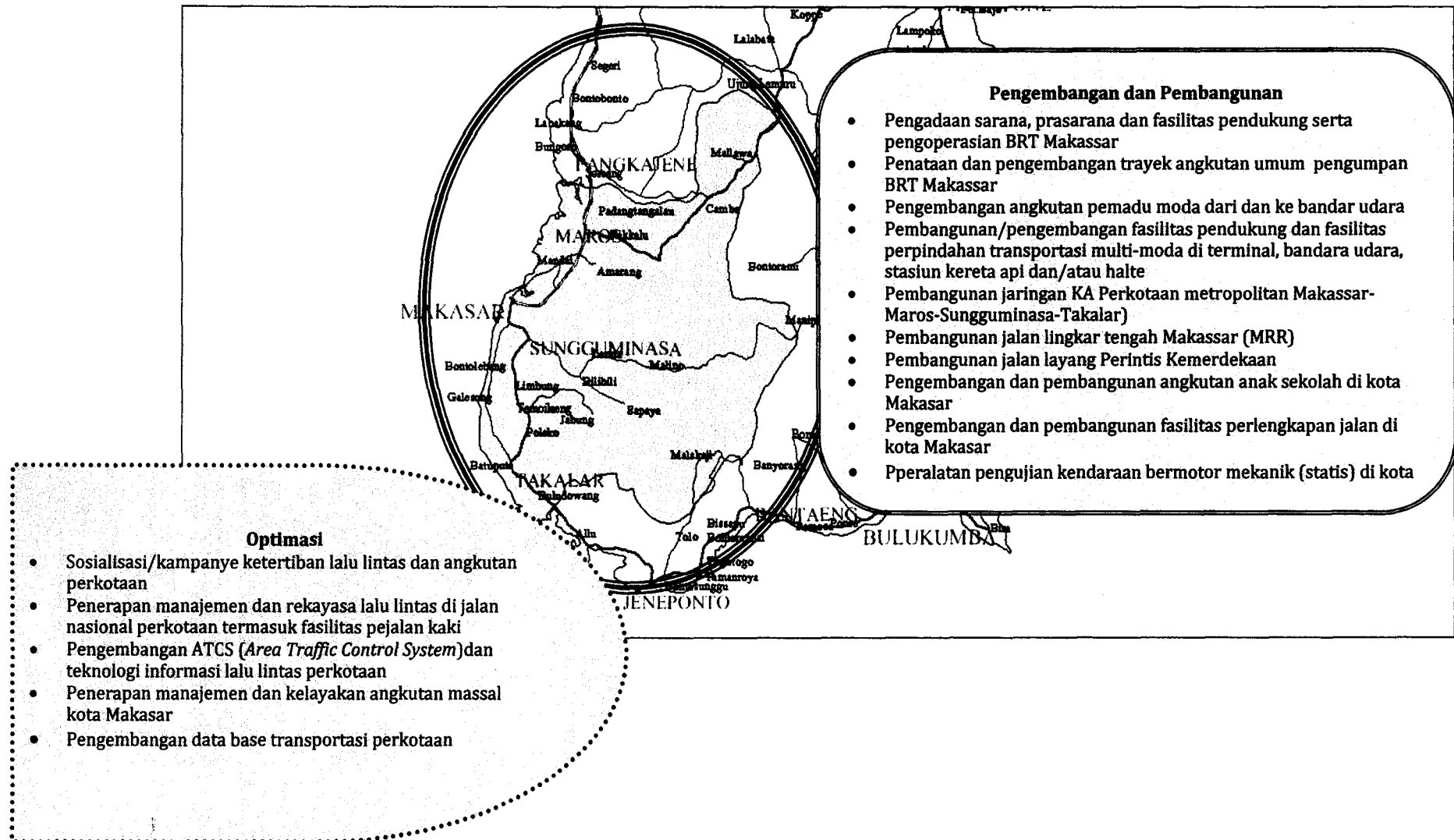
Optimasi

- Pengaturan hari kerja untuk mengurangi konsentrasi kegiatan
- Peningkatan pajak dan parkir untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
- Sosialisasi/kampanye ketertiban lalu lintas dan angkutan perkotaan
- Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional perkotaan termasuk penyediaan fasilitas pejalan kaki
- Pengembangan ATCS (*Area Traffic Control System*) dan teknologi informasi lalu lintas perkotaan
- Pengembangan *database* transportasi

GAMBAR L4-8 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN MOBILITAS ORANG DI SARBAGITA (DENPASAR-BANGLI-GIANYAR-TABANAN)



GAMBAR L4-9 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA UNTUK KELANCARAN MOBILITAS ORANG DI MAMINASATA (MAKASSAR-SUNGGUMINASA-TAKALAR-MAROS)



LAMPIRAN 5.

**MATRIKS PROGRAM PENGEMBANGAN ANTARMODA/MULTIMODA
PADA KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL**

LAMPIRAN 5.
MATRIKS PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA
PADA KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
I.	PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM												
1.	Kabupaten Gayo Lues*												
	• Pembangunan bandar udara perintis	Tersedianya bandar udara untuk melayani penerbangan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah daerah	Medan - Gayo Lues - Banda Aceh								Ditjen Phb Udara	Bappena/KemenPD/ Pemkab Gayo Lues
	• Penyediaan sarana transportasi darat	Tersedianya sarana angkutan darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT/Dishub Kab. Gayo Lues	Bappenas/Kemenhub /Bappeda Kab. Gayo Lues
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab. Gayo Lues	Ditjen Bina Marga
2.	Kabupaten Aceh Singkil *												
	• Pembangunan bandar udara perintis	Tersedianya bandar udara untuk melayani penerbangan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah daerah	Medan -Singkil - B. Aceh								Ditjen Phb Udara	Bappenas/Pemkab Aceh Singkil/KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT/Dishub Kab.. Aceh Singkil	Bappenas /Kemenhub/Bappeda Kab. Aceh Singkil
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab. Aceh Singkil	Ditjen Bina Marga

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
3.	Kabupaten Aceh Jaya **												
	• Pengembangan sarana angkutan jalan	Tersedianya sarana angkutan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah	Banda Aceh – Calang - Meulaboh								Ditjen Phb Darat.	Bappenas/Pemkab Aceh Jaya/KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT/Dishub Kab. Aceh Jaya	Bappenas/Kemenhub/Bappeda Kab. Aceh Jaya
4.	Kabupaten Aceh Barat Daya **												
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya kapal laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Blang Pidie – Sinabang – P. Banyak								Ditjen Phb Laut	Bappenas/Pemkab Aceh Barat Daya/KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT/Dishub Aceh Barat Daya	Bappenas / Kemen hub/Bappeda Kab. Aceh Barat Daya
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Aceh Barat Daya	Ditjen Bina Marga
5.	Kabupaten Simeulue **												
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya kapal laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Meulaboh – Simeulue - Sinabang								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Aceh Barat Daya / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Simeulue	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Simeulue
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Simeulue	Ditjen Bina Marga

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Simeulue	Bappenas / Pemkab Simeulue / KemenPDT	
6.	Kabupaten Bener Meriah *												
	• Pengembangan angkutan udara perintis	Penambahan frekwensi penerbangan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Medan - Bener Meriah - B. Aceh							Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Bener Meriah/ KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Bener Meriah	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Bener Meriah	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kabupaten Bener Meriah	Ditjen Bina Marga	
7.	Kabupaten Aceh Selatan *												
	• Pembangunan pelabuhan laut perintis	Tersedianya pelabuhan laut	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Labuhan Haji - Tapak tuan							Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Aceh Selatan/ KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Aceh Selatan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Aceh Selatan	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Aceh Selatan	Ditjen Bina Marga	
8.	Kabupaten Aceh Barat *												
	• Pengembangan jaringan angkutan laut perintis	Tersedianya rute angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan jasa transportasi laut perintis	Aceh barat - Nagan Raya - Aceh Singkil							Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Aceh Barat/ Kemen PDT	

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Aceh Barat	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Aceh Barat
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Aceh Barat	Ditjen Bina Marga
9.	Kabupaten Nagan Raya *												
	• Pembangunan peningkatan jalan	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatkan pelayanan transportasi darat.	Meulaboh - Nagan Raya - Takengon								Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Nagan Raya / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya moda transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Nagan Raya	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Nagan Raya
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Nagan Raya	Ditjen Bina Marga
10.	Kabupaten Aceh Timur *												
	• Pembangunan jaringan KA di wilayah NAD – Sumut	Tersedianya jaringan KA	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah	Medan - langsa - lhoksemawe								Ditjen Perkeretaapian	Bappenas / Pemkab. Aceh Timur / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Aceh Timur	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Aceh Timur
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Aceh Timur	Ditjen Bina Marga

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
11.	Kabupaten Aceh Tamiang *												
	• Pembangunan angkutan sungai	Tersedianya dermaga sungai	Meningkatnya jalur transportasi sungai	Aceh Tamiang - Langsa								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Aceh Tamiang/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Aceh Tamiang	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Aceh Tamiang
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Aceh Tamiang	Ditjen Bina Marga
12.	Kabupaten Pidie Jaya **												
	• Pembangunan Jaringan angkutan jalan	Tersedianya trayek ke daerah pedalaman	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah	Pidie - Pidie Jaya - Bireun								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Pidie Jaya/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Pidie Jaya	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Pidie Jaya
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Pidie Jaya	Ditjen Bina Marga
II.	PROVINSI SUMATERA UTARA												
1.	Kabupaten Nias Selatan **												
	• Pembangunan bandar udara perintis	Tersedianya bandar udara untuk melayani penerbangan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah daerah	Medan - Nias Selatan								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Nias Selatan/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Nias Selatan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Nias Selatan

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Nias Selatan	Ditjen Bina Marga
2.	Kabupaten Tapanuli Tengah *												
	• Pengembangan angkutan udara perintis	Penambahan frekwensi penerbangan perintis	Meningkatnya pelayanan jasa transportasi udara	Tapanuli Tengah - Sumut - Pekan Baru - Sumbar								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Tapanuli Tengah/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Tapanuli Tengah	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Tapanuli Tengah
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Tapanuli Tengah	Ditjen Bina Marga
3.	Kabupaten Pakpak Barat **												
	• Pembangunan terminal angkutan penumpang	Tersedianya terminal tipe B	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	Se - Sumatera Utara								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Pakpak Barat/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Pakpak Barat	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Pakpak Barat
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Pakpak Barat	Ditjen Bina Marga
4.	Kabupaten Nias **												
	• Peningkatan kapasitas angkutan udara	Tersedianya kapasitas angkutan udara	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah daerah	Medan - Nias								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Nias/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Nias	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Nias

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Nias	Ditjen Bina Marga
5.	Kabupaten Dairi *												
	• Penambahan trayek baru AKDP	Tersedianya trayek AKDP	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah daerah	Karo -Dairi-Samosir-pakpak Barat								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Dairi/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Dairi	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Dairi
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Dairi	Ditjen Bina Marga
6.	Kabupaten Samosir *												
	• Pembangunan angkutan danau dan pengadaan kapal angkutan danau	Tersedianya dermaga penyeberangan dan kapal angkutan danau	Meningkatnya pelayanan angkutan danau	Balige - Samosir-Tarutung - Prapat-Simalungun.								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Samosir/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Samosir	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Samosir
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Samosir	Ditjen Bina Marga
7.	Kabupaten Nias Barat **												
	• Pembangunan pelabuhan laut perintis	Tersedianya pelabuhan laut	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Pulau Nias-Sibolga - Simeleu - Menatawai								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkap Nias Barat/ KemenPDT

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab.upaten	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Nias Barat	Ditjen Bina Marga
8.	Kabupaten Nias Utara **												
	• Pembangunan pelabuhan laut perintis	Tersedianya pelabuhan laut	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Pulau Nias-Sibolga - Simeleu - Mentawai								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Nias Utara/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Nias Utara	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Nias Utara	Ditjen Bina Marga
III.	PROVINSI SUMATERA BARAT												
1.	Kabupaten Pesisir Selatan **												
	• Peningkatan jaringan transportasi angkutan jalan.	Tersedianya trayek AKAP	Meningkatnya pelayanan jasa angkutan angkutan jalan	Pesisir selatan - Pekanbaru, Jambi, Bengkulu								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Pesisir Selatan/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Pesisir Selatan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Pesisir Selatan
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Pesisir Selatan	Ditjen Bina Marga

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
2.	Kabupaten Pasaman Barat **												
	• Optimalisasi penggunaan terminal	Tersedianya fasilitas terminal	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Simpang Empat-Lubuk Sikaping-Lubuk Sabung								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Pasaman Barat / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Pasaman Barat	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Pasaman Barat
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yg mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Pasaman Barat	Ditjen Bina Marga
3.	Kabupaten Kepulauan Mentawai ***												
	• Pembangunan bandar udara perintis	Tersedianya bandar udara untuk melayani penerbangan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah daerah	Kep. Mentawai - Padang-Pekan baru -Bengkulu								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Kepulauan Mentawai/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kepulauan Mentawai	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Kepulauan Mentawai	Ditjen Bina Marga
4.	Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung *												
	• Pengembangan jaringan transportasi KA	Tersedianya jalur KA	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Sawah Lunto-Muaro								Ditjen Perkeretaapian	Bappenas / Pemkab Sawahlunto/sijunjung / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Sawahlunto/ Sijunjung	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Sawahlunto/ Sijunjung

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
					2010 s.d. 2014							2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Sawahlunto/Sijunjung	Ditjen Bina Marga	
5.	Kabupaten Solok Selatan **												
	• Pembangunan peningkatan angkutan jalan	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar wilayah	Dalam wilayah kabupaten dan antar kabupaten							Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemka Solok Selatan / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Solok Selatan	Bappenas / Kemenhub/ Bappe Kab. Solok Selatan	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Solok Selatan	Ditjen Bina Marga Selatan	
6.	Kabupaten Pasaman **												
	• Pembangunan sarana dan prasarana angkutan jalan	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Jalan kabupaten pasaman							Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemka Pasaman / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Pasaman	Bappenas / Kemenhub/ Bappec Kab. Pasaman	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Pasaman	Ditjen Bina Marga Pasaman	
IV.	PROVINSI BENGKULU												
1.	Kabupaten Seluma **												
	• Peningkatan jaringan pelayanan transportasi darat	Tersedianya trayek angkutan perintis	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Seluma-Pasar genting dan Pasar bulan							Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Seluma/ KemenPDT	

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan moda transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Seluma	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Seluma
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yg mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Seluma	Ditjen Bina Marga
2.	Kabupaten Kaur **												
	• Pembangunan terminal penumpang	Tersedianya terminal tipe B	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Kaur-Sukaraja – Tanjung Iman-Suka Merindu-Bankinang-Mana								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Kaur / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kaur	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kaur
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yg mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Kaur	Ditjen Bina Marga
3.	Kabupaten Bengkulu Selatan **												
	• Pengembangan dermaga angkutan laut perintis	Tersedianya dermaga angkutan laut perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah dan layanan angkutan laut perintis	Bengkulu selatan – P. Enggano								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Bengkulu Selatan/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Bengkulu Selatan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Bengkulu Selatan
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Bengkulu Selatan	Ditjen Bina Marga

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT		
					2010 s.d 2014							2015 s.d 2019	2020 s.d 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
4. Kabupaten Lebong **													
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Lebong	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Lebong	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Lebong	Ditjen Bina Marga	
5. Kabupaten Mukomuko *													
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya kapal laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Muko-muko – P. pagai selatan – P.Pagai utara							Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Mukomuko/ KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Mukomuko	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Mukomuko	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kabupaten	Ditjen Bina Marga	
6. Kabupaten Bengkulu Utara *													
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Bengkulu Utara	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Bengkulu Utara	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Bengkulu Utara	Ditjen Bina Marga	

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
7.	Kabupaten Bengkulu Tengah **												
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Bengkulu Tengah	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Bengkulu Tengah
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Bengkulu Tengah	Ditjen Bina Marga
V.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU												
1.	Kabupaten Natuna *												
	• Pengembangan rute angkutan laut perintis.	Tersedianya rute pelayanan perintis	Meningkatnya pelayanan jasa transportasi laut	P. Natuna, Ujung Batu, Bagan Batu-Tanjung Pinang								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Natuna/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kabupaten	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Natuna
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dishub Kab. Natuna	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Natuna
2.	Kabupaten Anambas **												
	• Pengembangan rute pada daerah yang belum terlayani transportasi laut	Tersedianya rute angkutan laut perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah daerah	Anambas - P. Bintan - P. Tambang besar								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Anambas/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Anambas	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Anambas

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dishub Kab. Anambas	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Anambas
VI.	PROVINSI JAMBI												
1.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur *												
	• Pembangunan dermaga angkutan laut perintis	Tersedianya dermaga angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Myara sabak - Kepulauan Riau								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Tanjung Jabung Timur/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Tanjung Jabung Timur	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Tanjung Jabung Timur	Ditjen Bina Marga
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dishub Kab. Tanjung Jabung Timur	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur
2.	Kabupaten Sarolangun *												
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Sarolangun	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Sarolangun
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Sarolangun	Ditjen Bina Marga

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
VII.	PROVINSI SUMATERA SELATAN												
1.	Kabupaten Empat Lawang **												
	• Pengembangan angkutan jalan	Tersedianya trayek angkutan perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan darat	Bengkulu -Empat lawang- Palembang								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Empat Lawang/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Empat Lawang	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Empat Lawang
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Empat Lawang	Ditjen Bina Marga
2.	Kabupaten Ogan Komiring Ulu Selatan *												
	• Pengembangan angkutan jalan	Tersedianya jaringan angkutan jalan	Meningkatnya pelayanan angkutan darat	Muara Dua – Suka Rajah								Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Ogan Komiring Ulu Selatan / Kementerian PDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Ogan Komiring Ulu Selatan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Ogan Komiring Ulu Selatan
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Ogan Komiring Ulu Selatan	Ditjen Bina Marga
3.	Kabupaten Ogan Ilir *												
	• Peningkatan pelayanan angkutan jalan	Tersedianya pelayanan angkutan jalan	Meningkatnya jasa pelayanan angkutan jalan	Tg. raja – Ogan Ilir – Batu raja								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Ogan Ilir / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Ogan Ilir	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Ogan Ilir

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Ogan Ilir	Ditjen Bina Marga
4.	Kabupaten Ogan Komering Ilir *												
	• Pembangunan dermaga angkutan sungai	Tersedianya dermaga angkutan sungai	Meningkatnya jasa pelayanan angkutan sungai	Sungai Ketupat – Talang selapan								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Ogan Komering Ilir / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Ogan Komering Ilir	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Ogan Komering Ilir
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Ogan Komering Ilir	Ditjen Bina Marga
VIII	PROVINSI LAMPUNG												
1.	Kabupaten Way Kanan *												
	• Pembangunan terminal penumpang	Tersedianya terminal tipe B /fasilitas angkutan jalan	Meningkatnya pelayanan jasa transportasi darat	Kota Blambangan umpu								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Way Kanan / KemenPDT
	• Pengadaan sarana angkutan darat	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau sungai	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Way Kanan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Way Kanan
	• Peningkatan jalan	Tersedianya angkutan jalan	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Way Kanan	Ditjen Bina Marga
2.	Kabupaten Lampung Barat **												
	• Pembangunan terminal penumpang	Tersedianya terminal tipe B /fasilitas angkutan jalan	Meningkatnya pelayanan jasa transportasi darat	Bengkulu – Biha - Wainaru								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Lampung Barat / KemenPDT

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Lampung Barat	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Lampung Barat	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Lampung Barat	Ditjen Bina Marga	
3.	Kabupaten Pesawaran **												
	• Pembangunan jaringan pelayanan angkutan jalan	Tersedianya jalan kabupaten	Meningkatnya pelayanan angkutan jalan	Kabupaten Pasawaran							Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Pesawaran / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Pesawaran	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Pesawaran	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Pesawaran	Ditjen Bina Marga	
4.	Kabupaten Lampung Selatan **												
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya kapal laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Kalianda - p. Umang, p. Sabuku, P. Sabesi							Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Lampung Selatan/ KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Lampung Selatan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Lampung Selatan	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Lampung Selatan	Ditjen Bina Marga	

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
IX PROVINSI BANGKA BELITUNG													
1. Kabupaten Bangka Selatan *													
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya kapal laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Toboali –Tanjung genting-Tanjung Klupang								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Bangka Selatan/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Bangka Selatan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Bangka Selatan
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dishub Kab. Bangka Selatan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Bangka Selatan
X PROVINSI DI YOGYAKARTA													
1. Kabupaten Gunung Kidul **													
	• Peningkatan pelayanan angkutan jalan	Meluasnya jaringan trayek angkutan perdesaan	Meningkatnya pelayanan angkutan perdesaan	Yogya – Gunung Kidul								Pemkab gunung kidul	KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Gunung Kidul	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Gunung Kidul
	• Peningkatan jalan	Meningkatnya jalan desa	Meningkatnya kelancaran fasilitas angkutan perdesaan	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Gunung Kidul	Ditjen Bina Marga
XI PROVINSI JAWA TIMUR													
1. Kabupaten Sampang **													
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya kapal laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Sampang – Probolinggo , Sampang Situbondo								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Sampang/ KemenPDT

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Sampang	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Sampang
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Sampang	Ditjen Bina Marga
2.	Kabupaten Pacitan **												
	• Pengembangan pelayanan angkutan laut perintis	Tersedianya pelayaran angkutan laut perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar wilayah	Pacitan								Ditjen Phb Laut	Bappenas / PemKab Pacitan/ KemenPDT
	• Pembangunan bandar udara	Tersedianya Bandar udara untuk melayani penerbangan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar wilayah	Pacitan								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Pacitan / PT. Merpati Nusantara/ KemenPDT
	• Pengadaan bus AKDP	Tersedianya bus AKDP	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar wilayah	Pacitan-Ponorogo								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Pacitan/ Perum. Damri/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Pacitan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Pacitan
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dinas PU Kab. Pacitan	Ditjen Bina Marga
XIV	PROVINSI KALIMANTAN BARAT												
1.	Kabupaten Sambas **												
	• Pengembangan angkutan jalan lintas negara	Tersedianya angkutan jalan lintas negara	Meningkatnya pelayanan angkutan jalan lintas negara	Sambas – Malaysia								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Sambas/ KemenPDT

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan jalan dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab.u Sambas	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Sambas
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Sambas	Ditjen Bina Marga
2.	Kabupaten Bengkayang *												
	• Pembangunan jaringan angkutan darat	Tersedianya AKDP	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar wilayah	Bangkayang - Ngabang - Singkawang								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Bengkayang/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya moda angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Bengkayang	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Bengkayang
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Bengkayang	Ditjen Bina Marga
3.	Kabupaten Landak **												
	• Pembangunan jaringan angkutan sungai	Tersedianya sarana dan prasarana angkutan sungai	Meningkatnya pelayanan transportasi melalui angkutan sungai	Kabupaten Landak								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Landak/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Landak	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Landak
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yg mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Landak	Ditjen Bina Marga

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
4. Kabupaten Sanggau *													
	• Pembangunan pelayanan jaringan angkutan darat	Tersedianya trayek angkutan darat AKDP	Meningkatnya pelayanan angkutan jalan	Sanggau – Sintang – Nanga Pinoh								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Sanggau/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Sanggau	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Sanggau
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Sanggau	Ditjen Bina Marga
5. Kabupaten Ketapang ***													
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya kapal laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Ketapang – P. Karimata – P. Bawal								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Ketapang/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Ketapang	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Ketapang
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Ketapang	Ditjen Bina Marga
6. Kabupaten Sintang *													
	• Pengembangan angkutan jalan	Tersedianya trayek ke daerah yang terisolir	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah daerah	Kabupaten Sintang								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Sintang/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Sintang	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Sintang

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Sintang	Ditjen Bina Marga	
7.	Kabupaten Kapuas Hulu *												
	• Pengembangan sarana angkutan jalan	Tersedianya armada angkutan jalan	Meningkatnya kapasitas angkutan darat untuk penumpang	Kabupaten kapuas Hulu							Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Kapuas Hulu/ KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kapuas hulu	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Kapuas Hulu	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Kapuas Hulu	Ditjen Bina Marga	
8.	Kabupaten Sekadau *												
	• Peningkatan angkutan sungai	Tersedianya rute pelayaran angkutan sungai	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar wilayah	Sekadau - Sanggau - Sintang							Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Sekadau/ KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Sekadau	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kabupaten Sekadau	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Sekadau	Ditjen Bina Marga	
9.	Kabupaten Melawi ***												
	• Pengembangan angkutan udara	Tersedianya rute pelayanan angkutan udara	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar wilayah	Melawi - Pontianak							Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Melawi/ KemenPDT	

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Melawi	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Melawi
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Melawi	Ditjen Bina Marga
10.	Kabupaten Kayong Utara **												
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya kapal laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Sukadana – P. Kelewar- p. Penebangan								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Kayong Utara/ KemenPDT
XV	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH												
1.	Kabupaten Katingan *												
	• Penambahan sarana angkutan jalan	Tersedianya sarana angkutan jalan	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi memenuhi harapan masyarakat	Kabupaten Katingan								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Katingan/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Katingan	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Kayong Utara
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Katingan	Ditjen Bina Marga
2.	Kabupaten Lamandau *												
	• Pengembangan angkutan darat	Tersedianya jaringan transportasi jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Kabupaten Lamandau								Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Lamandau/ KemenPDT
3.	Kabupaten Pulang Pisau *												
	• Pengembangan jaringan angkutan sungai	Tersedianya sarana angkutan sungai	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar wilayah semakin baik	Pulang Pisau – Kuala kapuas								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Pulau Pisang/ KemenPDT

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Pulau Pisang	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Lamandau
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Pulau Pisang	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Lamandau
	• Penyediaan sarana	Tersedianya kapal motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Pulau Pisang	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Lamandau
4.	Kabupaten Seruyan *												
	• Pengembangan angkutan jalan	Tersedianya trayek baru	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah pada daerah terpencil	Kabupaten Kuala Pembuang.								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Seruyam/ KemenPDT.
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya moda transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Seruyam	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Seruyam
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yg mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Seruyam	Ditjen Bina Marga
XVI	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR												
1.	Kabupaten Kutai Barat *												
	• Pengembangan jaringan angkutan jalan dan angkutan sungai	Tersedianya rute angkutan jalan dan angkutan sungai	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah daerah yang memiliki potensi SDA	Kutai Barat – Kalimantan Tengah								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Kutai Barat/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan jalant dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kutai Barat	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Kutai Barat

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kutai Barat	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Kutai Barat
2.	Kabupaten Malinau *												
	• Pengembangan angkutan laut lintas negara	Tersedianya jaringan angkutan laut lintas negara	Meningkatnya pelayanan angkutan laut lintas negara	Malinau - Malyasia- Brunei Darussalam								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Malinau/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Malinau	Bappenas / Bappeda Kab. Malinau
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Malinau	Ditjen Bina Marga
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Malinau	Bappenas / Pemda/ KemenPDT
3	Kabupaten Nunukan *												
	• Pengembangan angkutan udara lintas negara	Tersedianya jaringan angkutan udara lintas negara	Meningkatnya pelayanan angkutan udara lintas negara	Nunukan - Malyasia - Brunai darussalam								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Nunukan/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Nunukan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Nunukan
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Nunukan	Ditjen Bina Marga

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Nunukan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Nunukan
XVII	PROVINSI SULAWESI UTARA												
1.	Kabupaten Kepulauan Sangihe *												
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya rute angkutan laut perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar pulau	Kp. Sangihe – Kp. Talaud- Manado								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Kepulauan Sangihe / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kepulauan Sangihe	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kepulauan Sangihe
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Kepulauan Sangihe	Ditjen Bina Marga
	• Penyediaan sarana angkutan laut	Tersedianya kapal motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kepulauan Sangihe	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kepulauan Sangihe
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kepulauan Sangihe	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kepulauan Sangihe
2.	Kabupaten Kepulauan Talaud *												
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya kapal laut perintis	Meningkatnya kapasitas penumpang	Kp. Talaud – Menado- Kp. Sangihe								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Kepulauan Talaud / KemenPDT

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kepulauan Talaud	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kepulauan Talaud
	• Penyediaan sarana angkutan laut	Tersedianya kapal motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Kepulauan Talaud	Ditjen Bina Marga
3.	Kabupaten Kepulauan Sitaro **												
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya kapal laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Manado - Sitaro - Tahuna -, Sitaro-Bitung, - Molongguane - Gorontalo								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Kepulauan Sitaro / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kepulauan Sitaro	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kepulauan Sitaro
	• Penyediaan sarana angkutan laut	Tersedianya kapal motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kepulauan Sitaro	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kepulauan Sitaro
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayanan rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kepulauan Sitaro	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kepulauan Sitaro
XVIII	PROVINSI SULAWESI TENGAH												
1.	Kabupaten Banggai Kepulauan ***												
	• Pengembangan jaringan angkutan laut perintis	Tersedianya rute angkutan laut perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Banggai - Morowali, Banggai - Luwuk, Banggai - bungku								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Banggai Kepulauan / KemenPDT

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Banggai Kepulauan	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Banggai Kepulauan
	• Penyediaan sarana angkutan laut	Tersedianya kapal motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Banggai Kepulauan	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Banggai Kepulauan
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Banggai Kepulauan	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Banggai Kepulauan
2.	Kabupaten Banggai *												
	• Pengembangan angkutan udara perintis	Tersedianya kapasitas penumpang	Meningkatnya kapasitas angkut	Banggai – manado – Gorontalo								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Banggai / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya moda transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Banggai	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Banggai
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Banggai	Ditjen Bina Marga
3.	Kabupaten Morowali ***												
	• Pembangunan jaringan angkutan udara perintis	Tersedianya jaringan pelayana angkutan udara perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah	Morowali – Poso								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Morowali / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Morowali	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Morowali

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Morowali	Ditjen Bina Marga	
	• Penyediaan sarana angkutan laut	Tersedianya kapal motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Morowali	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Morowali	
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Morowali	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Morowali	
4.	Kabupaten Poso **												
	• Pengembangan jaringan angkutan udara perintis	Tersedianya rute penerbangan	Meningkatnya pelayanan jasa transportasi udara	Poso - Palu - Makassar							Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Poso / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Poso	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Poso	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Poso	Ditjen Bina Marga	
5.	Kabupaten Donggala **												
	• Pengembangan pelabuhan laut	Tersedianya pelabuhan sisi darat	Meningkatnya pelayanan angkutan laut	Kabupaten Donggala							Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Donggala / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Donggala	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Donggala	

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Donggala	Ditjen Bina Marga
6.	Kabupaten Toli-Toli **												
	• Pengembangan angkutan udara perintis	Tersedianya Frekwensi Penerbangan	Meningkatnya Pelayanan Jasa Angkutan Udara Perintis	Toli - toli - Donggala - Gorontalo - Makassar dan Manado								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Toli-Toli / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Toli-Toli	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Toli-Toli
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Toli-Toli	Ditjen Bina Marga
7.	Kabupaten Buol **												
	• Pengembangan Angkutan Darat	Tersedianya terminal tipe B	Meningkatnya pelayanan angkutan darat	Kabupaten Buol								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Buol / KemenPDT
	• Penyediaan Sarana Transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Buol	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Buol
	• Peningkatan Jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Buol	Ditjen Bina Marga
8.	Kabupaten Parigi Moutong **												
	• Pengembangan jaringan angkutan udara perintis	Tersedianya frekwensi penerbangan	Meningkatnya pelayanan jasa angkutan udara perintis	Parigi Moutong - Luwuk								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Parigi Moutong / KemenPDT

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Parigi Moutong	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Parigi Moutong
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Parigi Moutong	Ditjen Bina Marga
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Parigi Moutong	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Parigi Moutong
9.	Kabupaten Sigi **												
	• Pengembangan transportasi jalan	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Kabupaten Sigi								Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Sigi / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya moda transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Sigi	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Sigi
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Sigi	Ditjen Bina Marga
10.	Kabupaten Tojo Una-Una ***												
	• Pembangunan jaringan angkutan udara perintis	Tersedianya bandar udara untuk melayani angkutan perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan udara	Tojo Una-una-Toli-Toli - Manado-Makassar								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Tojo Una-Una / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Tojo Una-Una	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Tojo Una-Una

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan Jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Tojo Una-Una	Ditjen Bina Marga
XIX	PROVINSI SULAWESI BARAT												
1.	Kabupaten Majene **												
	• Pembangunan pelayanan jaringan jalan	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Kabupaten Majene								Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Tojo Una-Una / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Tojo Una-Una	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Tojo Una-Una
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Tojo Una-Una	Ditjen Bina Marga
2.	Kabupaten Polewali Mandar *												
	• Pengembangan jaringan angkutan jalan	Tersedianya trayek AKDP	Meningkatnya pelayanan angkutan darat	Polewali Mandar								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Polewali Mandar / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Polewali Mandar	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Polewali Mandar
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Polewali Mandar	Ditjen Bina Marga
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Polewali Mandar	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Polewali Mandar

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
3.	Kabupaten Mamasa *												
	• Peningkatan jaringan jalan	Tersedianya jalan propinsi dan kabupaten	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah	Kabupaten Mamasa								Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Mamasa / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Mamasa	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Mamasa
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan setapak beton	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Mamasa	Ditjen Bina Marga
4.	Kabupaten Mamuju *												
	• Pengembangan jaringan angkutan jalan	Tersedianya trayek angkutan jalan	Meningkatnya kapasitas angkut	Kabupaten mamuju								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Mamuju / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya moda transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Mamuju	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Mamuju
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Mamuju	Ditjen Bina Marga
5.	Kabupaten Mamuju Utara *												
	• Pengembangan angkutan jalan	Tersedianya trayek angkutan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Kabupaten Mamuju								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Mamuju Utara / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya moda transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Mamuju Utara	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Mamuju Utara

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Mamuju Utara	Ditjen Bina Marga
XX	PROVINSI SULAWESI SELATAN												
1.	Kabupaten Selayar *												
	• Pengembangan jaringan angkutan laut perintis	Tersedianya rute angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Selayar – Makasar								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Selayar / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Selayar	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Selayar
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Selayar	Bappenas / Kemenhub/Bappeda Kab. Selayar
	• Penyediaan sarana angkutan laut	Tersedianya Kapal Motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Selayar	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Selayar
2.	Kabupaten Bulukumba *												
	• Pengembangan angkutan darat	Tersedianya rute baru angkutan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Kab. Bulu Kumba								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab/ Bulukumba KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Bulukumba	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Bulukumba
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Bulukumba	Ditjen Bina Marga

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
3. Kabupaten Bantaeng **													
	• Pengembangan transportasi jalan	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah transportasi darat	Kabupaten Bantaeng								Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Bantaeng / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Bantaeng	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Bantaeng
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Bantaeng	Ditjen Bina Marga
	• Pembangunan Dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Bantaeng	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Bantaeng
4. Kabupaten Jeneponto **													
	• Pengembangan jaringan pelayanan angkutan laut perintis	Tersedianya rute pelayanan angkutan laut perintis	Meningkatnya jaringan pelayanan angkutan laut perintis	Jeneponto - Benteng								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Jeneponto / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Jeneponto	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Jeneponto
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Jeneponto	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Jeneponto
	• Penyediaan sarana angkutan laut	Tersedianya Kapal Motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Jeneponto	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Jeneponto

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN								PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030			
					2010	2011	2012	2013	2014					
5.	Kabupaten Sinjai *											Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab/ Sinjai KemenPDT	
	• Peningkatan jaringan angkutan darat	Tersedianya trayek angkutan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah angkutan jalan	Kabupaten Sinjai										
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan										Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Sinjai
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Sinjai	Ditjen Bina Marga	
6.	Kabupaten Barru **											Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Barru / KemenPDT	
	• Peningkatan jaringan transportasi darat	Tersedianya trayek angkutan jalan	Meningkatnya jaringan pelayanan angkutan jalan	Kabupaten Barru										
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan										Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Barru
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Barru	Ditjen Bina Marga	
7.	Kabupaten Luwu *											Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Luwu / KemenPDT	
	• Pengembangan transportasi udara	Tersedianya kapasitas angkutan udara perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan udara	Palopo - Malili										
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan										Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Luwu
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Luwu	Ditjen Bina Marga	

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Luwu	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Luwu	
8.	Kabupaten Toraja Utara **												
	• Pengembangan jaringan angkutan udara	Tersedianya frekwensi penerbangan perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan udara	Makassar - Toraja Utara							Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Toraja Utara / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Toraja Utara	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Toraja Utara	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Toraja Utara	Ditjen Bina Marga	
9.	Kabupaten Luwu Timur *												
	• Pengembangan dermaga angkutan laut perintis	Tersedianya fasilitas dermaga	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Luwu Timur - Palopo Watampone							Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Luwu Timur / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Luwu Timur	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Luwu Timur	
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Luwu Timur	Ditjen Bina Marga	
XXI	PROVINSI SULAWESI TENGGARA												
1.	Kabupaten Kabupaten Buton *												
	• Pengembangan transportasi laut	Tersedianya frekwensi pelayaran angkutan laut	Meningkatnya pelayanan angkutan laut	Buton - Keadari - Makassar							Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Buton / KemenPDT	

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan Sarana Transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Buton	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Buton
	• Peningkatan Jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yg mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Buton	Ditjen Bina Marga
	• Pembangunan Dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Buton	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Buton
2.	Kabupaten Kabupaten Muna *												
	• Pengembangan pelayanan angkutan laut perintis	Tersedianya rute angkutan laut perintis	Meningkatnya kapasitas angkut laut perintis	Muna - Andolo - Kasiputa - Bau-bau								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Muna / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Muna	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Muna
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yg mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Muna	Ditjen Bina Marga
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Muna	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Muna
	• Penyediaan sarana angkutan laut	Tersedianya Kapal Motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Muna	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Muna
3.	Kabupaten Kabupaten Konawe *												
	• Pembangunan pelayanan jaringan angkutan jalan	Tersedianya trayek angkutan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Kabupaten Konawe								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Konawe / KemenPDT

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Konawe	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Konawe
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Konawe	Ditjen Bina Marga
4.	Kabupaten Buton Utara *												
	• Pengembang angkutan laut perintis	Tersedianya rute pelayaran angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Buton Utara – Pasar wajo – P. wowoni								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Buton Utara / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Buton Utara	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Buton Utara
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Buton Utara	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Buton Utara
	• Penyediaan sarana angkutan laut	Tersedianya kapal motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Buton Utara	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Buton Utara
5.	Kabupaten Konawe Utara **												
	• Pengembangan angkutan udara	Tersedianya frekwensi penerbangan	Meningkatnya pelayanan angkutan udara	Wanggudu – Kasiputa								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Konawe Utara / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Konawe Utara	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Konawe Utara

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Konawe Utara	Ditjen Bina Marga	
6.	Kabupaten Kolaka Utara **												
	• Pengembangan jaringan angkutan jalan	Tersedianya trayek perintis angkutan jalan	Meningkatnya pelayanan angkutan barang dan penumpang	Kolaka utara-Kendari							Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Kolaka Utara / KemenPDT	
	• Penyediaan Sarana Transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kolaka Utara	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kolaka Utara	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Kolaka Utara	Ditjen Bina Marga	
XXII	PROVINSI GORONTALO												
1.	Kabupaten Gorontalo Utara **												
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya rute laut perintis	Meningkatnya keterbukaan antar wilayah	Gorontalo - Kalimantan Timur							Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Kolaka Utara / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kolaka Utara	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kolaka Utara	
	• Peningkatan Jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Kolaka Utara	Ditjen Bina Marga	
2.	Kabupaten Boalemo **												
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya rute angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Gorontalo -Kep. Sula, Kp sangihe, Kp talaud							Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Boalemo KemenPDT	

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Boalemo	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Boalemo
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Boalemo	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Boalemo
	• Penyediaan sarana angkutan laut	Tersedianya kapal motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Boalemo	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Boalemo
3.	Kabupaten Pohuwato *												
	• Pembangunan jaringan transportasi udara	Tersedianya bandar udara untuk melayani angkutan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah ke daerah terpencil	Pahuwoto – Gorontalo								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Pohuwato / KemenPDT Pohuwato
	• Penyediaan moda transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Pohuwato	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Pohuwato
	• Peningkatan Jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Pohuwato	Ditjen Bina Marga
4.	Kabupaten Bone Bolango **												
	• Pengembangan transportasi jalan	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Kabupaten – Suwawa								Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Bone Bolango / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya moda transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Bone Bolango	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Bone Bolango

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan Jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Bone Bolango	Ditjen Bina Marga
XXIII	PROVINSI MALUKU												
1.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat **												
	• Pengembangan Bandar udara	Tersedianya bandar udara untuk melayani penerbangan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Lakor								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Maluku Tenggara Barat / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Maluku Tenggara Barat	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Maluku Tenggara Barat
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Maluku Tenggara Barat	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Maluku Tenggara Barat
	• Penyediaan sarana angkutan laut	Tersedianya kapal motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Maluku Tenggara Barat	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Maluku Tenggara Barat
2.	Kabupaten Maluku Barat Daya **												
	• Pengembangan jaringan angkutan laut perintis	Tersedianya jaringan angkutan laut perintis	Meningkatnya keterbukaan wilayah	P. Seram - P. Bangai- P. Buru								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Maluku Barat Daya / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Maluku Barat Daya	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Maluku Barat Daya

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Maluku Barat Daya	Ditjen Bina Marga
	• Penyediaan sarana angkutan laut	Tersedianya kapal motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Maluku Barat Daya	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Maluku Barat Daya
3.	Kabupaten Maluku Tenggara *												
	• Pengembangan jaringan pelayanan angkutan udara	Tersedianya kapasitas pelayanan angkutan udara	Meningkatnya pelayanan angkutan udara perintis	Tual - Ambon								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Maluku Tenggara / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Maluku Tenggara	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Maluku Tenggara
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Maluku Tenggara	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Maluku Tenggara
4.	Kabupaten Maluku Tengah **												
	• Pengembangan sarana angkutan laut perintis	Tersedianya kapal laut perintis	Meningkatnya kapasitas angkutan laut perintis	Masohi - Saumlaki								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Maluku Tengah / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Maluku Tengah	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Maluku Tengah
	• Penyediaan sarana angkutan laut	Tersedianya kapal motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Maluku Tengah	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Maluku Tengah

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
5.	Kabupaten Buru **												
	• Pembangunan bandar udara perintis	Tersedianya bandar udara untuk melayani penerbangan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah daerah	Namlea								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Buru / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Buru	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Buru
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Buru	Ditjen Bina Marga
6.	Kabupaten Kepulauan Aru ***												
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya rute baru angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	K. Aru - Saumlaki - Ambon - K. Banda								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Kepulauan Aru / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kepulauan Aru	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kepulauan Aru
	• Peningkatan angkutan pesisir	Tersedianya kapal motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kepulauan Aru	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kepulauan Aru
7.	Kabupaten Seram Bagian Barat **												
	• Pengembangan prasarana angkutan laut perintis	Tersedianya fasilitas dermaga angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Piru - Ambon								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Seram Bagian Barat / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Seram Bagian Barat	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Seram Bagian Barat

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan Jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Seram Bagian Barat	Ditjen Bina Marga
8.	Kabupaten Seram Bagian Timur ***												
	• Pembangunan jaringan transportasi udara	Tersedianya bandar udara untuk melayani angkutan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar wilayah	Seram								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Seram Bagian Timur / KemenPDT
	• Penyediaan moda transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Seram Bagian Timur	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Seram Bagian Timur
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Seram Bagian Timur	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Seram Bagian Timur
XXIV	PROVINSI MALUKU UTARA												
1.	Kabupaten Halmahera Barat **												
	• Pengembangan prasarana angkutan laut perintis	Tersedianya fasilitas dermaga pelabuhan angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Jailolo - Ternate								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Halmahera Barat / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Halmahera Barat	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Halmahera Barat
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Halmahera Barat	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Halmahera Barat

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
2.	Kabupaten Halmahera Tengah **												
	• Pengembangan jaringan angkutan udara	Tersedianya bandar udara untuk melayani angkutan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah	Patani Utara								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Halmahera Tengah / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Halmahera Tengah	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Halmahera Tengah
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Halmahera Tengah	Ditjen Bina Marga
3.	Kabupaten Kepulauan Sula ***												
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya rute angkutan laut perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar wilayah	Sanana - Ternate - P. Gebe								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Kepulauan Sula / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kepulauan Sula	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kepulauan Sula
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kepulauan Sula	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kepulauan Sula
	• Penyediaan sarana angkutan laut	Tersedianya kapal motor penumpang	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kepulauan Sula	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kepulauan Sula
4.	Kabupaten Halmahera Selatan **												
	• Pengembangan angkutan laut perintis	Tersedianya kapal untuk angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan, keselamatan dan keamanan angkutan laut perintis	Bacan - Sanana - Manado								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Halmahera Selatan / KemenPDT

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Halmahera Selatan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Halmahera Selatan
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Halmahera Selatan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Halmahera Selatan
5.	Kabupaten Buru Selatan **												
	• Pengembangan dermaga laut perintis	Tersedianya dermaga pelabuhan angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Buru selatan - Ambon								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Buru Selatan / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Buru Selatan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Buru Selatan
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Buru Selatan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Buru Selatan
6.	Kabupaten Halmahera Utara *												
	• Pengembangan rute angkutan laut perintis	Tersedianya rute angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Tobelo - Morotai - Mara								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Halmahera Utara / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Halmahera Utara	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Halmahera Utara
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yg mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Halmahera Utara	Ditjen Bina Marga

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
7.	Kabupaten Morotai **												
	• Pengembangan fasilitas angkutan Laut perintis	Tersedianya dermaga pelabuhan angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Morotai – Jailolo								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Morotai	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Morotai
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Morotai	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Morotai
8.	Kabupaten Halmahera Timur **												
	• Peningkatan kapasitas kapal laut perintis	Tersedianya kapal untuk angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan, angkutan laut perintis	Mara –P. Obi – K. Sula								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Morotai / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Morotai	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Morotai
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab	Ditjen Bina Marga
XXV	PROVINSI PAPUA BARAT												
1.	Kabupaten Fak-Fak *												
	• Pembangunan jaringan transportasi jalan	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Kabupaten Fak-Fak								Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Morotai / KemenPDT

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya moda transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Morotai	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Morotai
2.	Kabupaten Kaimana ***												
	• Pembangunan bandar udara perintis	Tersedianya bandar udara untuk melayani penerbangan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah daerah	Kaimana - Manokwari								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Kaimana / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Kaimana	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Kaimana
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab	Ditjen Bina Marga
3.	Kabupaten Teluk Wondama ***												
	• Pengembangan jaringan angkutan laut perintis	Tersedianya pelayaran angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Wondama - P. Biak - P. Yapen								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Teluk Wondama / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Teluk Wondama	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Teluk Wondama
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yg mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Teluk Wondama	Ditjen Bina Marga
4.	Kabupaten Teluk Bintuni **												
	• Pengembangan fasilitas pelabuhan	Tersedianya fasilitas pelabuhan laut	Meningkatnya pelayanan angkutan laut	Bintuni - Sorong, P. Seram								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Teluk Bintuni / KemenPDT

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Teluk Bintuni	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Teluk Bintuni
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Teluk Bintuni	Ditjen Bina Marga
5.	Kabupaten Puncak **												
	• Pengembangan jaringan angkutan udara	Tersedianya jaringan angkutan udara	Meningkatnya pelayanan angkutan udara	Puncak – Manokwari – Sorong								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Puncak / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Puncak	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Puncak
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Puncak	Ditjen Bina Marga
6.	Kabupaten Maybrat **												
	• Pengembangan jaringan jalan	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah ke daerah terisolir	Kab. Maybrat								Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Maybrat / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Maybrat	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Maybrat
7.	Kabupaten Tambrau **												
	• Pengembangan jaringan angkutan udara	Tersedianya kapasitas angkutan udara	Meningkatnya pelayanan angkutan udara	Tambarau – Manokwari								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Tambrau / KemenPDT

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Tambrau	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Tambrau
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Tambrau	Ditjen Bina Marga
8.	Kabupaten Sorong Selatan ***												
	• Peningkatan jaringan pelayanan angkutan laut perintis	Tersedianya rute angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis.	Sorong Selatan - P. Seram - Bintuni								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Sorong Selatan / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Sorong Selatan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Sorong Selatan
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Sorong Selatan	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Sorong Selatan
9.	Kabupaten Sorong ***												
	• Pembangunan fasilitas pelabuhan dan penambahan armada	Tersedianya fasilitas dermaga dan penambahan kapal	Meningkatnya pelayanan jasa transportasi laut	Sorong - Ambon								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Sorong / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana angkutan darat dan atau laut	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Sorong	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Sorong
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Sorong	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Sorong

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
10.	Kabupaten Raja Ampat ***												
	• Penambahan jaringan pelayanan angkutan laut perintis	Tersedianya rute pelayaran angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan laut perintis	Raja Ampat - P. Numfor-Waisie								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Raja Ampat / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Raja Ampat	Bappenas / Bappeda Kab. Raja Ampat
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Raja Ampat	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Raja Ampat
XXVI	PROVINSI PAPUA												
1.	Kabupaten Merauke **												
	• Pengembangan rute angkutan laut perintis dan penambahan trayek angkutan perintis	Tersedianya kapal dan penambahan rute angkutan laut perintis	Meningkatnya pelayanan jasa angkutan laut	Merauke - Agats-Timika								Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Merauke / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Merauke	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Merauke
2.	Kabupaten Jayawijaya **												
	• Pengembangan jaringan pelayanan angkutan udara perintis	Tersedianya kapasitas angkutan udara perintis	Meningkatnya pelayanan jasa angkutan udara	Jaya wijaya - Jayapura								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Jayawijaya / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Jayawijaya	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Jayawijaya
3.	Kabupaten Nabire **												
	• Pembangunan jaringan transportasi udara	Tersedianya bandar udara untuk melayani angkutan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Nabire, Nabire - jaya pura								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Nabire / KemenPDT

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Nabire	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Nabire
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Nabire	Ditjen Bina Marga
4.	Kabupaten Yapen Waropen **												
	• Peningkatan jaringan transportasi jalan	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah ke daerah terpencil	Kab. Yapen Waropen								Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Yapen Waropen / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Yapen Waropen	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Yapen Waropen
5.	Kabupaten Biak Numfor **												
	• Penambahan trayek angkutan jalan perintis	Tersedianya trayek angkutan jalan perintis	Meningkatnya pelayanan jasa transportasi darat	Kab. Biak Numfor								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Biak Numfor / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Biak Numfor	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Biak Numfor
6.	Kabupaten Paniai **												
	• Pembangunan bandar udara perintis	Tersedianya bandar udara untuk melayani penerbangan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah daerah	Paniai - Jayapura								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab/ KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Paniai	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Paniai

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Paniai	Ditjen Bina Marga	
7.	Kabupaten Puncak Jaya **												
	• Pembangunan Bandar udara perintis	Tersedianya bandar udara untuk melayani angkutan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar wilayah	Puncak Jaya - Jayapura							Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Puncak Jaya / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Puncak Jaya	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Puncak Jaya	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Puncak Jaya	Ditjen Bina Marga	
8.	Kabupaten Mimika **												
	• Pengembangan jaringan rute penerbangan perintis	Tersedianya rute penerbangan perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan udara	Mimika - Jaya Pura- Oksibili							Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Mimika / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Mimika	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Mimika	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Mimika	Ditjen Bina Marga	
9.	Kabupaten Boven Digoel **												
	• Pengembangan jaringan rute penerbangan perintis	Tersedianya rute penerbangan perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan udara	Boven Digoel - Botawa - Tana Merah							Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Boven Digoel / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya moda transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Boven Digoel	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Boven Digoel	

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
10.	Kabupaten Mappi **												
	• Peningkatan jaringan jalan dalam mengakses daerah terpencil	Tersedianya jaringan jalan kabupaten	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Kab. Mappi								Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab / KemenPDT
	• Penyediaan moda transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Mappi	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Mappi
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Mappi	Ditjen Bina Marga
11.	Kabupaten Asmat **												
	• Pengembangan jaringan angkutan jalan	Tersedianya trayek angkutan jalan	Meningkatnya pelayanan jasa transportasi darat	Kab. Asmat								Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Asmat / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Asmat	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Asmat
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Asmat	Ditjen Bina Marga
12.	Kabupaten Yahukimo ****												
	• Pengembangan jaringan pelayanan angkutan udara perintis	Tersedianya frekwensi penerbangan	Meningkatnya pelayanan jasa transportasi udara	Yahukimo - Jaya Pura								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Yahukimo / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Yahukimo

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
				dan akses jalan							Kab. Yahukimo		
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Yahukimo	Ditjen Bina Marga	
13.	Kabupaten Pegunungan Bintang ***												
	• Peningkatan Jaringan angkutan jalan	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah angkutan darat	Kab. Pegunungan Bintang							Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Pegunungan Bintang / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Pegunungan Bintang	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Pegunungan Bintang	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Pegunungan Bintang	Ditjen Bina Marga	
14.	Kabupaten Tolikara ****												
	• Pengembangan jaringan pelayanan angkutan jalan	Tersedianya trayek angkutan jalan	Meningkatnya pelayanan jasa transportasi darat	Toli Kara – Tiom – Kobakma							Ditjen Phb Darat	Bappenas / Pemkab Tolikara / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Tolikara	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Tolikara	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Tolikara	Ditjen Bina Marga	
15.	Kabupaten Sarmi ***												
	• Peningkatan aksesibilitas angkutan jalan	Tersedianya jalan baru	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Sarmi – Jayapura							Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Sarmi / KemenPDT	

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Sarmi	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Sarmi	
16.	Kabupaten Keerom **												
	• Pengembangan jaringan pelayanan angkutan jalan	Tersedianya jaringan pelayanan angkutan jalan	Meningkatnya kapasitas angkutan jalan	Kab. Keerom – Wamena, Ilaga							Ditjen Phb Laut	Bappenas / Pemkab Keerom / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Keerom	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Keerom	
17.	Kabupaten Deiyai **												
	• Pengembangan transportasi udara	Tersedianya bandar udara untuk melayani angkutan perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan udara	Deiyai – Jayapura							Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Deiyai / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Deiyai	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Deiyai	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Deiyai	Ditjen Bina Marga	
18.	Kabupaten Dogiyai **												
	• Pembangunan bandar udara perintis	Tersedianya bandar udara untuk melayani penerbangan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah daerah	Dogiyai – Jayapura							Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Dogiyai / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Dogiyai	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Dogiyai	

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Dogiyai	Ditjen Bina Marga	
19.	Kabupaten Intan Jaya **												
	• Pengembangan angkutan udara perintis	Tersedianya pelayanan angkutan udara perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan udara	Intan Jaya – Jaya Pura							Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Intan Jaya / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Intan Jaya	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Intan Jaya	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Intan Jaya	Ditjen Bina Marga	
20.	Kabupaten Lanny Jaya **												
	• Pengembangan jaringan pelayanan angkutan udara perintis	Tersedianya frekwensi penerbangan perintis	Meningkatnya pelayanan angkutan udara	Lanny Jaya - Jaya Pura							Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Lanny Jaya / KemenPDT	
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Lanny Jaya	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Lanny Jaya	
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan							Dinas PU Kab Lanny Jaya	Ditjen Bina Marga	
21.	Kabupaten Mamberamo Raya **												
	• Pembangunan bandar udara perintis	Tersedianya bandar udara untuk melayani penerbangan perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah daerah	Membramo Raya – Jaya Pura							Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Mamberamo Raya / KemenPDT	

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019			2020 s.d. 2030
					2010	2011	2012	2013	2014				
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Mamberamo Raya	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Mamberamo Raya
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Mamberamo Raya	Ditjen Bina Marga
22.	Kabupaten Mamberamo Tengah **												
	• Pengembangan jaringan angkutan jalan	Tersedianya jalan baru dan peningkatan jalan	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah antar daerah	Memberamo Tengah - Wamena								Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Mamberamo Tengah / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Mamberamo Tengah	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Mamberamo Tengah
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Mamberamo Tengah	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Mamberamo Tengah
23.	Kabupaten Nduga **												
	• Pengembangan jaringan angkutan udara perintis	Tersedianya rute penerbangan	Meningkatnya pelayanan angkutan udara	Nduga - Jayapura								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Nduga / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Nduga	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Nduga
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Nduga	Ditjen Bina Marga

NO.	Kabupaten
24.	Kabupaten
	• Pengembangan jaringan angkutan udara Perintis
	• Penyediaan sarana transportasi
25.	Kabupaten
	• Peningkatan jaringan angkutan jalan
	• Penyediaan sarana transportasi
26.	Kabupaten
	• Pengembangan jaringan angkutan laut perintis
	• Penyediaan sarana transportasi
	• Pembangunan dermaga

Keterangan:

1. Kabupaten Sangat Parah Tertinggal (****)
2. Kabupaten Sangat Tertinggal (***)
3. Kabupaten Tertinggal (**)
4. Kabupaten Agak Tertinggal (*)

SALINAN
Kepala

UMAR A

Pembina
1963022

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN						PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT			
					2010 s.d 2014					2015 s.d 2019			2020 s.d 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014						
24.	Kabupaten Yalimo **	• Pengembangan jaringan angkutan udara Perintis	Tersedianya frekwensi penerbangan	Meningkatnya pelayanan angkutan udara	Yalimo - Jayapura								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Nduga / KemenPDT	
		• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan									Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Yalimo	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Nduga
		• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan									Dinas PU Kab Yalimo	Ditjen Bina Marga
25.	Kabupaten Waropen ***	• Peningkatan jaringan pelayanan angkutan jalan	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya pelayanan angkutan darat	Waropen - Sarmi								Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Nduga / KemenPDT	
		• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan									Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Waropen	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Nduga
26.	Kabupaten Supiori ***	• Pengembangan jaringan angkutan laut perintis	Tersedianya rute laut perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah angkutan laut perintis	Suipiori - Sarmi - Nabire								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Supiori / KemenPDT	
		• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan									Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Supiori	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Supiori
		• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan									Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Supiori	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Supiori

Keterangan:

1. Kabupaten Sangat Parah Tertinggal (****)
2. Kabupaten Sangat Tertinggal (***)
3. Kabupaten Tertinggal (**)
4. Kabupaten Agak Tertinggal (*)

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

L5 - 60

FREDDY NUMBERI

NO.	PROVINSI/Kabupaten Program	OUTPUT	OUTCOME	KAWASAN YANG DILAYANI	PERIODE/TAHUN							PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
					2010 s.d. 2014					2015 s.d. 2019	2020 s.d. 2030		
					2010	2011	2012	2013	2014				
24.	Kabupaten Yalimo **												
	• Pengembangan jaringan angkutan udara Perintis	Tersedianya frekwensi penerbangan	Meningkatnya pelayanan angkutan udara	Yalimo - Jayapura								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Nduga / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Yalimo	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Nduga
	• Peningkatan jalan	Tersedianya jalan kabupaten dan jalan desa	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Dinas PU Kab Yalimo	Ditjen Bina Marga
25.	Kabupaten Waropen ***												
	• Peningkatan jaringan pelayanan angkutan jalan	Tersedianya jaringan jalan	Meningkatnya pelayanan angkutan darat	Waropen - Sarmi								Ditjen Bina Marga	Bappenas / Pemkab Nduga / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Waropen	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Nduga
26.	Kabupaten Supiori ***												
	• Pengembangan jaringan angkutan laut perintis	Tersedianya rute laut perintis	Meningkatnya aksesibilitas antar daerah angkutan laut perintis	Suupiori - Sarmi - Nabire								Ditjen Phb Udara	Bappenas / Pemkab Supiori / KemenPDT
	• Penyediaan sarana transportasi	Tersedianya sarana transportasi darat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Supiori	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Supiori
	• Pembangunan dermaga	Tersedianya dermaga khusus pelayaran rakyat	Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat	Kawasan perdesaan yang mempunyai pasar, dermaga dan akses jalan								Deputi II Bidang Peningkatan Infrastruktur KemenPDT / Dishub Kab. Supiori	Bappenas / Kemenhub/ Bappeda Kab. Supiori

Keterangan:

1. Kabupaten Sangat Parah Tertinggal (****)
2. Kabupaten Sangat Tertinggal (***)
3. Kabupaten Tertinggal (**)
4. Kabupaten Agak Tertinggal (*)

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

UMAR ARTIS, SH, MM, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
19630220 198903 1001

Di Tetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 17 Februari 2010

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI